



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025

panganbiru

08

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2025

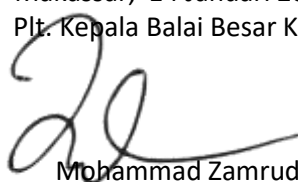
KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia dan Rahmat-Nya kegiatan Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahunan 2025 dapat terlaksana dan tersusun dengan baik. Laporan Kinerja ini sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan misi organisasi yang dituangkan dalam program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKj ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi tentang pencapaian kinerja operasional perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditetapkan untuk periode Tahunan 2025 yang disusun dengan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC). LKj menyajikan realisasi IKU yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan termasuk hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Kami menyadari bahwa LKj masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Makassar, 14 Januari 2026
Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar



Mohammad Zamrud



DAFTAR ISI

	i.	Kata Pengantar
	ii.	Daftar Isi
	iv.	Ringkasan Eksekutif
I. Pendahuluan	1.	Latar Belakang
	2.	Tugas Fungsi dan Strategis Organisasi
	3.	Arah Kebijakan dan Penyajian
	4.	Sistematika dan Penyajian
II. Perencanaan Kinerja	6.	Visi dan Misi
	7.	Tujuan Strategis
	7.	Sasaran, Indikator dan Kinerja
III. Akuntabilitas Kinerja	10.	Capaian Kinerja
	12.	Analisis dan Evaluasi
	13	IK.1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
	26.	IK.2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi PASCA Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
	39.	IK.3 Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
	47.	IK.4 Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
	55.	IK.5. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
	70.	IK.6 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
	77.	IK.7 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar



83.	IK.8 Indikator Kinerja Pelaksanaan ANggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
98.	IK.9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
104.	IK.10 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
109.	IK.11 Indeks Profesional ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
127.	IK.12 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
132.	IK.13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
139.	IK.14 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
144	IK.15 Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
156	IK.16 Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
168	Capaian Kinerja Lainnya
170	Kesimpulan
172	Rekomendasi
172	Tindaklanjut

IV. Penutup

Lampiran	1	Perjanjian Kinerja
	2	IK.1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
		IK.2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi PASca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
		IK.3 Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
		IK.4 Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
		IK.5. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
		IK.6 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
		IK.7 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
		IK.8 Indikator Kinerja Pelaksanaan ANggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
		IK.9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
		IK.10 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
		IK.11 Indeks Profesional ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
		IK.12 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
		IK.13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
		IK.14 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
		IK.15 Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
		IK.16 Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar



RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Besar KIPM Makassar pada Tahun 2025 adalah sebesar 112,73 (istimewa) Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

- A. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 telah ditetapkan 17 Indikator Kinerja Utama namun pada akhir tahun ada perubahan menjadi 16 Indikator Kinerja Utama adapun Indikator yang di TIADAKAN yaitu Inovasi pelayanan publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.
- B. Dari 16 (Enam belas) IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2025 dan memenuhi target yang telah ditetapkan selama tahun 2025.
- C. Pada Tahun 2025 Balai Besar KIPM Makassar telah berkomitmen dalam mendukung peningkatan ekspor produk perikanan di kabupaten/kota wilayah Sulawesi Selatan, Penghargaan ini merupakan penghargaan bnetuk apresiasi Pemkab Maros kepada Badan Mutu KKP Makassar atas dukungan dan peran aktif dalam peningkatan ekspor produk perikanan di Kabupaten Maros.



Kinerja Keuangan Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025 sebesar Rp 10.350.854.000 , adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sebesar Rp 189.258.000, anggaran setelah efisiensi sebesar Rp 10.161.596.000 dan terealisasi sebesar Rp 10.043.837.171 atau 98.84% dan ada efisiensi anggaran sebesar Rp 117.758.829.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instrument pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dalam peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) maupun tahunan (LKj Tahunan). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah mengukur kinerja evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Peraturan Presiden



Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), dalam melaksanakan tugas dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP.

1.2. Tugas dan Struktur Organisasi Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai Besar KIPM) Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Balai Besar KIPM Makassar terdiri dari (1). Sub bagian Umum, (2) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksanaan teknis pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Struktur organisasi Balai Besar KIPM Makassar dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah ini.



1.3. Arah Kebijakan dan Strategis

Arah kebijakan dan strategis pembangunan Balai Besar KIPM Makassar disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka sasaran strategis Balai Besar KIPM Makassar adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan Perikanan dengan didukung 1). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi Primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 2). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 3). Lokasi Pengawasan Mutu hasil eklautan dan perikanan sektor prosuksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 4). Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan sektor produksi pasca panen lingkup UPT



- Balai Besar KIPM Makassar, 5) Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Makassar
2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar yang didukung 1). Nilai kualitas penerapan sistem mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 2) . Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.
 3. Tata kelola pemerintahan yang efektif , lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang di dukung 1). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 2). Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 3). Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 4). Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 5). Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 6). Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 7). Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 8). Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 9). Survey Kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.

1.4. Sistimatis dan Penyajian

Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Bab I. Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi;



- b. Bab II. Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV. Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal-hal lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi Presiden 2025-2029 mengusung komitmen "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", yang melanjutkan fondasi yang telah dibangun dan mendorong Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Visi ini mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dan berkolaborasi demi meraih tujuan bersama, dan diwujudkan dalam 8 (delapan) Misi yang dikenal dengan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat keharmonisan kehidupan dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2.2. Tujuan Strategis

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025 – 2029 maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *output/impact* yang diinginkan dapat dicapai BPPMHKP dari program yang dilaksanakan , maka Balai Besar KIPM Makassar telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Sasaran Strategis | 1. Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan |
| 2. Sasaran Strategis | 2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar |
| 3. Sasaran Strategis | 3. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan |

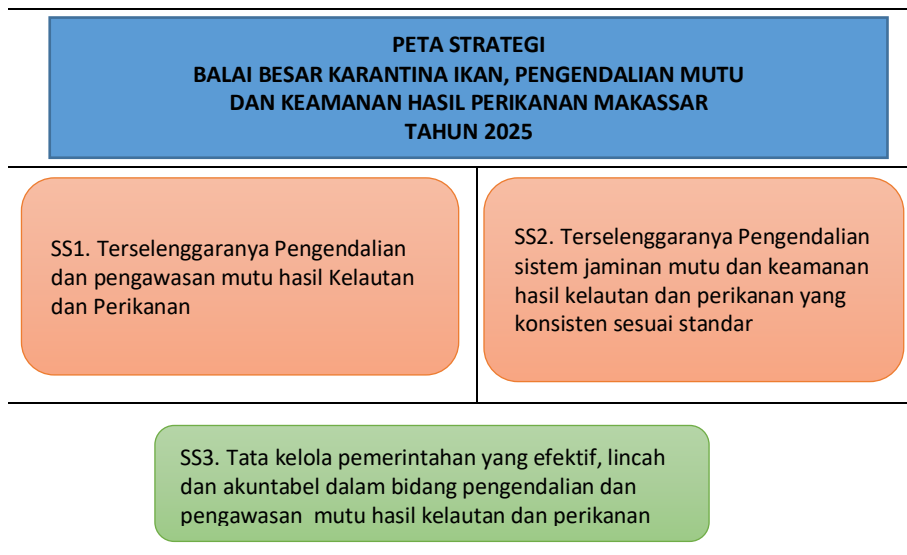
2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran strategis Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar merupakan penjabaran operasional dari visi,

misinya dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini menggambarkan hasil yang hendak dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi dan Penyusunan IKU pada KKP mampu membangun sistem mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.

Peta Strategis adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi nasional. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai Balai Besar KIPM Makassar pada tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPPMHKP.



Gambar 1. Peta Strategi Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja Balai Besar KIPM Makassar dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2025. Selanjutnya dilakukan pembahasan dan analisis lebih mendalam terutama terhadap indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target. Hal ini perlu dilakukan untuk mengenali faktor penyebabnya selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan strategi untuk peningkatan kinerja (*performance improvement*) di tahun-tahun selanjutnya.

Hasil capaian indikator kinerja Balai Besar KIPM Makassar untuk triwulan IV tahun 2025 yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel : 2.1

Capaian Kinerja Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025			
			2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi terhadap Target 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	125	70	100	142,86	142,86
	2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	98,1	70	94,6	135,14	135,14
	3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar						1	1	100,00	100,00
	4	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	5	4	4	100	1	1	100,00	100,00
	5	Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	-	99,99	99,99	101,99	100	99	100	101,01	101,01



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2025			
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target TW IV 2025	% Realisasi terhadap Target Tahun 2025
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	6	-	-	-	-	83,1	75	91,23	121,64	121,64
	7	-	-	-	-	-	75	90,96	121,28	121,28
Terselenggaranya Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	8	88	89	98,44	96,38	97,16	92	94,58	102,80	102,80
	9		86	87,87	86,2	98,37	71,5	100	139,86	139,86
	10	-	-	-	100	100	100	100	100,00	100,00
	11	68,01	81,44	82,23	90,27	90,78	82	87,97	107,28	107,28
	12	91,93	98	95,3	87,13	83,8	86	90	104,65	104,65
	13	82	65	100	100	100	85	100	117,65	117,65
	14			79,56	78,26	84,34	76	100	131,58	131,58
	15						75	75,51	100,68	100,68
	16	-	-	89,8	91,12	3,77	3,36	3,93	116,96	116,96

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategi secara lebih detail menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Kinerja 1

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan diperlukan dukungan 5 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan pencapaian 5 indikator kinerja tersebut disajikan pada table dibawah ini :

Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan : 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar 3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar 4. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar 5. Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	1. 70 % 2. 70 % 3. 1 Lokasi 4. 1 Lokasi 5. 99 %

IK. 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

SK.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
IKU-1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar									
Realisasi 2020 - 2025					2025			Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian terhadap target 2025
-	-	-	-	124%	70	100	142,86	70	142,86

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

BPPMHKP Makassar saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan

kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

1. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
2. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
3. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
4. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
5. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
6. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Pada Tahun 2025 BPPMHKP Makassar telah melakukan sertifikasi terhadap 3 jenis sertifikasi yaitu Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan, Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) dan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB) serta surveilan terhadap 3 jenis sertifikasi yaitu Surveilans Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) Surveilans Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Surveilans Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB).

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.

Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan.

Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan.

Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan pakan ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi pakan ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.

Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CDOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan.

Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk rumahan dan pengawasan mutu guna menghasilkan yang aman bermutu dan berkhasiat.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

Xn = Jumlah dari Unsur Pembentuk (6)*

$$\frac{A+B+F}{xn} \times 100\% = \frac{4+2+70}{76} \times 100\% = 100\%$$

Output dari kegiatan ini terdiri dari :

4 Sertifikat CBIB dengan masa berlaku 4 tahun pada tahun 2025

2 Sertifikat CPIB dengan masa berlaku 4 tahun pada tahun 2025

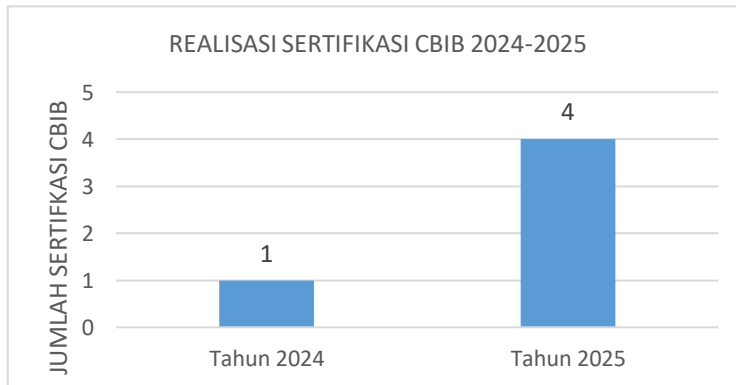
70 Sertifikat CPIB Kapal Perikanan dengan masa berlaku 2 tahun pada tahun 2025

Jika dibandingkan dengan realisasi capaian sertifikasi CBIB tahun 2024 dengan tahun 2025 terjadi peningkatan dari 1 menjadi 4 atau sebesar 75 %

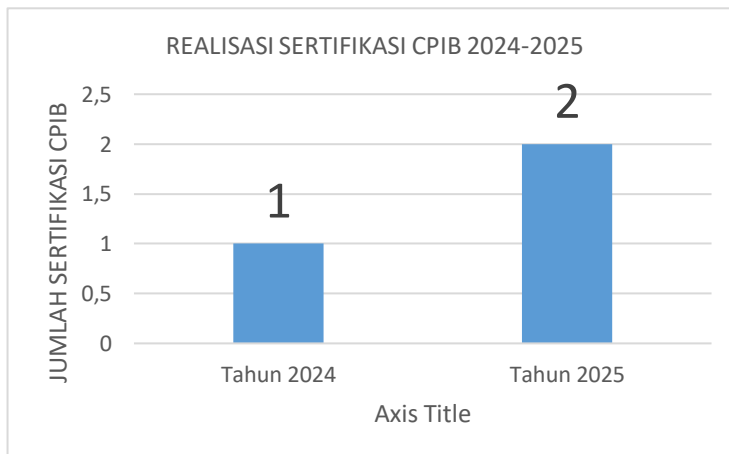
Untuk realisasi capaian sertifikasi CPIB tahun 2024 dengan tahun 2025 terjadi peningkatan 1 menjadi 2 atau sebesar 50 %

Untuk realisasi capaian sertifikasi CPIB Kapal tahun 2024 dengan tahun 2025 terjadi peningkatan 13 menjadi 70 atau sebesar 538,46 %

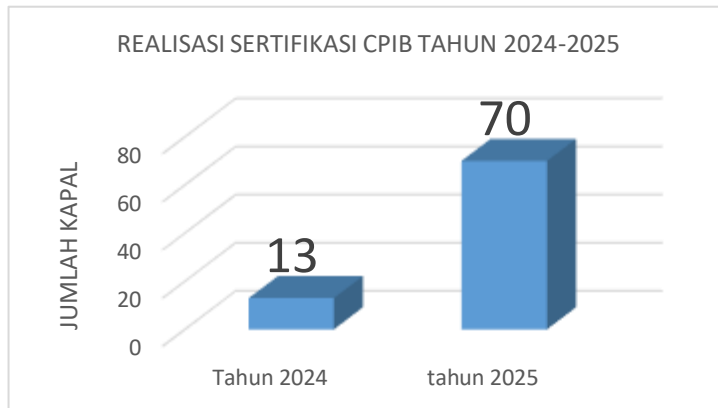
Capain sertifikasi CBIB dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Capain sertifikasi CPIB dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Capain sertifikasi CPIB Kapal dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar 29.140.000 atau 99.81% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase (%)
1	Sertifikasi sektor produksi primer	29.140.000	29.084.500	55.500	99.81 %
JUMLAH		29.140.000	29.084.500	55.500	99.81 %

Tahun 2025 masih ada anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 55.500.00. Jika dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp 132.135.925 atau 98.97 % .

Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi CPIB Kapal, CPIB dan CBIB pada tahun 2025 sebanyak 17 orang yang terdiri dari 10 Inspektur Mutu, 2 PJLP dari BPPMHKP Makassar. Sedangkan untuk kegiatan inspeksi CPIB dan CBIB telah dilaksanakan di

Kabupaten/kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Barru, Pinrang dan Maros dengan melibatkan 12 inspektur mutu dari BPPMHKP Makassar. Sedangkan pada kegiatan surveilan CPIB dan CBIB yang dilaksanakan di tahun 2025 terdiri dari 9 unit pembenihan dan 5 unit pembudidaya dengan melibatkan 12 inspektur mutu dari BPPMHKP Makassar.

Kegiatan sertifikasi CPIB Kapal yang ada dalam IKU ini merupakan kegiatan yang status risikonya termasuk dalam kategori tinggi. Risiko tinggi dalam konteks manajemen risiko merujuk pada kegiatan atau situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian signifikan, baik dari segi finansial, keamanan, reputasi maupun operasional. Adapun faktor risiko yang dimaksud berupa Permohonan sertifikasi CPIB tidak sesuai/tidak memenuhi persyaratan yang disebabkan karena Dokumen permohonan sertifikasi CPIB yang diajukan oleh pelaku usaha tidak lengkap. Upaya pengendalian yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan instansi pembina usaha perikanan tangkap dan melakukan sosialisasi sertifikasi CPIB Kapal kepada pelaku usaha.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP “ penangkapan ikan terukur berbasis kuota ” yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP “ pembangunan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan ” yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib

memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 :

- Pada tanggal 17 Januari 2025 telah dilakukan koordinasi dengan Direktur Pelabuhan dan Penanggung jawab PP Untia terkait dengan percepatan sertifikasi CPIB Kapal
- Pada Triwulan I tahun 2025 BPPMHKP Makassar telah melakukan sertifikasi terhadap 1 jenis sertifikasi yaitu : Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB). Kegiatan CBIB dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025 di CV. Senada Horta Jl. RAJAWALI NO. 37, Desa/Kelurahan Panambungan, Kec. Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Inspeksi CBIB ini dilaksanakan oleh inspektur Mutu BPPMHKP Makassar. Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah pembesaran Udang Vannamei (*Litopenaeus vannamei*) sesuai dengan kode KBLI 03254 yaitu komoditi Udang Vannamei (*Litopenaeus vannamei*).
- Pada tanggal 19 Februari 2025 telah dilakukan kegiatan Sosialisasi terhadap seluruh UPT BPPMHKP terkait SOP Pelaksanaan Sertifikasi pada Sektor Produksi Primer yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer secara daring.
- Pada tanggal 5 Maret 2025 telah dilaksanakan sharing session dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran B.233/BPPMHKP/OT.310/2025 tentang Pedoman Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk meningkatkan pemahaman dan optimalisasi pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di BPPMHKP Makassar, sharing session ini menjadi wadah bagi setiap penanggung jawab kegiatan teknis untuk memaparkan pedoman teknis yang relevan, sejalan dengan amanat peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8/PERMEN-KP/2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem

Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan serta peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/PERMEN-KP/2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian.

- Pada tanggal 17 – 18 Maret 2025 telah dilaksanakan monitoring pelaksanaan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal oleh Pusat Mutu Produksi Primer, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap UPT BPPMHKP Makassar diperoleh nilai total atas konsistensi pemenuhan Penerapan Persyaratan Teknis dengan jumlah 97,44 % dengan peringkat sangat baik, kegiatan dilanjutkan dengan bincang inspiratif tentang Strategi Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi CPIB Kapal diharapkan seluruh peserta dapat berbagai pengalaman, tantangan serta solusi yang implementasi kebijakan terkait sehingga tercipta harmonisasi dalam pengendalian dan pengawasan mutu perikanan yang lebih baik.
- Pada tanggal 18 Maret 2025 telah dilakukan kegiatan pemantapan persiapan pelaksanaan inspeksi dan surveilan tahun 2025 khususnya dalam rangka penerbitan sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB) dan sertifikat cara distribusi obat yang baik (CDOIB) terhadap seluruh UPT BPPMKHP yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer secara daring.
- Pada tanggal 5 Mei 2025 telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Plan Of Action (PoA) dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit DG Sante Uni Eropa secara hybrid di Aula Kantor Badan Mutu KKP Makassar yang diikuti oleh 88 orang peserta yang terdiri dari perwakilan BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Surabaya I, Pelabuhan Perikanan Untia, DPMPTSP, para kordinator penyuluh perikanan dari kabupaten/kota sentra perikanan, perusahaan eksportir dan pengolah hasil perikanan dari wilayah Sulawesi Selatan, Jakarta dan Surabaya yang memiliki pemasok bahan baku dari Sulawesi Selatan.
- Pada tanggal 19 Mei 2025 telah dilakukan Rapat Koordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Untia terkait percepatan sertifikasi CPIB Kapal Perikanan

- Pada tanggal 27 Mei 2025 mengikuti pertemuan reguler I Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) tuna provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MPDI).
- Mengikut help desk yang diselenggarakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer setiap hari Selasa pada bulan Juni 2025 yang membahas terkait progres percepatan sertifikasi primer dan kendala kendala yang dihadapi
- Pada tanggal 24 Juni 2025 telah dilaksanakan Sosialisasi Persamaan Persepsi pengisian checklist Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
- Pada tanggal 25 Juni 2025 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan PT. Ocean Champ Seafood terkait percepatan sertifikasi CPIB Kapal.
- Pada tanggal 1 Juli 2025 mengikuti kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil melalui Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal yang diikuti sebanyak 50 orang nelayan, dilanjutkan dengan koordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Untia dan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam rangka percepatan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal yang diselenggarakan di Kabupaten Sinjai.
- Mengikut help desk yang diselenggarakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer setiap hari Selasa pada bulan Juli 2025 yang membahas terkait progres percepatan sertifikasi primer dan kendala kendala yang dihadapi.
- Pada tanggal 23 Juli 2025 telah dilaksanakan Sosialisasi Juknis Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Kegiatan CPPIB dan diikuti oleh seluruh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar.
- Pada tanggal 1 Agustus 2025 telah dilakukan rapat penyesuaian sertifikasi primer pasca perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer BPPMHKP.

- Pada tanggal 18 September 2025 telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan BPSPL Makassar di Ruang Pertemuan BPSPL Makassar di Kab. Maros terkait dengan percepatan layanan surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)
- Pada tanggal 22 September 2025 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pengendalian dan pengawasabn mutu hasil kelautan dan perikanan di Sulawesi Selatan khususnya terkait dengan pengendalian di sektor produksi primer.
- Pada tanggal 1-2 Oktober 2025 mengikuti kegiatan Sosialisasi CBIB dan CPIB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
- Pada tanggal 8 Oktober 2025 mengikuti kegiatan Webinar Inovasi Teknologi dan Pengelolaan Perikanan Budidaya Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Profesi Akuakultur Indonesia (PROAKSI).
- Pada tanggal 22 -24 Oktober 2025, telah mengikuti pelatihan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) yang dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui metode Blended Learning.
- Pada tanggal 27 Oktober 2025 mengikuti FGD Inovasi Nutrisi dan Pakan Fungsional untuk meningkatkan kesehatan dan produktifitas dalam mendukung budidaya udang berkelanjutan di Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin.
- Pada tanggal 29–30 Oktober 2025, menjadi narasumber pada kegiatan Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas kapal dalam rangka pemberdayaan nelayan kecil di wilayah Kabupaten Bone, yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bone dan diikuti oleh 50 orang nelayan.
- Pada tanggal 24–25 November 2025, menjadi narasumber pada kegiatan Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas kapal dalam rangka pemberdayaan

nelayan kecil di wilayah Kabupaten Bone, yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bone dan diikuti oleh 50 orang nelayan.

- Pada tanggal 1 Desember 2025, telah dilaksanakan pemahaman produksi pakan serta pengelolaannya dalam mendukung pembudidayaan ikan yang dilaksanakan secara hybrid.
- Pada tanggal 8 Desember 2025, telah mengikuti kegiatan sosialisasi proses sertifikasi CPIB Kapal melalui aplikasi SIAPMUTU yang dilaksanakan secara virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Statistik, Data dan Informasi Sekretariat Jendral KKP.
- Pada tanggal 15 Desember 2025 telah terbit Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2076/XII/Tahun 2025 Tentang Satuan Gugus Tugas Pengendalian Penyakit Ikan Provinsi Sulawesi Selatan yang melibatkan BPPMHKP Makassar sebagai anggota Satgas.

Akar Masalah

Masih kurangnya literasi dan kesadaran teknis unit pembudidaya dan unit pembenihan akan pentingnya sertifikasi CPIB dan CBIB.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melaksanakan sosialisasi sertifikasi CPIB dan CBIB kepada penyuluh perikanan dan pelaku usaha.

Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi adalah telah memperbanyak pengumpulan data dukung inspeksi secara virtual berupa dokumentasi kondisi lokasi secara menyeluruh, baik melalui foto maupun video, sebelum pelaksanaan kegiatan inspeksi.



Keg. Inspeksi CPIB di PT.Sinar Sukses Persada di Kab. Jeneponto



Keg. Inspeksi CPIB diatas Kapal



Keg. Inspeksi CPIB di UPTD Balai Benih (BBI) Air Tawar
Tanralili Kab. Maros



Surveilen Cara Pembesaran Ikan yang Baik (CBIB)
Kab. Bulukumba



Rapat Koordinasi Plan Of Action (POA) dan Tidak Lanjut Rekomendasi Audit DG. Sante Uni Eropa



IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

SK.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
IKU-2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor produksi Pasca Panen yang menuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar									
Realisasi 2020 - 2025					2025			Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian terhadap target 2025
-	-	-	-	98,10%	70	100	142,86	70	142,86

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa mutu pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar mutu;

Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut serta adanya tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan konsep HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk akhir. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melalui Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen Pada triwulan IV 2025 melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)
2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)

Kegiatan Sertifikasi Pasca Panen merupakan salah IKU yang mendukung Asta Cita ke-2 Presiden RI yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua dan ke empat KKP yaitu

1. Prioritas kedua KKP yaitu Penerapan sistem kuota dalam penangkapan ikan untuk menjaga kelestarian sumber daya dimana, setiap hasil tangkapan harus dijamin mutu dan keamanannya melalui sertifikasi SKP dan HACCP sebelum dapat diekspor ke negara tujuan, sehingga keberterimaan produk perikanan Indonesia di pasar global dapat meningkat.
2. Prioritas keempat KKP yaitu Pengembangan budidaya perikanan di laut, pesisir, dan darat yang memperhatikan aspek keberlanjutan dimana, setiap hasil budidaya harus dijamin mutu dan keamanannya melalui sertifikasi SKP dan HACCP sebelum dapat diekspor ke negara tujuan, sehingga keberterimaan produk perikanan Indonesia di pasar global dapat meningkat.

Adapun kegiatan pendukung pada IKU pasca panen adalah kegiatan sertifikasi Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan, sertifikat SPDI (Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan) diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan

penyimpanan, pengadaan, sortasi dan grading serta yang melakukan kegiatan distribusi ikan dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai KBLI terkait, menerapkan cara distribusi ikan yang baik (CDIB) dan memenuhi persyaratan pembinaan dari Direktorat Teknis.

Sehubungan tindak lanjut dari Plan of Action (PoA) dan rekomendasi hasil audit DG SANTE – Uni Eropa (UE) pada Triwulan II, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) – KKP perlu segera melakukan sertifikasi terhadap pemasok yang mensuplai bahan baku ke UPI Approval Number UE. Sertifikasi tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia bahwa pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan di tahap hulu hingga hilir, sehingga permasalahan ekspor ke UE bisa terselesaikan. UPT Balai Mutu Makassar diberikan target sebanyak 18 (delapan belas) unit pemasok yang termasuk dalam pemasok ke UPI approval number Uni Eropa dan pada Triwulan III sudah direalisasikan unit pemasok ke Unit pengolahan Ikan dengan negara tujuan UE (Uni Eropa) telah dilakukan sertifikasi.

Proses pelaksanaan SPDI Tahun 2025 mengalami kendala dikarenakan dasar hukum yaitu PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berbasis Risiko belum memuat ketentuan terkait pelaksanaan SPDI. Atas dasar tersebut telah terbit Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan No 31 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Penerapan Hazard Analysis And Critical Control Point di Supplier, maka menjadi acuan dalam menerbitkan Surat Keterangan Penerapan Hazard Analysis And Critical Control Point di Supplier pada Tahun 2025.

Persyaratan dalam penerbitan SKP mengacu pada Permen KP No. 17 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan SKP, sedangkan persyaratan dalam penerbitan

sertifikasi HACCP mengacu pada Permen KP NO 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya kerja ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan melalui kegiatan inspeksi/sertifikasi SKP dan HACCP diperlukan sumberdaya manusia (Inspektur Mutu) yang berkompeten- ASN harus terus belajar dan mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah.

CARA PENGUKURAN

Perhitungan berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} X 100\%$$

Dimana

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
- B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
- xn = Total dari unsur pembentuk (2)

Pada rumus perhitungan di atas belum dijelaskan rumus perhitungan untuk memperoleh A dan B. Untuk memudahkan perhitungan maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$A = \frac{\text{Jumlah sertifikat HACCP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah sertifikat yang expired (target)}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sertifikat SKP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah rekomendasi yang masuk}} \times 100\%$$

Adapun persentase realisasi pada Tahun 2025 dapat dilihat pada matriks sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tahun 2025		
		Target/Rekomendasi	Realisasi	Persentase
1	Sertifikasi HACCP (A)	272	291	106,98%
2	Sertifikasi SKP (B)	416	321	77,16%

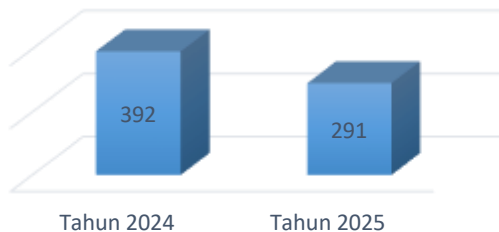
$$\begin{aligned} \%X &= \frac{106,98 + 77,16}{2} \\ &= 94,6\% \end{aligned}$$

Dengan demikian realisasi IKU sebesar 94,6% melebihi target realisasi yang ditetapkan yaitu sebesar 70% atau capaian IKU ini sebesar 135,14%.

Jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2024 sebesar 163,1%, maka di tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 135,14% atau 17,14%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 merupakan tahun perpanjangan untuk sertifikasi HACCP sehingga realisasi sertifikat HACCP tinggi.

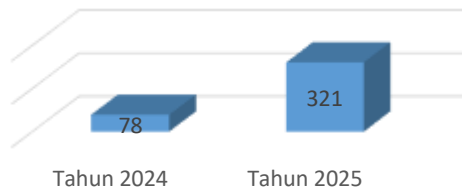
Capaian sertifikat HACCP dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

REALISASI SERTIFIKASI HACCP 2024-2025



Capaian sertifikat SKP dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

REALISASI SERTIFIKASI SKP 2024- 2025



Pada grafik realisasi sertifikat SKP terlihat peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2024 yaitu sebesar 311,53%. Hal ini disebabkan karena pada akhir tahun 2024, kewenangan sertifikasi SKP baru dilimpahkan ke BPPMKHP dari DJPDSPK, sehingga angka capaian masih sangat rendah.

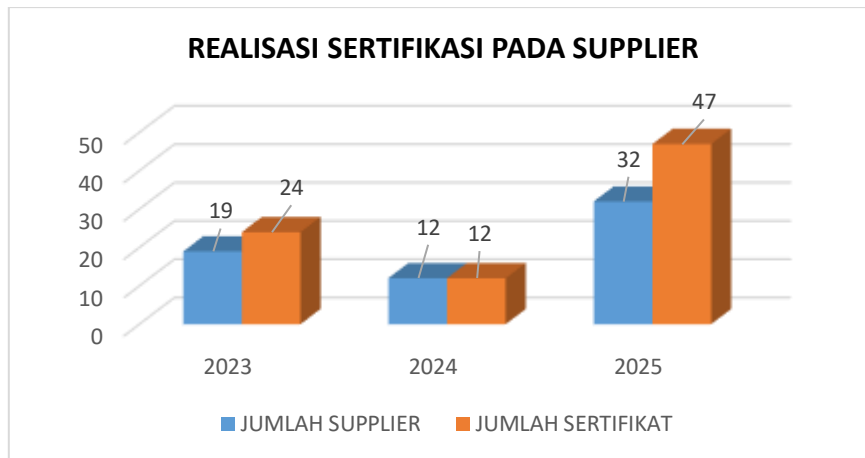
Adapun untuk kegiatan pendukung berupa Sertifikasi Penerapan HACCP Di Supplier, pada Tahun 2025 telah terealisasi sebagai berikut :



TW	JUMLAH SUPPLIER	JUMLAH SERTIFIKAT
I	0	0
II	8	14
III	16	22
IV	8	11
TOTAL	32	47



	2023	2024	2025
JUMLAH SUPPLIER	19	12	32
JUMLAH SERTIFIKAT	24	12	47



Seiring dilakukannya sosialisasi, pelatihan tentang arti pentingnya sertifikasi pada tingkat unit pemasok dan pemahaman penerapan HACCP di tingkat supplier, dapat dilihat pada Tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah sertifikasi pada supplier sebesar 291,67 %.

Output dari kegiatan ini berupa sertifikat SKP dan HACCP serta didukung oleh sertifikasi SPDI atau CPIB supplier. Dengan adanya sertifikasi SKP dan HACCP ini, Unit Pengolahan Ikan atau UMKM dapat melakukan kegiatan ekspor produk perikanannya dengan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terjamin serta memenuhi standar negara tujuan ekspor. Hal ini didukung dengan adanya sertifikasi SPDI atau CPIB supplier yang dapat menjamin mutu dan keamanan pasokan bahan baku yang masuk ke unit pengolahan dan UMKM.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 sebagai berikut:

1. Telah dilakukan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Mutu Domestik dan Sertifikasi SPDI Pasca Efisiensi anggaran 18 Februari 2025 secara daring oleh Pusat Mutu Pasca Panen;

2. Telah dilakukan Rapat Koordinasi Verifikasi Verifikator Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada tanggal 10 Maret 2025 secara daring oleh Pusat Mutu Pasca Panen;
3. Sosialisasi pembinaan CDIB dan Penerbitan SPDI yang dilaksanakan oleh Direktorat Logistic DITJEN PDSPKP secara daring pada tanggal 13 maret 2025.
4. Telah dilakukan koordinasi dengan PJ. Pembinaan CDIB dari Direktorat Teknis Penguatan Daya Saing Perikanan dan Kelautan melalui via Whatsap dan telepon (dokumentasi terlampir);
5. Telah dilakukan Koordinasi percepatan Kep. Ka. Badan No 31 Tahun 2025 pada tanggal 12 Juni 2025 (dokumentasi terlampir).
6. Telah dilakukan sharing session peningkatan kompetensi Inspektur Mutu tentang PP NO 28 Tahun 2025 nspektur Mutu pada tanggal 21 Agustus 2025
7. Pada tanggal 9 September 2025 Inspektur Mutu mengikuti kegiatan konsultasi public tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis resiko sector kelautan dan perikanan bidang pengendalian pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan diselenggarakan oleh sekretariat badan
8. Kegiatan rapat penyatuan inspeksi perpanjangan Inspeksi SKP dan HACCP telah dilakukan pada tanggal 16 September 2025, yang diselenggarakan oleh Pusat Mutu Pasca Panen
9. Pada tanggal 8 – 10 Oktober 2025 Telah dilakukan Goes To Supplier dalam rangka Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan di Kepulauan Selayar, kegiatan ini merupakan kolaborasi Balai Besar KIPM Makassar dengan Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI);
10. Pada tanggal 20 - 21 Oktober 2025 Balai Besar KIPM Makassar mengikuti kegiatan workshop pemindaian dan pengambilan sampel produk udang yang diekspor bebas dari radiasi radionuklida Sesium -137 yang dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP KKP;

11. Telah dilakukan Goes To Supplier dalam rangka Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan di Kepulauan Selayar pada tanggal 25 Oktober 2025
12. Pada tanggal 11 November 2025 Balai Besar KIPM Makassar mengikuti kegiatan Sosialisasi SHTI dan CoA Perikanan Tangkap yang diselenggarakan oleh PP Untia;
13. Pada tanggal 11 November 2025 Balai Besar KIPM Makassar mengikuti kegiatan Sosialisasi Penerbitan CoA Perikanan Budidaya yang diselenggarakan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP KKP;
14. Pada tanggal 21 November 2025 Balai Besar KIPM Makassar berkolaborasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Maros mengadakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM pada Level UMKM dan Supplier yang dilaksanakan di Kantor Bupati Maros;
15. Pada tanggal 24 November 2025, Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu telah mengikuti Sosialisasi Teknis Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) untuk Penerbitan sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana dan Sarana, DJPDSKP KKP;
16. Pada tanggal 17 Desember 2025 Balai Besar KIPM Makassar menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Hulu Hilir kepada Peserta Magang dan Penyuluh Perikanan BRPBAPPP Maros;

Kegiatan ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu dengan total sebanyak 16 orang dan didukung oleh tenaga PPNPM sebanyak 24 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengendalian dan pengawasan mutu serta pelayanan sertifikasi mutu hasil perikanan

Anggaran awal kegiatan pasca panen pada tahun 2025 sebesar Rp. 210.000.000.- di blokir sebesar Rp. 169.228.000,- dan pagu revisi sebesar Rp. 43.012.000,- realisasi tahun 2025

sebesar Rp.42.999.157,- atau sebesar (99,97%) dan anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp 12.843. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp. 376.370.000, realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 375.548.469 (99,55%) mengalami penurunan sebesar 42%.

Akar Masalah

Terdapat beberapa rekomendasi SKP dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang belum memenuhi persyaratan dan memerlukan revisi.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan koordinasi dengan Pembina mutu daerah dalam rangka pembinaan teknis di tingkat daerah sebelum pengajuan rekomendasi.

Tindaklanjut Rekomendasi sebelumnya

Pada Tahun 2025 telah dilakukan akselerasi pelaksanaan Sertifikasi SKP yang dibuktikan dengan peningkatan output sertifikat dari Tahun 2024 sebanyak 78 sertifikat meningkat menjadi 321 sertifikat pada Tahun 2025. Upaya akselerasi telah dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan selaku instansi yang merupakan perpanjangan kewenangan pembinaan mutu dari Direktorat Jenderal PDSKP KKP. Selain itu dilakukan sosialisasi SKP baik kepada penyuluh perikanan maupun kepada pelaku utama perikanan.



Kegiatan Inspeksi Konsistensi Penrapan HACCP



Kegiatan Sertifikasi Penerapan HACCP di Supplier

IK.3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

SK.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
IKU-3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasi Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar									
Realisasi 2020 - 2025					2025			Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian terhadap target 2025
-	-	2	-	-	1	1	100,00	1	100,00

Pada tahun 2025 terdapat penambahan IKU baru yaitu Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi), yang ditahun sebelum hanya berupa IKU pendukung.

Balai Besar KIPM Makassar adalah salah satu unit kerja yang mendapatkan target lokasi monitoring cemaran perairan dari Kepala Pusat Mutu Produksi Primer BPPMHKP pada, tahun 2025 lokasi monitoring 1 lokasi yaitu perairan wilayah Takalar yang terdiri dari 1 titik monitoring yaitu TPI Beba.

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui apakah komoditi perikanan yang diperoleh dari perairan terpapar racun hayati laut dan logam berat serta mendapatkan data dan informasi pengujian kandungan racun hayati laut dan logam berat pada ikan sebagai bahan rekomendasi kepada Otoritas Kompeten.

Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun yaitu pada setiap semester dengan sasaran titik pendaratan ikan yang ditangkap di perairan Takalar atau di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan adanya data

monitoring yang mutakhir sehingga menjadi bahan rekomendasi pengelolaan perikanan di perairan Makassar.

Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan monitoring cemaran perairan meliputi :

- Sarana dan Prasarana : Penerapan standar sanitasi dan higienis pada TPI/PPI merupakan indikator jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipasarkan sehat dan aman untuk konsumsi
- Pengambilan Contoh uji yang diambil kemudian dibawa ke Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar untuk pengujian parameter logam berat (*Pb, Cd, Hg*) dan pengujian mikrobiologi untuk parameter *E.Coli, Salmonella* dan dikirim ke Laboratorium BUSKIPM untuk pengujian racun hayati laut parameter *ciguatoksin* dikarenakan pengujian racun hayati belum masuk ruang lingkup di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar.

Kegiatan monitoring cemaran perairan merupakan salah IKU yang mendukung Asta Cita ke - 2 Presiden RI yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua KKP yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang diekspor ke negara tujuan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di laboratorium dan penyiapan sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir.

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya kerja ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu perikanan melalui kegiatan monitoring cemaran perairan di perlukan sumberdaya manusia (Inspektur mutu) yang berkompeten ASN harus terus belajar dan mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah.

Kegiatan monitoring cemaran perairan merupakan kegiatan yang statusnya termasuk dalam kategori tinggi. Risiko tinggi dalam konteks manajemen risiko merujuk pada kegiatan atau situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian signifikan, baik dari segi finansial, keamanan, reputasi maupun operasional. Adapun kegiatan monitoring cemaran ini memiliki risiko berupa data dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif yang disebabkan karena tim pelaksana tidak detail dalam menuangkan hasil monitoring ke dalam laporan. Risiko ini telah dimitigasi oleh penanggung jawab kegiatan berupa penyusunan laporan monitoring sesuai dengan juknis. Pengendalian risikonya telah dilaksanakan berupa verifikasi laporan monitoring sebelum disampaikan ke pusat.

Kegiatan monitoring cemaran perairan, berdasarkan program Tahunan yang telah disusun pada tahun 2025 memiliki 1 target lokasinya yaitu TPI Beba Kab. Takalar, dan dilaksanakan dalam 2 (dua) kali setahun.

Adapun hasil kegiatan monitoring cemaran perairan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Hasil pengujian monitoring cemaran perairan di PPI Beba tahun 2025

No	Lokasi	Jenis ikan	Parameter Uji			E coli	Hasil Uji	
			Logam berat (Hg, Cd, Pb)	Ciguatoxin	Salamonella		TW III	TW IV
1	PPI Beba	Ikan Barakuda	√	<i>Negativ</i>	√	√	Bawah ambang batas	
		Ikan kanekes	√	<i>Negativ</i>	√	√	Bawah ambang batas	
		Ikan Katamba	√	<i>Negativ</i>	√	√	Bawah ambang batas	

Dengan terlaksananya kegiatan tersebut di atas, maka realisasi kegiatan monitoring cemaran perairan tahun 2025 telah tercapai 100%. Hasil pengujian parameter logam berat dan mikrobiologi, seluruh sampel dinyatakan memenuhi standar atau berada di bawah ambang batas.

Capaian IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2024 karena pada tahun 2024 kegiatan ini hanya merupakan IKU pendukung dari IKU Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%). Namun jika kegiatan monitoring perairan tahun 2024 dan 2025 dibandingkan maka dapat diperoleh data sebagai berikut :

1. Jumlah lokasi monitoring cemaran perairan mengalami penurunan, dari 2 lokasi tahun 2024 menjadi 1 lokasi di tahun 2025
2. Jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan mengalami penurunan dari 4 kali di tahun 2024 menjadi 2 kali di tahun 2025
3. Jenis ikan yang diambil sebagai sampel mengalami penurunan dari 5 jenis ikan sampel di tahun 2024 menjadi 3 jenis ikan sampel di tahun 2025

Hal ini disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga UPT Balai Besar KIPM Makassar melakukan penyesuaian lokasi, frekuensi monitoring dan jenis ikan yang diambil sampel.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 meliputi :

1. Melakukan rapat koordinasi pengendalian pengawasan mutu produksi primer tanggal Februari 2025
2. Melakukan pengambilan sampel dengan jenis ikan demersal dengan lokasi TPI Beba tanggal 29 April 2025 dan 25 September 2025
3. Mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer pada tanggal 19 Februari 2025 yang dilaksanakan secara daring oleh Pusat Mutu Produksi Primer BPPMHKP. Pada kegiatan tersebut Pusat Mutu Produksi Primer menyampaikan target lokasi monitoring cemaran perairan untuk BPPMHKP Makassar.
4. Refresment/Sharing session peningkatan kompetensi inspektur mutu melalui bincang inspiratif pada tanggal 2 juni 2025
5. melakukan Refresment/Sharing session peningkatan kompetensi inspektur mutu melalui bincang inspiratif terkait Keputusan Kepala BKIPM No. 96 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis monitoring cemaran perairan pada tanggal 24 Juli 2025
6. Menyampaikan hasil pengujian monitoring cemaran perairan di TPI Beba Kab. Takalar pada tanggal 2 Desember 2025 pada Penanggungjawab TPI Beba
7. Mengikuti Rapat Evaluasi dan koordinasi dengan tim Pusat Mutu Produksi Primer pada tanggal 24 Desember 2025

SDM yang terlibat dalam kegiatan monitoring cemaran perairan tahun 2025 adalah 8 orang Inspektur Mutu. Sedangkan pada tahun 2024 SDM yang terlibat dalam kegiatan monitoring cemaran perairan sebanyak 16 Inspektur mutu lebih banyak dari tahun 2024 karena dipengaruhi oleh jumlah lokasi dan frekuensi kegiatan tahun 2024 yang lebih banyak.

Anggaran awal kegiatan monitoring cemaran perairan pada tahun 2025 sebesar Rp. 10.000.000,- setelah buka blokir anggaran bernilai Rp. 8.240.000,- dan realisasi tahun 2025 sebesar Rp. 8.232.000,- atau sebesar 99.90 %, anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp 8000,-

Pada tahun 2024 kegiatan monitoring cemaran perairan merupakan kegiatan pendukung dengan nilai Anggaran Rp. 80.000.000,- dengan realisasi sebesar 78.603.744 atau sebesar 98,25%

Akar Masalah

Pada Keputusan Kepala BKIPM No. 96 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis monitoring cemaran perairan dinyatakan frekuensi pengambilan contoh dilakukan minimal 1 (satu) kali per triwulan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Rekomendasi Rencana Aksi

Mengikuti kegiatan rapat persiapan monitoring cemaran perairan yang dilaksanakan oleh pusat mutu produksi primer untuk mendapatkan penjelasan detail terkait juknis tersebut

Tindaklanjut Rekomensi sebelumnya

Pada tanggal 1 desember 2025 telah menyampaikan hasil pengujian ke insatansi terkait yaitu Dinas Perikanan Kab. Takalar



Kegiatan Rapat Evaluasi dan kegiatan Monitoring Cemaran Perairan di PPI BEBA, KEc. Galesong Utara, Kab. Takalar



Kegiatan Rapat Evaluasi dan kegiatan Workshop

IK 4. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

SK.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
IKU-4. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar									
Realisasi 2020 - 2025					2025			Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian terhadap target 2025
-	-	-	4	100	1	1	100,00	1	100,00

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik merupakan salah satu IKU yang mendukung Asta Cita ke-2 Presiden RI yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas KKP yaitu:

- Program Prioritas Kedua KKP yaitu penerapan sistem kuota dalam penangkapan dan memastikan keberlanjutan sumber daya ikan, dimana pada kegiatan pengawasan

mutu BPPMHKP Makassar memastikan produk hasil perikanan tangkap yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

- Program Prioritas Ketiga KKP yaitu pengembangan budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, baik untuk komoditas ekspor maupun konsumsi lokal, dimana pada kegiatan pengawasan mutu BPPMHKP Makassar memastikan produk hasil perikanan hasil budidaya yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain dan instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir. Dalam hal ini BPPMHKP memiliki peran penting antara lain:

1. Pengawasan Mutu: BPPMHKP melakukan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.
2. Pengendalian Mutu: BPPMHKP melakukan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kualitas dan keamanan pangan.

Dengan demikian BPPMHKP juga dapat membantu meningkatkan kualitas dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar domestik dan internasional.

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan

mutu perikanan, diperlukan sumberdaya manusia (Inspektur Mutu) yang berkompeten: ASN harus terus belajar mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah.

Pada tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar menjadi salah satu unit kerja yang diberikan target sebanyak 1 lokasi yaitu kota Makassar, Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu setiap semester. Adapun lokasi pengawasan yaitu pasar tradisional daya kota Makassar.

Sebagai perbandingan pada tahun 2024 lokasi pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik lebih banyak yaitu berada pada 4 kabupaten/kota dengan 14 titik lokus yaitu :

1. Kota Makassar sebanyak 8 titik pengawasan yaitu pasar tradisional Daya, pasar tradisional Pa'baeng-baeng, pasar tradisional Terong, pasar Tradisional Sentral, pasar modern lotte mart Panakkukang, pasar modern Lotte Mart Alauddin, TPI Rajawali dan PPI Paotere.
2. Kabupaten Gowa sebanyak 2 titik pengawasan yaitu pasar tradisional Minasa Maupa dan pasar Balang-balang
3. Kabupaten Takalar sebanyak 2 titik yaitu PPI Beba dan pasar sentral Takalar
4. Kabupaten Pinrang sebanyak 2 titik pengawasan yaitu pasar Sentral Pinrang dan pasar Kampung Jaya.

Pada tahun 2023 lokasi pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yaitu berada 4 kabupaten/kota dengan 14 titik lokus yang sama.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi) di tahun 2025 yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan ke kepala UPTD Pasar Tradisional/Modern,TPI/PPI
2. Melakukan kunjungan ke lokasi pasar tradisional serta mengisi check list Pengamatan Kondisi sarana Prasarana dan Sanitasi Higiene.
3. Pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian di laboratorium.

Rangkaian kegiatan terdapat pengambilan sampel dengan jenis ikan demersal, pelagic, cephalopod, crustacea dan ikan hasil budidaya, dengan target pengujian yaitu organoleptik, Angka Lempeng Total (ALT), *Escherichia coli*, *Coliform*, *Salmonella spp*, formalin dan histamin. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium pada sampel uji di semester I dan II tahun 2025 dengan titik pengawasan pasar taradisional daya kota Makassar, menunjukkan hasil pengujian memenuhi standar sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sebagai perbandingan hasil pengujian sampel pengawasan mutu tahun 2024 menunjukkan hasil yang sama yaitu seluruh parameter pengujian memenuhi standar sesuai dengan yang dipersyaratkan. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat hasil pengujian yang menyimpang yaitu triwulan II dengan hasil pengujian sampel Kab. Takalar titik pengawasan PPI Beba sampel cumi-cumi segar (*cephalopods*) ditemukan hasil pengujian *coliform* dan *Escherichia coli* diatas ambang batas yang dipersyaratkan (persyaratan <3,0 MPN/g) hasil uji coliform 7,4 MPN/g dan *E. coli* 3,6 MPN/g dan titik pengawasan Pasar Sentral Takalar dengan sampel bandeng segar ditemukan hasil pengujian *coliform* dan *Escherichia coli* diatas ambang batas yang dipersyaratkan (persyaratan <3,0 MPN/g) hasil uji coliform 3,6 MPN/g dan *E. coli* 3,6 MPN/g.

Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik tahun 2025 merupakan salah satu indikator kinerja yang tidak mendapatkan alokasi anggaran karena adanya kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran. Namun kebijakan pemerintah

tersebut tidak menjadi penghalang pada kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik.

Tindakan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 adalah :

- Telah dilakukan koordinasi dengan TIM pengelola anggaran sehingga pelaksanaan pengawasan mutu domestik masih bisa dilakukan pada triwulan I tahun 2025.
- Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Mutu Domestik dan Sertifikasi SPDI Pasca Efisiensi Anggaran tanggal 18 Februari 2025
- Telah dilakukan sosialisasi ke pelaku usaha pada saat kunjungan lapangan di sentra penyedia pangan sehat untuk selalu menjaga mutu ikan agar tetap aman dan laik untuk konsumsi
- Pada triwulan II tahun 2025 belum dilakukan koordinasi dengan pihak pengelola pasar, koordinasi dan sosialisasi akan dilakukan pada triwulan III bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan.
- Telah dilakukan koordinasi dengan pihak pengelola pasar untuk dilakukan sosialisasi cara penanganan ikan yang baik serta sanitasi dan hygiene pada saat melakukan kunjungan lapangan kesentra penyedia pangan sehat
- Telah dilaporkan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik Triwulan III kepada Dinas Perikanan dan pertanian Kota Makassar pada bulan November 2025
- Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam negeri sehubungan ketersediaan stok ikan pada Pelaksanaan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Berbagai upaya dilaksanakan antara lain turun langsung ke lapangan memantau stok ikan di sentra penyedia pangan sehat (TPI Labuang Kab. Maros), melakukan diskusi dengan pelaku utama yang melakukan aktivitas jual beli ikan serta

melakukan pengawasan mutu produk perikanan untuk memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan bermutu.

Pagu anggaran tahun 2025 untuk indikator ini sebesar Rp 25.000.000, namun sampai triwulan IV anggaran masih terblokir sehingga tidak ada realisasi.

Sebagai perbandingan pagu anggaran untuk kegiatan pengawasan mutu domestik pada tahun 2024 sebesar Rp. 60.000.000 dengan persentase capaian sebesar 95,39%. (Rp. 57.235.865)

Pada tahun 2023 sebesar Rp. 78,342,000, dengan persentase capaian sebesar 99.53% (Rp. 77.977.352).

Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik pada tahun 2025 yaitu inspektur mutu dan staf sebanyak 11 orang sedangkan pendamping kegiatan sebanyak 4 orang dari Dinas Perikanan kota, BPPSDMKP Maros sebanyak 2 orang, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin sebanyak 1 orang, serta dari Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI) sebanyak 3 orang.

Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik pada tahun 2024 yaitu inspektur mutu dan staf sebanyak 22 orang sedangkan pendamping kegiatan sebanyak 12 orang dari Dinas Perikanan kabupaten/kota, Balai Besar POM Makassar sebanyak 2 orang, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin sebanyak 2 orang, serta dari Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI) sebanyak 3 orang.

Sebagai Perbandingan Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik pada tahun 2023 yaitu inspektur mutu sebanyak 22 orang sedangkan pendamping kegiatan sebanyak 15 orang dari DKP Provinsi dan kabupaten/kota, Balai Besar POM Makassar sebanyak 2 orang, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin sebanyak 3 orang, serta dari Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI) sebanyak 3 orang.

Akar Masalah

1. Balai Besar KIPM Makassar belum menyampaikan hasil pengujian sampel pada kegiatan pengawasan mutu domestik dan pemantauan ketersediaan pasokan ikan menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada instansi terkait.
2. Keterlibatan Balai Besar KIPM Makassar pada kegiatan operasi pasar tradisional yang dilaksanakan secara berkala oleh Pemerintah Kota Makassar belum optimal.

Rekomendasi rencana aksi

Rekomendasi rencana aksi di triwulan I tahun 2026 yaitu:

1. Menyampaikan hasil pengujian sampel pada kegiatan pengawasan mutu domestik dan pemantauan ketersediaan pasokan ikan menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada instansi terkait.
2. BPPMHKP Makassar akan berkoordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan kegiatan pengawasan mutu domestik di tahun 2026.

Tindak Lanjut Rekomendasi sebelumnya

Telah dilaporkan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik Triwulan III kepada Dinas Perikanan dan pertanian Kota Makassar pada bulan November 2025



Keg. Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Tahun 2025 di Pasar Daya



Keg. Pendataan Ketersediaan Stok Ikan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Tahun 2025



Keg. Rangkaian Kegiatan pengujian dilaboratorium Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Tahun 2025

IK 5. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan Eksport lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

SK.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
IKU-5. Rasio ekspor ikan dan hasil peikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)									
Realisasi 2020 - 2025					2025			Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian terhadap target 2025
-	99,99	99,99	101,99	100	99	100	101,01	99	101,01

Sistem Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tumbuh seiring dengan perkembangan tuntutan akan jaminan mutu dan keamanan pangan di tataran internasional yang semakin ketat, dan tidak hanya fokus pada mutu dan keamanan dari produk akhir. Sistem jaminan mutu dan keamanan terhadap proses merupakan tuntutan

dan penerimaan masyarakat dunia (internasional) akan keberterimaan pangan, termasuk hasil perikanan. Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh internasional, harus dipenuhi oleh seluruh negara pengekspor, yang dinyatakan pada sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang menyertai setiap produk yang dipasarkan, baik untuk pasar dalam negeri maupun tujuan ekspor.

Meningkatnya daya saing produk perikanan harus diiringi dengan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan berbasis kualitas sesuai dengan Rencana Strategis Balai Besar KIPM Makassar tahun 2025 -2029. Salah satu isu strategisnya adalah peningkatan gizi anak melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan, yang kaya akan nutrisi seperti ikan dan rumput laut

Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) merupakan bukti bahwa hasil perikanan yang dipasarkan telah diproses berdasarkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu, maka penerbitan SMKHP didasarkan pada hasil pengawasan mutu terhadap efektifitas penerapan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit Usaha Pembenihan, Pembesaran dan Unit Pengolahan Ikan serta hasil pengujian contoh.

Peningkatan ekspor perikanan ke negara tujuan merupakan salah satu program prioritas nasional yang tergambar dalam misi Asta Cita ke 5 yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pada Asta Cita ke 5 terdapat tiga kegiatan utama yaitu peningkatan ekspor produk perikanan tangkap, pembangunan industri hilir dan industri penangkapan ikan serta penjaminan mutu dan keamanan pangan akuatik komoditas perikanan budi daya.

Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua KKP yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang diekspor ke negara tujuan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di laboratorium dan penyiapan sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir.

Balai Besar KIPM Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Atas dasar hasil pengendalian tersebut, Balai Besar KIPM Makassar memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ikan dan produk perikanan yang akan di lalulintaskan ke negara tujuan.

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan rasio kegiatan pengiriman ikan dan hasil perikanan ke luar wilayah Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak ada penolakan oleh negara tujuan ekspor. Hal ini dibuktikan diterimanya SMKHP di negara tujuan ekspor dan tidak ada notifikasi penolakan dari negara tujuan.

Perhitungan IKU ini berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$X = \frac{A - B}{A}$$

A

X : Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A : SMKHP yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B : Jumlah SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan

Indikator Kinerja Utama ini menggunakan formulasi diatas sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$X : \frac{\text{Jumlah SMKHP ekspor yang memenuhi syarat mutu} - \text{penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah SMKHP mutu ekspor yang diterbitkan}} \times 100\%$$

$$\frac{(13.076 - 0)}{12.630} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian realisasi IKU ini di tahun 2025 adalah 100% karena tidak ada penolakan dari negara tujuan. Sehingga jika dilihat dari aspek keberterimaan di negara tujuan didapatkan nilai yang sama antara tahun 2025 dan tahun 2024 yaitu 100 %.

Pada tahun 2025 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 202.697 ton senilai Rp. 9,2 T dengan jumlah sertifikat ekspor (SMKHP) yang diterbitkan sebanyak 13.076 sertifikat. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 201.002 ton senilai Rp. 9,01 T dengan jumlah SMKHP yang diterbitkan sebanyak 9.992 sertifikat. Berdasarkan data tersebut pada tahun 2025 terjadi peningkatan frekwensi penerbitan SMKHP sebesar 30,86 %, dan volume ekspor sebesar 0.84 %, serta nilai sebesar 2,11 % jika dibandingkan tahun 2024. Peningkatan volume ekspor ini sejalan dengan peningkatan jumlah Unit Pengolahan Ikan (eksportir) yang ada di Sulawesi Selatan yaitu dari 134 pada tahun 2024 menjadi 151 unit pada tahun 2025. Hal ini dipengaruhi adanya kemudahan perizinan berusaha serta iklim investasi yang kondusif.

Data tahun 2025 menunjukkan tidak terdapat kasus penolakan produk perikanan yang dikirim ke negara tujuan. Pada tahun 2025 memiliki kondisi yang sama dengan tahun 2024 yaitu tidak adanya kasus penolakan produk perikanan.

Kegiatan sertifikasi ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu sebanyak 20 orang serta didukung oleh tenaga PPPK sebanyak 13 orang dan PJLP sebanyak 2 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu, serta pelayanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pada tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar menerima penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Maros sebagai Instansi yang Berperan Aktif Dalam Peningkatan Ekspor Produk Perikanan Di Kabupaten Maros pada tanggal 17 Desember 2025. Penghargaan ini diserahkan oleh Bupati Maros Dr. H.A.S Chaidir Syam pada kegiatan Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Bela Negara. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemkab Maros kepada Balai Besar KIPM Makassar atas dukungan dan peran aktif dalam peningkatan ekspor produk perikanan di Kabupaten Maros. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Bupati Maros melepas ekspor produk perikanan sebanyak 2.319,7 ton ke 8 negara tujuan dengan nilai ekonomi Rp. 51,4 milyar.

Sejalan dengan peningkatan pelayanan sertifikasi ekspor produk perikanan, terdapat beberapa kegiatan peningkatan kompetensi, pemberian penghargaan, undangan mengikuti kegiatan eksternal maupun kunjungan dari pihak eksternal untuk mendukung IKU ini. Kegiatan tersebut diikuti oleh petugas pelayanan maupun inspektur mutu antara lain sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Waktu Kegiatan
1.	Briefing Pagi Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	5 Januari 2025
2.	Sosialisasi Penerbitan SMKHP Melalui Aplikasi SIAP MUTU	Sekretariat BPPMHKP	22 Januari 2025
3.	Launching dan Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU	Sekretariat BPPMHKP	27 Februari 2025
4.	Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU dan PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif	BPPMHKP Makassar	28 Februari 2025



	Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan		
5.	Briefing Siang Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	10 April 2025
6.	Bincang Inspiratif Penguatan Program Kerja Badan Mutu KKP Dalam Menunjang Program Prioritas KKP	BPPMHKP Makassar	9 Mei 2025
7.	Evaluasi Kegiatan Sertifikasi Mutu Lingkup Badan Mutu KKP	Sekretariat BPPMHKP	14 – 16 Mei 2025
8.	Briefing Pagi Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	15 Mei 2025
9.	Briefing Pagi Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	24 Juni 2025
10.	Bincang Inspiratif Pelayanan Publik Dengan Tema “Menuju Pelayanan Publik Yang professional & Unggul (Profesional & Excellent Service)” bersinergi dengan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Makassar	BPPMHKP Makassar	14 Juli 2025
11.	Briefing Siang Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	16 Juli 2025
12.	Sharing session Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 44 tahun 2024 dan Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 35 tahun 2025	BPPMHKP Makassar	24 Juli 2025
13.	Kunjungan Kerja Tim Komisi IV DPR RI Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Pengendalian Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	BPPMHKP Makassar	11 Agustus 2025
14.	Webinar Budaya Kerja Work Life Balance Untuk ASN Menjaga Kesehatan Mental Di Tempat Kerja	Biro SDMA Organisasi Sekretariat Jenderal KKP	9 September 2025
15.	Bincang Inspiratif Pelayanan Pelayanan Publik Dengan Tema “Menuju Pelayanan Publik Yang professional & Unggul (Profesional & Excellent Service)” bersinergi dengan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Makassar	BPPMHKP Makassar	11 September 2025
16.	Bimbingan Teknis Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan Tahun 2025	Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal KKP	17 September 2025
17.	Sharing Session Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan	BPPMHKP Makassar	25 September 2025
	Sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan	BPPMHKP Makassar	30 September 2025
18.	Peningkatan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan	BPPMHKP Makassar	08 Oktober 2025



19.	Briefing Siang Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	14 Oktober 2025
20.	Pelepasan ekspor komoditi perikanan dari kab. Maros yang dirangkaikan dengan peringatan hari ikan nasional	BPPMHKP Makassar	21 November 2025
21.	BPPMHKP Makassar menghadiri ekspor perdana frozen cephalopod	PT. Nirvana Niaga Sejahtra	15 Desember 2025
22.	BPPMHKP Makassar menerima penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Maros sebagai Instansi yang Berperan Aktif Dalam Peningkatan Ekspor Produk Perikanan	Pemerintah Kabupaten Maros	17 Desember 2025
23.	BPPMHKP Makassar menghadiri pelepasan ekspor serentak sinergi Nusantara dari delapan penjuru wilayah Indonesia	Kementerian Perdagangan RI	17 Desember 2025
24.	Rapat koordinasi penguatan SMKHP dan pengembangan laboratorium rujukan wilayah Indonesia Timur	BPPMHKP Makassar	29 Desember 2025

Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu :

1. Monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra.
2. Monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP
3. Investigasi kasus penolakan ekspor di negara tujuan.

I. Monitoring dan Evaluasi Nomor Registrasi Negara Mitra

Pada tahun 2025 telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra sebanyak 5 (lima) UPI. Adapun UPI yang telah di monitoring adalah :

No	Nama UPI	Waktu Kegiatan	Inspektur Mutu
1.	CV. Gimae Seaweed & Spice	02 Juli 2025	Mohammad Zamrud Suprianto
2.	PT. Aiki Mega Jaya Utama	05 November 2025	Waode Suharni Arfiandi
3.	PT. Biru Laut Nusantara	05 November 2025	Fatima Tayang Wara Zakaria
4.	PT. Jireh Komoditi	05 November 2025	Kamaruddin Patmawati
5.	PT. Buana Laut Nusantara	05 November 2025	Anugrah Ekayani Taufiq



Monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra (Noreg) dilakukan untuk mengetahui efektifitas penggunaan nomor registrasi oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI). Sasaran kegiatan ini adalah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memiliki nomor registrasi di beberapa negara mitra seperti China, Republik Korea, Arab Saudi, Kanada dan Vietnam. Berdasarkan hasil monev noreg yang paling aktif digunakan oleh UPI tersebut adalah ekspor dengan tujuan negara China. Pada akhir tahun 2025 terjadi buka blokir anggaran tetapi belum mengakomodir kegiatan perjalanan dinas sehingga kegiatan ini dilakukan secara daring.

II. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Penerbitan SMKHP

Pada tahun 2025 BPPMHKP Makassar telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada 20 (dua puluh) UPI yang melaksanakan ekspor ke negara tujuan. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut ini.

No	Nama UPI	Waktu Kegiatan	Inspektur Mutu
1.	PT. Multi Monodon Indonesia	25 April 2025	Mohammad Zamrud Suprianto
2.	PT. Mitra Kartika Sejati	28 April 2025	Waode Suharni Wara Zakaria Sapan
3.	CV. Bintang Megah Jaya Perkasa	2 Mei 2025	Kamaruddin Taufiq
4.	PT. Rika Rayhan Mandiri	6 Mei 2025	Andi Rahmaniar Muzakkir
5.	PT. Biru Laut Nusantara	8 Mei 2025	Patmawati Arfiandi
6.	PT. Dunia Marine Products	2 Juni 2025	Waode Suharni Fatima Tayang
7.	PT. Keumkang Industri Indonesia	3 Juni 2025	Anugrah Ekayani Taufiq
8.	PT. Bumi Laut Pertiwi	5 Juni 2025	Kamaruddin Arfiandi
9.	PT. Mega Citra Karya	02 Juli 2025	Habrin Yake Ardiana
10.	CV. Lontara Jaya Sakti	02 Juli 2025	Andi Rahmaniar Idawati Barung

11.	PT. Celebes Berkah Niaga	04 Juli 2025	Muzakir Suprianto
12.	CV. Adi Tirta	5 Agustus 2025	Muhammad Irfan Rais Idawati Barung
13.	PT. Simpul Agro Globalindo	6 Agustus 2025	Habrin Yake Ardiana
14.	PT. Mina Timur Indonesia	26 Agustus 2025	Sri Rahayu Setyaningsi Wara Zakaria Sapan
15.	PT. Asnur Anton Jaya	29 Agustus 2025	Mohammad Zamrud Moh. Fahrii
16.	PT. Sutracco Nusantara Megah	4 September 2025	Muhammad Irfan Rais Anugrah Ekayani ALP
17.	PT. Parlevliet Paraba Seafood	4 September 2025	Patmawati Moh. Fahri
18.	CV. Anugrah Bintang Cemerlang	02 Oktober 2025	Suprianto Andi Muhammad Haedar
19.	PT. Giwang Citra Laut	02 Oktober 2025	Mohammad Zamrud Taufiq Erwin Wijaya
20.	PT. Lintas Antar Nusa	08 Oktober 2025	Waode Suharni Fatima Tayang Erwin Wijaya

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada UPI dilakukan berdasarkan profiling Unit Pengolahan Ikan dalam kegiatan pelayanan sertifikasi ekspor ke negara tujuan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan monev adalah memastikan bahwa kegiatan penilaian kesesuaian penerbitan SMKHP pada pelaku usaha berjalan sesuai ketentuan regulasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai serta memudahkan BPPMHKP Makassar dalam melakukan penilaian ke pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya pelaku usaha ekspor. Hasil dari kegiatan monev ini menjadi dasar dalam pemberian skoring tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam penerbitan SMKHP. Kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP dilaksanakan secara tatap muka dengan memanfaatkan kendaraan dinas. Pada tahun 2025 telah dilakukan buka blokir anggaran tetapi belum mengakomodir kegiatan perjalanan dinas.

III. Investigasi Kasus Penolakan Ekspor Di Negara Tujuan

Pada tahun 2025 terdapat notifikasi penolakan ekspor dari negara tujuan di UPT BPPMHKP Makassar, sebanyak 1 (satu kali) dari negara tujuan Rusia. BPPMHKP Makassar menerima surat dari Kepala Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP sebagai berikut ;

- Nomor R.468/BPPMHKP.2/KI.530/V/2025 tanggal 1 Mei 2025 tentang Pemberlakuan Internal Suspend CV. Prima Indo Tuna (RR.B-049-27).
- Nomor T.379/BPPMHKP.2/KI.530/IV/2025 tanggal 14 April 2025 tentang Penyampaian Informasi DWPE 16 – 81 PT. Phillips Seafoods Indonesia
- Nomor T.380/BPPMHKP.2/KI.530/IV/2025 tanggal 14 April 2025 tentang Penyampaian Informasi DWPE 16 – 81 PT. Wahyu Pradana Binamulia.

Sebagai catatan, untuk PT. Wahyu Pradana Binamulia tidak terdapat notifikasi penolakan ekspor karena Amerika Serikat bukan negara mitra yang dipayungi oleh MRA (Mutual Recognition Arrangement) dengan Indonesia.

Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025 adalah melakukan pendampingan pada kegiatan investigasi penolakan ekspor di negara tujuan yang dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP. Kegiatan pendampingan investigasi tersebut untuk mencari akar masalah terjadinya kasus produk perikanan pada tahun sebelumnya. Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Nama UPI	Waktu Kegiatan Investigasi	Produk	Penyebab	Inspektur Mutu
1.	CV. Prima Indo Tuna	7 Mei 2025	Frozen Cephalopod	Arsenik yang melebihi ambang batas	Wara Zakaria Anugra Ekayani

2.	PT. Wahyu Perdana Binamulia	8 Mei 2025	Frozen Tuna	Salmonella	Mohammad Zamrud Muzakkir
3.	PT. Phillips Seafoods Indonesia	9 Mei 2025	Frozen Tuna	Salmonella	Suprianto Fatima Tayang

Berdasarkan tabel diatas, telah dilaksanakan kegiatan pendampingan investigasi pada 3 (tiga) UPI di Sulawesi Selatan oleh inspektur mutu BPPMHKP Makassar. Untuk PT. Wahyu Pradana Binamulia dan PT. Phillips Seafoods Indonesia dikenakan status *Detention Without Physical Examination* (DWPE) oleh US FDA yang merupakan ketidaksesuaian yang telah masuk pada *Red List of Import Alert 16 – 81 Detention Without Physical Examination of Seafood Products Due to Presence of Salmonella*. Temuan ketidaksesuaian tersebut menginformasikan terdapat pengujian sampel tuna Ready To Eat (RTE) beku dari beberapa negara Asia Tenggara yang dikumpulkan sejak Mei 2024. Pada pengujian tersebut ditemukan 7 dari 140 sampel dari Indonesia mengandung Salmonella. Salah satunya adalah sampel tuna dari produk PT. Wahyu Pradana Binamulia dan PT. Phillips Seafoods Indonesia. Untuk PT. Wahyu Pradana Binamulia dan PT. Phillips Seafoods Indonesia tidak menerima notifikasi penolakan dari negara tujuan.

Adapun untuk CV. Prima Indo Tuna terdapat notifikasi otoritas kompeten Rusia (Rosselkhoznadzor) nomor FS-ARV-7/6520-1 didasarkan dari hasil pemeriksaan pengawasan resmi pasar (*official control on the market*) dimana ditemukan produk gurita beku (*frozen octopus*) yang diekspor pada tahun 2024 dengan nomor *Health Certificate* 02.0-03094-2024 mengandung kandungan logam berat (arsenik) melebihi ambang batas yang diperbolehkan yaitu 9,05 mg/kg (ambang batas Rusia < 5 mg/kg).

Berdasarkan hasil investigasi terhadap ketiga UPI tersebut maka diperoleh akar masalah dan rekomendasi sebagai berikut :



No	Nama UPI	Akar Masalah	Rekomendasi
1.	CV. Prima Indo Tuna	Pengendalian terhadap potensi kontaminasi logam berat (arsen) belum optimal dijalankan	1. Pemutakhiran data pengujian logam berat sesuai dengan lokasi asal bahan baku 2. Perlu adanya monitoring logam berat.
2.	PT. Wahyu Pradana Binamulia	1. Pelaksanaan prosedur sanitasi belum konsisten dijalankan 2. Pengendalian proses perlu ditingkatkan	1. Program swab peralatan untuk dibuat lebih detail sehingga seluruh peralatan dapat terwakili 2. Intensitas pelatihan personil terkait sanitasi dan higiene perlu ditingkatkan 3. Pengendalian terhadap fasilitas yang mensupport proses produksi pada UPI perlu ditingkatkan dan dilakukan perbaikan jika terjadi masalah 4. Penyempurnaan sop pada pengendalian proses
3.	PT. Phillips Seafoods Indonesia		1. Pemutakhiran pada GMP tahapan penerimaan 2. UPI menyampaikan data terupdate antara lain : - Program pengendalian air dan es - SOP <i>environmental monitoring procedure</i> - Program pengujian swab peralatan

Berdasarkan data hasil uji laboratorium terdapat beberapa produk perikanan yang menyimpang di tahun 2025 sehingga dilakukan investigasi secara virtual. Adapun UPI yang di investigasi adalah sebagai berikut:

No	Nama UPI	Waktu Kegiatan Investigasi	Produk	Penyebab	Inspektur Mutu
1.	CV. Mitra Alam	29 Juli 2025	Air dan Es	Zat Padat Terlaru (TDS)	Andi Rahmianar DJ Ardiana
2.	PT. Blue Ocean Resource	29 Juli 2025	Air	Total Zat padat terlarut dan pH pada air	Habrin Yake Muzakir
3.	PT. Nuansa Cipta Magello	04 September 2025	Pasteurized Crabmeat	Angka Lempeng Total (ALT)	Habrin Yake Muzakir



4.	PT. Wahyu Pradana Bina Mulia	20 Oktober 2025	Air dan Es	Penyimpangan Hasil Uji Laboratorium kimia (Fe)	Andi Rahmaniar DJ Ardiana
5.	PT. Lintas Antar Nusa	23 Oktober 2025	Air Asin	Penyimpangan Hasil Uji Lab Total Zat padat terlarut	Habrin Yake Muzakir
6.	CV. Maros Timur Jaya	03 November 2025	Air dan Es	Penyimpangan hasil uji parameter Besi (Fe) Terlarut pada Air dan Es serta Total Zat Padat Terlarut (TDS) pada Es	Habrin Yake Muzakir
7.	PT. Global Maju Pratama	27 November 2025	Air	Penyimpangan hasil uji laboratorium parameter Zat Padat Terlarut (TDS)	Habrin Yake Muzakir
8.	PT. Sinar Graha	04 Desember 2025	Frozen Pelagic Fish (Steak Tenggiri)	Penyimpangan hasil uji parameter kimia Timbal (Pb)	Habrin Yake Muzakir

Kegiatan yang mendukung IKU ini beserta pagu anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Lock Pagu	Realisasi Anggaran TW IV 2025	Persentase Realisasi
1.	7010.ABR.001 Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra dan Negara Tujuan Ekspor	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0
2.	3989.QIC.002 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.888.000,-	412000	0.016
3.	3989.BIA.001 Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0

Alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini pada tahun 2025 sebesar Rp. 45.000.000 terealisasi hanya Rp 412.000. karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan

Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sebesar Rp 44.588.000,- . Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 57.000.000 dengan realisasi Rp. 56.841.000 dimana terjadi penurunan pagu anggaran sebesar 25%.

Pada tahun 2024 dan tahun 2025 kegiatan pendukung yaitu monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi negara mitra tercapai 100 %, namun dari segi anggaran tidak berjalan maksimal di tahun 2025 tidak tercapai disebabkan karena buka blokir anggaran telah dilaksanakan tetapi belum mengakomodir kegiatan perjalanan dinas sehingga tidak memungkinkan untuk dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran di tahun 2024.

Akar Masalah

Belum tersedia prosedur internal terhadap penyimpangan hasil uji setelah dilakukan investigasi

Rekomendasi rencana aksi

Pertemuan/sharing session inspektur mutu terkait prosedur internal terhadap penyimpangan hasil uji setelah dilakukan investigasi

Tindak Lanjut Rekomendasi sebelumnya

Telah dilaksanakan kegiatan monev nomor registrasi negara mitra dibulan November sebanyak 4 (empat) UPI.



Keg. Eksport Produk Perikanan



Keg. Monitoring dan Evaluasi kesesuaian Penerbitan
Penerbitan SMKHP pada Unit Pengolahan Ikan

Sasaran Kegiatan 2

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsistensi sesuai standar

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsistensi sesuai standar di dukung 2 Indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan pencapaian 2 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsistensi sesuai standar 1. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Balai Besar KIPM Makassar 2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	1. 75 Nilai 2. 75 Nilai

IK6. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Balai Besar KIPM Makassar

SK.2 Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar									
IKU-6. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar									
Realisasi 2020 - 2025					2025			Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian terhadap target 2025
-	-	-	-	83,1	75	91,23	121,64	75	121,64

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

dimana :

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \text{Rata rata} \\ \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} &= \text{Nilai tingkat pemenuhan ke-1, 2, 3, ..., n} \\ n &= \text{Banyaknya nilai tingkat pemenuhan} \end{aligned}$$

Hasil verifikasi Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji di Balai Besar KIPM Makassar dihitung oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP berdasarkan rumus di atas. Berdasarkan surat dari Kepala Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP Nomor B.35/BPPMHKP.2/TU.210/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Penyampaian Capaian Kinerja Sistem Manajemen Mutu sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, maka Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai sebesar 91,23 dari target sebesar 75. Sehingga output kegiatan penerapan sistem manajemen mutu telah terealisasi sebesar 121,64 %.

Sebagai perbandingan, capaian nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu dengan beberapa UPT BPPMHKP dapat disandingkan sebagai berikut :

- Balai KIPM Semarang dengan nilai 92,02. Maka untuk perbandingan ini, masih lebih rendah dengan selisih 1,06 poin.
- Balai KIPM Denpasar dengan nilai 86,57. Maka untuk perbandingan ini, Balai Besar KIPM Makassar lebih tinggi dengan selisih 4,39 poin.

Dari bechmarking tersebut diatas maka Balai Besar KIPM Makassar masih memerlukan perbaikan berkelanjutan terhadap indikator-indikator penilaian terutama pada indikator yang menjadi temuan ketidaksesuaian.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium penguji adalah kegiatan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan di

laboratorium Balai Besar KIPM Makassar. Selama Tahun 2025, terdapat 11.167 kali pengujian laboratorium yang terdiri dari :

1. Pengujian Organoleptik sebanyak 2.405 kali
2. Pengujian Mikrobiologi sebanyak 5.613 kali
3. Pengujian Kimia sebanyak 2.433 kali
4. Pengujian Air dan Es sebanyak 716 kali

Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 dilakukan pengujian laboratorium sebanyak 14.307 kali yang lebih dipengaruhi oleh banyaknya pengujian parameter organoleptik di tahun 2024.

Selama tahun 2025, terdapat subkontrak pengujian sebanyak 2.423 kali pengujian ke laboratorium Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk parameter mikrobiologi dan kimia, Laboratorium PT. Angler Bio Chemlab untuk pengujian Phosphate dan Clostridium botulinum, dan Laboratorium Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim untuk pengujian air dan es. Pengujian subkontrak ini dilaksanakan karena masih ada parameter uji yang belum masuk dalam ruang lingkup pengujian dan juga dikarenakan adanya peralatan yang rusak. Kedepannya, dengan rencana pembangunan laboratorium rujukan Wilayah Timur Indonesia, maka parameter uji yang belum masuk dalam ruang lingkup pengujian akan dimasukkan dalam ruang lingkup uji laboratorium Balai Besar KIPM Makassar.

Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh 18 orang mulai dari Manager Puncak hingga analis dan staf laboratorium yang kompeten dalam melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium.

Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini mendukung Asta Cita ke-2 dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui

ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

IKU ini mendukung budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di Lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu Berorientasi Pelayanan dengan memberikan pelayanan laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan.

Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPA Balai Besar KIPM Makassar pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 112.446.000,- mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 60,6% dari sebelumnya sebesar Rp. 70.000.000,- di tahun 2024. Realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 103.003.210,- atau sebesar 91,60%. Sisa anggaran sebesar Rp. 9.442.790,- sudah tidak dapat direalisasikan karena adanya anggaran penanganan limbah laboratorium yang berlebih.

Pada tahun 2025 ini telah dilakukan Surveilans ke-2 penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 pada tanggal 20 Mei 2025 dengan menyesuaikan ruang lingkup pengujian dengan menghapus ruang lingkup pengujian karantina dan ruang lingkup mutu yang peralatannya telah diserahkan kepada Badan Karantina Indonesia. Total ruang lingkup yang dipertahankan adalah sebanyak 12 ruang lingkup pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Selama tahun 2025 telah dilakukan kegiatan peningkatan kompetensi analis laboratorium sebanyak 11 kali untuk meningkatkan kompetensi analis dalam melaksanakan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pada tanggal 25 November 2025 Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP melaksanakan Verifikasi Official Control untuk melihat konsistensi pengujian laboratorium dalam rangka official control di Balai Besar KIPM dengan evaluator Martono dan Danar Kristiasari. Hasilnya terdapat 5 temuan yang telah dilakukan tindakan perbaikan pada tanggal 24 Desember 2025. Hasil verifikasi official control Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai 88,33 (sangat baik).

Pada tanggal 7 – 8 November 2025 terdapat kunjungan Kepala Pusat Manajemen Mutu ke Balai Besar KIPM Makassar dalam rangka memantau progress persiapan pembangunan laboratorium rujukan yang di biayai dari anggaran SBSN tahun 2026. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Pusat Manajemen Mutu memberikan arahan rencana strategis pembangunan laboratorium rujukan. Rencananya Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar akan mendapatkan peralatan tambahan untuk penambahan ruang lingkup uji laboratorium Balai Besar KIPM Makassar.

Selama tahun 2025, terdapat 58 mahasiswa program Sarjana dan siswa sekolah kejuruan yang melaksanakan magang di Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar, serta terdapat 4 orang lulusan perguruan tinggi yang melaksanakan magang berdasarkan program pemagangan nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Program magang ini memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada peserta magang dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan khususnya di bidang pengujian laboratorium.

Akar Masalah

Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar akan dijadikan laboratorium rujukan Wilayah Timur Indonesia dengan beberapa ruang lingkup baru. Potensi masalah yang ada adalah

perlunya dilakukan peningkatan kompetensi laboratorium untuk mengakomodir ruang lingkup baru berupa ketersediaan peralatan, bahan, metode uji, personil, dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengujian untuk ruang lingkup yang akan di tambahkan.

Rekomendasi Rencana Aksi

Peningkatan kompetensi laboratorium melalui penyediaan gedung laboratorium rujukan Wilayah Timur Indonesia sesuai standar internasional SNI ISO/IEC 17025:2017

Tindak Lanjut Rekomendasi sebelumnya

Telah dilakukan surveilan ke-2 akreditasi dalam rangka mempertahankan status akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 di Tahun 2025.



Keg. Verifikasi Penerapan Sistem Manajemn Mutu Laboratorium



Keg. Surveilan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17025:2017

IK7. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar

SK.2 Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar										
IKU-7. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar										
Realisasi 2020 - 2025					2025			Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian terhadap target 2025	
-	-	-	-	83,1	75	90,96	121,28	75	121,28	

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga Inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (ISO 17020).

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah kegiatan surveilan penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Selama Triwulan IV Tahun 2025, terdapat 75 kali pelaksanaan surveilan penerapan HACCP.

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

dimana :

$\bar{X}$	= Rata rata
$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$	= Nilai tingkat pemenuhan ke - 1, 2, 3, ..., n
n	= Banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Hasil verifikasi Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi di Balai Besar KIPM Makassar dihitung oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP berdasarkan rumus di atas. Berdasarkan surat dari Kepala Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP nomor B.35/BPPMHKP.2/TU.210/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Penyampaian Capaian Kinerja Sistem Manajemen Mutu sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 maka Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai sebesar 90,96 dari target sebesar 75. Sehingga output kegiatan penerapan sistem manajemen mutu telah terealisasi sebesar 121,28 %.

Sebagai perbandingan, capaian nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu dengan beberapa UPT BPPMHKP dapat disandingkan sebagai berikut :

- Balai Besar KIPM Surabaya II dengan nilai 91,30. Maka untuk perbandingan ini, masih lebih rendah dengan selisih 0,34 poin.
- Balai KIPM Mataram dengan nilai 84,18. Maka untuk perbandingan ini, Balai Besar KIPM Makassar lebih tinggi dengan selisih 6,78 poin.

Dari benchmarking tersebut diatas maka Balai Besar KIPM Makassar masih memerlukan perbaikan berkelanjutan terhadap indikator-indikator penilaian terutama pada indikator yang menjadi temuan ketidaksesuaian.

Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh 21 orang mulai dari Manager Puncak hingga inspektur mutu hasil perikanan yang telah memiliki nomor registrasi inspektur mutu dan/atau telah mengikuti pelatihan HACCP dasar.

Selama tahun 2025 dilakukan surveilan pelaksanaan HACCP sebanyak 318 kali sebagai pelaksanaan ruang lingkup lembaga inspeksi. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 terdapat surveilan HACCP sebanyak 320 kali.

Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi ini mendukung Asta Cita ke-2 dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

IKU ini mendukung budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di Lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu Kompeten dimana ASN dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas sesuai dengan tantangan yang ada. Dengan adanya perubahan tugas dan fungsi dalam penjaminan mutu hulu hingga hilir, ASN inspektur mutu dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dan mengupdate regulasi-regulasi terbaru.

Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi bersumber dari DIPA Balai Besar KIPM Makassar tahun 2025 adalah sebesar Rp. 27.304.000,- mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 36,52% dari sebelumnya sebesar Rp. 20.000.000,-. Realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 27.254.000,- atau sebesar 99,82%. Sisa anggaran sebesar Rp. 50.000,- merupakan sisa anggaran dari kegiatan yang tidak terserap.

Pada tahun 2025 ini dilakukan 5 kali peningkatan kompetensi inspektur mutu berupa sharing session dan penyamaan persepsi inspektur mutu. Kegiatan peningkatan kompetensi inspektur mutu ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi inspektur mutu dalam melaksanakan tugas pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu hingga hilir.

Pada tanggal 25 November 2025 Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP melaksanakan Verifikasi Quality Manajemen System untuk melihat konsistensi pengujian laboratorium dalam rangka official control di Balai Besar KIPM dengan evaluator Martono dan Danar Kristiasari. Hasilnya terdapat 7 temuan yang telah dilakukan tindakan perbaikan pada tanggal 24 Desember 2025. Dari hasil verifikasi tersebut, lembaga inspeksi Balai Besar KIPM Makassar memperoleh penilaian 88,33 (sangat baik).

Pada tanggal 1 – 2 Desember 2025 telah dilakukan re-akreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012 oleh Badan Akreditasi Nasional dengan ruang lingkup Surveilans HACCP. Hasilnya terdapat

17 temuan penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012 dan 3 temuan penyaksian (witness). Tindakan perbaikan paling lambat harus diselesaikan pada tanggal 1 Februari 2026.

Akar Masalah

Sertifikat Akreditasi Lembaga Inspeksi Balai Besar KIPM Makassar SNI ISO/IEC 17020:2012 dengan nomor akreditasi LI-089-IDN telah dilakukan re-akreditasi. Terdapat 17 temuan penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012 dan 3 temuan witness lembaga inspeksi. Potensi masalah yang perlu diperhatikan adalah belum efektifnya tindak lanjut tindakan perbaikan temuan re-akreditasi yang memiliki tenggat waktu yang semakin dekat, yaitu tanggal 1 Februari 2026.

Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan penyelesaian temuan re-akreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012 sesegera mungkin sebelum tenggat waktu yang ditentukan.

Tindak Lanjut Rekomendasi sebelumnya

Berdasarkan rekomendasi tindak lanjut triwulan sebelumnya, telah dilakukan re-Akreditasi ulang terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17020:2012 pada tanggal 1-2 Desember 2025.



Keg. Verifikasi Quality Management System Pusat Pengendalian Mutu
BPPMHKP

Sasaran Kegiatan 3

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, untuk mencapai sasaran kegiatan ini diperlukan dukungan 9 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan . adapun penjelasan pencapaian 9 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :



Indikator Kinerja	Target
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan :	
1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) UPT Lingkup Balai Besar KIPM Makassar)	1. 92 Nilai
2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	2. 71,5 Nilai
3. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	3. 100 %
4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	4. 82 Indeks
5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	5. 86 Nilai
6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	6. 85 persen
7. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	7. 76 Persen
8. Nilai minimal yang di persyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	8. 75 Nilai
9. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	9. 3,36 Indeks

IK8. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

SK.3 Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah an akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan									
IKU-8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar									
Realisasi 2020 - 2025					2025			Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian terhadap target 2025
88	89	98,44	96,38	97,16	92	94,58	102,80	92	102,80

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini terintegrasi dengan Aplikasi OM-SPAN. Penilaian IKPA diatur pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

 Ruang lingkup :

PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 mengatur mengenai pengukuran dan penilaian secara sistematis dan objektif atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA dan menggunakan aplikasi yang dikelola oleh DJPB.

 Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja

Pengukuran IKPA meliputi 3 aspek :

1. Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:
 - a. Revisi DIPA bobot 10 %
 - b. Deviasi halaman 3 DIPA bobot 15%
2. Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:

- a. Penyerapan anggaran bobot 20%
 - b. Belanja Kontraktual bobot 10%
 - c. Penyelesaian Tagihan bobot 10%
 - d. Pengelolaan UP dan TUP bobot 10%
 - e. Dispensasi Surat Perintah Membayar bobot 0%
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini adalah capaian output. Bobot capaian output adalah 25%.

Total Konversi Bobot pada Aspek pengukuran dan Indikator Kinerja pada TW IV Tahun Anggaran 2025 adalah 100%

Berdasarkan hasil penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, kinerja pelaksanaan anggaran pada Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar memperoleh nilai akhir sebesar 94,58, dengan kategori Sangat Baik. Penilaian ini mencerminkan tingkat kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta hasil pelaksanaan anggaran yang secara umum telah berjalan efektif, tertib, dan akuntabel. Berikut penjelasan dari Indikator penunjang IKPA:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran

Kualitas perencanaan anggaran memperoleh nilai aspek sebesar 88,93. Capaian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun dengan cukup baik dan realistis. Indikator Revisi DIPA memperoleh nilai maksimal, yang mencerminkan bahwa perencanaan awal anggaran telah disusun secara matang sehingga tidak memerlukan banyak penyesuaian sepanjang tahun anggaran.

Namun demikian, pada indikator Deviasi Halaman III DIPA, nilai yang diperoleh belum optimal. Hal ini disebabkan masih adanya perbedaan antara rencana penarikan dana dengan realisasi pelaksanaan anggaran pada beberapa periode. Deviasi tersebut terjadi sebagai dampak dari penyesuaian jadwal kegiatan, adanya blokir anggaran, penghematan belanja, serta perubahan kondisi pelaksanaan kegiatan yang memerlukan penyesuaian waktu realisasi. Meskipun demikian, deviasi tersebut masih dalam batas wajar dan tidak mengganggu pencapaian target kinerja secara keseluruhan.

Berikut penjelasan nilai yang dicapai pada masing-masing indikator pendukung Kualitas perencanaan Anggaran:

a) Revisi DIPA

Revisi DIPA
Nilai: 100
Bobot: 10%
Nilai Akhir: 10,00

Hasil evaluasi:

- Perencanaan awal yang matang
- Revisi dilakukan tepat sasaran dan sesuai ketentuan

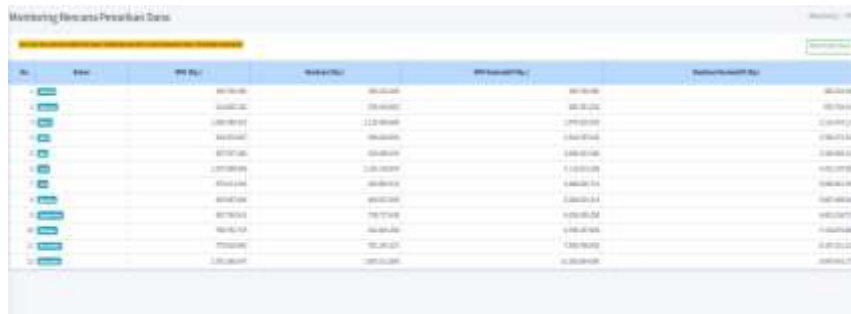
b) Deviasi Hal III DIPA

Deviasi Hal III DIPA
Nilai: 77,86
Bobot: 15%
Nilai Akhir: 11,68

Hasil evaluasi:

- Terdapat perbedaan antara RPB (Hal III DIPA) dengan realisasi bulanan

Tampilan RPD dan Realisasi Tahun Anggaran 2025



ID	Nama	RPD Rp	Realisasi Rp	RPD Realisasi Rp	RPD Realisasi Rp	Realisasi Realisasi Rp
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...

2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Kualitas pelaksanaan anggaran memperoleh nilai aspek sebesar 94,87, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran telah berjalan sangat baik. Indikator Penyerapan Anggaran mencatat nilai hampir maksimal, yang menggambarkan bahwa sebagian besar pagu anggaran dapat direalisasikan sesuai peruntukannya dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada indikator Belanja Kontraktual, nilai yang diperoleh belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh adanya kontrak yang tidak dapat direalisasikan sepenuhnya, pembatalan kontrak, maupun penyesuaian kebutuhan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika pelaksanaan di lapangan serta upaya efisiensi anggaran, namun tetap dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, indikator Penyelesaian Tagihan dan Pengelolaan UP dan TUP memperoleh nilai maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh tagihan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa penumpukan pada akhir tahun anggaran, serta pengelolaan uang persediaan

dan tambahan uang persediaan dilakukan secara tertib, tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut penjelasan nilai yang dicapai pada masing-masing indikator pendukung Kualitas Pelaksanaan Anggaran:

a) Penyerapan Anggaran

Penyerapan Anggaran
Nilai: 99,48
Bobot: 20%
Nilai Akhir: 19,90

Hasil evaluasi:

- Serapan anggaran hampir optimal
- sisa anggaran sangat kecil dan masih dalam batas wajar

b) Belanja Kontraktual

Belanja Kontraktual
Nilai: 80
Bobot: 10%
Nilai Akhir: 8

Hasil evaluasi:

- Terdapat kontrak yang tertunda sehingga tidak terealisasi secara penuh

c) Penyelesaian Tagihan

Penyelesaian Tagihan
Nilai: 100
Bobot: 10
Nilai Akhir: 10

Hasil evaluasi:

- Tagihan diselesaikan tepat waktu
- Tidak ada penumpukan SPM di akhir tahun

d) Pengelolaan UP dan TUP

Pengelolaan UP dan TUP
Nilai: 100
Bobot: 10
Nilai Akhir: 10

Hasil evaluasi:

- Tidak ada keterlambatan LPJ
- Tidak ada saldo mengendap bermasalah
- Pengelolaan kas UP/TUP maksimal

3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Pada aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai maksimal sebesar 100,00. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh output kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan dan dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menggambarkan bahwa anggaran yang digunakan telah mampu menghasilkan keluaran yang optimal dan memberikan manfaat sesuai tujuan program dan kegiatan.

Capaian Output
Nilai: 100
Bobot: 25
Nilai Akhir: 25

Hasil evaluasi:

- Output kegiatan tercapai sesuai target

Cara menghitung nilai total Capaian kinerja IKPA =
(Nilai Akhir Kualitas Perencanaan Anggaran + Nilai Akhir Kualitas Pelaksanaan Anggaran
+ Nilai Akhir Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran) / Konversi Bobot 100 %

Perhitungan perolehan dari Nilai Akhir Kualitas Perencanaan Anggaran, Nilai Akhir Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Akhir Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan Indikator pendukung pada masing-masing adalah hasil perhitungan otomatis dari Aplikasi Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi Monev PA

Berikut tampilan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran Tahun 2025 pada Balai Besar KIPM Makassar.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan: 31/12/2025

No	Kode IKPA	Kode SA	Kode Subur	Uraian Indikator	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Diserap SPN (Pengerang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Pelaksanaan di DIPA	Penyisipan Anggaran	Belanja Konstruktif	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	108	002	427586	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Nilai	100.00	77.36	99.43	80.00	100.00	100.00	100.00	94.59	100%	0.00	94.59
					Bobot	10	15	30	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.60	19.90	8.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Rata-rata	88.93			94.87			100.00				

Dibawah ini merupakan tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran:

Tabel perbandingan capaian kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikar kinerja	Periode Tahun 2024 (Tahunan=93,78)		Periode Tahun 2025 (Tahunan=92)	
	Bobot	Nilai Akhir	Bobot	Nilai Akhir
Kualitas Perencanaan Anggaran				
Revisi DIPA	10	10	10	10
Deviasi Hal III DIPA	15	13,82	15	11,68
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Penyerapan Anggaran	20	19,15	20	19,9
Belanja Kontraktual	10	9,2	10	8
Penyelesaian Tagihan	10	10	10	10
Pengelolaan UP dan TUP	10	9,93	10	10
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Capaian Output	25	25	25	25
Dispensasi SPM (Pengurang)	0	0	0	0
Nilai Total	100	97,16	100	94,58
Nilai IKPA setelah konversi		97,16		94,58
Capaian (Realisasi/Target Q2)		103,60		102,80

Pada tabel diatas terlihat adanya penurunan nilai IKPA pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 sebesar 0,8 persen namun capaian realisasi masih melampaui target IKU 8 yang telah ditetapkan di awal tahun. Penurunan Tahun 2025 dipengaruhi oleh indikator Deviasi Hal III DIPA dan Belanja Kontraktual.

Hal-hal yang telah dilaksanakan dan dicapai selama tahun 2025 untuk mendukung nilai IKPA 2025 yaitu:

- Balai Besar KIPM Makassar mendapatkan IKPA 100 persen. Hal ini berdasarkan surat dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor:S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari

2025 tentang Penyesuaian data dan perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025.

- Indikator pada aspek pengukuran Kualitas Pelaksanaan Anggaran terkait pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sepanjang Tahun Anggaran 2025 memperoleh nilai sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh proses pengelolaan UP dan TUP telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Indikator pada aspek pengukuran Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran terkait capaian output sepanjang Tahun Anggaran 2025 memperoleh nilai sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh output kegiatan yang direncanakan telah terealisasi secara optimal, tepat sasaran, dan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Hal ini juga didukung dengan mengikutkan operator mengikuti kegiatan sosialisasi pelaporan proyeksi target dan realisasi Capaian Output 2025 secara online.
- Tim Keuangan telah melaksanakan rapat strategi pada tanggal 11 Juli 2025 dalam rangka meningkatkan capaian indikator deviasi Halaman III DIPA pada IKPA Triwulan III Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pengelola keuangan, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran, perlu melakukan perencanaan realisasi anggaran dengan mengacu pada Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disusun. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat kondisi yang mengharuskan optimalisasi penyerapan anggaran, sehingga realisasi anggaran tidak sepenuhnya sejalan dengan RPD yang telah direncanakan.
- Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan RPD 2026 yang dirangkaikan dengan rapat evaluasi kegiatan operasional tgl 19 Desember 2025

- Sebagai perbandingan nilai IKPA dengan 2 UPT lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat disajikan Sesuai dengan Nota Dinas Nomor 111/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 10 Januari 2026 Hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025 yaitu:

1. IKPA Balai Besar KIPM Makassar

126	032	407988	BALAI BESAR KASABATANA KANA, PENGENDALIAN, WISATA DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PERIKANAN MAKASSAR	Nilai	100.00	77.86	96.48	80.00	100.00	100.00	100.00	94.58	100%	0.00	94.58
				Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
				Nilai Akhir	10.00	11.68	19.00	8.00	10.00	10.00	25.00				
				Nilai Aspek	80.00			94.87			100.00				

2. IKPA Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan

132	032	401827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	99.97	100.00	79.97	80%	0.00	99.96
				Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
				Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.97	25.00				
				Nilai Aspek	100.00			99.97			100.00				

3. IKPA Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi

126	032	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	Nilai	100.00	98.25	100.00	100.00	100.00	92.58	100.00	92.70	100%	0.00	92.70
				Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
				Nilai Akhir	10.00	9.44	20.00	10.00	10.00	9.26	25.00				
				Nilai Aspek	78.13			90.15			100.00				

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai IKPA sebesar 94,58 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada Balai Besar KIPM Makassar secara umum telah dilaksanakan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara. Nilai IKPA tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Apabila dibandingkan dengan UPT lain dengan eselon yang sama, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan memperoleh nilai IKPA sebesar 99,96 persen, sedangkan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi memperoleh nilai IKPA sebesar 92,70 persen. Perbandingan ini menunjukkan bahwa capaian IKPA Balai Besar KIPM Makassar berada pada posisi yang kompetitif dan relatif seimbang dengan UPT pembanding lainnya, serta berada di atas salah satu UPT yang menjadi pembanding.

Capaian IKPA Balai Besar KIPM Makassar didukung oleh kinerja yang optimal pada sebagian besar indikator penyusun IKPA, khususnya indikator yang memiliki bobot signifikan terhadap nilai akhir. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara efektif, termasuk dalam aspek ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, kualitas administrasi keuangan, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja pelaksanaan anggaran, Balai Besar KIPM Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 10 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.329/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor: B.009/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar KIPM Makassar. Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:
 - 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
 - 1 Orang Bendahara Pengeluaran;

- 3 Orang Staf KPA dan;
 - 2 Orang Staf PPK
- Surat Perintah Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor: B.005/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tgl 2 Januari 2025 dengan beranggotakan 1 Pegawai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan layanan manajemen keuangan dan layanan perkantoran gaji dan tunjangan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

- Layanan manajemen keuangan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp23.450.000. Pagu pada kegiatan ini terblokir sepenuhnya.
- Layanan perkantoran gaji dan tunjangan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp6.734.232.000 setelah revisi. Pada TW IV 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar 6.632.028.852 atau 98,48 persen. Output dari layanan perkantoran gaji dan tunjangan adalah pembayaran gaji dan tunjangan seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar.

Total pagu anggaran untuk mendukung capaian kinerja pelaksanaan anggaran adalah sebesar Rp6.757.682.000 dengan realisasi anggaran 6.632.028.852 atau 98,14 persen. adanya efesien sebesar Rp 125.653.148,- sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2024, kegiatan pada indikator kinerja ini hanya didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp9.468.000 Setelah revisi dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.440.000 atau 99,70 persen. terdapat penurunan realisasi anggaran pada Tahun 2025. Hal ini disebabkan pada Tahun 2025 pagu anggaran kegiatan layanan manajemen keuangan masih terblokir



seluruhnya dan pagu anggaran sebagai pendukung pada indikator yang sama pada Tahun 2024 sangat kecil.

Pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita.

Tangkap Layar IKPA Tahun 2025 pada Aplikasi Monev PA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sumber: Dokumen IKPA 2025

No	Kode KPA	Kode SK	Kode Subsk	Uraian Indikator	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran						Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Kinerja Subst	Diserap (PA Pengantar)	Nilai Akhir (Nilai Total Kinerja Subst)
						Realisasi DIPA	Deviasi Realisasi di DIPA	Penggunaan Anggaran	Salvage Kontribusi	Pengeluaran Tagihan	Pengeluaran SP dan TUP					
1	136	000	427500	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Nilai	100,00	77,88	99,40	90,00	100,00	100,00	100,00	94,50	100%	0,00	94,50
					Subst	10	10	20	10	10	10	20				
					Nilai Rata	10,00	11,99	19,90	0,00	10,00	10,00	20,00				
					Nilai Rata	99,90			90,00			100,00				

Kegiatan penyusunan RPD yang dirangkaikan dengan Rapat Evaluasi dan Kegiatan Operasional tgl 19 Desember 2025



Akar masalah

- Kurang optimalnya monitoring pelaksanaan belanja kontraktual
- Potensi masalah perencanaan RPD SBSN kurang optimal

Rekomendasi rencana aksi

- Melaksanakan monitoring belanja kontraktual melalui briefing pagi/sharing session antar pengelola anggaran di awal tahun untuk meminimalisir tidak terserapnya kegiatan belanja kontraktual di akhir tahun
- Tim Teknis berkoordinasi ke biro PBJ dan Sekretariat BPPMHKP terkait RPD SBSN

Hasil Tindaklanjut Rekomendasi

- Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan RPD 2026 yang dirangkaikan dengan rapat evaluasi kegiatan operasional tgl 19 Desember 2025
- Pengelola anggaran telah memaksimalkan realisasi sesuai dengan RPD. Kegiatan penyusunan RPD yang dirangkaikan dengan Rapat Evaluasi dan Kegiatan Operasional tgl 19 Desember 2025

IK9. Nilai Kinerja Perencanaan anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

SK.3 Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah an akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan									
IKU-9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar									
Realisasi 2020 - 2025					2025			Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian terhadap target 2025
-	86	87,87	86,2	98,37	71,5	100	139,86	71,5	139,86

Menteri keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran sebagai salah satu instrument penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara professional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga, unit eselon I / dan / satuan kerja bersangkutan. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas dimaksud bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor- faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA- K/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk:

- Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan;
- Penyusunan reviu angka dasar;
- Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenan; dan
- Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga; dan/atau pihak-pihak lain, yang antara lain meliputi akademisi, pakar dan praktisi.

Untuk memantau Nilai Kinerja Anggaran, Kementerian Keuangan telah membuat suatu aplikasi yaitu Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Hal ini dimaksudkan agar setiap organisasi dapat selalu memantau dashboard kinerja anggaran dan melakukan peningkatan pada aspek-aspek penunjang Nilai Kinerja Anggaran tersebut.

Pada triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk mendukung tercapainya target kinerja ini antara lain :

- Penyusunan revisi anggaran

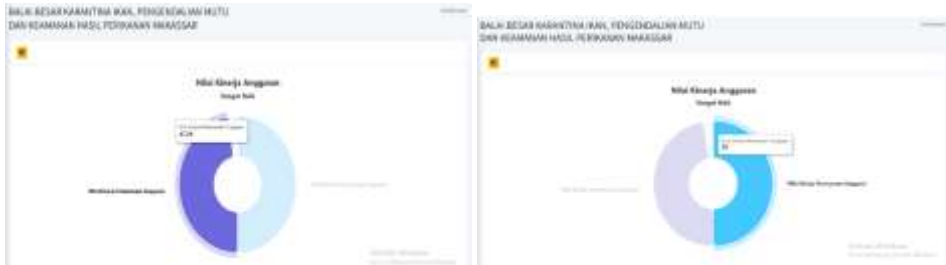
Aplikasi Monev Kementerian Keuangan pengukuran Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan pada 2 kategori yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan untuk tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya Nilai Kinerja Anggaran didasarkan dari 4 aspek yaitu Aspek Penyerapan, Konsistensi, Capaian realisasi Output, dan Nilai Efisiensi.

Berikut adalah proses bisnis terbentuknya data pada dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu



Dasboard Aplikasi Monev Kemenkeu

Penjelasan Dashboard Nilai Kinerja Anggaran Triwulan IV tahun 2025



1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 47,29 %
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 50 %

Nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 47,29% yang terlihat pada aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id> sudah dapat menjelaskan kondisi riil nilai kinerja perencanaan anggaran yang ada di Balai Besar KIPM Makassar. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id> sudah terupdate yang dibuktikan dengan statemen pada aplikasi yaitu “Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi”.

Capaian nilai perencanaan anggaran Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 100 persen dari target 71,5, dimana nilai perencanaan juga berintegrasi dengan nilai IKPA. Nilai tersebut tidak menggambarkan nilai sebenarnya, hal ini disebabkan karena adanya Nota Dinas dari Sekretaris Jenderal KKP Nomor: 138/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan IV TA 2025.



CAPAIAN INDIKATOR KINERJA NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKP) TA. 2025 LINGKUP BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERUBAHAN IKP DATA PER TANGGAL 13 JANUARI 2025					
No	Kategori	Sub Kategori	Nilai Kinerja		
			Target	Realisasi	Deviasi
1	1.1	1.1.1	100%	100%	0%
2	1.1	1.1.2	100%	100%	0%
3	1.1	1.1.3	100%	100%	0%
4	1.1	1.1.4	100%	100%	0%
5	1.1	1.1.5	100%	100%	0%
6	1.1	1.1.6	100%	100%	0%
7	1.1	1.1.7	100%	100%	0%
8	1.1	1.1.8	100%	100%	0%
9	1.1	1.1.9	100%	100%	0%
10	1.1	1.1.10	100%	100%	0%
11	1.1	1.1.11	100%	100%	0%
12	1.1	1.1.12	100%	100%	0%
13	1.1	1.1.13	100%	100%	0%
14	1.1	1.1.14	100%	100%	0%
15	1.1	1.1.15	100%	100%	0%
16	1.1	1.1.16	100%	100%	0%
17	1.1	1.1.17	100%	100%	0%
18	1.1	1.1.18	100%	100%	0%
19	1.1	1.1.19	100%	100%	0%
20	1.1	1.1.20	100%	100%	0%
21	1.1	1.1.21	100%	100%	0%
22	1.1	1.1.22	100%	100%	0%
23	1.1	1.1.23	100%	100%	0%
24	1.1	1.1.24	100%	100%	0%
25	1.1	1.1.25	100%	100%	0%
26	1.1	1.1.26	100%	100%	0%
27	1.1	1.1.27	100%	100%	0%
28	1.1	1.1.28	100%	100%	0%
29	1.1	1.1.29	100%	100%	0%
30	1.1	1.1.30	100%	100%	0%
31	1.1	1.1.31	100%	100%	0%
32	1.1	1.1.32	100%	100%	0%
33	1.1	1.1.33	100%	100%	0%
34	1.1	1.1.34	100%	100%	0%
35	1.1	1.1.35	100%	100%	0%
36	1.1	1.1.36	100%	100%	0%
37	1.1	1.1.37	100%	100%	0%
38	1.1	1.1.38	100%	100%	0%
39	1.1	1.1.39	100%	100%	0%
40	1.1	1.1.40	100%	100%	0%
41	1.1	1.1.41	100%	100%	0%
42	1.1	1.1.42	100%	100%	0%
43	1.1	1.1.43	100%	100%	0%
44	1.1	1.1.44	100%	100%	0%
45	1.1	1.1.45	100%	100%	0%
46	1.1	1.1.46	100%	100%	0%
47	1.1	1.1.47	100%	100%	0%
48	1.1	1.1.48	100%	100%	0%
49	1.1	1.1.49	100%	100%	0%
50	1.1	1.1.50	100%	100%	0%
51	1.1	1.1.51	100%	100%	0%
52	1.1	1.1.52	100%	100%	0%
53	1.1	1.1.53	100%	100%	0%
54	1.1	1.1.54	100%	100%	0%
55	1.1	1.1.55	100%	100%	0%
56	1.1	1.1.56	100%	100%	0%
57	1.1	1.1.57	100%	100%	0%
58	1.1	1.1.58	100%	100%	0%
59	1.1	1.1.59	100%	100%	0%
60	1.1	1.1.60	100%	100%	0%
61	1.1	1.1.61	100%	100%	0%
62	1.1	1.1.62	100%	100%	0%
63	1.1	1.1.63	100%	100%	0%
64	1.1	1.1.64	100%	100%	0%
65	1.1	1.1.65	100%	100%	0%
66	1.1	1.1.66	100%	100%	0%
67	1.1	1.1.67	100%	100%	0%
68	1.1	1.1.68	100%	100%	0%
69	1.1	1.1.69	100%	100%	0%
70	1.1	1.1.70	100%	100%	0%
71	1.1	1.1.71	100%	100%	0%
72	1.1	1.1.72	100%	100%	0%
73	1.1	1.1.73	100%	100%	0%
74	1.1	1.1.74	100%	100%	0%
75	1.1	1.1.75	100%	100%	0%
76	1.1	1.1.76	100%	100%	0%
77	1.1	1.1.77	100%	100%	0%
78	1.1	1.1.78	100%	100%	0%
79	1.1	1.1.79	100%	100%	0%
80	1.1	1.1.80	100%	100%	0%
81	1.1	1.1.81	100%	100%	0%
82	1.1	1.1.82	100%	100%	0%
83	1.1	1.1.83	100%	100%	0%
84	1.1	1.1.84	100%	100%	0%
85	1.1	1.1.85	100%	100%	0%
86	1.1	1.1.86	100%	100%	0%
87	1.1	1.1.87	100%	100%	0%
88	1.1	1.1.88	100%	100%	0%
89	1.1	1.1.89	100%	100%	0%
90	1.1	1.1.90	100%	100%	0%
91	1.1	1.1.91	100%	100%	0%
92	1.1	1.1.92	100%	100%	0%
93	1.1	1.1.93	100%	100%	0%
94	1.1	1.1.94	100%	100%	0%
95	1.1	1.1.95	100%	100%	0%
96	1.1	1.1.96	100%	100%	0%
97	1.1	1.1.97	100%	100%	0%
98	1.1	1.1.98	100%	100%	0%
99	1.1	1.1.99	100%	100%	0%
100	1.1	1.1.100	100%	100%	0%

Untuk mendukung tercapainya IKU ini, Balai Besar KIPM Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 9 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.329/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor: B.009/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar KIPM Makassar. Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:
 - 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
 - 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
 - 3 Orang Staf KPA dan;
 - 2 Orang Staf PPK



Komitmen untuk terus meningkatkan kinerja berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara menjadi prioritas Balai Besar KIPM Makassar.

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran dan layanan perkantoran, perawatan, Gedung dan Bangunan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

- Layanan Perencanaan dan penganggaran

Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 17.407.000,-. Pada TW IV 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 17.406.459,- Output dari layanan perencanaan dan penganggaran adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.

- Layanan perkantoran, perawatan, Gedung dan Bangunan

Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 313.110.000,-. Pada TW IV 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 312.839.527,- Output dari layanan perencanaan dan penganggaran adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.

Pada tahun 2025, untuk triwulan IV Tahun 2025 terdapat buka blokir anggaran sebesar Rp. 1.620.576.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan dukungan manajerial (3987) sebesar Rp. 1.420.698.000, kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu (3989) sebesar Rp. 159.628.000 dan kegiatan manajemen mutu (7010) sebesar Rp. 40.250.000. Buka blokir anggaran berdampak positif terhadap kinerja anggaran Triwulan IV disebabkan anggaran yang tersedia dapat segera dibelanjakan sesuai kegiatan, program yang sempat tertunda akibat blokir anggaran dapat dilanjutkan dan diselesaikan tepat waktu serta target fisik dan manfaat yang diharapkan dapat tercapai.

Selain itu buka blokir anggaran menyebabkan ketidaksesuaian rencana penarikan dana yang telah disusun pada awal Triwulan.

Pada Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta cita.

Akar masalah

- Buka blokir anggaran akhir tahun belum terserap secara maksimal terutama di belanja 52;
- Buka blokir anggaran diakhir tahun berpotensi terjadinya pembelanjaan yang kurang efektif, tidak tepat sasaran dan ketidaksesuaian prioritas.

Rekomendasi rencana aksi

- Rapat/briefing terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
- Identifikasi resiko buka blokir anggaran.

Tindaklanjut Rekomendasi sebelumnya

Briefing personil dukungan manajerial terkait percepatan penyerapan anggaran tanggal 22 Oktober 2025;



Keg. Briefing Dukungan Manajerial percepatan penyerapan

IK 10. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

SK.3 Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah an akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan									
IKU-10. Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar									
Realisasi 2020 - 2025					2025			Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian terhadap target 2025
			100	100	100	100	100,00	100	100,00

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dan anggaran oleh Satuan Kerja, maka secara periodik dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal (Inspektorat Jenderal) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemerisa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan

keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh obyek pemeriksaan (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir;

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Satker BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern;

Indikator kinerja “Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)” dihitung berdasarkan dokumen formal yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan dokumen bukti tindak lanjut penyelesaiannya. Formulasi perhitungannya menggunakan pendekatan sebagai berikut :

$$\% P = (A/B) \times 100\%$$

Keterangan :

%P = Persentase penyelesaian temuan;

A = Jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 yang diselesaikan pada LHP atas kepatuhan;

B = Nilai temuan BPK tahun 2025;

Pada triwulan IV tahun 2025 tidak terdapat pemeriksaan BPK, sehingga realisasi dari IKU ini dinilai mencapai 100%, jika dibandingkan TW III, TW II dan TW I 2025 yaitu 100% jadi Tahun 2025 ini capaian realisasinya 100%. Dengan demikian penyelesaian temuan BPK pada lingkup Balai Besar KIPM Makassar dinilai konsisten.

Kegiatan yang Dilaksanakan :

Pada triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan guna mendukung tercapainya indikator ini, yakni dengan melakukan pemeriksaan, verifikasi dan validasi terhadap seluruh bukti tagihan belanja untuk menentukan bahwa tagihan tersebut layak untuk dilakukan pembayaran. Dengan aktivitas tersebut diharapkan pengelolaan anggaran dapat dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku sehingga tidak ada temuan dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional baik internal maupun eksternal;

Persentase penyelesaian temuan BPK mendukung Misi Asta Cita ke-7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan Korupsi dan Narkoba”. Hal ini karena dengan adanya IKU ini dapat mendorong instansi pemerintah dalam hal ini Balai Besar KIPM Makassar untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta mematuhi penyelesaian temuan BPK tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IKU ini juga mendorong meningkatnya budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di lingkungan Balai Besar KIPM Makassar yaitu “Akuntabel” ASN bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh pengelola anggaran sebanyak 11 orang, yang terdiri dari :

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen;
- (3) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
- (4) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
- (6) Bendahara Penerimaan;
- (7) Bendahara Pengeluaran;
- (8) Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- (9) Verifikator Keuangan (3 orang);

Pada TW IV tahun 2025 terdapat kegiatan audit BPK berdasarkan Surat Pemberitahuan BPK nomor 184/B/S/DJPKN-IV/PPA.02/11/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan yang akan dilaksanakan selama 30 hari sejak tanggal 24 November s/d 31 Desember 2025. Adapun lokasi sampling audit di Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, NTT dan Kalimantan Barat. Provinsi Sulawesi Selatan tidak menjadi lokasi sampling audit tetapi mengumpulkan data Rekapitulasi Belanja Modal dan Belanja Barang Kontraktual TA 2025.

Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja 3987.EBA.994.002.0C dan 0H adalah sebesar Rp. 196.283.000,- yang terdiri dari :

- Layanan Perkantoran, Perawatan Kendaraan Bermotor semula Rp. 135.310.000,- menjadi 141.683.000,-;
- Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu anggaran sebesar Rp. 54.600.000,-

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025 telah direalisasikan anggaran Rp. 196.143.552,- atau 99.9% yang digunakan untuk Layanan perkantoran, Perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp. 141.564.319,- dan Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu sebesar Rp. 54.579.233,-, masih ada anggaran yang tidak teralisasi sebesar Rp 139.448,-

Akar Masalah

Belum optimalnya Sistem pengendalian internal keuangan terkait verifikasi berjenjang;

Rekomendasi rencana aksi

Melaksanakan rapat SPIP membahas verifikasi keuangan secara berjenjang;

Tindakanlanjutan Rekomendasi sebelumnya

Telah dilakukan verifikasi terhadap seluruh bukti tagihan belanja, dan dituangkan dalam lembar checklist;



Keg. Rapat Capaian Kinerja dan Kegiatan Verifikasi Keuangan

IK 11. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

SK.3 Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah an akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan									
IKU-11. Indeks Pprofesional ASN Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar									
Realisasi 2020 - 2025					2025			Renstra Balai Besar KIPM Makassar	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian terhadap target 2025
68,01	81,44	82,23	90,27	90,78	82	87,97	107,28	82	107,28

Menurut UU No 20 Tahun 2023 tentang Apartur Sipil Negara, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
 - c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Target Tahunan IP ASN Tahun 2025 adalah 82 dengan periode pelaporan Semester I nilai target 81 dan Semester II nilai target 82.

Nilai Realisasi IP ASN tahun 2025 adalah **87.97**

Perbandingan Nilai IP ASN Tahun 2024 (90,78) dengan Tahun 2025 (87.97) **terjadi penurunan** senilai 2.81. Hal ini disebabkan jumlah pegawai dan Pendidikan serta adanya mutasi keluar/mutasi masuk dengan komposisi yang berbeda antara tahun 2024 dan tahun 2025

Adapun data pegawai mutasi masuk dan mutasi keluar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Nama	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Pendidikan
1	Abdul Mubarak Azis		2025	S1
2	Anwar		2025	S2
3	Hasbullah		2025	S1
4	Rosdiana	2025		D3
5	Rahma Tenri Aben	2025		S2
6	Andi Muhammad Haedar	2025		SLTA
7	Erwin Wijaya	2025		SLTA

Dengan keterbatasan anggaran, TIM Kepegawaian Balai Besar KIPM Makassar berupaya melakukan pengembangan kompetensi ASN dengan Optimalisasi teknologi, perencanaan strategis dan kolaborasi.

❖ Pemanfaatan sumber daya internal :

1. Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU yang dilaksanakan secara daring dengan narasumber Inspektur Mutu Balai Besar KIPM Makassar
2. Bincang Inspiratif Pemaparan Pedoman Teknis Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan dengan narasumber Inspektur Mutu Balai Besar KIPM Makassar
3. Bincang Inspiratif : "Pembuatan Multi-Factor Authentication (MFA) pada SIASN" dengan Narasumber Ketua TIM Kerja Dukungan Manajerial
4. Bincang Inspiratif Persamaan persepsi dalam pengisian ceklis pada kegiatan Sertifikasi CBIB. Kegiatan diikuti oleh seluruh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu Badan Mutu KKP Makassar.
5. Sharing Session Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penerbitan SMKHP diikuti oleh pegawai teknis BPPMHKP Makassar dengan Narasumber Inspektur Mutu Balai Besar KIPM Makassar

6. Refresment Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi SNI ISO/IEC 17020:2012 dan dan SNI ISO/IEC 17020:2012 Di Badan Mutu Kkp Makassar.

❖ Optimalisasi teknologi

1. Penyusunan Arsip Dinamis diikuti oleh 2 ASN
2. Pengembangan Kompetensi SDM Kearsipan diikuti oleh 3 ASN
3. Implementing Quality Management System ISO 9001:2015 diikuti oleh 20 ASN
4. Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional diikuti oleh 24 ASN
5. Coretax bagi Instansi Pemerintah: Pembuatan Bukti Potong, Pembayaran dan Pelaporan diikuti oleh 1 orang ASN
6. Strategi menghadapi pemeriksaan pajak terkait transfer pricing untuk perusahaan PMA diikuti oleh 1 orang ASN
7. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi diikuti oleh 1 orang ASN
8. Yuk Kenalan dengan ISO 17065 2012 diikuti oleh 4 orang ASN
9. NgoMik #10 Evaluating Culture Media Performance as per ISO 11133 2014 diikuti oleh 7 orang ASN
10. Coretax Instansi Pemerintah pada Satker di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diikuti oleh 13 orang ASN
11. Penilaian Usul Musnah Tahun 2025 diikuti oleh 1 orang ASN
12. Sosialisasi Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) diikuti oleh 9 orang ASN
13. Fleksibel Skills diikuti oleh 10 orang ASN
14. Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realisasi Capaian Output TA 2025 diikuti oleh 1 orang ASN
15. Sosialisasi Implementasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional diikuti oleh 5 orang ASN
16. Pengelolaan Konflik Kepentingan diikuti oleh 5 orang ASN
17. Kebijakan Pengembangan Budaya Udang Nasional diikuti oleh 6 orang ASN

18. Pengelolaan Arsip dalam rangka mewujudkan transparansi,akuntabilitas dan kepastian hukum diikuti oleh 1 orang ASN
19. Kebijakan Pengembangan Rumput Laut Nasional; Rencana Kerja 2025 - 2029 dan dampak kebijakan president diikuti oleh 13 orang ASN
20. Sosialisasi Kebijakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2025 diikuti oleh 2 orang ASN
21. Conformity Assessment Based on SNI ISO/IEC 17065:2012,SNI ISO/IEC 17067:2013,and SNI ISO/IEC TR 17026:2015 diikuti oleh 14 orang ASN
22. Produktivitas Kerja Bagi ASN diikuti oleh 3 orang ASN
23. Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik diikuti oleh 8 orang ASN
24. Uji Konfirmasi Bakteri Salmonella dengan Teknik PCR berdasarkan SNI 2332.11:2027 diikuti oleh 10 orang ASN
25. Pelatihan Pelayanan Publik diikuti oleh 2 orang ASN
26. Audit Technique om ISO 190112018 requirements diikuti oleh 2 orang ASN
27. Strategi Peningkatan Kualitas Inovasi Pelayanan Publik diikuti oleh 1 orang ASN
28. Sosialisasi Aplikasi Monev PBJ KKP diikuti oleh 9 orang ASN
29. Optimalisasi Workflow Pangan untuk Deteksi Patogen sesuai regulasi iso dengan teknologi Biokar dan Hygiena diikuti oleh 4 orang ASN
30. Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Triwulan I – 2025 diikuti oleh 1 orang ASN
31. Sosialisasi Permen KP Nomor 9 Tahun 2025 diikuti oleh 1 orang ASN
32. International Day for The Fight Againts Illegal Unreported and Unregulated Fishing 2025 diikuti oleh 1 orang ASN
33. Microlearning Mengenal dan Menghindari Gratifikasi diikuti oleh 1 orang ASN
34. Microlearning Pelayanan Prima diikuti oleh 1 orang ASN
35. Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran dalam Pengujian Molekuler diikuti oleh 3 orang ASN

36. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) diikuti oleh 14 orang ASN
37. Pemeriksaan Parasit Anisakis sp secara mikroskopis diikuti oleh 3 orang ASN
38. Forum Keterbukaan Informasi Publik diikuti oleh 5 orang ASN
39. Pelatihan Evaluasi sertifikat kalibrasi timbangan sesuai dengan ISO 17025 yang diikuti oleh 2 orang ASN
40. Norovirus pada produk perikanan, Ancaman, Tantangan serta penanggulangannya yang diikuti oleh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu
41. Solusi Biosekuriti untuk tambak udang diikuti oleh 1 orang ASN
42. Quality Assurance in the seaweed value chain diikuti oleh 1 orang ASN
43. Penerapan SNI 9369:2025 wadah bersekat dari baja tahan karat untuk makanan diikuti oleh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu
44. Forum Kepegawaian Dan Sosialisasi Kode Etik Dan Perilaku Pegawai Lingkup Bppmhkp Tahun 2025 diikuti oleh 1 orang ASN
45. Penguatan Pemahaman Penjaminan Mutu Hasil
46. Perikanan melalui Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) diikuti oleh 1 orang ASN
47. Pembahasan daftar perika (PPD) komoditi rumput laut kering dan rumput laut koloid diikuti oleh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu
48. Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA Angkatan VII Tahun 2025 diikuti oleh Jumhana
49. Edukasi Perpajakan diikuti oleh 1 orang ASN
50. Kupas Tuntas Umur Simpan Produk Perikanan diikuti oleh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu
51. Meningkatkan Desain Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas diikuti oleh 2 orang ASN
52. Edukasi Perpajakan diikuti Kamdani

53. Pembentukan dan Pemeliharaan panelis terlatih sensori / organeleptik diikuti oleh 1 orang ASN
54. Pemahaman proses penanganan dan pengolahan rumput laut diikuti oleh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu
55. Penggunaan aplikasi Portal KKP bagi PPPK diikuti oleh 1 orang ASN
56. Growth Promotion Test as Microbiology iso 11133 diikuti oleh 13 orang ASN
57. Kupas Tuntas Soal Udang diikuti oleh 5 orang ASN
58. Penguatan sektor Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pembangunan ekonomi bali diikuti oleh 1 orang ASN
59. Radiation Awareness Dialogue on Aquatic diikuti oleh 8 orang ASN
60. Asistensi penilaian arsip usul musnah di lingkungan SKIPM Cirebon diikuti 2 orang ASN
61. Ketidakpastian pengukuran kualitatif dan Kuantitatif mikrobiologi diikuti oleh 12 orang ASN
62. Rakor Penyelamatan Arsip Kabinet Indonesia Maju dan Arsip Kemaritiman diikuti oleh 1 orang
63. Penanganan dan Pengelolaan Limbah Laboratorium diikuti oleh 1 orang ASN
64. Temu teknis sub jejaring Laboratorium pengujian pangan indonesia sektor Kelautan dan Perikanan diikuti oleh 2 ASN
65. ASEAN Training Workshop on Marine Biotoxin diikuti oleh 1 orang ASN
66. Sosialisasi CDIB untuk penerbitan SPDI diikuti oleh 1 orang ASN
67. Basic & teknik Analisa dengan Instrument Atomic Absorption Spectrophotometer diikuti oleh 15 orang ASN
68. Pemahaman Integrasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, dan SNI ISO/IEC 17020:2012 diikuti oleh 5 orang ASN
69. Pemahaman Good Laboratory Practices diikuti oleh 3 orang ASN
70. SCS_E-Certificate_Monthly Microbiology Webinar diikuti oleh 1 orang ASN

71. Pemahaman Pengujian Proksimat (Kadar Air, Kadar Garam, dan Kadar Abu) pada Produk Hasil Perikanan diikuti oleh 11 orang ASN
72. Pemahaman Produksi Pakan serta Pengelolaannya dalam Mendukung Pembudidayaan Ikan diikuti oleh 14 orang ASN
73. Pemahaman Prinsip-prinsip Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), dan Jenis Obat Ikan dan Penggunaan yang Aman dan Efektif diikuti oleh 3 orang ASN
74. Seminar Diseminasi Hasil Laboratorium Acuan BUSPM diikuti oleh 2 orang ASN
75. Inovasi Produksi Pakan Alami Perikanan Budi Daya diikuti oleh 1 orang ASN
76. Forum Konsultasi Publik Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi yang dikecualikan KKP diikuti oleh 2 orang ASN
77. Budaya Kerja ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan diikuti oleh 2 orang ASN
78. Panduan Praktis Mengoptimalkan Pajak UMKM diikuti oleh 1 orang ASN
79. Peningkatan Produksi Udang Windu berbasis Ekosistem ISPIKANI diikuti oleh 8 orang ASN
80. FGD Pengembangan Budi Daya Rumput Laut diikuti oleh 7 orang ASN

❖ Perencanaan strategis dan kolaborasi :

1. Forum Peningkatan Kapasitas UMKM Pengolahan Hasil Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep sebagai narasumber
2. Bincang Inspiratif : “Strategi Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Cpib Kapal dengan narasumber dari Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer yaitu Ibu Dedeh Ratnasari, S.Pi, M.Si.
3. Badan Mutu KKP bersama Ditjen Bea dan Cukai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu (Disperindag), BPOM serta PT. Garuda Indonesia belum lama ini menyelenggarakan coaching clinic, serta diseminasi kemudahan ekspor produk perikanan bertajuk 'Peduli Mutu Bersama Dalam Mendukung Kemudahan Ekspor Bagi Pelaku Usaha Perikanan dan UMKP di Provinsi Bengkulu'

4. Bincang Inspiratif dengan tema "Penguatan Program Kerja Badan Mutu KKP dalam Menunjang Program Prioritas KKP". Narasumber kegiatan adalah Ibu Kepala Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP dan dimoderatori oleh Plt Kepala Badan Mutu KKP Makassar
5. Badan Mutu KKP Makassar mengikuti kegiatan Pelatihan Penanganan Gurita Yang Baik yang diselenggarakan oleh Sustainable Fisheries Partnership (SFP) berkolaborasi dengan PT. Prima Bahari Inti Lestari bertempat di Swiss Bellhotel Losari Makassar. Pada kesempatan tersebut Badan Mutu KKP Makassar menjadi narasumber kegiatan tersebut
6. Pemberdayaan Nelayan Kecil "Pelatihan Cpib Di Atas Kapal" Di Kab. Sinjai bersinergi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai
7. Bincang Inspiratif Pelayanan Publik Dengan Tema "Menuju Pelayanan Publik Yang Professional & Unggul (Professional & Excellent Service) bersinergi dengan Bank Negara Indonesia diikuti pegawai Balai Besar KIPM Makassar
8. Seminar Diseminasi Pakan Pungsional Pada Budidaya Udang oleh PT. Grobest Indomakmur bertempat di Hotel Rinra Makassar diikuti Ketua Tim Kerja Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
9. Pelatihan HACCP Dasar bekerjasama dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Bincang Inspiratif Pelayanan Publik Dengan Tema Service Excelent bersinergi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) diikuti pegawai Balai Besar KIPM Makassar
11. Badan Mutu KKP Makassar mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Perbenihan Udang di Aula Lt. 2 Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin yang diselenggarakan oleh Pusat Kolaborasi Riset Shrimp Technology Badan Riset dan Inovasi Nasional – Universitas Hasanuddin

12. Sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Pelayanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Inspektur Mutu Badan Mutu KKP Makassar
13. Sharing session Pelayanan publik ramah kelompok rentan dengan narasumber dari Balla inklusi
14. HACCP Dasar diikuti oleh 1 orang ASN
15. Badan Mutu KKP Makassar berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi dan Penataran Peserta Magang Batch III yang diselenggarakan oleh Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros
16. Badan Mutu KKP Makassar gelar forum konsultasi publik, dengan narasumber dari Badan Mutu KKP Makassar, Dinas Perikanan Maros dan Bank Papua cabang Makassar
17. Badan Mutu KKP Makassar menjadi salah satu narasumber kegiatan penyadartahuan publik dalam Peringatan Hari Ikan Nasional dengan tema “Konsumen Cerdas : Penuhi Gizi, Laut Lestari” yang diselenggarakan oleh Marine Buddies Makassar
18. Dinas Perikanan Kabupaten Bone bekerja sama dengan Badan Mutu KKP Makassar melaksanakan kegiatan Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal sebagai narasumber
19. Badan Mutu KKP Makassar bekerja sama dengan Bank Papua Cab.Makassar melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pada level UMKM dan Supplier sebagai narasumber
20. Badan Mutu KKP Makassar mengikuti kegiatan Sosialisasi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan Certificate of Admissibility (CoA) Perikanan Tangkap yang dilaksanakan oleh Pelabuhan Perikanan Untia
21. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Makassar menghadiri kegiatan Forum Ilmiah Kepiting Berkelanjutan dengan tema “Masa Depan Kepiting: Inovasi Keberlanjutan” yang diselenggarakan oleh Pusat

- Kolaborasi Riset Kepiting Berkelanjutan Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
22. Dinas Perikanan Kabupaten Bone bekerja sama dengan Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Makassar melaksanakan kegiatan Sosialisasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal
 23. Badan Mutu KKP Makassar mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Pusat Kolaborasi Riset Shrimp Tech Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan Universitas Hasanudin bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros
 24. Badan Mutu KKP Makassar menjalin kerja sama dengan lembaga Balla Inklusi dengan kegiatan pelayanan publik yang ramah bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas

Tahun 2025, Aparatur Sipil Negara Balai Besar KIPM Makassar telah melakukan Uji kompetensi kenaikan pangkat/jabatan, Uji kompetensi manajerial, Uji kompetensi calon pegawai tugas belajar dan Ujian dinas kenaikan pangkat seperti tabel berikut ini :

No	Uraian	Nama Pegawai
1	Uji kompetensi kenaikan pangkat/jabatan	– Muhammad Irfan Rais – Sri Rahayu Setyaningsih – Wara Zakaria Sapan – Patmawati M – Taufiq – Suprianto
2	Uji kompetensi kenaikan alih jenjang	Arfiandi
3	Uji kompetensi manajerial	– Junaedi – Rosdiana

4	Uji kompetensi calon pegawai tugas belajar	Mohammad Zamrud
5	Ujian dinas kenaikan pangkat	Niza Mahaputri Zainal

Peningkatan kompetensi menjadikan budaya kerja berupa sikap dan perilaku Aparatur Sipil negara untuk melaksanakan tugas sesuai pelatihan/keterampilan yang telah dimiliki. Pelatihan yang dilaksanakan akan menambah wawasan yang akan merubah pola pikir dalam menyesuaikan diri dengan perubahan jangka pendek dan jangka panjang sehingga bisa menangani masalah atau tugas yang tidak terduga secara efektif.

Indikator Nilai IP ASN tercapai selain pengembangan kompetensi sebagai berikut :

1. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN BBKIPM Makassar, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 = -
 - b. Pendidikan S-2 :
 - S2 Keahlian : 7 orang :
 1. Ir Habrin Yake, M.M
 2. Andi Rahmانيar Dj, ST.,M.Si
 3. Kamaruddin, S.P, M.S
 4. Kamdani, S.Pi, M.M
 5. Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P
 6. Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi., M.Sc
 7. Fatima Tayang, S.St.Pi, MM
 - S2 Pelaksana : 1 orang
 1. Rahma Tenri Aben

c. Pendidikan S-1 /D-IV :

- S-1 /D-IV Keahlian : 12 orang
 1. Waode Suharni, S.Pi
 2. Bakhtiar, S.Pi
 3. Moh. Fahri, S. Pi
 4. Wara Zakaria Sapan, A.PI
 5. Muhammad Irfan Rais, S.Pi
 6. Patmawati M, S.St.Pi
 7. Erlina Kadang, S.Kom
 8. Junaedi, S.E
 9. Muzakkir, S.Pi
 10. Taufiq, S.PKP
 11. Anugra Ekayani A. Lantara Pawiseang, S.St.Pi
 12. Suprianto, A.Md.Pi., S.Pi

- S-1 /D-IV Pengawas : 1 orang
 1. Karwit, S.Pi

- S-1 /D-IV Keterampilan : 1 orang
 1. Arfiandi

- S-1 /D-IV Pelaksana : 5 orang :
 1. Darmawan, SP
 2. Hapi, SAP
 3. Muhammad Arman, SAP
 4. Arniyanti
 5. Oktovianus, SAP

d. Pendidikan D-III ;

– D-III Keterampilan : 4 orang

1. Idawati Barung
2. Rosdiana
3. Zulyana Arlina
4. Ardiana

- D-III Pelaksana : 1 orang

1. Jumhana

e. SLTA :

– SLTA Keterampilan : 2 orang

1. Erwin Wijaya
2. Andi Muhammad Haedar

– SLTA Pelaksana : 3 orang

1. Halim
2. Niza Mahaputri Zainal
3. Irma Syam

2. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

Predikat Kinerja yang diperoleh ASN BBKIPM Makassar pada tahun 2024 adalah BAIK dan SANGAT BAIK

- Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir Aparatur Sipil Negara Lingkup Balai Besar KIPM Makassar tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sehingga semua ASN mendapatkan nilai 5

Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

Sebagai perbandingan nilai IP ASN dengan beberapa UPT lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat disajikan sebagai berikut :

- Balai Besar KIPM Jakarta I dengan nilai IP ASN 84.89 dengan kategori tinggi maka untuk perbandingan ini berarti Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai IP ASN 87.97 masih lebih tinggi dengan selisih 3.08

BALAI BESAR KIPM JAKARTA I	16	2312	9248%	3177	79.42%	25	83.33%	5	100%	84.89	TINGGI
----------------------------	----	------	-------	------	--------	----	--------	---	------	-------	--------

- Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Pesisir dan Pulau Pulau kecil dengan nilai IP ASN 83.63 dengan kategori tinggi maka untuk perbandingan ini berarti Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai IP ASN 87.97 masih lebih tinggi dengan selisih 4.34



DIREKTORAT PESIR DAN PULAU-PULAU KECIL	44	2352	9408%	2830	7232%	2591	8637%	5	100%	8336	TINGGI
---	----	------	-------	------	-------	------	-------	---	------	------	--------

Sumber data : <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/unker/1296> pertanggal 4 Januari 2026

Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN

Balai Besar KIPM Makassar, mempunyai SDM Aparatur Sipil Negara sebanyak 37 Pegawai yang sebelumnya 34 pegawai, pegawai mutasi masuk sebanyak 3 orang yang UPT sebelumnya Adalah Stasiun KIPM Palu, Stasiun KIPM Ternate dan Stasiun KIPM Kendari

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Subbagian Umum	1
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
4.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir	1
7.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	3
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1
9.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2
10.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
11.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	1
12.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	1
13.	Pelaksana	10
	Total	37



Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum , Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2024 :

- Anggaran Awal sebesar Rp. 77.285.000
- Anggaran Setelah revisi sebesar Rp. 73.833.000
- Realisasi Rp. 73.434.365 (99.46%)

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum , Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2025 :

- Anggaran Awal sebesar Rp. 18.064.000
- Anggaran setelah blokir Rp. 0

Triwulan IV

- Anggaran Setelah Blokir sebesar Rp.8.600.000
- Realisasi Rp. 8.542.000 (99.32%)

Anggaran tahun 2025 sebesar Rp 8.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp 8.542.000,- yang tidak terealisasi sebesar Rp 58.000,-.

Jika dibandingkan tahun 2024 pagu anggaran sebesar Rp 73.833.000 dan realisasi sebesar Rp 73.434.365,-atau 99,46 %.

Pada indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai Besar KIPM Makassar memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita, dengan meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara akan meningkatkan kualitas Sumber daya manusia dalam pelayanan publik.

Kompetensi ASN Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar bermanfaat bagi kemajuan organisasi dan individu, IP ASN merupakan area pengembangan diri dalam Upaya peningkatan profesionalitas sebagai ASN dan IP ASN sebagai kontrol sosial agar ASN bertindak professional dalam kaitan pelayanan publik.

Akar masalah

- Potensi permasalahan dapat timbul dengan adanya pengurangan alokasi anggaran yang dapat berdampak pada peningkatan kompetensi pegawai khususnya untuk pelatihan yang membutuhkan pertemuan klasikal dan praktek langsung.
- Kesadaran ASN dalam mengentry data sertifikat pada aplikasi MyASN tepat waktu perlu ditingkatkan

Rekomendasi rencana aksi

- Aparatur Sipil Negara mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi secara luring dan daring
- Pelatihan dengan pemanfaatan Sumberdaya internal

Tindaklanjut Rekomendasi sebelumnya

- Aparatur Sipil Negara telah mengikuti Pelatihan secara daring dengan dibuktikan nilai IP ASN yang meningkat.
- Penyampaian update sertifikat pada aplikasi MyASN di Whatsapp group



IP ASN 2025												
Dashboard Evaluasi Laporan FAQ 07 JUN 2025												
1	INSTRUMENT BOKOR KEMERDEKAAN DAN KEMERDEKAAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	65	23,08	92,32%	24,95	72,86%	25	93,33%	5	100%	92,33	TRACED
2	PROSEDUR PELAKSANAAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	28	20,88	92,32%	31,88	79,17%	26	93,33%	5	100%	94,88	TRACED
3	PROSEDUR PELAKSANAAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	27	20,88	92,32%	31,88	84,73%	26	93,33%	5	100%	87,22	TRACED
4	PROSEDUR PELAKSANAAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	28	21,88	95,64%	34,68	88,46%	26	93,33%	5	100%	86,68	TRACED
5	SK.3 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	46	23,12	92,40%	30,77	78,42%	26	93,33%	5	100%	94,83	TRACED
6	SK.3 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	27	22,7	96,6%	35	87,0%	25,27	94,22%	5	100%	87,97	TRACED
7	SK.3 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	30	23,8	84%	29,06	77,85%	26	93,33%	5	100%	82,86	TRACED
8	SK.3 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	48	22,01	92,88%	32,84	85,88%	26	93,33%	5	100%	90,48	TRACED
9	SK.3 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	25	22,86	92,84%	35	87,0%	26	93,33%	5	100%	86,86	TRACED
10	SK.3 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	46	21,88	87,73%	34,68	88,46%	26	93,33%	5	100%	88,38	TRACED
11	SK.3 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	25	23	92%	31	72%	26	93,33%	5	100%	84	TRACED
12	SK.3 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	40	23,81	94,44%	31	72%	23,81	75,7%	5	100%	92,22	TRACED

IK 12. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

SK.3 Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan									
IKU-12. Penilaian MANDiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar									
Realisasi 2020 - 2025					2025			Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian terhadap target 2025
91,93	98	95,3	87,13	83,8	86	90	104,65	86	104,65

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.



Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) parameter yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 %

Pada aspek ini menyampaikan dokumen perencanaan yang berupa :

Renstra 2025-2029, Renja, RKAKL dan Rencana Aksi.

Yang sudah dilaksanakan sampai triwulan IV tahun 2025 yaitu : penyusunan RKAKL dan Rencana Aksi Renja dan Renstra mencapai 30 %.

2. Pengukuran Kinerja dengan Bobot 30 %

Pengukuran Kinerja ini telah terselesaikan Pada Aspek ini menyampaikan dokumen pengukuran kinerja yang berupa :

Penyusunan Manual IKU tahun 2025 yang telah diselesaikan pada triwulan I terealisasi mencapai 30%

3. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15 %

Pada Aspek Pelaporan Kinerja tahun 2025, dokumen yang harus disiapkan adalah Laporan Kinerja Triwulan I , Triwulan II, Triwulan III, triwulan IV dan Tahunan.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025 telah disampaikan Laporan Kinerja Triwulan I , II, III, dan IV sehingga realisasi tercapai 15 %

4. Evaluasi Kinerja dengan Bobot 25 %

Evaluasi kinerja dilaksanakan secara internal oleh Balai Besar KIPM Makassar dan secara eksternal oleh Sekretariat BPPMHKP, Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat Jenderal secara berkala (triwulanan). Evaluasi secara internal dilakukan oleh Tim Balai Besar KIPM Makassar sebelum dilakukan penyusunan Laporan Kinerja, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan setelah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja . Hasil akhir dari evaluasi eksternal berupa pengesahan nilai NPSS dalam Aplikasi Kinerjaku yang dapat dijadikan dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan evaluasi kinerja secara internal dan eksternal realisasi tercapai 25 % .

Bobot realisasi capaian :

$$\begin{aligned} &= \text{Parameter 1 (30 \%)} + \text{parameter 2 (30 \%)} + \text{parameter 3 (15 \%)} + \text{parameter 4 (25 \%)} \\ &= 100 \%. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi capaian} &= \frac{\text{Bobot realisasi capaian}}{\text{Target}} \times 100 \% \\ &= \frac{100}{86} \times 100 \\ &= 116,27 \% \end{aligned}$$

Namun dilihat dari Aplikasi Kinerjaku dan Surat Kepala Badan BPPMHKP Nomor Surat 1/BPPMHKP.1/RC.610/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP

TA. 2025 UPT lingkup BPPMHKP, terdapat perbedaan hasil penilaian yaitu 90 (A), dengan rincian sebagai berikut :

No	Parameter	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	27
2.	Pengukuran Kinerja	30	27
3	Pelaporan Kinerja	15	13,5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,5
Jumlah			90

Dengan demikian untuk kinerja AKIP diperlukan upaya peningkatan kinerja pada semua parameter kinerja.

Adapun pencapaian indikator ini tahun 2025 yaitu 90 (A) ini melebihi dari target 86 sehingga capaian kinerja ini 104,65 %. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu 102.19 % maka tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2.46 %.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2025 adalah :

1. Telah dilakukan rapat sesuai dengan memorandum Balai Besar KIPM Makassar Nomor B.14/BBKIPM.MKS/TU.330/III/2025 pada tanggal 5 Maret perihal penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 17 (tujuh belas) Indikator kinerja
2. Mengikuti Launching Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP sesuai Surat Sekjen Biro Perencanaan nomor B.1694/SK.1/RC.610/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 memberikan pemahaman dan kapasitas aparatur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah (SAKIP) serta Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029.
3. Tim SAKIP telah melakukan peningkatan kompetensi dengan mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh KKP melalui aplikasi E-Milia sesuai Surat Tugas Nomor B.1592/BBKIPM.MKS/KP.440/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025 jumlah pegawai 35 Orang

4. Telah dilaksanakan optimalisasi capaian kegiatan dan dilakukan penginputan pada aplikasi SAKTI dengan penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar 49.16 %
5. Telah melakukan penginputan data dukung rencana aksi triwulan III pada aplikasi kinerjaku berupa pagu anggaran yang mendukung setiap indikator, realisasi anggaran, masalah, rekomendasi dan tindaklanjut dari rekomendasi sebelumnya, penginputan data dukung tersebut dilakukan setiap triwulanan.
6. Tanggal 13 Oktober 2025 finalisasi Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025-2029.
7. Tanggal 28 November 2025 telah melakukan perbaikan LKE pada Aplikasi Kinerja untuk Penilaian Mandiri SAKIP

Penilaian Mandiri SAKIP mendukung misi Asta Cita ke 7 yaitu “ Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini disebabkan karena dengan adanya penilaian mandiri sakip dapat meningkatkan output dari program kegiatan yang terdapat dalam Tugas dan Fungsi Balai Besar KIPM Makasar.

IKU ini mendukung terciptanya budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu “Akuntabel” ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, hal ini disebabkan karena setiap pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi dipertanggungjawabkan secara tertulis dan disertai dengan dokumentasi kegiatan yang detail dan lengkap.

Untuk pemanfaatan melaksanakan Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 42.795.000 yang mengalami blokir sebanyak 100 %. jika dibandingkan pemanfaatan anggaran tahun 2024 dengan pagu Rp 38.668.000,- teralisasi anggaran sebesar sebesar Rp 38. 655.199 atau 99.96 %

Untuk mendukung tercapainya IKU ini didukung SDM sebanyak 7 orang terdiri dari Kasubbag Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Fungsional APK APBN Madya, APK APBN Muda, APK APBN Pertama, Staf Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran)

Akar Masalah

Potensi masalah dapat terjadi jika monitoring terhadap capaian kegiatan tidak berjalan optimal

Rekomendasi rencana aksi

Melakukan monitoring output kegiatan dan realisasi anggaran

Tindaklanjuti Rekomendasi sebelumnya

Briefing personil dukungan manajerial terkait percepatan penyerapan anggaran tanggal 22 Oktober 2025;

IK 13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar

SK.3 Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan									
IKU-13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar									
Realisasi 2020 - 2025					2025			Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian terhadap target 2025
82	65	100	100	100	85	100	117,65	85	117,65

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan

kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik;

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut;

Indikator Kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada Balai Besar KIPM Makassar berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s/d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Balai Besar KIPM Makassar yang menjadi obyek pengawasan, dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh unit kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan pada unit kerja}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2025 terdapat audit dari Inspektorat Jenderal KKP yang memberikan rekomendasi yang telah ditindak lanjuti 100%, sehingga realisasi indikator kinerja tahunan ini mencapai 100, atau dengan % capaian sebesar 117,65% yang sama-sama telah melewati target seperti pada periode tahun 2024.

Berikut Rekomendasi itjen hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 pada BPPMHKP Makassar.

Rekomendasi	Tindak Lanjut
Kepala BPPMHKP Makassar direkomendasikan untuk menyusun rencana aksi untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan Tahun 2025 kategori pelayanan prima, khususnya bagi aspek-aspek yang belum optimal, antara lain melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan atas SP;	TL 30 Juni s.d. 4 Juli 2025 Telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor B.1859/BBKIPM.MKS/TU. 210/VI/2024 tanggal 30 Juni 2025 perihal Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025, yang berisi Matriks Rencana Aksi Tindakan Perbaikan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025. Adapun Forum Konsultasi Publik atas SP BPPMHKP Makassar pada bulan Agustus 2025 TL 10 Juli 2025 Telah ditindaklanjuti dengan Laporan Monev Pelaksanaan SP yang memuat masukan dari SKM, namun laporan tersebut belum menganalisa atas seluruh 14 komponen Standar Pelayanan. TL 3 September 2025 Telah ditindaklanjuti dengan Laporan Pelaksanaan Reviu Standar Pelayanan Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2025



Kepala BPPMHKP Makassar direkomendasikan untuk menyusun rencana aksi untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan Tahun 2025 kategori pelayanan prima, khususnya bagi aspek-aspek yang belum optimal, antara lain mempublikasikan SP SIPPN	TL 30 Juni s.d. 4 Juli 2025 Telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Nomor B.1859/BBKIPM.MKS/TU. 210/VI/2024 tanggal 30 Juni 2025 perihal Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025, yang berisi Matriks Rencana Aksi Tindakan Perbaikan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025. 2. Penjelasan bahwa sampai dengan tanggal 3 Juli 2025, Website SIPPN KemenPAN RB belum dapat diakses, beserta bukti postingan KemenPAN RB pada akun instagram @pelayanan.publik.
Kepala BPPMHKP Makassar direkomendasikan untuk menyusun rencana aksi untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan Tahun 2025 kategori pelayanan prima, khususnya bagi aspek-aspek yang belum optimal, antara lain pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik yang belum dilakukan secara harian dan detail/sangat lengkap	<i>Kurang:</i> <i>Bukti pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik yaitu jumlah sertifikat yang terbit setiap harinya dan diposting secara harian dan detail/sangat lengkap</i> TL 30 Juni s.d. 4 Juli 2025 Telah ditindaklanjuti dengan: Surat Nomor B.1859/BBKIPM.MKS/TU. 210/VI/2024 tanggal 30 Juni 2025 perihal Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025, yang berisi Matriks Rencana Aksi Tindakan Perbaikan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025. TL 10 Juli 2025 Data dukung yang disampaikan belum seluruhnya sesuai, yaitu screenshot rekap penerbitan sertifikat dari aplikasi





	SIAPMUTU. Belum terdapat publikasi di media sosial atau website secara harian (minimal 7 hari) kepada pengguna jasa. TL 3 September 2025 Telah ditindaklanjuti dengan screenshot publikasi pelayanan di media social
Kepala BPPMHKP Makassar direkomendasikan untuk menyusun rencana aksi untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan Tahun 2025 kategori pelayanan prima, khususnya bagi aspek-aspek yang belum optimal, antara lain mengikutsertakan Inovasi "Si Jempol Jala Ekspor" dalam kompetisi	TL 30 Juni s.d. 4 Juli 2025 Telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Nomor B.1859/BBKIPM.MKS/TU. 210/VI/2024 tanggal 30 Juni 2025 perihal Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025, yang berisi Matriks Rencana Aksi Tindakan Perbaikan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025. 2. Surat Nomor B. 2346/BPPMHKP.1/HM.460/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 perihal Berita Acara Hasil Penilaian Proposal KIPP UPP Lingkup BPPMHKP Tahun 2025, yang didalamnya terdapat bukti keikutsertaan "Si Jempol Jala Ekspor" dalam kompetisi internal lingkup BPPMHKP

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan anggaran dari DIPA Tahun 2025 pada mata anggaran 3987.EBA.994.002.0A, 3987.EBA.994.002.0G dan 3987.EBA.994.002.0I, dengan pagu anggaran Rp.2.064.505.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.2.060.401.068,- atau 99,80% yang digunakan untuk belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, belanja honor output kegiatan,



belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 4.103.932,-

Jika dibandingkan alokasi anggaran pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 822.011.000,- maka terjadi peningkatan alokasi pagu yang signifikan yaitu sebesar 60,18%. Demikian pula dengan besaran persentase penggunaan anggaran jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang hanya mencapai 86,30%.

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 14 orang yang terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Pejabat Pengadaan 1 orang, Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang 1 orang, Pengurus BMN 1, Bendahara 2 orang, Bendahara Penerimaan Pembantu 1 orang, Staf KPA 2 orang, Staf PPK 3 orang.

Indikator kinerja ini jika tercapai maka akan mendukung keberhasilan program prioritas KKP maupun Program Prioritas Nasional Asta Cita. Indikator kinerja ini secara spesifik mendukung Program Prioritas Nasional Asta Cita ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”.

IKU ini juga mendorong meningkatnya budaya kerja Ber-AHLAK di lingkungan Balai Besar KIPM Makassar yaitu “Akuntabel” dimana ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.

Tercapainya target kinerja ini mencerminkan bahwa organisasi telah melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan dan standar yang berlaku sehingga dapat

dikatakan bahwa kegiatan dan anggaran telah dilaksanakan dengan akuntabel dan tepat waktu.

Aspek pemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan IKU ini yaitu memberikan informasi mengenai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, sehingga dapat mengambil tindakan dan Keputusan secara cepat, tepat dan akurat.

Akar Masalah

Potensi masalah kurang cermatnya pengelola kegiatan dan anggaran dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan itjen.

Rekomendasi rencana aksi

- Operator SIDAK melakukan pemantauan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan Itjen secara berkala.

Tindaklanjuti Rekomendasi sebelumnya

Telah dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan Itjen pada aplikasi SIDAK periode Triwulan IV Tahun 2025.



IK 14. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

SK.3 Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan										
IKU-14. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar										
Realisasi 2020 - 2025					2025			Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian terhadap target 2025	
-	-	-	-	-	76	100	131,58	76	131,58	

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai

pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Anggaran untuk RUP paket pengadaan barang dan jasa hingga akhir tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 3.242.871. 000,-. Untuk menghitung persentase capaian rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%) menggunakan rumus sebagai berikut :

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SiRUP

$$= \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 3.242.871. 000}}{\text{Rp. 3.242.871. 000}} \times 100\% = 100 \%$$

Realisasi IKU pada akhir tahun 2025 adalah sebesar 100 % dari target 76 % atau capaiannya sebesar **131,57 %**

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam aplikasi SiRUP pada tanggal 12 Mei 2025;
2. Mengikuti bimbingan/ diskusi terkait Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)) yang dipandu oleh Kepala Sub bagian Umum/ Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada hari Senin, 19 Juni 2025;

3. Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam aplikasi SIRUP pada tanggal 4 Agustus 2025;;
4. Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam aplikasi SIRUP pada tanggal 24 s.d 25 November 2025;
5. Mengikuti Desiminasi Pencatatan RUP Atahun Anggaran 2026 Lingkup KKP tanggal 17 Desember 2025;

Untuk melaksanakan program kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/ Jasa yang mudah diakses masyarakat, akuntabel dan transparan pada instansi pemerintah khususnya lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka perlu disusun Rencana Umum Pengadaan berbasis aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berkaitan dengan hal tersebut Balai Besar KIPM Makassar sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah menyusun Rencana Umum Pengadaan yang diupload di aplikasi SIRUP. Pada triwulan II dan triwulan IV telah dilakukan revisi kegiatan dan anggaran sehingga Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/ Jasa perlu menyesuaikan, diinput serta diumumkan ke dalam portal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Pada tahun anggaran 2025 nilai paket pengadaan barang dan jasa Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah mengalami perubahan (revisi) menjadi Rp. 3.241.329.000,-.. Keadaan dan posisi realisasi RUP sebagaimana pada tabel berikut:

No.	Kode	Nama Program	Pagu Program (Rp.)	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu terumumkan (Rp.)	Selish (Rp.)	Persentase
1	EC	Program dan Nilai Tambah Daya Saing Industri	403,122,000	195,558,000	181,118,000	14,440,000	92.62 %



2	WA	Program Dukungan Manajemen	3,213,500,000	3,061,753,000	3,061,753,000	0	100 %
---	----	----------------------------	---------------	---------------	---------------	---	-------

Nilai Pagu Pengadaan Rp. 195.558.000,- yang selisih dengan Pagu terumumkan sebesar Rp. 14.440.000,- dalam posisi Blokir Anggaran (*Look Pagu*) dan tidak bisa diumumkan di RUP.

No	Kode	Nama Program	Pagu Program	Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Persentase
1	EC	Program Hutan Tanaman dan Sagu Sang Intai	401,122,000	195,558,000	195,558,000	14,440,000	93.62%
2	WA	Program Dukungan Manajemen	3,213,500,000	3,061,753,000	3,061,753,000	0	100.00%

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Rencana Umum Pengadaan (RUP) Balai Besar KIPM Makassar yang telah diinput ke dalam aplikasi SIRUP LKPP.go.id yang dilaksanakan oleh tim Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP persentase capaian IKU ini adalah 100 % (sumber dari aplikasi SIRUP)

Adapun sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja ini selama tahun 2025 sebanyak 7 orang yang terdiri dari: KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Operator SIRUP dan Operator SAKTI (Modul Persediaan, Aset Tetap dan GLP).

Pada tahun 2025 alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebagai berikut :

- TW I sebesar Rp. 65.568.000,-
- TW II sebesar Rp. 120.504.000,-
- TW III sebesar Rp. 120.504.000,-
- TW IV sebesar Rp. 110.652.000,-



Realisasi anggaran hingga akhir tahun 2025 sebesar Rp. 110.650.000,- dengan persentase 99,99 %.

Indikator Kinerja Utama ini tidak bisa dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2024 karena IKU ini merupakan IKU baru di Tahun Anggaran 2025.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) berbasis Web (*Web based*) mendukung misi Asta Cita ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini disebabkan karena dengan adanya aplikasi SiRUP maka transparansi pada pengelolaan sistem pemerintahan dapat terlaksana dengan baik, masyarakat dapat secara langsung mengakses pengadaan barang dan jasa.

Manfaatnya sebagai berikut :

1. SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (*Web based*) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP
2. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya.
3. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.
4. Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SiRUP pada website LKPP dengan alamat : inaproc.lkpp.go.id/sirup;
5. Untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi Balai Besar KIPM Makassar dalam pengadaan barang/ jasa

Akar Masalah

Potensi masalah : Update perubahan kegiatan dan anggaran (revisi) belanja pengadaan barang dan jasa tidak tersampaikan ke bagian admin pengelola aplikasi SIRUP.

Rekoemndasi rencana aksi

Setiap perubahan kegiatan dan anggaran pengadaan (revisi) disampaikan atau dikomunikasikan dengan pengelola aplikasi SIRUP

Tindakanlanjut Rekomendasi sebelumnya

Operator telah menginput data kegiatan dan anggaran dalam portal SIRUP.go.id dengan cermat dan lebih teliti sehingga nilai paket pengadaan yang diinput sesuai dengan nilai paket yang terumumkan

IK 15. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

SK.3 Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah an akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan									
IKU-15. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar									
Realisasi 2020 - 2025					2025			Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian terhadap target 2025
-	-	1	-	-	75	75,51	100,68	75	100,68

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen

pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa untuk terwujudnya birokrasi yang berdaya saing, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima, perlu melakukan pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja di instansi pemerintah;

Balai Besar KIPM Makassar telah menyandang predikat WBK sejak tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2018. Untuk mempertahankan predikat tersebut, maka Balai Besar KIPM Makassar harus konsisten dalam penerapannya khususnya penanaman nilai-nilai integritas kepada seluruh jajaran pegawai Balai Besar KIPM Makassar beserta *stakeholder* yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

Sesuai surat Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor B.360/BPPMHKP.1/OT.720/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 Hal Persiapan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan PPMHKP Tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar bersama 4 UPT lainnya ditetapkan sebagai unit kerja yang akan dilakukan penilaian implementasi WBK dan WBBM oleh TPI (Tim Penilai Internal) KKP Tahun 2025-2026;

Target indikator kinerja ini bersifat tahunan, sampai dengan triwulan IV tahun 2025 telah diperoleh hasil penilaian dari BPPMHKP. Berdasarkan penilaian dari tim penilai internal BPPMHKP diperoleh nilai total 75,51 atau 100,25% dari target, yang terdiri dari komponen pengungkit 37,16 dan komponen hasil 38,03.

Kegiatan yang Dilaksanakan :

Pada tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan sebagai wujud implementasi zona integritas WBK pada Balai Besar KIPM Makassar, diantaranya adalah :

- 1) Pertemuan pembahasan pemenuhan dokumen penerapan WBK pada tanggal 20 Februari 2025;
- 2) Penyiapan dokumen penerapan WBK oleh masing-masing penanggung jawab unsur;
- 3) Penetapan tim kerja pembangunan WBK sesuai surat tugas Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar Nomor B.325/BBKIPM.MKS/OP.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025;
- 4) Pemenuhan kepatuhan penyampaian LHKPN sebanyak 8 orang dan SPT Tahunan sebanyak 37 orang;
- 5) Penandatanganan pakta integritas untuk seluruh pegawai (ASN, PPNP dan PJLP);
- 6) Penerbitan surat tugas dengan mencantumkan himbauan tidak melakukan KKN saat bertugas dan penyampaian melalui WAG pegawai dan pelaku usaha;
- 7) Penerbitan surat dan memorandum himbauan tidak menerima gratifikasi pada momen hari raya keagamaan dan penyampaian melalui WAG pegawai dan pelaku usaha;
- 8) Penandatanganan berita acara tuntas pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada tanggal 25 Maret 2025;
- 9) Melakukan bincang inspiratif bertema pengendalian gratifikasi yang diikuti oleh seluruh pegawai pada tanggal 13 Maret 2025 dengan nara sumber Mohammad Zamrud, S.Pi., MP;

- 10) Pemenuhan fasilitas pelayanan publik berupa perbaikan neon box, perbaikan running text, dan pengaktifan announcement menjaga integritas);
- 11) Verifikasi dokumen penerapan zona integritas WBK masing-masing unsur oleh tim sekretariat :
 - Unsur manajemen perubahan (1) dilakukan verifikasi pada tanggal 30 April 2025;
 - Unsur penataan tata laksana (2) telah diverifikasi pada tanggal 11 Juni 2025;
 - Unsur penataan sistem manajemen SDM aparatur (3) telah diverifikasi pada tanggal 17 April 2025;
 - Unsur penguatan akuntabilitas, (4) telah dilakukan verifikasi pada tanggal 24 April 2025;
 - Unsur penguatan pengawasan (5) diverifikasi pada tanggal 17 April 2025;
 - Unsur peningkatan kualitas pelayanan publik (6) dilakukan verifikasi pada tanggal 22 Mei 2025;
- 12) Internalisasi/sosialisasi penerapan zona integritas WBK oleh masing-masing unsur pada kegiatan apel pagi :
 - Unsur manajemen perubahan (1) pada tanggal 21 April 2025;
 - Unsur penataan tata laksana (2) pada tanggal 28 April 2025;
 - Unsur penataan sistem manajemen SDM aparatur (3) tanggal 5 Mei 2025;
 - Unsur penguatan akuntabilitas, (4) pada tanggal 19 Mei 2025;
 - Unsur penguatan pengawasan (5) pada tanggal 26 Mei 2025;
 - Unsur peningkatan kualitas pelayanan publik (6) pada tanggal 16 Juni 2025;
 - Unsur penguatan hasil pada tanggal 23 Juni 2025;
- 13) Internalisasi/sosialisasi agen perubahan tentang reformasi birokrasi oleh tim agen perubahan Balai Besar KIPM Makassar pada tanggal 30 Juni 2025;
- 14) Instruksi dari pimpinan dan unsur manajerial terkait konsistensi penerapan zona integritas WBK untuk seluruh pegawai (ASN dan non ASN) lingkup Balai Besar KIPM Makassar dalam briefing petugas pelayanan pada tanggal 15 Mei 2025 dan 14 Juni 2025;
- 15) Penerbitan surat tugas dengan mencantumkan himbauan tidak melakukan KKN saat bertugas dan penyampaian melalui WAG pegawai dan pelaku usaha;

- 16) Penegasan tidak memberikan komisi atau keuntungan dari penyedia kepada pengelola anggaran dalam pengadaan barang dan jasa, serta penandatanganan pakta integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- 17) Pemenuhan fasilitas pelayanan publik berupa perbaikan fasilitas difabel, pengadaan papan informasi digital, dan penataan ruang pelayanan publik;
- 18) Verifikasi dokumen penerapan zona integritas WBK oleh tim sekretariat WBK;
- 19) Melaksanakan apel pagi setiap hari Senin yang dipimpin oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar atau pejabat lain yang ditunjuk. Pada apel pagi tersebut disampaikan himbauan penerapan nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai, penerapan nilai-nilai kebangsaan dan internalisasi ASN Ber-AKHLAK;
- 20) Pada tanggal 7 Juli 2025, dilaksanakan internalisasi pola pikir dan budaya kerja seluruh pegawai oleh tim agen perubahan, yang dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada pegawai teladan periode semester I tahun 2025;
- 21) Tanggal 14 Juli 2025 telah dilaksanakan kegiatan bincang inspiratif dengan tema pelayanan prima bekerjasama dengan PT. BNI (Persero) Cabang Makassar. Pada momen tersebut dipaparkan tata cara melakukan melayani pelanggan, teknik berkomunikasi yang baik, etika penampilan dilanjutkan dengan praktek/simulasi serta diskusi dan tanya jawab;
- 22) Pada tanggal 14 Juli 2025 dilaksanakan internalisasi oleh tim agen perubahan dengan tema “Filosofi Shinkansen” yang merupakan sarana transportasi yang efisien, simbol kemajuan teknologi dan kebanggaan masyarakat Jepang, diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja seluruh pegawai;
- 23) Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Balai Besar KIPM Makassar, pada tanggal 16 Juli 2025 telah dilaksanakan briefing kepada petugas pelayanan dengan nara sumber (1) Ketua Tim Kerja Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan (2) Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Materi briefing terkait penerapan nilai-

nilai integritas, petugas pelayanan wajib memutakhirkan diri dengan regulasi yang sifatnya dinamis, memperbaiki kelemahan dalam pelayanan, penyajian data yang valid, etika dalam berkomunikasi, optimalkan penggunaan papan informasi digital, serta deklarasi konflik kepentingan,

- 24) Pada tanggal 17 Juli 2025, dilaksanakan penyusunan dokumen deklarasi konflik kepentingan oleh seluruh pegawai (ASN dan non ASN). Deklarasi konflik kepentingan tersebut berupa pernyataan dan daftar kepentingan pribadi pegawai yang ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan;
- 25) Tanggal 28 Juli 2025 dilaksanakan sosialisasi penerapan disiplin ASN oleh Kepala Subbagian Umum. Pada kesempatan tersebut dipaparkan regulasi yang berlaku dalam penegakan disiplin ASN dilanjutkan dengan tanya jawab;
- 26) Tanggal 4 Agustus 2025, dilaksanakan sosialisasi penerapan zona integritas WBK secara umum oleh ketua tim pembangunan zona integritas WBK pada Balai Besar KIPM Makassar, yang dilanjutkan dengan kuis dan tanya jawab;
- 27) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Balai Besar KIPM Makassar, pada tanggal 11 September 2025 dilakukan bincang inspiratif pelayanan prima yang diikuti oleh petugas pelayanan dan pegawai lainnya dengan nara sumber dari Bank Syariah Indonesia. Dalam even tersebut dipaparkan tata krama melayani pelanggan, teknik berkomunikasi yang baik, etika penampilan dilanjutkan dengan praktek/simulasi serta diskusi dan tanya jawab;
- 28) Penerbitan surat tugas dengan mencantumkan himbauan tidak melakukan KKN saat bertugas dan penyampaian melalui WAG pegawai dan pelaku usaha;
- 29) Penegakan tidak memberikan komisi atau keuntungan dari penyedia kepada pengelola anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta penandatanganan pakta integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa;

- 30) Pemenuhan fasilitas pelayanan publik berupa perbaikan fasilitas difabel dan kelompok rentan, pengadaan papan informasi digital, dan penataan ruang pelayanan publik;
- 31) Pemenuhan fasilitas pelayanan publik berupa penataan ruang pelayanan dan ruang tunggu, penataan papan informasi digital, dan pemasangan poster pengelolaan pengaduan;
- 32) Melaksanakan apel pagi setiap hari Senin yang dipimpin oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar atau pejabat lain yang ditunjuk. Pada apel pagi tersebut disampaikan himbauan penerapan nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai, penerapan nilai-nilai kebangsaan dan internalisasi ASN Ber-AKHLAK;
- 33) Guna meningkatkan kualitas pelayanan khususnya untuk pelanggan berkebutuhan khusus, pada tanggal 8 Oktober 2025 dilakukan sosialisasi “Etika Berinteraksi untuk Penyandang Disabilitas” dengan nara sumber dari Balla Inklusi Makassar yang diikuti oleh seluruh pegawai. Pada sosialisasi tersebut dipaparkan materi dan dipraktekkan teknik melayani pelanggan berkebutuhan khusus dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab untuk pendalaman terhadap materi yang disampaikan. Pada akhir sesi dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar KIPM Makassar dengan Balla Inklusi Makassar;
- 34) Pada bulan Oktober 2025 beberapa pegawai yang terpilih telah melakukan pengisian SPI (Survei Penilaian Integritas) yang dilaksanakan oleh KPK. Tujuan SPI tersebut adalah untuk memetakan risiko korupsi, mengukur tingkat integritas di instansi publik (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah), dan mendorong perbaikan sistem pencegahan korupsi agar pelayanan publik lebih bersih, transparan, dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi publik (pegawai, pengguna layanan, dan ahli);
- 35) Pada tanggal 14 Oktober 2025 telah dilakukan briefing bagi petugas pelayanan oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar yang diikuti oleh seluruh pegawai yang

bertugas dalam pelayanan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam briefing tersebut disampaikan langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan petugas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima serta menghindari adanya komplain dari pelanggan;

- 36) Pada tanggal 22 Oktober 2025 dilaksanakan briefing pegawai lingkup Dukungan Manajemen oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar. Tujuan dilaksanakannya briefing adalah untuk menyelaraskan pemahaman, memberikan instruksi atau arahan, meningkatkan motivasi kerja pegawai serta memastikan bahwa koordinasi di tingkat tim dukungan manajemen terjalin dengan baik guna mendukung kinerja organisasi;
- 37) Pada tanggal 3 November 2025 dilaksanakan internalisasi oleh tim agen perubahan dengan tema “Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja”. Pada internalisasi tersebut disampaikan pola pikir yang merupakan pergeseran cara pandang, sikap mental, dan keyakinan dasar seseorang atau organisasi untuk menjadi lebih konstruktif, adaptif, dan profesional, sementara perubahan budaya kerja diartikan sebagai transformasi nilai, kebiasaan, perilaku, dan praktik kerja kolektif dalam organisasi agar selaras dengan tujuan baru, yang keduanya sering kali dilakukan bersamaan untuk meningkatkan integritas, kinerja, dan pelayanan;
- 38) Pada tanggal 26 November 2025 dilakukan sosialisasi Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat BPPMHKP dengan nara sumber Inspektorat IV Inspektorat Jenderal KKP yang diikuti peserta dari UPT lingkup BPPMHKP. Balai Besar KIPKM Makassar mengikuti kegiatan tersebut secara daring. Dengan sosialisasi tersebut diharapkan seluruh pegawai lingkup BPPMHKP dapat memahami dan menerapkan kebijakan pengelolaan konflik dan pengendalian gratifikasi sesuai regulasi yang berlaku;
- 39) Pada bulan Desember 2025, Balai Besar KIPM Makassar telah melaksanakan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dengan sasaran 24 orang responden para

pengguna layanan. Survey tersebut bertujuan untuk memetakan persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan publik dan penerapan WBK pada Balai Besar KIPM Makassar. Hasil yang dicapai adalah (1) Nilai : 95,55; (2) Mutu Pelayanan : A; dan (3) Kinerja Unit Layanan : Sangat Setuju;

- 40) Pada tanggal 4 Desember 2025 Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan dengan tujuan untuk menyusun standar pelayanan serta momentum untuk memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan mutu dan keamanan hasil perikanan. Peserta dalam forum tersebut berasal dari instansi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja, unsur Pemerintah Daerah, akademisi, asosiasi usaha perikanan, LSM dan media massa;
- 41) Pada tanggal 22 Desember 2025 bertepatan dengan Hari Ibu, dilakukan sosialisasi oleh tim agen perubahan dengan tema “Disiplin dan Pengembangan Diri”. Pada sosialisasi disampaikan betapa pentingnya disiplin dan pengembangan diri guna menunjang kinerja organisasi. Tujuan disiplin dan pengembangan diri adalah untuk membangun kehidupan yang teratur, produktif, dan memuaskan dengan menciptakan kebiasaan baik, meningkatkan fokus, serta memperkuat karakter untuk mencapai tujuan hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, memperbaiki hubungan, dan membangun ketahanan diri menghadapi tantangan. Keduanya saling melengkapi, di mana disiplin menjadi fondasi untuk terus berkembang secara pribadi dan profesional, sementara pengembangan diri memberikan alat untuk memperkuat disiplin tersebut menuju kesuksesan;

Perhitungan nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebagai berikut :

- (1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;

- (2) Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
- (3) Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,50 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,00;
- (4) Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15,00;
- (5) Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal KKP;

Sumberdaya manusia yang terlibat dalam penerapan kinerja ini adalah seluruh pegawai lingkup Balai Besar KIPM Makassar sebanyak 60 orang, yang terdiri dari ASN (PNS 37 orang, PPPK 12 orang, PPPK Paruh Waktu 6 orang) dan non ASN 5 orang;

Alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja ini pada tahun 2025 semula sebesar Rp. 12.489.000,-, namun setelah adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah, anggarannya dialihkan menjadi Rp. 0,-. Anggaran untuk operasional zona integritas WBK menyatu dengan anggaran keperluan perkantoran.

Penerapan zona integritas WBK merupakan salah satu program prioritas nasional yang tergambar dalam misi Asta Cita ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini berarti Asta Cita ke 7 fokus pada peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang adil dan upaya berkelanjutan dalam memberantasan korupsi dan pemberantasan narkoba. Asta Cita ke 7 juga sejalan dengan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penyediaan makanan dan

susu gratis di sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan peningkatan produktivitas lahan pertanian;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir, Balai Besar KIPM Makassar secara konsisten telah menerapkan zona integritas WBK. Hal ini dapat mendukung terwujudnya program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan ke 3 “Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, serta ke 4 “Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil”.

Aspek Pemanfaatan :

Penerapan nilai-nilai integritas menuju WBK pada suatu unit kerja memiliki berbagai manfaat, yakni :

- (a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
- (b) Mencegah terjadinya korupsi;
- (c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik;
- (d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- (e) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat;
- (f) Meningkatkan reputasi instansi pemerintah;
- (g) Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024;

Target indikator kinerja ini bersifat tahunan. Berdasarkan penilaian dari tim penilai internal BPPMHKP diperoleh nilai total 75,51 atau 100,68% dari target, yang terdiri dari komponen pengungkit 37,48 dan komponen hasil 38,03. Rekapitulasi hasil penilaian tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.



No.	Unsur	Bobot Nilai	Perolehan Nilai	%
1	2	3	4	5
A.	Pengungkit :	60,00	37,48	
I.	Pemenuhan :	30,00	27,61	92,02
1	Manajemen Perubahan	4,00	3,55	88,63
2	Penataan Tatalaksana	3,50	2,92	83,33
3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	4,36	87,16
4	Penguatan Akuntabilitas	5,00	4,57	91,38
5	Penguatan Pengawasan	7,50	7,22	96,25
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	5,00	100,00
II.	Reform :	30,00	9,88	32,92
1	Manajemen Perubahan	4,00	3,17	79,17
2	Penataan Tatalaksana	3,50	2,33	66,62
3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	3,50	70,00
4	Penguatan Akuntabilitas	5,00	5,00	100,00
5	Penguatan Pengawasan	7,50	6,88	91,67
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	5,00	100,00
	Total Pengungkit		37,48	62,47
B.	Hasil	40,00	38,03	
1	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22,50	22,50	100,00
a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survey Eksternal; Indeks Persepsi Anti Korupsi/IPAK)	17,50	17,50	100,00
b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00	5,00	100,00
2	Pelayanan Publik yang Prima	17,50	15,53	88,75
a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50	15,53	88,75
	Total Hasil		38,03	95,08
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi		75,51	

Akar masalah

Potensi kelambatan pemenuhan dokumentasi bukti penerapan zona integritas WBK oleh masing-masing penanggung jawab unsur dikarenakan penanggung jawab unsur lambat mengolah data penerapan WBK yang menjadi tanggung jawabnya;



Rekomendasi rencana aksi

- Ketua tim WBK mengingatkan penyampaian dokumen implementasi WBK secara berkala kepada penanggung jawab unsur;
- Tim Sekretariat memastikan pemenuhan fasilitas pendukung penerapan WBK;

Tindak Lanjut Rekomendasi sebelumnya

- Nota Dinas Ketua Tim WBK kepada penanggung jawab unsur WBK tentang penyampaian dokumen implementasi WBK;
- Diakukan pemenuhan fasilitas pendukung penerapan WBK (spanduk, banner, dan penataan ruang pelayanan);



IK 16. Indeks kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

SK.3 Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan									
IKU-16. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar									
Realisasi 2020 - 2025					2025			Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025 - 2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	% Capaian terhadap target 2025
-	-	-	3,64	3,66	3,36	3,93	116,96	3,36	116,96

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14> .

Dimulai dari triwulan II tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (Survey kepuASAN masyarakat) melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa U1. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana.

Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai Besar KIPM Makassar survey dilakukan terhadap 11 (Sebelas) jenis layanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu:

- Laporan hasil uji mutu produk perikanan
- Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB)
- Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)



- Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
- Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)
- Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)
- Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)

Survey juga dilakukan terhadap setiap pengguna jasa yang menerima layanan dengan jumlah sampel minimal mengacu pada formula Isaac & Michael sebagai berikut:

Formula Isaac & Michael

$$S = \frac{X^2 NP (1-P) / d^2 (N-1) + X^2 P (1-P)}{}$$

X^2 = Nilai chi square tabel = 3,841
dimana df = 1 dan $\alpha = 5\% = 0.05$
P = Perkiraan proporsi populasi (Jika tidak diketahui maka P = 0.5)
N = Jumlah Populasi
d = tingkat toleransi kesalahan (0.05)

$$S = \frac{3.841 \times 48 \times 0.5 \times 0.5}{(0.05^2 \times 47) + (3.841 \times 0.5 \times 0.5)}$$

$$S = 48.092 = 42.766 = 43$$

PURWATAMA, KEP, 2022

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	100	100	1000	1000
15	15	200	180	1000	200
20	20	300	270	1000	300
25	25	400	360	1000	400
30	30	500	450	1000	500
35	35	600	540	1000	600
40	40	700	630	1000	700
45	45	800	720	1000	800
50	50	900	810	1000	900
55	55	1000	900	1000	1000
60	60	1100	990	1000	1100
65	65	1200	1080	1000	1200
70	70	1300	1170	1000	1300
75	75	1400	1260	1000	1400
80	80	1500	1350	1000	1500
85	85	1600	1440	1000	1600
90	90	1700	1530	1000	1700
95	95	1800	1620	1000	1800
100	100	1900	1710	1000	1900
105	105	2000	1800	1000	2000
110	110	2100	1890	1000	2100
115	115	2200	1980	1000	2200
120	120	2300	2070	1000	2300
125	125	2400	2160	1000	2400
130	130	2500	2250	1000	2500
135	135	2600	2340	1000	2600
140	140	2700	2430	1000	2700
145	145	2800	2520	1000	2800
150	150	2900	2610	1000	2900
155	155	3000	2700	1000	3000
160	160	3100	2790	1000	3100
165	165	3200	2880	1000	3200
170	170	3300	2970	1000	3300
175	175	3400	3060	1000	3400
180	180	3500	3150	1000	3500
185	185	3600	3240	1000	3600
190	190	3700	3330	1000	3700
195	195	3800	3420	1000	3800
200	200	3900	3510	1000	3900
205	205	4000	3600	1000	4000
210	210	4100	3690	1000	4100
215	215	4200	3780	1000	4200
220	220	4300	3870	1000	4300
225	225	4400	3960	1000	4400
230	230	4500	4050	1000	4500
235	235	4600	4140	1000	4600
240	240	4700	4230	1000	4700
245	245	4800	4320	1000	4800
250	250	4900	4410	1000	4900
255	255	5000	4500	1000	5000
260	260	5100	4590	1000	5100
265	265	5200	4680	1000	5200
270	270	5300	4770	1000	5300
275	275	5400	4860	1000	5400
280	280	5500	4950	1000	5500
285	285	5600	5040	1000	5600
290	290	5700	5130	1000	5700
295	295	5800	5220	1000	5800
300	300	5900	5310	1000	5900
305	305	6000	5400	1000	6000
310	310	6100	5490	1000	6100
315	315	6200	5580	1000	6200
320	320	6300	5670	1000	6300
325	325	6400	5760	1000	6400
330	330	6500	5850	1000	6500
335	335	6600	5940	1000	6600
340	340	6700	6030	1000	6700
345	345	6800	6120	1000	6800
350	350	6900	6210	1000	6900
355	355	7000	6300	1000	7000
360	360	7100	6390	1000	7100
365	365	7200	6480	1000	7200
370	370	7300	6570	1000	7300
375	375	7400	6660	1000	7400
380	380	7500	6750	1000	7500
385	385	7600	6840	1000	7600
390	390	7700	6930	1000	7700
395	395	7800	7020	1000	7800
400	400	7900	7110	1000	7900
405	405	8000	7200	1000	8000
410	410	8100	7290	1000	8100
415	415	8200	7380	1000	8200
420	420	8300	7470	1000	8300
425	425	8400	7560	1000	8400
430	430	8500	7650	1000	8500
435	435	8600	7740	1000	8600
440	440	8700	7830	1000	8700
445	445	8800	7920	1000	8800
450	450	8900	8010	1000	8900
455	455	9000	8100	1000	9000
460	460	9100	8190	1000	9100
465	465	9200	8280	1000	9200
470	470	9300	8370	1000	9300
475	475	9400	8460	1000	9400
480	480	9500	8550	1000	9500
485	485	9600	8640	1000	9600
490	490	9700	8730	1000	9700
495	495	9800	8820	1000	9800
500	500	9900	8910	1000	9900
505	505	10000	9000	1000	10000

Selama tahun 2025, Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap Triwulan dengan jumlah responden sebagai berikut:

Triwulan	Jumlah Layanan	Jumlah Minimal Responden	Jumlah Responden	Keterangan
I	2.798	338	197	Jumlah responden tidak mencukupi. Dilakukan briefing/ sharing session kepada petugas pelayanan dan inspektur mutu untuk meningkatkan jumlah responden kepada pengguna layanan.
II	7.932	367	674	Jumlah responden telah mencukupi
III	3.590	351	660	Jumlah responden telah mencukupi
IV	1.063	285	447	Jumlah responden telah mencukupi



Dari jumlah responden yang mengisi Survei Kepuasan Masyarakat dapat terlihat bahwa pada Triwulan I jumlah responden belum mencukupi jumlah minimal responden sesuai dengan Formula Isaac & Michael. Namun dengan perbaikan terus menerus maka jumlah responden telah dapat ditingkatkan pada Triwulan II, III dan IV dan telah memenuhi jumlah minimal responden.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitung Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111.$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

Sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan MENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara rutin Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 kali dalam setahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Besar KIPM Makassar.

Jika dilihat berdasarkan nilai per unsur, maka nilai IKM Balai Besar KIPM Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Kesesuaian persyaratan	3.733	3.730	3,885	3,944
2	Kemudahan prosedur	3.731	3.724	3,874	3,942
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian	3.724	3.674	3,871	3,933
4	Kesesuaian biaya	3.711	3.757	3,865	3,933
5	Kesesuaian produk	3.741	3.737	3,877	3,937
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi	3.706	3.665	3,873	3,931
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur	3.716	3.693	3,871	3,933
8	Layanan konsultasi dan pengaduan	3.746	3.740	3,879	3,940
9	Kualitas isi/sarana	3.706	3.702	3,873	3,933
	Nilai IKM	3,72	3,71	3,87	3,93

Jika dibandingkan dengan periode yang sama untuk dua tahun terakhir, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat terlihat pada table berikut:

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan		
		2023	2024	2025
1.	Kesesuaian persyaratan	3,680	3,750	3,944
2.	Kemudahan prosedur	3,610	3,757	3,942
3.	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian	3,669	3,755	3,933
4.	Kesesuaian biaya	3,669	3,787	3,933
5.	Kesesuaian produk	3,664	3,755	3,937
6.	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi	3,630	3,738	3,931
7.	Kemudahan dalam penggunaan fitur	3,540	3,775	3,933
8.	Layanan konsultasi dan pengaduan	3,723	3,812	3,940
9.	Kualitas isi/konten	3,620	3,785	3,933
	Nilai IKM	3,64	3,77	3,93

Dari nilai IKM yang dilaksanakan selama tiga tahun terakhir, dapat terlihat bahwa nilai IKM secara konsisten terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan perbaikan yang dilakukan terus menerus mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Balai Besar KIPM Makassar.

Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ini sejalan dengan penghargaan yang diterima oleh Balai Besar KIPM Makassar di Tahun 2025 pada pelayanan publik yang diberikan. Pada tanggal 2 Desember 2025, Balai Besar KIPM Makassar menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat “INFORMATIF” yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Bapak Sakti Wahyu Trenggono Nomor B.1272/MEN-KP/XII/2025.

Jika dilihat nilai perunsur, nilai unsur yang paling rendah adalah unsur **kecepatan respon aplikasi**, unsur **Kesesuaian jangka waktu penyelesaian**, serta unsur **Kemudahan dalam**

penggunaan fitur dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan. Berdasarkan Peraturan MenPANRB nomor 14 tahun 2017, rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Untuk itu perlu dilakukan tindakan perbaikan unsur kecepatan respon, unsur Kesesuaian jangka waktu penyelesaian, serta unsur Kemudahan dalam penggunaan fitur walaupun nilai unsur tersebut sudah berada dalam kategori Sangat Baik.

Dalam pelayanan sertifikasi ekspor pada Triwulan I 2025, Balai Besar KIPM Makassar menggunakan aplikasi Aplikasi SIAP Mutu (Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu) dalam rangka penerbitan SMKHP digunakan pertanggal 1 Maret 2025 secara serentak semua UPT BPPMHKP yang dikembangkan oleh Sekretariat BPPMHKP. Namun dalam pelaksanaannya Aplikasi SIAP Mutu masih dalam tahap penyempurnaan dan masih ada fitur yang dibutuhkan bagi petugas pelayanan dan pengguna layanan.

Meningkatkannya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2023 ke Tahun 2025 sejalan dengan layanan konsultasi petugas pelayanan pasca transisi penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan. Petugas pelayanan memberikan informasi dan solusi terhadap kebingungan pelaku usaha tentang penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan, serta petugas lebih komunikatif meminta kritik, saran dan masukan terhadap peningkatan pelayanan publik dari Balai Besar KIPM Makassar. Sehingga nilai IKM dapat ditingkatkan dari unsur Layanan konsultasi dan Pengaduan pada Tahun 2025.

Balai Besar KIPM Makassar berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan melaksanakan:

- 27 Februari 2025, mengikuti Launching dan Sosialisasi Aplikasi Siap Mutu dalam rangka meningkatkan penerbitan SMKHP;

- 28 Februari 2025, Sosialisasi Aplikasi SIAPMutu dan PMK nomor 1 Tahun 2025 lingkup Badan Mutu KKP Makassar kepada pengguna layanan secara daring mengenai sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan pada Aplikasi SIAPMutu;
- 10-13 Maret 2025, Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik lingkup BPPMHKP Makassar;
- 10 April 2025 dilaksanakan Briefing siang Petugas Pelayanan, Verifikator Dokumen dan Penandatanganan SMKHP;
- 15 April 2025 dilaksanakan Sosialisasi Kepatuhan Pelaku Usaha Tahun 2025 secara daring. Disampaikan bahwa saat ini telah dilaunching platform SIAP MUTU sebagai tools dalam pelayanan sertifikasi ekspor;
- 15 Mei 2025 dan tanggal 24 Juni 2025 dilaksanakan Briefing Petugas Pelayanan pada inspektur mutu dan petugas pelayanan untuk memutakhirkan diri dengan ketentuan regulasi;
- 14 Juli 2025 telah dilaksanakan kegiatan bincang inspiratif dengan tema pelayanan prima bekerjasama dengan PT. BNI (Persero) Cabang Makassar;
- 16 Juli 2025 dilaksanakan Briefing Petugas Pelayanan dilaksanakan untuk meningkatkan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat;
- 24 Juli 2025 dilaksanakan Sharing Session Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Penerbitan SMKHP;
- 11 September 2025 dilaksanakan Bincang Inspiratif Service Excelent yang bersinergi dengan PT. BSI;
- 25 September 2025 dilaksanakan Sharing session Pelayanan Publik ramah kelompok rentan;
- 30 September 2025 dilaksanakan Sosialisasi KepMen KP Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Pelayanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara daring;

- 8 Oktober 2025, Sosialisasi Pelayanan publik ramah kelompok rentan narasumber dari Balla' Inklusi Sulawesi Selatan;
- 07 Oktober 2025, Customer Service melakukan pendampingan terhadap PT. Celebes Ocean Fisheries terkait pengisian aplikasi SIAPMUTU;
- 14 Oktober 2025 telah dilakukan briefing bagi petugas pelayanan oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar disampaikan langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan petugas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima serta menghindari adanya komplain dari pelanggan;
- 18 November 2025 Customer Service melakukan pendampingan terhadap PT. Zhongyi Chain Services untuk konsultasi mengenai pendaftaran nomor registrasi negara mitra;
- 4 Desember 2025 Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan;
- 19 Desember 2025 Customer Service melakukan pendampingan terhadap CV. Prima Indo Tuna untuk konsultasi mengenai model sertifikat TRACES baru.

Bukti komitmen petugas pelayanan dan IMUT/AIMUT tersebut menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025 meningkat dari **3,77** di Tahun 2024 menjadi **3,93**. Namun demikian peningkatan berkelanjutan melalui kritik dan saran pengguna layanan tetap dilakukan, sehingga kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan dan dipertahankan.

Adapun kritik, saran dan masukan dari masyarakat melalui aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat terdapat tanggapan sebagai berikut;

- Kecepatan proses penerbitan sertifikat agar dipercepat;
- Beberapa fitur belum terdapat pada aplikasi yang dapat memudahkan pengguna layanan;

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
4.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	3
7.	PPPK	12
8.	PJLP	5
	TOTAL	37

Alokasi anggaran awal kegiatan indeks kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2025 yaitu 3987 EBA 994.002.B Semula Rp. 1.292.244.000, - dan terjadi revisi anggaran awal menjadi Rp. 356,509,000, -. Hingga tahun 2025, anggaran yang sudah terealisasi sebanyak **Rp. 356,016,623,-** atau 99.86 % pada langganan daya dan jasa. Sehingga sisa anggaran sebesar Rp. **492,377,-**

Alokasi anggaran kegiatan indeks kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2024 yaitu Rp. 12.500.000,-. Pada RKAKL Triwulan IV tahun 2024 ini, terjadi revisi anggaran dimana anggaran untuk Survei Kepuasan Masyarakat dihilangkan dan dialihkan dari kegiatan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan (3990) ke kegiatan Dukungan Manajemen Internal (3987).

Anggaran dari Tahun 2024 dengan tahun 2025 berbeda sangat signifikan karena pada tahun 2025 anggaran untuk IKU Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) mengambil pada anggaran Langganan daya dan jasa sebagai penunjang tersedianya sarana dan prasana pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu prioritas nasional karena dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah memberikan perhatian atas percepatan digitalisasi pelayanan publik sejalan dengan Asta Cita yang ke 5 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tools untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi atas kepuasan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Yang mana Survey ini dapat mengetahui kritik, saran dan masukan dari Masyarakat pengguna layanan pada Balai Besar KIPM Makassar untuk memperbaiki layanan menjadi pelayanan publik yang prima.

IKU ini mendukung budaya ASN yang berakhlak dilingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu Berorientasi Pelayanan. ASN berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ini mencakup memahami kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan. Survey Kepuasan Masyarakat sebagai alat untuk mengetahui saran kritik masukan Masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik Balai Besar KIPM Makassar untuk memberikan pelayanan yang prima.

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai Besar KIPM Makassar dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi atas kepuasan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Survey kepuasan Masyarakat ini sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Akar Masalah

Belum semua jenis layanan terutama bagian sertifikasi hulu yang dilakukan survey kepuasan Masyarakat oleh Inspektur/ Asisten Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Rekomendasi rencana aksi

Perlu dilakukan briefing/ sharing session kepada petugas pelayanan dan Inspektur/ Asisten Inspektur Mutu terkait masukan kepada pengguna layanan untuk perbaikan pelayanan publik.

Tindakanlanjut Rekomendasi sebelumnya

- Postingan mengenai Janji Layanan dan Biaya Layanan di EBook Layanan pada media sosial
- 07 Oktober 2025 Customer Service melakukan pendampingan terhadap PT. Celebes Ocean Fisheries terkait pengisian aplikasi SIAPMUTU;
- 18 November 2025 Customer Service melakukan pendampingan terhadap PT. Zhongyi Chain Services untuk konsultasi mengenai pendaftaran nomor registrasi negara mitra;
- 19 Desember 2025 Customer Service melakukan pendampingan terhadap CV. Prima Indo Tuna untuk konsultasi mengenai model sertifikat TRACES baru Yang dimana hasilnya IKM meningkat di triwulan IV 2025 dari 96,85 menjadi 98,40.



3.3 Capaian Kinerja Lainnya

Balai Besar KIPM Makassar kembali membuktikan komitmennya dalam berperan aktif mendukung peningkatan ekspor produk perikanan di kabupaten/kota wilayah Sulawesi Selatan. Pada tanggal 17 Desember 2025 bertepatan dengan Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Bela Negara ke 77, Badan Mutu KKP Makassar menerima penghargaan dari Bupati Maros Dr. H.A.S. Chaidir Syam.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemkab Maros kepada Badan Mutu KKP Makassar atas dukungan dan peran aktif dalam peningkatan ekspor produk perikanan di Kabupaten Maros. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Bupati Maros melepas ekspor produk perikanan sebanyak 2.319,7 ton ke 8 negara tujuan dengan nilai ekonomi Rp. 51,4 milyar.

Produk perikanan tersebut meliputi rumput laut, ikan segar, ikan beku, tuna, cumi-cumi dan telur ikan terbang yang diekspor oleh 17 UPI yang ada di Kabupaten Maros. Di Kabupaten Maros sendiri terdapat 20 Unit Pengolahan Ikan dan 14 Unit Pengolahan Rumput Laut yang berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi pembudidaya dan nelayan.

Prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi insan kelautan dan perikanan untuk terus berkarya memperkuat kinerja sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan menjadi lebih baik lagi.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Balai Besar KIPM Makassar Tahunan 2025, secara umum rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar KIPM Makassar 112,73 (kategori Istimewa).



Sehingga dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	70	100
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	70	97,66



		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)	1	1
		4.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)	1	1
		5.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	99	100
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	75	91,23
		7.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	75	90,96
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	92	94,58
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	71,5	100
		10.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	100	100
		11.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	82	87,97
		12.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	86	90
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	85	100
		14.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	76	100
		15.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	75	75,51
		16.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	3.36	3,93



4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil Evaluasi kinerja Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan III Tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Memperbanyak data dukung inspeksi berupa kondisi lokasi secara keseluruhan baik melalui foto maupun video sebelum kegiatan inspeksi dilaksanakan.. (IKU1)
2. Memperbanyak data dukung inspeksi berupa kondisi lokasi secara keseluruhan baik melalui foto maupun video sebelum kegiatan inspeksi dilaksanakan. (IKU2)
3. Menyampaikan laporan hasil uji pada instansi terkait (IKU3)
4. Penyusunan RPD tahun 2026 dilakukan dilakukan bersama dengan para katimja dan para penanggungjawab kegiatan untuk meningkatkan nilai IKPA 2026 (IKU 8)

4.3 Tindaklanjuti

Adapun rekomendasi pada triwulan II tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti pada triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi triwulan sebelumnya
Melakukan koordinasi dengan pihak BPSPL Makassar dalam rangka percepatan penerbitan PKKPR. (IKU1)
Tindaklanjuti : 1). Tindak lanjut rekomendasi 1 : Pada tanggal 18 September 2025 telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan BPSPL Makassar di Ruang Pertemuan BPSPL Makassar di Kab. Maros terkait dengan percepatan layanan surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
2). Tindak lanjut rekomendasi 2 : pada tanggal 1 Juli 2025 koordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Untia dan Dinas Perikanan Kab. Sinjai terkait Percepatan Sertifikasi CPIB Kapal di Hotel Grand Rofina Kab. Sinjai.

2. Rekomendasi triwulan sebelumnya :

Melaksanakan sharing session peningkatan kompetensi Inspektur Mutu (IKU2)

Tindaklanjuti : Telah dilakukan sharing session peningkatan kompetensi Inspektur Mutu tentang PP No 28 Tahun 2025 Inspektur Mutu pada tanggal 21 Agustus 2025

3. Rekomendasi triwulan sebelumnya :

Melakukan refreshment cara pengambilan dan penanganan sampel (IKU3)

Tindaklanjuti : Telah melakukan Refreshment/Sharing session peningkatan kompetensi inspektur mutu melalui bincang inspiratif terkait Keputusan Kepala BKIPM No. 96 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis monitoring cemaran perairan pada tanggal 24 Juli 2025

4. Rekomendasi triwulan sebelumnya :

Melakukan evaluasi tentang anomali data kepada petugas pelayanan dan inspektur mutu (IKU5)

Tindaklanjuti : 1). Telah dilaksanakan briefing pagi petugas pelayanan dan inspektur mutu yang salah satu poinnya adalah mengevaluasi anomali data pada tanggal 16 Juli 2025. 2) Telah dilaksanakan sharing session sosialisasi monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra pada tanggal 20 Agustus 2025.

5. Rekomendasi triwulan sebelumnya :

Penyelesaian tindakan perbaikan Surveilans II SNI ISO/IEC 17025:2017 di Triwulan III Tahun 2025 (IKU6)

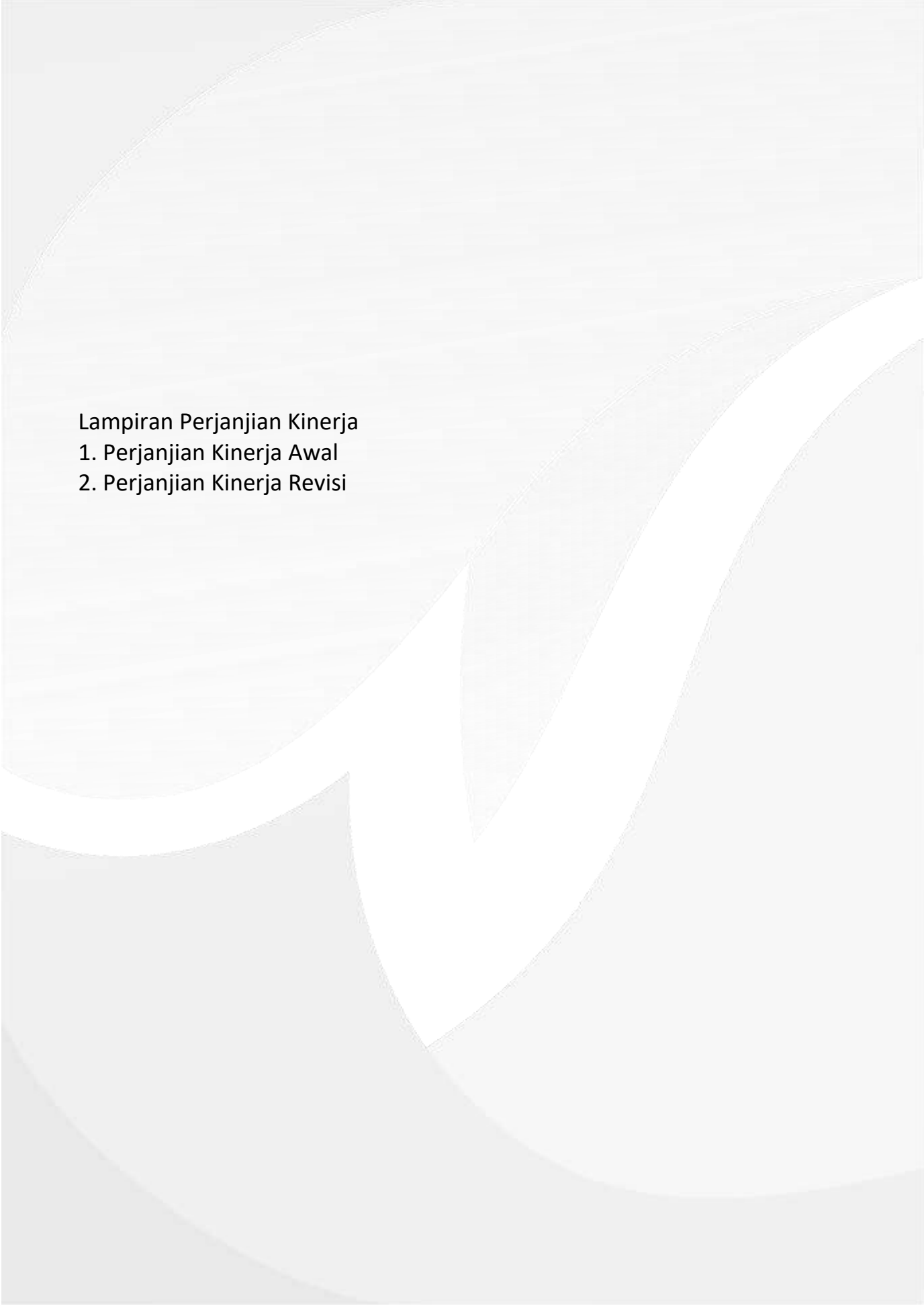
Tindaklanjuti : Telah dilakukan penyelesaian tindakan perbaikan Surveilans ke-II SNI ISO/IEC 17025:2017 pada Triwulan III Tahun 2025.

6. Rekomendasi triwulan sebelumnya :

Sosialisasi kepada pengguna layanan mengenai Layanan terbaru Balai Besar KIPM Makassar terkait dengan Keputusan Menteri KP nomor 20 Tahun 2025 mengenai Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik lingkup KKP (IKU17)

Tindaklanjut : 1). Briefing kepada Petugas Layanan pada tanggal 16 Juli 2025, untuk lebih aktif meminta kritik saran dan masukan kepada pengguna layanan untuk perbaikan pelayanan publik. Serta diharapkan inspektur mutu dan petugas pelayanan memutakhirkan diri dengan ketentuan regulasi, memperkaya diri dengan pengetahuan baru yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2). Sosialisasi kepada pengguna layanan mengenai Layanan terbaru Balai Besar KIPM Makassar terkait dengan Keputusan Menteri KP nomor 20 Tahun 2025 mengenai Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik lingkup KKP pada tanggal 30 September 2025. Yang dimana hasilnya IKM meningkat di triwulan III 2025 dari 93,05 menjadi 96,85.



Lampiran Perjanjian Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Awal
2. Perjanjian Kinerja Revisi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mohammad Zamrud**
Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Makassar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mohammad Zamrud

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN MAKASSAR

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)	1
		4.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)	1
		5.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	75
		7.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	92
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	71,5
		10.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	100
		11.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	82
		12.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	86
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	85
		14.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	76
		15.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	75
		16.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	3.36

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	9,947,732,000
2.	Manajemen Mutu	187,750,000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	215,372,000
Total Anggaran Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar Tahun 2025		10.350.854.000

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Plt.Kepala Balai Besar Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Makassar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mohammad Zamrud



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sri Rahayu Setyaningsih**
Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Makassar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sri Rahayu Setyaningsih

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN MAKASSAR

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)	1
		4.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)	1
		5.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	75
		7.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	92
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	71,5
		10.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	100
		11.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	87
		12.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	86
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	85
		14.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	76
		15.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	75
		16.	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Unit)	1
		17.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	11.326.526.000
2.	Manajemen Mutu	178.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	375.000.000
Total Anggaran Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar Tahun 2025		11.879.526.000

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Plt.Kepala Balai Besar Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Makassar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sri Rahayu Setyaningsih

Lampiran Form Capaian Kinerja
Tahunan 2025

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 1	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN		
	2023	2024	2025
Target	0	70	70
Realisasi	0	100	100
% Capaian	0	142,85 %	142,85 %

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. - BPPMHKP Makassar saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan. - Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. - Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari : - Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan; - Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) - Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);

4. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
5. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
6. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

- Pada Tahun 2025 BPPMHKP Makassar telah melakukan sertifikasi terhadap 3 jenis sertifikasi yaitu Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan, Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) dan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB) serta surveilan terhadap 3 jenis sertifikasi yaitu Surveilans Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), Surveilans Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Surveilans Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB).
- Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.
- Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan.
- Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan.
- Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan pakan ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi pakan ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.
- Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CDOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan.
- Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk rumahan dan pengawasan mutu guna menghasilkan yang aman bermutu dan berkhasiat.
- Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

- %X = Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer
- A = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CBIB
- B = Jumlah Unit menerapkan CPIB
- C = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
- D = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB
- E = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- F = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
- xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

$$\frac{A+B+F}{xn} \times 100\%$$

$$= \frac{4+2+70}{76} \times 100\% = 100\%$$

Output dari kegiatan ini terdiri dari :

- 4 Sertifikat CBIB dengan masa berlaku 4 tahun pada tahun 2025
- 2 Sertifikat CPIB dengan masa berlaku 4 tahun pada tahun 2025
- 70 Sertifikat CPIB Kapal Perikanan dengan masa berlaku 2 tahun pada tahun 2025

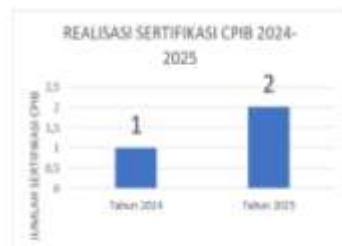
Jika dibandingkan dengan realisasi capaian sertifikasi CBIB tahun 2024 dengan tahun 2025 terjadi peningkatan dari 1 menjadi 4 atau sebesar 75 %
 Untuk realisasi capaian sertifikasi CPIB tahun 2024 dengan tahun 2025 terjadi peningkatan 1 menjadi 2 atau sebesar 50 %
 Untuk realisasi capaian sertifikasi CPIB Kapal tahun 2024 dengan tahun 2025 terjadi peningkatan 13 menjadi 70 atau sebesar 538,46 %

Capain sertifikasi CBIB dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Capain sertifikasi CBIB dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Capain sertifikasi CPIB dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Capain sertifikasi CPIB Kapal dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



- Realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar 29.140.000 atau 99.81% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase (%)
1	Sertifikasi sektor produksi primer	29.140.000	29.084.500	55.500	99.81 %
JUMLAH		29.140.000	29.084.500	55.500	99.81 %

Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi CPIB Kapal, CPIB dan CBIB pada tahun 2025 sebanyak 17 orang yang terdiri dari 10 Inspektur Mutu, 2 PJLP dari BPPMHKP Makassar. Sedangkan untuk kegiatan inspeksi CPIB dan CBIB telah dilaksanakan di Kabupaten/kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Barru, Pinrang dan Maros dengan melibatkan 12 inspektur mutu dari BPPMHKP Makassar. Sedangkan pada kegiatan surveilan CPIB dan CBIB yang dilaksanakan di tahun 2025 terdiri dari 9 unit pembenihan dan 5 unit pembudidaya dengan melibatkan 12 inspektur mutu dari BPPMHKP Makassar.

- Kegiatan sertifikasi CPIB Kapal yang ada dalam IKU ini merupakan kegiatan yang status risikonya termasuk dalam kategori tinggi. Risiko tinggi dalam konteks manajemen risiko merujuk pada kegiatan atau situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian signifikan, baik dari segi finansial, keamanan, reputasi maupun operasional. Adapun faktor risiko yang dimaksud berupa Permohonan sertifikasi CPIB tidak sesuai/tidak memenuhi persyaratan yang disebabkan karena Dokumen permohonan sertifikasi CPIB yang diajukan oleh pelaku usaha tidak lengkap. Upaya pengendalian yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan instansi pembina usaha perikanan tangkap dan melakukan sosialisasi sertifikasi CPIB Kapal kepada pelaku usaha.

PROGRAM NASIONAL

- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP " penangkapan ikan terukur berbasis kuota " yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP " pembangunan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan " yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan

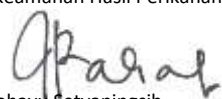
budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 :

- Pada tanggal 17 Januari 2025 telah dilakukan koordinasi dengan Direktur Pelabuhan dan Penanggung jawab PP Untia terkait dengan percepatan sertifikasi CPIB Kapal
- Pada Triwulan I tahun 2025 BPPMHKP Makassar telah melakukan sertifikasi terhadap 1 jenis sertifikasi yaitu : Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB). Kegiatan CBIB dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025 di CV. Senada Horta Jl. RAJAWALI NO. 37, Desa/Kelurahan Panambungan, Kec. Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Inspeksi CBIB ini dilaksanakan oleh inspektur Mutu BPPMHKP Makassar. Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah pembesaran Udang Vannamei (*Litopenaeus vannamei*) sesuai dengan kode KBLI 03254 yaitu komoditi Udang Vannamei (*Litopenaeus vannamei*).
- Pada tanggal 19 Februari 2025 telah dilakukan kegiatan Sosialisasi terhadap seluruh UPT BPPMHKP terkait SOP Pelaksanaan Sertifikasi pada Sektor Produksi Primer yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer secara daring.
- Pada tanggal 5 Maret 2025 telah dilaksanakan sharing session dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran B.233/BPPMHKP/OT.310/2025 tentang Pedoman Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk meningkatkan pemahaman dan optimalisasi pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di BPPMHKP Makassar, sharing session ini menjadi wadah bagi setiap penanggung jawab kegiatan teknis untuk memaparkan pedoman teknis yang relevan, sejalan dengan amanat peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8/PERMEN-KP/2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan serta peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/PERMEN-KP/2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian.
- Pada tanggal 17 – 18 Maret 2025 telah dilaksanakan monitoring pelaksanaan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal oleh Pusat Mutu Produksi Primer, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap UPT BPPMHKP Makassar diperoleh nilai total atas konsistensi pemenuhan Penerapan Persyaratan Teknis dengan jumlah 97,44 % dengan peringkat sangat baik, kegiatan dilanjutkan dengan bincang inspiratif tentang Strategi Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi CPIB Kapal diharapkan seluruh peserta dapat berbagai pengalaman, tantangan serta solusi yang implementasi kebijakan terkait sehingga tercipta harmonisasi dalam pengendalian dan pengawasan mutu perikanan yang lebih baik.
- Pada tanggal 18 Maret 2025 telah dilakukan kegiatan pemantapan persiapan pelaksanaan inspeksi dan surveilans tahun 2025 khususnya dalam rangka penerbitan sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB) dan sertifikat cara distribusi obat yang baik (CDOIB) terhadap seluruh UPT BPPMHKP yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer secara daring.
- Pada tanggal 5 Mei 2025 telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Plan Of Action (PoA) dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit DG Sante Uni Eropa secara hybrid di Aula Kantor Badan Mutu KKP Makassar yang diikuti oleh 88 orang peserta yang terdiri dari perwakilan BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Surabaya I, Pelabuhan Perikanan Untia, DPMPTSP, para kordinator penyuluh perikanan dari kabupaten/kota sentra perikanan, perusahaan eksportir dan pengolah hasil perikanan dari wilayah Sulawesi Selatan, Jakarta dan Surabaya yang memiliki pemasok bahan baku dari Sulawesi Selatan.
- Pada tanggal 19 Mei 2025 telah dilakukan Rapat Koordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Untia terkait percepatan sertifikasi CPIB Kapal Perikanan
- Pada tanggal 27 Mei 2025 mengikuti pertemuan reguler I Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) tuna provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MPDI).

- Mengikut help desk yang diselenggarakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer setiap hari Selasa pada bulan Juni 2025 yang membahas terkait progres percepatan sertifikasi primer dan kendala kendala yang dihadapi
- Pada tanggal 24 Juni 2025 telah dilaksanakan Sosialisasi Persamaan Persepsi pengisian checklist Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
- Pada tanggal 25 Juni 2025 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan PT. Ocean Champ Seafood terkait percepatan sertifikasi CPIB Kapal.
- Pada tanggal 1 Juli 2025 mengikuti kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil melalui Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal yang diikuti sebanyak 50 orang nelayan, dilanjutkan dengan koordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Untia dan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam rangka percepatan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal yang diselenggarakan di Kabupaten Sinjai.
- Mengikut help desk yang diselenggarakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer setiap hari Selasa pada bulan Juli 2025 yang membahas terkait progres percepatan sertifikasi primer dan kendala kendala yang dihadapi.
- Pada tanggal 23 Juli 2025 telah dilaksanakan Sosialisasi Juknis Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Kegiatan CPPIB dan diikuti oleh seluruh Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar.
- Pada tanggal 1 Agustus 2025 telah dilakukan rapat penyesuaian sertifikasi primer pasca perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer BPPMHKP.
- Pada tanggal 18 September 2025 telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan BPSPL Makassar di Ruang Pertemuan BPSPL Makassar di Kab. Maros terkait dengan percepatan layanan surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)
- Pada tanggal 22 September 2025 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di Sulawesi Selatan khususnya terkait dengan pengendalian di sektor produksi primer.
- Pada tanggal 1-2 Oktober 2025 mengikuti kegiatan Sosialisasi CBIB dan CPIB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
- Pada tanggal 8 Oktober 2025 mengikuti kegiatan Webinar Inovasi Teknologi dan Pengelolaan Perikanan Budidaya Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Profesi Akuakultur Indonesia (PROAKSI).
- Pada tanggal 22-24 Oktober 2025, telah mengikuti pelatihan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) yang dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui metode Blended Learning.
- Pada tanggal 27 Oktober 2025 mengikuti FGD Inovasi Nutrisi dan Pakan Fungsional untuk meningkatkan kesehatan dan produktifitas dalam mendukung budidaya udang berkelanjutan di Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin.
- Pada tanggal 29–30 Oktober 2025, menjadi narasumber pada kegiatan Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas kapal dalam rangka pemberdayaan nelayan kecil di wilayah Kabupaten Bone, yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bone dan diikuti oleh 50 orang nelayan.
- Pada tanggal 24–25 November 2025, menjadi narasumber pada kegiatan Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas kapal dalam rangka pemberdayaan nelayan kecil di wilayah Kabupaten Bone, yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bone dan diikuti oleh 50 orang nelayan.
- Pada tanggal 1 Desember 2025, telah dilaksanakan pemahaman produksi pakan serta pengelolaannya dalam mendukung pembudidayaan ikan yang dilaksanakan secara hybrid.
- Pada tanggal 8 Desember 2025, telah mengikuti kegiatan sosialisasi proses sertifikasi CPIB Kapal melalui aplikasi SIAPMUTU yang dilaksanakan secara virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Statistik, Data dan Informasi Sekretariat Jendral KKP.

Pada tanggal 15 Desember 2025 telah terbit Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2076/XII/Tahun 2025 Tentang Satuan Gugus Tugas Pengendalian Penyakit Ikan Provinsi Sulawesi Selatan yang melibatkan BPPMHKP Makassar sebagai anggota Satgas.
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
Masih kurangnya literasi dan kesadaran teknis unit pembudidaya dan unit pembenihan akan pentingnya sertifikasi CPIB dan CBIB.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	
Melaksanakan sosialisasi sertifikasi CPIB dan CBIB kepada penyuluh perikanan dan pelaku usaha.	
Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	
Tindak lanjut rekomendasi adalah telah memperbanyak pengumpulan data dukung inspeksi secara virtual berupa dokumentasi kondisi lokasi secara menyeluruh, baik melalui foto maupun video, sebelum pelaksanaan kegiatan inspeksi.	Penanggung Jawab Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan  Sri Rahayu Setyaningsih

I. DAFTAR RUANG LINGKUP SERTIFIKASI CBIB TAHUN 202

No	Nama UPR	Produk	Grade	No. Sertifikat
1	CV SENADA HORTA	Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)	B	ID-CBIB-P-73-250012 Tanggal 07 Februari 2025
2	PT SINAR SUKSES PERSADA	Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)	B	ID-CBIB-73-P-250104 Tanggal 30 Juni 2025
3	CV ARAYA CRUSTACEA CEMERLANG	Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)	B	ID-CBIB-73-P-250105 Tanggal 30 Juni 2025
4	PT. ESAPUTLII PRAKARSA UTAMA	Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)	A	ID-CBIB-73-P-250150 Tanggal 23 Juli 2025

II. DAFTAR RUANG LINGKUP SERTIFIKASI CPIB TAHUN 2025

No.	Nama Unit Pembenihan	Produk	Grade	No. Sertifikat
1	Ukkas Hamzah	Benih Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>)	A	ID-CPIB-T-73-250139 Tanggal 30 Oktober 2025
2	UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Air Tawar Tanralili	Benih Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>)	B	ID-CPIB-T-73-250154 Tanggal 28 November 2025

III. REKAPITULASI DATA SERTIFIKASI CPIB KAPAL PERIKANAN TAHUN 2025

NO.	NAMA KAPAL	ALAMAT	NAMA NAHKODA	UKURAN KAPAL	TIPE KAPAL	TANGGAL INSPEKSI	KOMODITAS	JENIS PRODUK	NAMA UPI YANG DIPASOK	NOMOR CPIB	MASA BERLAKU CPIB	GRADE
1	Risal Hidayat	Pulau Burung Lohe, RT002/RW001, Desa Pulau Burung Pitue, Kec. Pulau Sembilan, Kab. Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan	Rusman	22	Penangkap	24 Mei 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 250143	2 Juni 2025 - 2 Juni 2027	C
2	Nurlaela 06	Jl. Cakalang RT000/RW000, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan	Herman Rasyid	23	Penangkap	24 Mei 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Prima Indo Tuna	ID - CPIB - K - 73 - 250145	2 Juni 2025 - 2 Juni 2027	C
3	Bintang Terang A01	Kampala, RT.007/RW003, Desa Kampala, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan	Riski Afandi	27	Penangkap	24 Mei 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 250144	2 Juni 2025 - 2 Juni 2027	C
4	Sumber Reski 12	Dusun Marana, RT.1/RW.1 Kel. Pasimarannu, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Prov Sulawesi Selatan	Wahyu	27	Penangkap	26 Mei 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 250146	2 Juni 2025 - 2 Juni 2027	C
5	Aisah 58	Pulau Burung Lohe, RT002/RW001, Desa Pulau Burung Lohe, Kec. Pulau Sembilan, Kab. Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan	Jubir	22	Penangkap	26 Mei 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Prima Indo Tuna	ID - CPIB - K - 73 - 250147	2 Juni 2025 - 2 Juni 2027	C
6	Yasmin 02	Jl. Cumi Cumi RT001/RW002 Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Prov. Sulawesi Selatan	Hasanuddin	19	Penangkap	27 Mei 2025	Tuna	Ikan Pelagis segar	PT. Bumi Menara Internusa	ID - CPIB - K - 73 - 250184	10 Juni 2025 - 10 Juni 2027	D
7	Raja Timur 02	Jl. Banana, RT.001/RW.001, Kel. Tongke Tongke, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan	Rusman	22	Penangkap	27 Mei 2025	Tuna, cakalang	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 250185	10 Juni 2025 - 10 Juni 2027	D
8	Bulukamase Berlayar 07	BTN GRIYA TONGKE-TONGKE BLOK P.11, RT.002/RW.001, Desa TONGKE-TONGKE, Kec.SINJAI TIMUR, Kab. Sinjai	Dani	28	Penangkap	21 Juni 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 250260	10 Juni 2025 - 10 Juni 2027	C

9	Koperasi Alhamidi 01	Dusun Lambutoa, RT.00/RW.00 Desa Kampung Beru, Kec. Galesong, Kab. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	M. Umar	30	Penangkap	1 Juli 2025	Layang Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Anugerah Bahari Mandiri	ID - CPIB - K - 73 - 250350	14 Juli 2025 - 14 Juli 2027	C
10	Yasmin 03	Jl. Cumi Cumi, RT.001/RW.002, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan	Ahli Nur	17	Penangkap	2 Juli 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Bumi Menara Internusa	ID - CPIB - K - 73 - 250298	9 Juli 2025 - 9 Juli 2027	C
11	Usaha Abadi 07	Babana, RT.002/RW.002, Kel. Tongke Tongke, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan	Irham	25	Penangkap	2 Juli 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Dwira Masagena	ID - CPIB - K - 73 - 250343	25 Juli 2025 - 25 Juli 2027	D
12	Mastain	Ling. Paleo, RT.003/RW.001, Desa Pangali. Kec. Banggae, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Selatan	Hamran	19	Penangkap	2 Juli 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 250294	8 Juli 2025 - 8 Juli 2027	D
13	Sumber Reski 01	Dusun Marana, RT.1/RW.1, Kel. Pasimarannu, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan	Anwar	19	Penangkap	2 Juli 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 250295	8 Juli 2025 - 8 Juli 2027	D
14	Sumber Reski 03	Dusun Marana, RT.1/RW.1, Kel. Pasimarannu, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan	Riswandi	16	Penangkap	2 Juli 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 250299	9 Juli 2025 - 9 Juli 2027	C
15	Naisyila	Dusun Marana, RT.4/RW.2, Kel. Pasimarannu, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan	Asfar	28	Penangkap	2 Juli 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 250349	14 Juli 2025 - 14 Juli 2027	D
16	Liang Liang Putra 02	Pulau Liang Liang, RT.002/RW.001, Desa Pulau Harapan, Kec. Pulau Sembilan, Kab. Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan	Hengky	26	Penangkap	2 Juli 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Dwira Masagena	ID - CPIB - K - 73 - 250347	14 Juli 2025 - 14 Juli 2027	D
17	Saro Mase 12	Dusun Cempae RT.001/RW.001, Desa Tongke Tongke, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan	Saenal Abidin	27	Penangkap	2 Juli 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Dwira Masagena	ID - CPIB - K - 73 - 250344	14 Juli 2025 - 14 Juli 2027	D
18	Erwin RS01	Dusun Cempae RT.002/RW.001, Desa Tongke Tongke, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan	Aryadi	27	Penangkap	2 Juli 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Dwira Masagena	ID - CPIB - K - 73 - 250346	14 Juli 2025 - 14 Juli 2027	D

19	Saro Mase 10	Cempae RT.5/RW.0, Desa Tongke Tongke, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan	Suyuti	9	Penangkap	2 Juli 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Dwira Masagena	ID - CPIB - K - 73 - 250345	14 Juli 2025 - 14 Juli 2027	D
20	Bintang Kejora HD 01	Dusun Maccini, Kel. Panaikang, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan	Hendra	14	Penangkap	2 Juli 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Bumi Menara Internusa	ID - CPIB - K - 73 - 250348	14 Juli 2025 - 14 Juli 2027	D
21	Ayu Lestari MR02	Dusun Maroanging, RT.0/RW.0, Desa Tongke Tongke, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan	Akbar	29	Penangkap	2 Juli 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 250297	8 Juli 2025 - 8 Juli 2027	C
22	Ayu Lestari MR01	Dusun Maroanging, RT.0/RW.0, Desa Tongke Tongke, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan	Asri	26	Penangkap	2 Juli 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 250296	8 Juli 2025 - 8 Juli 2027	C
23	Cahaya Mulia Baru 02	Dusun Marana, RT.1/RW.1, Kel. Pasimarannu, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan	Umar	17	Penangkap	2 Juli 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Bumi Menara Internusa	ID - CPIB - K - 73 - 250300	9 Juli 2025 - 9 Juli 2027	C
24	Sinar Tarufa	Dusun Tinanja, RT.0/RW.0, Desa Tarupa, Kec. Taka Bonerate, Kab. Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan	Ilham	29	Penangkap	2 Juli 2025	Cephalopod Segar	Ikan Demersal Segar	PT. Sinar Sejahtera Sentosa	ID - CPIB - K - 73 - 250351	14 Juli 2025 - 14 Juli 2027	B
25	Herman Dg Manja	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Herman	1	Penangkap	10 Juli 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250460	21 Juli 2025 - 21 Juli 2027	D
26	Abd Rajab	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Abd. Rajab	1	Penangkap	10 Juli 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250461	21 Juli 2025 - 21 Juli 2027	D
27	Asri	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Asri Dg Naba	1	Penangkap	10 Juli 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250462	21 Juli 2025 - 21 Juli 2027	D
28	Nadir	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Nadir	1	Penangkap	14 Juli 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250468	21 Juli 2025 - 21 Juli 2027	D

29	Syakir	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Syakir	1	Penangkap	14 Juli 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250470	21 Juli 2025 - 21 Juli 2027	D
30	Jamaluddin	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Jamaluddin	1	Penangkap	14 Juli 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250467	21 Juli 2025 - 21 Juli 2027	D
31	Baco	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Baco Dg Nai	1	Penangkap	14 Juli 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250466	21 Juli 2025 - 21 Juli 2027	D
32	Herman	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Herman	1	Penangkap	14 Juli 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250469	21 Juli 2025 - 21 Juli 2027	D
33	Akbar	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Akbar	1	Penangkap	14 Juli 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250476	22 Juli 2025 - 22 Juli 2027	D
34	Enal Jaya	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Enal Jaya	1	Penangkap	14 Juli 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250477	22 Juli 2025 - 22 Juli 2027	D
35	Sumber Reseki	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Adi Rani	1	Penangkap	14 Juli 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250478	22 Juli 2025 - 22 Juli 2027	D
36	Bakka Dg nai	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Bakka Dg Nai	1	Penangkap	29 Juli 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250540	04 Agustus 2025 - 04 Agustus 2027	D
37	Mahaputra	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Lira Dg Nojeng	1	Penangkap	29 Juli 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250542	04 Agustus 2025 - 04 Agustus 2027	D
38	Saparuddin	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Saparuddin	1	Penangkap	29 Juli 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250543	04 Agustus 2025 - 04 Agustus 2027	D

39	Bombang	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Robi Dg Bombang	1	Penangkap	29 Juli 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250541	04 Agustus 2025 - 04 Agustus 2027	D
40	Nasir	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Nasir Dg Majja	1	Penangkap	07 Agustus 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250581	13 Agustus 2025 - 13 Agustus 2027	D
41	Umar	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Umar	1	Penangkap	07 Agustus 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250582	13 Agustus 2025 - 13 Agustus 2027	D
42	Sarifuddin	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Sarifuddin	1	Penangkap	07 Agustus 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250582	13 Agustus 2025 - 13 Agustus 2027	D
43	Satuan	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Satuan Dg Sese	1	Penangkap	07 Agustus 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250580	13 Agustus 2025 - 13 Agustus 2027	D
44	Bulukamase 04	BTN Griya Tongke Tongke Blok P.11, RT.002/RW.001, Desa Tongke Tongke, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai	Samsuri	25	Penangkap	07 Agustus 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 250624	19 Agustus 2025 - 19 Agustus 2027	D
45	Fitri Abadi 02	Campaga, RT.001/RW.001, Desa Lasiai, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan	Anis	27	Penangkap	07 Agustus 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 250630	19 Agustus 2025 - 19 Agustus 2027	D
46	Adira BL 01	Pulau Burung Lohe, RT.002/RW. 002, Kel. Pulau Buhung Pitue, Kec. Pulau Sembilan, kab. Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan	Jumardi Appe	29	Penangkap	07 Agustus 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 250629	19 Agustus 2025 - 19 Agustus 2027	D
47	Sumber Reski 04	Dusun Marana, RT.1/RW.1 Kel. Pasimarannu, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Prov Sulawesi Selatan	Muh. Iksan	19	Penangkap	07 Agustus 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 250631	19 Agustus 2025 - 19 Agustus 2027	D
48	Musa	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Musa Dg Taba	1	Penangkap	09 Agustus 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250573	13 Agustus 2025 - 13 Agustus 2027	D

49	Nasir Dg Mabe	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Nasir Dg Mabe	1	Penangkap	09 Agustus 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250574	13 Agustus 2025 - 13 Agustus 2027	D
50	Santri 01	Dusun Rajuni Utara, RT.000/RW.000, Desa Rajuni, Kec. Taka Bonerate, Kab. Selayar, PProv. Sulawesi Selatan	Arif	13	Penangkap	08 Agustus 2025	Ikan Demersal segar	Ikan Demersal segar	PT. Sinar Sejahtera Sentosa	ID - CPIB - K - 73 - 250626	19 Agustus 2025 - 19 Agustus 2027	C
51	Riswal 03	Cempae RT.003/RW.001, Desa Tongke Tongke, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan	Nurdin	29	Penangkap	08 Agustus 2025	Tuna segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 250628	19 Agustus 2025 - 19 Agustus 2027	C
52	Muhlis Jaya	Cempae RT.003/RW.001, Desa Tongke Tongke, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan	Sahrul	29	Penangkap	08 Agustus 2025	Tuna segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 250627	19 Agustus 2025 - 19 Agustus 2027	C
53	Riswal	Cempae RT.003/RW.001, Desa Tongke Tongke, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan	Saeful	29	Penangkap	08 Agustus 2025	Tuna segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 250625	19 Agustus 2025 - 19 Agustus 2027	C
54	Bangun	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Bangun Dg Nai	1	Penangkap	09 Agustus 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250575	13 Agustus 2025 - 13 Agustus 2027	D
55	Aso Bella	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Aso Bella	1	Penangkap	09 Agustus 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250576	13 Agustus 2025 - 13 Agustus 2027	D
56	Suaib	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Suaib Dg Pasang	1	Penangkap	09 Agustus 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250577	13 Agustus 2025 - 13 Agustus 2027	D
57	Al Maidah	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Patahuddin Dg Sikki	1	Penangkap	09 Agustus 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250578	13 Agustus 2025 - 13 Agustus 2027	D
58	Saharuddin	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Saharuddin Dg Naba	1	Penangkap	09 Agustus 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250579	13 Agustus 2025 - 13 Agustus 2027	D

59	Rahmadana	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Sudirman	1	Penangkap	09 Agustus 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250636	20 Agustus 2025 - 20 Agustus 2027	D
60	M. Ripal	Kalongkong, Kelurahan Bontosunggu, Kec. Galesong Utara, Keb. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan	Anwar Bani	1	Penangkap	09 Agustus 2025	Kepiting Rajungan	Demersal	PT. Ocean Champ Seafood	ID - CPIB - K - 73 - 250635	20 Agustus 2025 - 20 Agustus 2027	D
61	Susi Indah 01	Jl. Yos Sudarso, RT.3/RW.2, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan	Bancoa	13	Penangkap	19 Agustus 2025	Gurita, Kakap, Lencam, Kaka Tua	Ikan Demersal Segar	PT. Sinar Sejahtera Sentosa	ID - CPIB - K - 73 - 250726	4 September 2025 - 4 September 2027	D
62	Rezki Jaya MR 03	Maroanging, RT.002/RW.002, Desa Tongke Tongke, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan	Abdullah	29	Penangkap	1 September 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 250761	12 September 2025 - 12 September 2027	C
63	Nazirah 01	Desa Maroangin, RT.003/RW.001, Desa Tongke Tongke, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan	Yusrianto	27	Penangkap	2 September 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 250731	8 September 2025 - 8 September 2027	D
64	Suci Rudy	Baringeng, RT.000/RW.000, Kel. Samataring, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan	Jamaluddin	22	Penangkap	2 September 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 250732	8 September 2025 - 8 September 2027	D
65	Berkat Usaha MFI	Dusun Bisokeng, RT.003/RW.002, Kel. Sinaji, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan	Sandi	20	Penangkap	3 September 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 250733	8 September 2025 - 8 September 2027	B
66	Risma Jaya 02 SJ	Dusun Maroanging, RT.002/RW.002, Desa Tongke Tongke, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan	Sagena	27	Penangkap	3 September 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 250734	8 September 2025 - 8 September 2027	B

67	Gibran Makmur 01	Dusun Baringeng, RT.002/RW.001, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan	Muh. Tahir	25	Penangkap	11 November 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 251183	14 November 2025 - 14 November 2027	B
68	Cahaya Purnama 07	Tippulue, RT.-/RW,-,Kel. Toro, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan	Nursaenal	21	Penangkap	11 November 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 251185	14 November 2025 - 14 November 2027	B
69	Elsa Jaya	Wiyatamandala, RT.0/RW.0, Kel. Lonrae, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan	Fikri Nur Fauzan	30	Penangkap	11 November 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 251186	14 November 2025 - 14 November 2027	B
70	Sinar Baru Mr 03	Jl. Bulu Bicara, RT.002,RW.002. Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan	Imran	26	Penangkap	11 November 2025	Tuna Segar	Ikan Pelagis segar	PT. Chen Woo Fishery	ID - CPIB - K - 73 - 251184	14 November 2025 - 14 November 2027	B

**DOKUMENTASI KEGIATAN
KOORDINASI DENGAN DIREKTUR PELABUHAN DAN PENANGGUNG
JAWAB PP UNTIA**



**DOKUMENTASI KEGIATAN
INSPEKSI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK DI CV SENADA HORTA**



**DOKUMENTASI KEGIATAN
SOSIALISASI TERHADAP SELURUH UPT BPPMKHP TERKAIT SOP PELAKSANAAN SERTIFIKASI PADA SEKTOR
PRODUKSI PRIMER**



DOKUMENTASI KEGIATAN
SHARING SESSION DALAM RANGKA MENINDAKLANJUTI SURAT B.233/BPPMHKP/OT.310/2025 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN



DOKUMENTASI KEGIATAN
MONITORING PELAKSANAAN SERTIFIKASI CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK (CPIB) KAPAL



**DOKUMENTASI KEGIATAN
BINCANG INSPIRATIF TENTANG STRATEGI KEBERHASILAN DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN SERTIFIKASI CPIB KAPAL**



**DOKUMENTASI KEGIATAN
SURVEILAN CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
DI MUTIARA BENUR JALANGNGE
30 JUNI 2025**





DOKUMENTASI KEGIATAN
INSPEKSI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
DI PT. SINAR SUKSES PERSADA KABUPATEN JENEPONTO
17 JUNI 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN
INSPEKSI CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI ATAS KAPAL
24 MEI 2025 – 21 JUNI 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI PLAN OF ACTION (POA) DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI AUDIT DG SANTE UNI EROPA
05 JUNI 2025

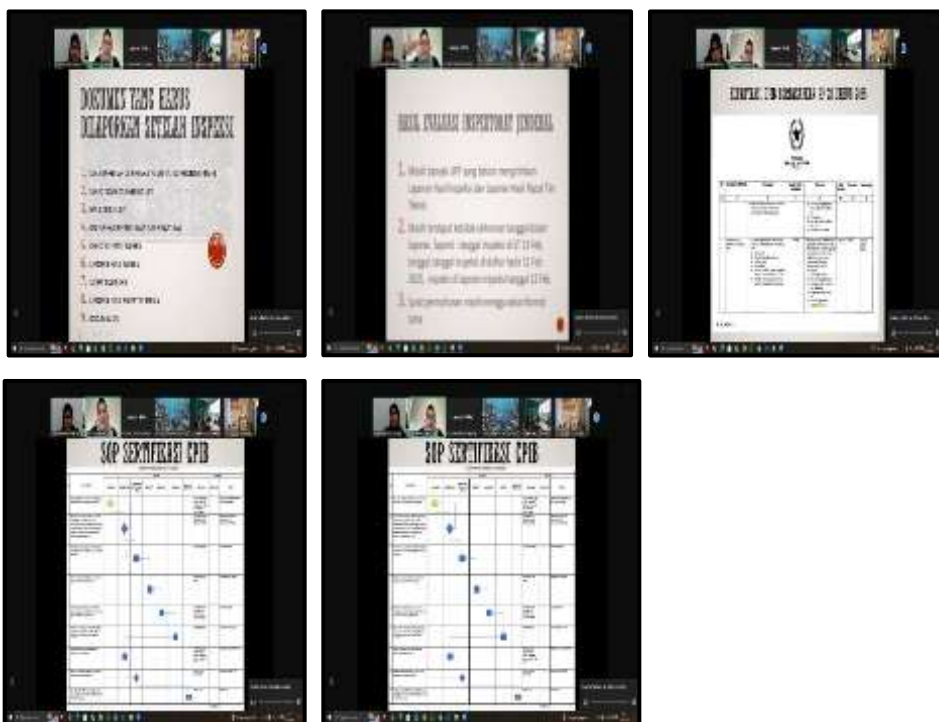


DOKUMENTASI KEGIATAN
KOORDINASI DENGAN PELABUHAN PERIKANAN UNTIA TERKAIT PERCEPATAN SERTIFIKASI CPIB KAPAL
19 MEI 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN
HELP DESK OLEH PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER
BULAN JUNI 2025





DOKUMENTASI KEGIATAN
PERTEMUAN REGULER I KOMITE PENGELOLA BERSAMA PERIKANAN (KPBP) TUNA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TANGGAL 27 MEI 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN
PERSAMAAN PERSEPSI DALAM PENGISIAN CHECKLIST CBIB
BADAN MUTU KKP MAKASSAR
24 JUNI 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT KORDINASI DENGAN PT. OCEAN CHAMP SEAFOOD TERKAIT
\PERCEPATAN SERTIFIKASI CPIB KAPAL
25 JUNI 2025





DOKUMENTASI KEGIATAN
SURVEILAN CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
DI MUTIARA BENUR JALANGNGE
3 JULI 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN
INSPEKSI CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI ATAS KAPAL





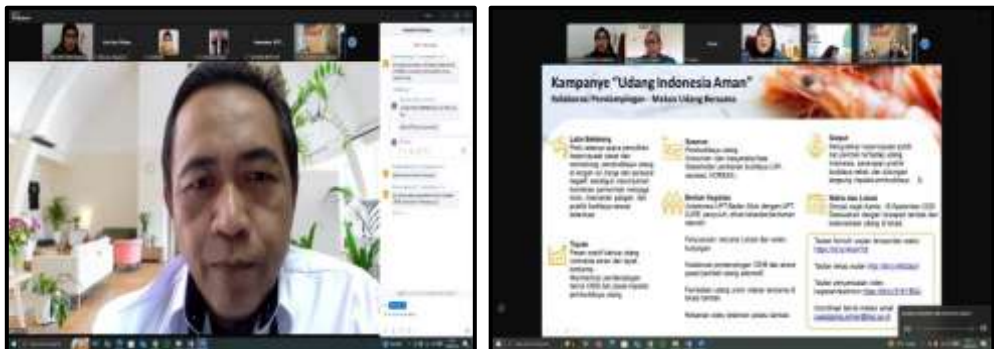
DOKUMENTASI KEGIATAN
SURVEILAN CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK



DOKUMENTASI KEGIATAN
PELATIHAN CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK (CPIB) SERTA KOORDINASI PERCEPATAN SERTIFIKASI CPIB
KAPAL DENGAN DINAS PERIKANAN DAN PP UNTIA DI KABUPATEN SINJAI
TANGGAL 1 JULI 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN
KEGIATAN HELP DESK TRIWULAN III TAHUN 2025





DOKUMENTASI KEGIATAN
SOSIALISASI JUKNIS SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN
YANG BAIK (CPPIB)
23 JULI 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT PENYESUAIAN SERTIFIKASI PRIMER PASCA PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025
1 AGUSTUS 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI DENGAN BPSPL MAKASSAR
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI DENGAN DINAS KELAUTAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN
PELATIHAN CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB) DAN CARA
PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB)
22 – 24 OKTOBER 2025





DOKUMENTASI KEGIATAN
INSPEKSI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB)
DI UKKAS HAMZAH, KABUPATEN MAROS
27 – 28 OKTOBER 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN
INSPEKSI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
DI UPTD BALAI BENIH IKAN (BBI) AIR TAWAR TANRALILI KABUPATEN MAROS
26 NOVEMBER 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN
SURVEILAN CARA PEMBESARAN IKAN YANG BAIK (CBIB)
DI PT. 2512 KABUPATEN BULUKUMBA
19 – 20 DESEMBER 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN
INSPEKSI CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI ATAS KAPAL SECARA
VIRTUAL



DOKUMENTASI KEGIATAN
PELATIHAN CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK (CPIB) DI KABUPATEN BONE
29-30 OKTOBER 2025





DOKUMENTASI KEGIATAN
 PELATIHAN CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK (CPIB)
 DI KABUPATEN BONE, 24-25 NOVEMBER 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN
PEMAHAMAN PRODUKSI PAKAN SERTA PENGELOLAANNYA DALAM MENDUKUNG
PEMBUDIDAYAAN IKAN
01 DESEMBER 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN
SOSIALISASI PROSES SERTIFIKASI CPIB KAPAL
MELALUI SIAP MUTU SECARA VIRTUL
08 DESEMBER 2025



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
Nama Tim/ja	:	Pengendalian kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan
Periode Laporan	:	Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN		
	2023	2024	2025
Target	0	70	70
Realisasi	0	114,2	94,6
% Capaian	0	163,1%	135,14 %

Catatan :

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?) Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa mutu pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar mutu; Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut serta adanya tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan konsep HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk akhir. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melalui Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen Pada tahun 2025 melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)
2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)

Kegiatan Sertifikasi Pasca Panen merupakan salah IKU yang mendukung Asta Cita ke-2 Presiden RI yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua dan ke empat KKP yaitu

3. Prioritas kedua KKP yaitu Penerapan sistem kuota dalam penangkapan ikan untuk menjaga kelestarian sumber daya dimana, setiap hasil tangkapan harus dijamin mutu dan keamanannya melalui sertifikasi SKP dan HACCP sebelum dapat diekspor ke negara tujuan, sehingga keberterimaan produk perikanan Indonesia di pasar global dapat meningkat.
4. Prioritas keempat KKP yaitu Pengembangan budidaya perikanan di laut, pesisir, dan darat yang memperhatikan aspek keberlanjutan dimana, setiap hasil budidaya harus dijamin mutu dan keamanannya melalui sertifikasi SKP dan HACCP sebelum dapat diekspor ke negara tujuan, sehingga keberterimaan produk perikanan Indonesia di pasar global dapat meningkat.

Adapun kegiatan pendukung pada IKU pasca panen adalah kegiatan sertifikasi Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan, sertifikat SPDI (Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan) diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan penyimpanan, pengadaan, sortasi dan grading serta yang melakukan kegiatan distribusi ikan dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai KBLI terkait, menerapkan cara distribusi ikan yang baik (CDIB) dan memenuhi persyaratan pembinaan dari Direktorat Teknis.

Sehubungan tindak lanjut dari Plan of Action (PoA) dan rekomendasi hasil audit DG SANTE – Uni Eropa (UE) pada Triwulan II, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) – KKP perlu segera melakukan sertifikasi terhadap pemasok yang mensuplai bahan baku ke UPI Approval Number UE. Sertifikasi tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia bahwa pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan di tahap hulu hingga hilir, sehingga permasalahan ekspor ke UE bisa terselesaikan. UPT Balai Mutu Makassar diberikan target sebanyak 18 (delapan belas) unit pemasok yang termasuk dalam pemasok ke UPI approval number Uni Eropa dan pada Triwulan III sudah direalisasikan unit pemasok ke Unit pengolahan Ikan dengan negara tujuan UE (Uni Eropa) telah dilakukan sertifikasi.

Proses pelaksanaan SPDI Tahun 2025 mengalami kendala dikarenakan dasar hukum yaitu PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berbasis Risiko belum memuat ketentuan terkait pelaksanaan SPDI. Atas dasar tersebut telah terbit Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan No 31 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Penerapan Hazard Analysis And Critical Control Point di Supplier, maka menjadi acuan dalam menerbitkan Surat Keterangan Penerapan Hazard Analysis And Critical Control Point di Supplier pada Tahun 2025.

Persyaratan dalam penerbitan SKP mengacu pada Permen KP No. 17 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan SKP, sedangkan persyaratan dalam penerbitan sertifikasi HACCP mengacu pada Permen KP NO 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya kerja ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan melalui kegiatan inspeksi/sertifikasi SKP dan HACCP diperlukan sumberdaya manusia (Inspektur Mutu) yang

berkompeten- ASN harus terus belajar dan mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah.

CARA PENGUKURAN

5. Perhitungan berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

Dimana

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
xn = Total dari unsur pembentuk (2)

Pada rumus perhitungan di atas belum dijelaskan rumus perhitungan untuk memperoleh A dan B. Untuk memudahkan perhitungan maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$A = \frac{\text{Jumlah sertifikat HACCP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah sertifikat yang expired (target)}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sertifikat SKP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah rekomendasi yang masuk}} \times 100\%$$

Adapun persentase realisasi pada Tahun 2025 dapat dilihat pada matriks sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tahun 2025		
		Target/Rekomendas	Realisasi	Persentase
1	Sertifikasi HACCP (A)	272	291	106,98%
2	Sertifikasi SKP (B)	416	321	77,16%

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{106,98 + 77,16}{2} \\ &= 94,6 \%\end{aligned}$$

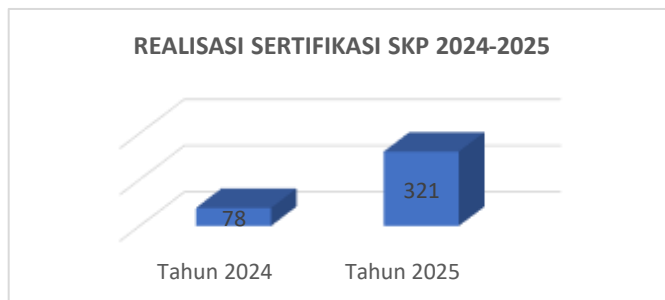
Dengan demikian realisasi IKU sebesar 94,6% melebihi target realisasi yang ditetapkan yaitu sebesar 70% atau capaian IKU ini sebesar 135,14%.

Jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2024 sebesar 163,1%, maka di tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 135,14% atau 17,14%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 merupakan tahun perpanjangan untuk sertifikasi HACCP sehingga realisasi sertifikat HACCP tinggi.

Capaian sertifikat HACCP dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Capaian sertifikat SKP dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

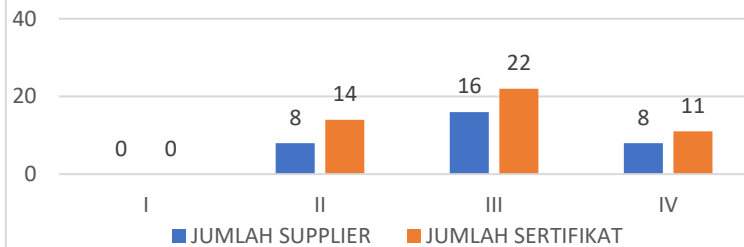


Pada grafik realisasi sertifikat SKP terlihat peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2024 yaitu sebesar 311,53%. Hal ini disebabkan karena pada akhir tahun 2024, kewenangan sertifikasi SKP baru dilimpahkan ke BPPMKHP dari DJPDSKP, sehingga angka capaian masih sangat rendah.

Adapun untuk kegiatan pendukung berupa Sertifikasi Penerapan HACCP Di Supplier, pada Tahun 2025 telah terealisasi sebagai berikut :

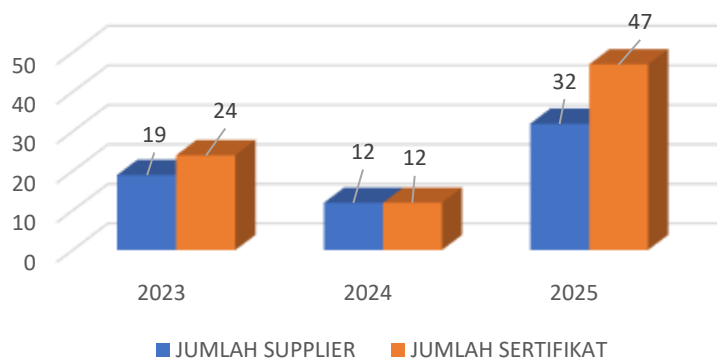
TW	JUMLAH SUPPLIER	JUMLAH SERTIFIKAT
I	0	0
II	8	14
III	16	22
IV	8	11
Total	32	47

REALISASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENERAPAN HACCP DI SUPPLIER TAHUN 2025



	2023	2024	2025
JUMLAH SUPPLIER	19	12	32
JUMLAH SERTIFIKAT	24	12	47

REALISASI SERTIFIKASI PADA SUPPLIER



Seiring dilakukannya sosialisasi, pelatihan tentang arti pentingnya sertifikasi pada tingkat unit pemasok dan pemahaman penerapan HACCP di tingkat supplier, dapat dilihat pada Tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah sertifikasi pada supplier sebesar 291,67 %.

Output dari kegiatan ini berupa sertifikat SKP dan HACCP serta didukung oleh sertifikasi SPDI atau CPIB supplier. Dengan adanya sertifikasi SKP dan HACCP ini, Unit Pengolahan Ikan atau UMKM dapat melakukan kegiatan ekspor produk perikananannya dengan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terjamin serta memenuhi standar negara tujuan ekspor. Hal ini didukung dengan adanya sertifikasi SPDI atau CPIB supplier yang dapat menjamin mutu dan keamanan pasokan bahan baku yang masuk ke unit pengolahan dan UMKM.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 sebagai berikut:

1. Telah dilakukan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Mutu Domestik dan Sertifikasi SPDI Pasca Efisiensi anggaran 18 Februari 2025 secara daring oleh Pusat Mutu Pasca Panen;
2. Telah dilakukan Rapat Koordinasi Verifikasi Verifikator Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada tanggal 10 Maret 2025 secara daring oleh Pusat Mutu Pasca Panen;
3. Sosialisasi pembinaan CDIB dan Penerbitan SPDI yang dilaksanakan oleh Direktorat Logistic DITJEN PDSPKP secara daring pada tanggal 13 maret 2025.
4. Telah dilakukan koordinasi dengan PJ. Pembinaan CDIB dari Direktorat Teknis Penguatan Daya Saing Perikanan dan Kelautan melalui via Whatsap dan telepon (dokumentasi terlampir);
5. Telah dilakukan Koordinasi percepatan Kep. Ka. Badan No 31 Tahun 2025 pada tanggal 12 Juni 2025 (dokumentasi terlampir).
6. Telah dilakukan sharing session peningkatan kompetensi Inspektur Mutu tentang PP N0 28 Tahun 2025 nspektur Mutu pada tanggal 21 Agustus 2025
7. Pada tanggal 9 September 2025 Inspektur Mutu mengikuti kegiatan konsultasi public tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis resiko sector kelautan dan perikanan bidang pengendalian pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan diselenggarakan oleh sekretariat badan
8. Kegiatan rapat penyatuan inspeksi perpanjangan Inspeksi SKP dan HACCP telah dilakukan pada tanggal 16 September 2025, yang diselenggarakan oleh Pusat Mutu Pasca Panen
9. Pada tanggal 8 – 10 Oktober 2025 Telah dilakukan Goes To Supplier dalam rangka Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan di Kepulauan Selayar, kegiatan ini merupakan kolaborasi Balai Besar KIPM Makassar dengan Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI);
10. Pada tanggal 20 - 21 Oktober 2025 Balai Besar KIPM Makassar mengikuti kegiatan workshop pemindaian dan pengambilan sampel produk udang yang diekspor bebas dari radiasi radionuklida Sesium -137 yang dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP KKP;
11. Telah dilakukan Goes To Supplier dalam rangka Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan di Kepulauan Selayar pada tanggal 25 Oktober 2025
12. Pada tanggal 11 November 2025 Balai Besar KIPM Makassar mengikuti kegiatan Sosialisasi SHTI dan CoA Perikanan Tangkap yang diselenggarakan oleh PP Untia;
13. Pada tanggal 11 November 2025 Balai Besar KIPM Makassar mengikuti kegiatan Sosialisasi Penerbitan CoA Perikanan Budidaya yang diselenggarakan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP KKP;
14. Pada tanggal 21 November 2025 Balai Besar KIPM Makassar berkolaborasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Maros mengadakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM pada Level UMKM dan Supplier yang dilaksanakan di Kantor Bupati Maros;
15. Pada tanggal 24 November 2025, Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu telah mengikuti Sosialisasi Teknis Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) untuk Penerbitan sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana dan Sarana, DJPDSKP KKP;
16. Pada tanggal 17 Desember 2025 Balai Besar KIPM Makassar menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Hulu Hilir kepada Peserta Magang dan Penyuluh Perikanan BRPBAPPP Maros;

Kegiatan ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu dengan total sebanyak 16 orang dan didukung oleh tenaga PPNPM sebanyak 24 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengendalian dan pengawasan mutu serta pelayanan sertifikasi mutu hasil perikanan.

Anggaran awal kegiatan pasca panen pada tahun 2025 sebesar Rp. 210.000.000.- di blokir sebesar Rp. 169.228.000,- dan pagu revisi sebesar Rp. 43.012.000,- realisasi tahun 2025 sebesar Rp.42.999.157,- atau sebesar

(99,97%). Jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp. 376.370.000, realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 375.548.469 (99,55%) mengalami penurunan sebesar 42%.

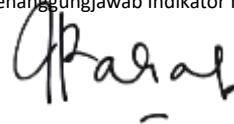
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Terdapat beberapa rekomendasi SKP dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang belum memenuhi persyaratan dan memerlukan revisi sehingga realisasi kurang maksimal.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Melakukan koordinasi dengan Pembina mutu daerah dalam rangka pembinaan teknis di tingkat daerah sebelum pengajuan rekomendasi.	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Hasil Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
- Pada Tahun 2025 telah dilakukan akselerasi pelaksanaan Sertifikasi SKP yang dibuktikan dengan peningkatan output sertifikat dari Tahun 2024 sebanyak 78 sertifikat meningkat menjadi 321 sertifikat pada Tahun 2025. Upaya akselerasi telah dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan selaku instansi yang merupakan perpanjangan kewenangan pembinaan mutu dari Direktorat Jenderal PDSKP KKP. Selain itu dilakukan sosialisasi SKP baik kepada penyuluh perikanan maupun kepada pelaku utama perikanan.	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Pekanan

Makassar, 08 Januari 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja



Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi,M.Sc

DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI SKP



DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI KONSISTENSI PENERAPAN HACCP



DOKUMENTASI KEGIATAN SERTIFIKASI PENERAPAN HACCP DI SUPPLIER TAHUN 2025





DOKUMENTASI KEGIATAN TINDAK LANJUT TAHUN 2025

1. Telah dilakukan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Mutu Domestik dan Sertifikasi SPDI Pasca Efisiensi anggaran 18 Februari 2025 secara daring oleh Pusat Mutu Pasca Panen;



2. Telah dilakukan Rapat Koordinasi Verifikasi Verifikator Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada tanggal 10 Maret 2025 secara daring oleh Pusat Mutu Pasca Panen;



3. Sosialisasi pembinaan CDIB dan Penerbitan SPDI yang dilaksanakan oleh Direktorat Logistic DITJEN PDSPKP secara daring pada tanggal 13 maret 2025.

6. Telah dilakukan sharing session peningkatan kompetensi Inspektur Mutu tentang PP NO 28 Tahun 2025 nspektur Mutu pada tanggal 21 Agustus 2025



7. Pada tanggal 9 September 2025 Inspektur Mutu mengikuti kegiatan konsultasi public tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis resiko sector kelautan dan perikanan bidang pengendalian pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan diselenggarakan oleh sekretariat badan



8. Kegiatan rapat penyatuan inspeksi perpanjangan Inspeksi SKP dan HACCP telah dilakukan pada tanggal 16 September 2025, yang diselenggarakan oleh Pusat Mutu Pasca Panen



9. Pada tanggal 8 – 10 Oktober 2025 Telah dilakukan Goes To Supplier dalam rangka Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan di Kepulauan Selayar, kegiatan ini merupakan kolaborasi Balai Besar KIPM Makassar dengan Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI)



10. Pada tanggal 20 - 21 Oktober 2025 Balai Besar KIPM Makassar mengikuti kegiatan workshop pemindaian dan pengambilan sampel produk udang yang diekspor bebas dari radiasi radionuklida Sesium -137 yang dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP KKP;



11. Pada tanggal 11 November 2025 Balai Besar KIPM Makassar mengikuti kegiatan Sosialisasi SHTI dan CoA Perikanan Tangkap yang diselenggarakan oleh PP Untia;



12. Pada tanggal 11 November 2025 Balai Besar KIPM Makassar mengikuti kegiatan Sosialisasi Penerbitan CoA Perikanan Budidaya yang diselenggarakan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP KKP;



13. Pada tanggal 21 November 2025 Balai Besar KIPM Makassar berkolaborasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Maros mengadakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM pada Level UMKM dan Supplier yang dilaksanakan di Kantor Bupati Maros;



14. Pada tanggal 24 November 2025, Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu telah mengikuti Sosialisasi Teknis Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) untuk Penerbitan sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana dan Sarana, DJPDSKP KKP;



15. Pada tanggal 17 Desember 2025 Balai Besar KIPM Makassar menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Hulu Hilir kepada Peserta Magang dan Penyuluh Perikanan BRPBAPPP Maros;



16. Goes To Supplier dalam rangka Road to Bulan bakti Kelautan dan Perikanan pada tanggal 25 Oktober 2025 di Kepulauan Selayar



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)
Nama Tim/ja	:	Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu , dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Tahunan 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)

T/R	TAHUN		
	2023	2024	2025
Target	2	-	1
Realisasi	2	-	1
%Capaian	100	-	100

Catatan :

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Pada tahun 2025 terdapat penambahan IKU baru yaitu Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi), yang ditahun sebelum hanya berupa IKU pendukung.

Balai Besar KIPM Makassar adalah salah satu unit kerja yang mendapatkan target lokasi monitoring cemaran perairan dari Kepala Pusat Mutu Produksi Primer BPPMHKP pada, tahun 2025 lokasi monitoring 1 lokasi yaitu perairan wilayah Takalar yang terdiri dari 1 titik monitoring yaitu TPI Beba.

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui apakah komoditi perikanan yang diperoleh dari perairan terpapar racun hayati laut dan logam berat serta mendapatkan data dan informasi pengujian kandungan racun hayati laut dan logam berat pada ikan sebagai bahan rekomendasi kepada Otoritas Kompeten.

Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun yaitu pada setiap semester dengan sasaran titik pendaratan ikan yang ditangkap di perairan Takalar atau di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan adanya data monitoring yang mutakhir sehingga menjadi bahan rekomendasi pengelolaan perikanan di perairan Makassar.

Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan monitoring cemaran perairan meliputi :

1. Sarana dan Prasarana : Penerapan standar sanitasi dan higienis pada TPI/PPI merupakan indikator jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipasarkan sehat dan aman untuk konsumsi
2. Pengambilan Contoh uji yang diambil kemudian dibawa ke Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar untuk pengujian parameter logam berat (*Pb, Cd, Hg*) dan pengujian mikrobiologi untuk parameter *E.Coli, Salmonella* dan dikirim ke Laboratorium BUSKIPM untuk pengujian racun hayati laut parameter *ciguatoksine* dikarenakan pengujian racun hayati belum masuk ruang lingkup di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar.

Kegiatan monitoring cemaran perairan merupakan salah IKU yang mendukung Asta Cita ke - 2 Presiden RI yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua KKP yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang diekspor ke negara tujuan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di laboratorium dan penyiapan sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir.

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya kerja ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu perikanan melalui kegiatan monitoring cemaran perairan di perlukan sumberdaya manusia (Inspektur mutu) yang berkompeten ASN harus terus belajar dan mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah.

Kegiatan monitoring cemaran perairan merupakan kegiatan yang statusnya termasuk dalam kategori tinggi. Risiko tinggi dalam konteks manajemen risiko merujuk pada kegiatan atau situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian signifikan, baik dari segi finansial, keamanan, reputasi maupun operasional. Adapun kegiatan monitoring cemaran ini memiliki risiko berupa data dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif yang disebabkan karena tim pelaksana tidak detail dalam menuangkan hasil monitoring ke dalam laporan. Risiko ini telah dimitigasi oleh penanggung jawab kegiatan berupa penyusunan laporan monitoring sesuai dengan juknis. Pengendalian risikonya telah dilaksanakan berupa verifikasi laporan monitoring sebelum disampaikan ke pusat.

Kegiatan monitoring cemaran perairan, berdasarkan program Tahunan yang telah disusun pada tahun 2025 memiliki 1 target lokasinya yaitu TPI Beba Kab. Takalar, dan dilaksanakan dalam 2 (dua) kali setahun.

Adapun hasil kegiatan monitoring cemaran perairan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Hasil pengujian monitoring cemaran perairan di PPI Beba tahun 2025

No	Lokasi	Jenis ikan	Parameter Uji			E coli	Hasil Uji	
			Logam berat (Hg, Cd, Pb)	Ciguat oxin	Salamo nella		TW III	TW IV
1	PPI Beba	Ikan Barakuda	√	<i>Negativ</i>	√	√	Bawah ambang batas	
		Ikan kaneke	√	<i>Negativ</i>	√	√	Bawah ambang batas	
		Ikan Katamba	√	<i>Negativ</i>	√	√	Bawah ambang batas	

Dengan terlaksananya kegiatan tersebut di atas, maka realisasi kegiatan monitoring cemaran perairan tahun 2025 telah tercapai 100%. Hasil pengujian parameter logam berat dan mikrobiologi, seluruh sampel dinyatakan memenuhi standar atau berada di bawah ambang batas.

Capaian IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2024 karena pada tahun 2024 kegiatan ini hanya merupakan IKU pendukung dari IKU Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%). Namun jika kegiatan monitoring perairan tahun 2024 dan 2025 dibandingkan maka dapat di peroleh data sebagai berikut :

3. Jumlah lokasi monitoring cemaran perairan mengalami penurunan, dari 2 lokasi tahun 2024 menjadi 1 lokasi di tahun 2025
4. Jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan mengalami penurunan dari 4 kali di tahun 2024 menjadi 2 kali di tahun 2025
5. Jenis ikan yang diambil sebagai sampel mengalami penurunan dari 5 jenis ikan sampel di tahun 2024 menjadi 3 jenis ikan sampel di tahun 2025

Hal ini disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga UPT Balai Besar KIPM Makassar melakukan penyesuaian lokasi, frekuensi monitoring dan jenis ikan yang diambil sampel.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 meliputi :

1. Melakukan rapat koordinasi pengendalian pengawasan mutu produksi primer tanggal Februari 2025
2. Melakukan pengambilan sampel dengan jenis ikan demersal dengan lokasi TPI Beba tanggal 29 April 2025 dan 25 September 2025
3. Mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer pada tanggal 19 Februari 2025 yang dilaksanakan secara daring oleh Pusat Mutu Produksi Primer BPPMHKP. Pada kegiatan tersebut Pusat Mutu Produksi Primer menyampaikan target lokasi monitoring cemaran perairan untuk BPPMHKP Makassar.

4. Refresment/Sharing session peningkatan kompetensi inspektur mutu melalui bincang inspiratif pada tanggal 2 juni 2025
5. melakukan Refresment/Sharing session peningkatan kompetensi inspektur mutu melalui bincang inspiratif terkait Keputusan Kepala BKIPM No. 96 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis monitoring cemaran perairan pada tanggal 24 Juli 2025
6. Menyampaikan hasil pengujian monitoring cemaran perairan di TPI Beba Kab. Takalar pada tanggal 2 Desember 2025 pada Penanggungjawab TPI Beba
7. Mengikuti Rapat Evaluasi dan koordinasi dengan tim Pusat Mutu Produksi Primer pada tanggal 24 Desember 2025

SDM yang terlibat dalam kegiatan monitoring cemaran perairan tahun 2025 adalah 8 orang Inspektur Mutu. Sedangkan pada tahun 2024 SDM yang terlibat dalam kegiatan monitoring cemaran perairan sebanyak 16 Inspektur mutu lebih banyak dari tahun 2024 karena dipengaruhi oleh jumlah lokasi dan frekuensi kegiatan tahun 2024 yang lebih banyak.

Anggaran awal kegiatan monitoring cemaran perairan pada tahun 2025 sebesar Rp. 10.000.000,- setelah buka blokir anggaran bernilai Rp. 8.240.000,- dan realisasi tahun 2025 sebesar Rp. 8.232.000,- atau sebesar 99,90 %

Pada tahun 2024 kegiatan monitoring cemaran perairan merupakan kegiatan pendukung dengan nilai Anggaran Rp. 80.000.000,- dengan realisasi sebesar 78.603.744 atau sebesar 98,25%

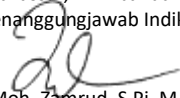
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Pada Keputusan Kepala BKIPM No. 96 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis monitoring cemaran perairan dinyatakan frekuensi pengambilan contoh dilakukan minimal 1 (satu) kali per triwulan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Mengikuti kegiatan rapat persiapan monitoring cemaran perairan yang di laksanakan oleh pusat mutu produksi primer untuk mendapatkan penjelasan detail terkait juknis tersebut	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu , dan Keamanan Hasil Perikanan

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Pada tanggal 1 desember 2025 telah menyampaikan hasil pengujian ke insatansi terkait yaitu Dinas Perikanan Kab. Takalar	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu , dan Keamanan Hasil Perikanan

Makassar, Januari 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja


Moh. Zamrud, S.Pi, M.Si

Dokumentasi Triwulan I

**FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU PRODUKSI PRIMER
PADA TANGGAL 19 FEBRUARI 2025**



Dokumentasi Triwulan II

**DOKUMENTASI KEGIATAN
Refresment/Sharing session peningkatan kompetensi inspektur mutu
melalui bincang inspiratif**

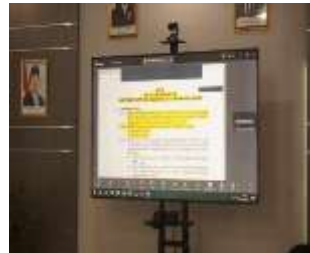


**DOKUMENTASI KEGIATAN SURVEILAN MONITORING CEMARAN PERAIRAN
DI PPI BEBA, KECAMATAN GALESONG UTARA, KABUPATEN TAKALAR,
PROPINSI SULAWESI SELATAN**



Dokumentasi Triwulan III

DOKUMENTASI KEGIATAN
Refresment/Sharing session peningkatan kompetensi inspektur mutu
melalui bincang inspiratif pada tanggal 24 Juli 2025



Dokumentasi Triwulan III

DI PPI BEBA, KECAMATAN GALESONG UTARA, KABUPATEN TAKALAR, PROPINSI SULAWESI SELATAN



Dokumentasi Triwulan IV HASIL PENGUJIAN CIGUATOXIN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kantor Wilayah Sulawesi Selatan
Jalan Jenderal Sudirman No. 100
Makassar 90132
Telp. (0831) 8470000
Fax. (0831) 8470001
Email: kementerian@kementerian.go.id

HASIL ISI
Form No. 001/2020
Revisi/Revisi: 01/2020/001/2020

Memeriksa:
1. Kepala Wilayah
2. Kepala Bidang
3. Kepala Subbidang
4. Kepala Seksi
5. Kepala Subseksi
6. Kepala Subseksi
7. Kepala Subseksi
8. Kepala Subseksi
9. Kepala Subseksi

Memeriksa:
1. Kepala Wilayah
2. Kepala Bidang
3. Kepala Subbidang
4. Kepala Seksi
5. Kepala Subseksi
6. Kepala Subseksi
7. Kepala Subseksi
8. Kepala Subseksi
9. Kepala Subseksi

No.	Item	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail
1	Kel. Airas	Kel. Airas	Kel. Airas	Kel. Airas	Kel. Airas	Kel. Airas	Kel. Airas	Kel. Airas
2	Kel. Airas	Kel. Airas	Kel. Airas	Kel. Airas	Kel. Airas	Kel. Airas	Kel. Airas	Kel. Airas
3	Kel. Airas	Kel. Airas	Kel. Airas	Kel. Airas	Kel. Airas	Kel. Airas	Kel. Airas	Kel. Airas

Referensi:
1. Hasil uji coba...
2. Hasil uji coba...
3. Hasil uji coba...
4. Hasil uji coba...
5. Hasil uji coba...
6. Hasil uji coba...
7. Hasil uji coba...
8. Hasil uji coba...
9. Hasil uji coba...

Disetujui: 08 Desember 2020
Kepala Wilayah

Disetujui: 08 Desember 2020
Kepala Wilayah

Dokumentasi Triwulan IV



Nomor : B.3740/BBKPM/MSK-TU.210/KR/2025 1 Desember 2025
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Pembertahanan Hasil Pengujian Monitoring Cemeran Perikanan dan Perikanan Kelautan Lingkungan

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
 Di Takalar

Selubungan dengan pelaksanaan kegiatan monitoring cemeran perikanan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar di semester II tahun 2025 dimana salah satu titik monitoring adalah PPI Bala Takalar, maka bersama ini disampaikan hasil pengujian pada ikan hasil tangkapan ikan sesuai dengan persyaratan. Adapun hasil perikanan kode lingkungan PPI Bala Takalar masih terdapat beberapa ketidaksesuaian pada fasilitas konstruksi serta sanitasi dan hygiene. Untuk itu, kami merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan secara progresif terhadap kondisi ikan, sarana pendukung air, program pemantauan tangkai tangkai, fasilitas ikan, ketersediaan air serta kebersihan perikanan dan alat tangkap yang digunakan.

Oleh karena kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pl. Kepala BBKPM Makassar,



Mohammad Zainul

Dikirimkan di: 14 Desember 2025, pukul 10.00 WIB, melalui email: zainul@bbkpm.makassar.go.id
 Ditandatangani oleh: Mohammad Zainul, Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
 HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
 JALAN MEDAN MERDEKA YUKON NOMOR 10
 JAKARTA 10110 KOTA PUS 4100 20110101
 TELEFON 021 21507000, 021 21507001
 LAMARAN www.kkp.go.id (BUREAU), 021 21507000 (BUREAU)

Nomor : B.1835/BBKPM/MSK-TU.330/KR/2025 21 Desember 2025

Salut : Bismillah
 Lampiran : Satu Lembar
 Hal : Undangan Rapat

Yth. (Daftar Terlampir)

Selubungan dengan pelaksanaan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor perikanan primer melalui kegiatan monitoring pengawasan ikan, maka bersama ini disampaikan hasil pengujian pada ikan hasil tangkapan ikan sesuai dengan persyaratan. Adapun hasil perikanan kode lingkungan PPI Bala Takalar masih terdapat beberapa ketidaksesuaian pada fasilitas konstruksi serta sanitasi dan hygiene. Untuk itu, kami merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan secara progresif terhadap kondisi ikan, sarana pendukung air, program pemantauan tangkai tangkai, fasilitas ikan, ketersediaan air serta kebersihan perikanan dan alat tangkap yang digunakan.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu atau Pejabat/Staff yang mewakili pada pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

- hari, tanggal : Rabu, 24 Desember 2025
- waktu : Pukul 13.00 WIB s.d 16.00 WIB
- tempat : Ruang Rapat New Century GMBH I Lantai 8 (sistem hybrid)
 Zoom Meeting ID Rapat : 910 2157 9038
 Password : 406662
- agenda : a. Evaluasi pelaksanaan monitoring perikanan tahun 2025;
 b. Penyelesaian permasalahan monitoring perikanan tahun 2025 dan
 c. Hal lain yang berkembang dalam rapat

Oleh karena kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pl. Kepala Badan
 Pengendalian dan Pengawasan Mutu
 Hasil Kelautan dan Perikanan
 Kepala Pusat Mutu Perikanan Primer



Ari Prabowo

Tembusan:
 Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Dikirimkan di: 21 Desember 2025, pukul 10.00 WIB, melalui email: ari@bbkpm.makassar.go.id
 Ditandatangani oleh: Ari Prabowo, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
Nama Tim/ja	:	Pengendalian kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan
Periode Laporan	:	Tahun 2025

Nama Indikator (4)	:	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)
Nama Tim/ja	:	Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

T/R	TAHUN		
	2023	2024	2025
Target	4	70	1
Realisasi	4	100	1
% Capaian	100	142	100

Catatan :

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik merupakan salah satu IKU yang mendukung Asta Cita ke-2 Presiden RI yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas KKP yaitu:

- Program Prioritas Kedua KKP yaitu penerapan sistem kuota dalam penangkapan dan memastikan keberlanjutan sumber daya ikan, dimana pada kegiatan pengawasan mutu BPPMHKP Makassar memastikan produk hasil perikanan tangkap yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.
- Program Prioritas Ketiga KKP yaitu pengembangan budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, baik untuk komoditas ekspor maupun konsumsi lokal, dimana pada kegiatan pengawasan mutu BPPMHKP Makassar memastikan produk hasil perikanan hasil budidaya yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain dan instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir. Dalam hal ini BPPMHKP memiliki peran penting antara lain:

1. Pengawasan Mutu: BPPMHKP melakukan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.
2. Pengendalian Mutu: BPPMHKP melakukan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kualitas dan keamanan pangan.

Dengan demikian BPPMHKP juga dapat membantu meningkatkan kualitas dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar domestik dan internasional.

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu perikanan, diperlukan sumberdaya manusia (Inspektur Mutu) yang berkompeten: ASN harus terus belajar mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah.

Pada tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar menjadi salah satu unit kerja yang diberikan target sebanyak 1 lokasi yaitu kota Makassar, Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu setiap semester. Adapun lokasi pengawasan yaitu pasar tradisional daya kota Makassar.

Sebagai perbandingan pada tahun 2024 lokasi pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik lebih banyak yaitu berada pada 4 kabupaten/kota dengan 14 titik lokus yaitu :

1. Kota Makassar sebanyak 8 titik pengawasan yaitu pasar tradisional Daya, pasar tradisional Pa'baeng-baeng, pasar tradisional Terong, pasar Tradisional Sentral, pasar modern lotte mart Panakkukang, pasar modern Lotte Mart Alauddin, TPI Rajawali dan PPI Paotere.
2. Kabupaten Gowa sebanyak 2 titik pengawasan yaitu pasar tradisional Minasa Maupa dan pasar Balang-balang
3. Kabupaten Takalar sebanyak 2 titik yaitu PPI Beba dan pasar sentral Takalar
4. Kabupaten Pinrang sebanyak 2 titik pengawasan yaitu pasar Sentral Pinrang dan pasar Kampung Jaya.

Pada tahun 2023 lokasi pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yaitu berada 4 kabupaten/kota dengan 14 titik lokus yang sama.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi) di tahun 2025 yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan ke kepala UPTD Pasar Tradisional/Modern,TPI/PPI
2. Melakukan kunjungan ke lokasi pasar tradisional serta mengisi check list Pengamatan Kondisi sarana Prasarana dan Sanitasi Higiene.
3. Pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian di laboratorium.

Rangkaian kegiatan terdapat pengambilan sampel dengan jenis ikan demersal, pelagic, cephalopod, crustacea dan ikan hasil budidaya, dengan target pengujian yaitu organoleptik, Angka Lempeng Total (ALT), *Echerichia coli*, *Coliform*, *Salmonella spp*, formalin dan histamin. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium pada sampel uji di semester I dan II tahun 2025 dengan titik pengawasan pasar taradisional daya kota Makassar, menunjukkan hasil pengujian memenuhi standar sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sebagai perbandingan hasil pengujian sampel pengawasan mutu tahun 2024 menunjukkan hasil yang sama yaitu seluruh parameter pengujian memenuhi standar sesuai dengan yang dipersyaratkan. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat hasil pengujian yang menyimpang yaitu triwulan II dengan hasil pengujian sampel Kab. Takalar titik pengawasan PPI Beba sampel cumi-cumi segar (*cephalopods*) ditemukan hasil pengujian *coliform* dan *Escherichia coli* diatas ambang batas yang dipersyaratkan (persyaratan <3,0 MPN/g) hasil uji coliform 7,4 MPN/g dan *E. coli* 3,6 MPN/g dan titik pengawasan Pasar Sentral Takalar dengan sampel bandeng segar ditemukan hasil pengujian *coliform* dan *Escherichia coli* diatas ambang batas yang dipersyaratkan (persyaratan <3,0 MPN/g) hasil uji coliform 3,6 MPN/g dan *E. coli* 3,6 MPN/g.

Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik tahun 2025 merupakan salah satu indikator kinerja yang tidak mendapatkan alokasi anggaran karena adanya kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran. Namun kebijakan pemerintah tersebut tidak menjadi penghalang pada kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik.

Tindakan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 adalah :

- Telah dilakukan koordinasi dengan TIM pengelola anggaran sehingga pelaksanaan pengawasan mutu domestik masih bisa dilakukan pada triwulan I tahun 2025.
- Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Mutu Domestik dan Sertifikasi SPDI Pasca Efisiensi Anggaran tanggal 18 Februari 2025
- Telah dilakukan sosialisasi ke pelaku usaha pada saat kunjungan lapangan di sentra penyedia pangan sehat untuk selalu menjaga mutu ikan agar tetap aman dan laik untuk konsumsi
- Pada triwulan II tahun 2025 belum dilakukan koordinasi dengan pihak pengelola pasar, koordinasi dan sosialisasi akan dilakukan pada triwulan III bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan.
- Telah dilakukan koordinasi dengan pihak pengelola pasar untuk dilakukan sosialisasi cara penanganan ikan yang baik serta sanitasi dan hygiene pada saat melakukan kunjungan lapangan kesentra penyedia pangan sehat
- Telah dilaporkan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik Triwulan III kepada Dinas Perikanan dan pertanian Kota Makassar pada bulan November 2025
- Melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam negeri sehubungan ketersediaan stok ikan pada Pelaksanaan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Berbagai upaya dilaksanakan antara lain turun langsung ke lapangan memantau stok ikan di sentra penyedia pangan sehat (TPI Labuang Kab. Maros), melakukan diskusi dengan pelaku utama yang melakukan aktivitas jual beli ikan serta melakukan pengawasan mutu produk perikanan untuk memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan bermutu.

Sebagai perbandingan pagu anggaran untuk kegiatan pengawasan mutu domestik pada tahun 2024 sebesar Rp. 60.000.000 dengan persentase capaian sebesar 95,39%. (Rp. 57.235.865)

Pada tahun 2023 sebesar Rp. 78,342,000, dengan persentase capaian sebesar 99.53% (Rp. 77.977.352).

Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik pada tahun 2025 yaitu inspektur mutu dan staf sebanyak 11 orang sedangkan pendamping kegiatan sebanyak 4 orang dari Dinas Perikanan kota, BPPSDMKP Maros sebanyak 2 orang, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin sebanyak 1 orang, serta dari Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI) sebanyak 3 orang.

Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik pada tahun 2024 yaitu inspektur mutu dan staf sebanyak 22 orang sedangkan pendamping kegiatan sebanyak 12 orang dari Dinas Perikanan kabupaten/kota, Balai Besar POM Makassar sebanyak 2 orang, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin sebanyak 2 orang, serta dari Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI) sebanyak 3 orang.

Sebagai Perbandingan Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik pada tahun 2023 yaitu inspektur mutu sebanyak 22 orang sedangkan pendamping kegiatan sebanyak 15 orang dari DKP Provinsi dan kabupaten/kota, Balai Besar POM Makassar sebanyak 2 orang, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin sebanyak 3 orang, serta dari Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI) sebanyak 3 orang.

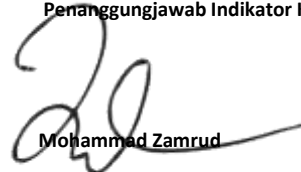
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Balai Besar KIPM Makassar belum menyampaikan hasil pengujian sampel pada kegiatan pengawasan mutu domestik dan pemantauan ketersediaan pasokan ikan menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada instansi terkait.
- Keterlibatan Balai Besar KIPM Makassar pada kegiatan operasi pasar tradisional yang dilaksanakan secara berkala oleh Pemerintah Kota Makassar belum optimal.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Rekomendasi rencana aksi di triwulan I tahun 2026 yaitu: 1. Menyampaikan hasil pengujian sampel pada kegiatan pengawasan mutu domestik dan pemantauan ketersediaan pasokan ikan menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada instansi terkait. 2. BPPMHKP Makassar akan berkoordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan kegiatan pengawasan mutu domestik di tahun 2026.	Katimja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Telah dilaporkan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik Triwulan III kepada Dinas Perikanan dan pertanian Kota Makassar pada bulan November 2025	Katimja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

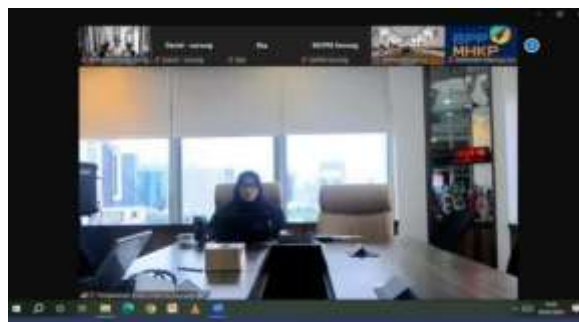
Makassar, 8 Januari 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja



Mohammad Zamrud

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Tahun 2025

- a. **Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Mutu Domestik dan Sertifikasi SPDI Pasca Efisiensi Anggaran tanggal 18 Februari 2025**



b. Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Triwulan I Tahun 2025 di Pasar Daya Kota Makassar



- c. Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Triwulan III Tahun 2025 di Pasar Daya Kota Makassar



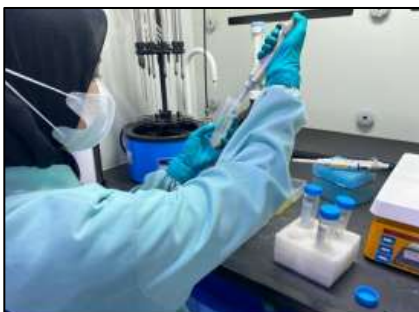
- d. Kegiatan Pendataan Ketersediaan Stok Ikan dan Pengawasan Mutu Produk Perikanan pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026





e. Rangkaian kegiatan pengujian di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar Triwulan I Tahun 2025





Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN		
	2023	2024	2025
Target	99	99	99
Realisasi	100	100	100
% capaian	101 %	101 %	101 %

Catatan :

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Sistem Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tumbuh seiring dengan perkembangan tuntutan akan jaminan mutu dan keamanan pangan di tataran internasional yang semakin ketat, dan tidak hanya fokus pada mutu dan keamanan dari produk akhir. Sistem jaminan mutu dan keamanan terhadap proses merupakan tuntutan dan penerimaan masyarakat dunia (internasional) akan keberterimaan pangan, termasuk hasil perikanan. Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh internasional, harus dipenuhi oleh seluruh negara pengekspor, yang dinyatakan pada sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang menyertai setiap produk yang dipasarkan, baik untuk pasar dalam negeri maupun tujuan ekspor. Meningkatnya daya saing produk perikanan harus diiringi dengan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan berbasis kualitas sesuai dengan Rencana Strategis Balai Besar KIPM Makassar tahun 2025 -2029. Salah satu isu strategisnya adalah peningkatan gizi anak melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan, yang kaya akan nutrisi seperti ikan dan rumput laut Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) merupakan bukti bahwa hasil perikanan yang dipasarkan telah diproses berdasarkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu, maka penerbitan SMKHP didasarkan pada hasil pengawasan mutu terhadap efektifitas penerapan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit Usaha Pembenihan, Pembesaran dan Unit Pengolahan Ikan serta hasil pengujian contoh. Peningkatan ekspor perikanan ke negara tujuan merupakan salah satu program prioritas nasional yang tergambar dalam misi Asta Cita ke 5 yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pada Asta Cita ke 5 terdapat tiga kegiatan utama yaitu peningkatan ekspor produk perikanan tangkap, pembangunan industri hilir dan industri penangkapan ikan serta penjaminan mutu dan keamanan pangan akuatik komoditas perikanan budi daya. Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua KKP yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang diekspor ke negara tujuan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di laboratorium dan penyediaan sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir.

Balai Besar KIPM Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Atas dasar hasil pengendalian tersebut, Balai Besar KIPM Makassar memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ikan dan produk perikanan yang akan di lalulintaskan ke negara tujuan.

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan rasio kegiatan pengiriman ikan dan hasil perikanan ke luar wilayah Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak ada penolakan oleh negara tujuan ekspor. Hal ini dibuktikan diterimanya SMKHP di negara tujuan ekspor dan tidak ada notifikasi penolakan dari negara tujuan.

Perhitungan IKU ini berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$X = \frac{A - B}{A}$$

X : Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A : SMKHP yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B : Jumlah SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan

IKU ini menggunakan formulasi diatas sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$X : \frac{\text{Jumlah SMKHP ekspor yang memenuhi syarat mutu - penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah SMKHP mutu ekspor yang diterbitkan}} \times 100\%$$

$$\frac{(12.630 - 0)}{12.630} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian realisasi IKU ini di tahun 2025 adalah 100% karena tidak ada penolakan dari negara tujuan. Sehingga jika dilihat dari aspek keberterimaan di negara tujuan didapatkan nilai yang sama antara tahun 2025 dan tahun 2024 yaitu 100 %.

Pada tahun 2025 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 211.429,45 ton senilai Rp. 9,2 T dengan jumlah sertifikat ekspor (SMKHP) yang diterbitkan sebanyak 12.672 sertifikat. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 201.002 ton senilai Rp. 9,01 T dengan jumlah SMKHP yang diterbitkan sebanyak 9.992 sertifikat. Berdasarkan data tersebut pada tahun 2025 terjadi peningkatan frekwensi penerbitan SMKHP sebesar 21,15 % dan volume ekspor sebesar 4,93 %, serta nilai sebesar 2,17 % jika dibandingkan tahun 2024. Peningkatan volume ekspor ini sejalan dengan peningkatan jumlah Unit Pengolahan Ikan (eksportir) yang ada di Sulawesi Selatan yaitu dari 134 pada tahun 2024 menjadi 151 unit pada tahun 2025. Hal ini dipengaruhi adanya kemudahan perizinan berusaha serta iklim investasi yang kondusif.

Data tahun 2025 menunjukkan tidak terdapat kasus penolakan produk perikanan yang dikirim ke negara tujuan. Pada tahun 2025 memiliki kondisi yang sama dengan tahun 2024 yaitu tidak adanya kasus penolakan produk perikanan.

Kegiatan sertifikasi ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu sebanyak 20 orang serta didukung oleh tenaga PPPK sebanyak 13 orang dan PJLP sebanyak 2 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu, serta pelayanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pada tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar menerima penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Maros sebagai Instansi yang Berperan Aktif Dalam Peningkatan Ekspor Produk Perikanan Di Kabupaten Maros pada tanggal 17 Desember 2025. Penghargaan ini diserahkan oleh Bupati Maros Dr. H.A.S Chaidir Syam pada kegiatan Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Bela Negara. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemkab Maros kepada Balai Besar KIPM Makassar atas dukungan dan peran aktif dalam peningkatan ekspor produk perikanan di Kabupaten Maros. Sebagaimana diketahui, beberapa

waktu lalu Bupati Maros melepas ekspor produk perikanan sebanyak 2.319,7 ton ke 8 negara tujuan dengan nilai ekonomi Rp. 51,4 milyar.

Sejalan dengan peningkatan pelayanan sertifikasi ekspor produk perikanan, terdapat beberapa kegiatan peningkatan kompetensi, pemberian penghargaan, undangan mengikuti kegiatan eksternal maupun kunjungan dari pihak eksternal untuk mendukung IKU ini. Kegiatan tersebut diikuti oleh petugas pelayanan maupun inspektur mutu antara lain sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Waktu Kegiatan
1.	Briefing Pagi Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	5 Januari 2025
2.	Sosialisasi Penerbitan SMKHP Melalui Aplikasi SIAP MUTU	Sekretariat BPPMHKP	22 Januari 2025
3.	Launching dan Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU	Sekretariat BPPMHKP	27 Februari 2025
4.	Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU dan PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	BPPMHKP Makassar	28 Februari 2025
5.	Briefing Siang Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	10 April 2025
6.	Bincang Inspiratif Penguatan Program Kerja Badan Mutu KKP Dalam Menunjang Program Prioritas KKP	BPPMHKP Makassar	9 Mei 2025
7.	Evaluasi Kegiatan Sertifikasi Mutu Lingkup Badan Mutu KKP	Sekretariat BPPMHKP	14 – 16 Mei 2025
8.	Briefing Pagi Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	15 Mei 2025
9.	Briefing Pagi Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	24 Juni 2025
10.	Bincang Inspiratif Pelayanan Publik Dengan Tema “Menuju Pelayanan Publik Yang professional & Ungggul (Profesional & Excellent Service)” bersinergi dengan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Makassar	BPPMHKP Makassar	14 Juli 2025
11.	Briefing Siang Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	16 Juli 2025
12.	Sharing session Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 44 tahun 2024 dan Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 35 tahun 2025	BPPMHKP Makassar	24 Juli 2025
13.	Kunjungan Kerja Tim Komisi IV DPR RI Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Pengendalian Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	BPPMHKP Makassar	11 Agustus 2025
14.	Webinar Budaya Kerja Work Life Balance Untuk ASN Menjaga Kesehatan Mental Di Tempat Kerja	Biro SDMA Organisasi Sekretariat Jenderal KKP	9 September 2025
15.	Bincang Inspiratif Pelayanan Pelayanan Publik Dengan Tema “Menuju Pelayan Publik Yang professional & Ungggul (Profesional & Excellent Service)” bersinergi dengan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Makassar	BPPMHKP Makassar	11 September 2025

16.	Bimbingan Teknis Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan Tahun 2025	Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal KKP	17 September 2025
17.	Sharing Session Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan	BPPMHKP Makassar	25 September 2025
	Sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	BPPMHKP Makassar	30 September 2025
18.	Peningkatan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan	BPPMHKP Makassar	08 Oktober 2025
19.	Briefing Siang Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	14 Oktober 2025
20.	Pelepasan ekspor komoditi perikanan dari kab. Maros yang dirangkaikan dengan peringatan hari ikan nasional	BPPMHKP Makassar	21 November 2025
21.	BPPMHKP Makassar menghadiri ekspor perdana frozen cephalopod	PT. Nirvana Niaga Sejahtera	15 Desember 2025
22.	BPPMHKP Makassar menerima penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Maros sebagai Instansi yang Berperan Aktif Dalam Peningkatan Ekspor Produk Perikanan	Pemerintah Kabupaten Maros	17 Desember 2025
23.	BPPMHKP Makassar menghadiri pelepasan ekspor serentak sinergi Nusantara dari delapan penjuru wilayah Indonesia	Kementerian Perdagangan RI	17 Desember 2025
24.	Rapat koordinasi penguatan SMKHP dan pengembangan laboratorium rujukan wilayah Indonesia Timur	BPPMHKP Makassar	29 Desember 2025

Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu :

1. Monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra.
2. Monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP
3. Investigasi kasus penolakan ekspor di negara tujuan.

I. Monitoring dan Evaluasi Nomor Registrasi Negara Mitra

Pada tahun 2025 telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra sebanyak 5 (lima) UPI. Adapun UPI yang telah di monitoring adalah :

No	Nama UPI	Waktu Kegiatan	Inspektur Mutu
1.	CV. Gimae Seaweed & Spice	02 Juli 2025	Mohammad Zamrud Suprianto
2.	PT. Aiki Mega Jaya Utama	05 November 2025	Waode Suharni Arfiandi
3.	PT. Biru Laut Nusantara	05 November 2025	Fatima Tayang Wara Zakaria
4.	PT. Jireh Komoditi	05 November 2025	Kamaruddin Patmawati
5.	PT. Buana Laut Nusantara	05 November 2025	Anugrah Ekayani Taufiq

Monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra (Noreg) dilakukan untuk mengetahui efektifitas penggunaan nomor registrasi oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI). Sasaran kegiatan ini adalah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memiliki nomor registrasi di beberapa negara mitra seperti China, Republik Korea, Arab Saudi, Kanada dan Vietnam. Berdasarkan hasil move noreg yang paling aktif digunakan oleh UPI tersebut adalah

ekspor dengan tujuan negara China. Pada akhir tahun 2025 terjadi buka blokir anggaran tetapi belum mengkomodir kegiatan perjalanan dinas sehingga kegiatan ini dilakukan secara daring.

II. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Penerbitan SMKHP

Pada tahun 2025 BPPMHKP Makassar telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada 20 (dua puluh) UPI yang melaksanakan ekspor ke negara tujuan. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut ini.

No	Nama UPI	Waktu Kegiatan	Inspektur Mutu
1.	PT. Multi Monodon Indonesia	25 April 2025	Mohammad Zamrud Suprianto
2.	PT. Mitra Kartika Sejati	28 April 2025	Waode Suharni Wara Zakaria Sapan
3.	CV. Bintang Megah Jaya Perkasa	2 Mei 2025	Kamaruddin Taufiq
4.	PT. Rika Rayhan Mandiri	6 Mei 2025	Andi Rahmaniar Muzakkir
5.	PT. Biru Laut Nusantara	8 Mei 2025	Patmawati Arfiandi
6.	PT. Dunia Marine Products	2 Juni 2025	Waode Suharni Fatima Tayang
7.	PT. Keumkang Industri Indonesia	3 Juni 2025	Anugrah Ekayani Taufiq
8.	PT. Bumi Laut Pertiwi	5 Juni 2025	Kamaruddin Arfiandi
9.	PT. Mega Citra Karya	02 Juli 2025	Habrin Yake Ardiana
10.	CV. Lontara Jaya Sakti	02 Juli 2025	Andi Rahmaniar Idawati Barung
11.	PT. Celebes Berkah Niaga	04 Juli 2025	Muzakir Suprianto
12.	CV. Adi Tirta	5 Agustus 2025	Muhammad Irfan Rais Idawati Barung
13.	PT. Simpul Agro Globalindo	6 Agustus 2025	Habrin Yake Ardiana
14.	PT. Mina Timur Indonesia	26 Agustus 2025	Sri Rahayu Setyaningsi Wara Zakaria Sapan
15.	PT. Asnur Anton Jaya	29 Agustus 2025	Mohammad Zamrud Moh. Fahrii
16.	PT. Sutracco Nusantara Megah	4 September 2025	Muhammad Irfan Rais Anugrah Ekayani ALP
17.	PT. Parlevliet Paraba Seafood	4 September 2025	Patmawati Moh. Fahri
18.	CV. Anugrah Bintang Cemerlang	02 Oktober 2025	Suprianto Andi Muhammad Haedar
19.	PT. Giwang Citra Laut	02 Oktober 2025	Mohammad Zamrud Taufiq Erwin Wijaya
20.	PT. Lintas Antar Nusa	08 Oktober 2025	Waode Suharni Fatima Tayang Erwin Wijaya

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada UPI dilakukan berdasarkan profiling Unit Pengolahan Ikan dalam kegiatan pelayanan sertifikasi ekspor ke negara tujuan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan monev adalah memastikan bahwa kegiatan penilaian kesesuaian penerbitan SMKHP pada pelaku usaha berjalan sesuai ketentuan regulasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai serta memudahkan BPPMHKP Makassar dalam melakukan penilaian ke pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya pelaku usaha ekspor. Hasil dari kegiatan monev ini menjadi dasar dalam pemberian

skoring tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam penerbitan SMKHP. Kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP dilaksanakan secara tatap muka dengan memanfaatkan kendaraan dinas. Pada tahun 2025 telah dilakukan buka blokir anggaran tetapi belum mengakomodir kegiatan perjalanan dinas.

III. Investigasi Kasus Penolakan Ekspor Di Negara Tujuan

Pada tahun 2025 terdapat notifikasi penolakan ekspor dari negara tujuan di UPT BPPMHKP Makassar, sebanyak 1 (satu kali) dari negara tujuan Rusia. BPPMHKP Makassar menerima surat dari Kepala Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP sebagai berikut ;

- Nomor R.468/BPPMHKP.2/KI.530/V/2025 tanggal 1 Mei 2025 tentang Pemberlakuan Internal Suspend CV. Prima Indo Tuna (RR.B-049-27).
- Nomor T.379/BPPMHKP.2/KI.530/IV/2025 tanggal 14 April 2025 tentang Penyampaian Informasi DWPE 16 – 81 PT. Phillips Seafoods Indonesia
- Nomor T.380/BPPMHKP.2/KI.530/IV/2025 tanggal 14 April 2025 tentang Penyampaian Informasi DWPE 16 – 81 PT. Wahyu Pradana Binamulia.

Sebagai catatan, untuk PT. Wahyu Pradana Binamulia tidak terdapat notifikasi penolakan ekspor karena Amerika Serikat bukan negara mitra yang dipayungi oleh MRA (Mutual Recognition Arrangement) dengan Indonesia.

Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025 adalah melakukan pendampingan pada kegiatan investigasi penolakan ekspor di negara tujuan yang dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP. Kegiatan pendampingan investigasi tersebut untuk mencari akar masalah terjadinya kasus produk perikanan pada tahun sebelumnya. Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Nama UPI	Waktu Kegiatan Investigasi	Produk	Penyebab	Inspektur Mutu
1.	CV. Prima Indo Tuna	7 Mei 2025	Frozen Cephalopod	Arsenik yang melebihi ambang batas	Wara Zakaria Anugra Ekayani
2.	PT. Wahyu Perdana Binamulia	8 Mei 2025	Frozen Tuna	Salmonella	Mohammad Zamrud Muzakkir
3.	PT. Phillips Seafoods Indonesia	9 Mei 2025	Frozen Tuna	Salmonella	Suprianto Fatima Tayang

Berdasarkan tabel diatas, telah dilaksanakan kegiatan pendampingan investigasi pada 3 (tiga) UPI di Sulawesi Selatan oleh inspektur mutu BPPMHKP Makassar. Untuk PT. Wahyu Pradana Binamulia dan PT. Phillips Seafoods Indonesia dikenakan status *Detention Without Physical Examination* (DWPE) oleh US FDA yang merupakan ketidaksesuaian yang telah masuk pada *Red List of Import Alert 16 – 81 Detention Without Physical Examination of Seafood Products Due to Presence of Salmonella*. Temuan ketidaksesuaian tersebut menginformasikan terdapat pengujian sampel tuna Ready To Eat (RTE) beku dari beberapa negara Asia Tenggara yang dikumpulkan sejak Mei 2024. Pada pengujian tersebut ditemukan 7 dari 140 sampel dari Indonesia mengandung Salmonella. Salah satunya adalah sampel tuna dari produk PT. Wahyu Pradana Binamulia dan PT. Phillips Seafoods Indonesia. Untuk PT. Wahyu Pradana Binamulia dan PT. Phillips Seafoods Indonesia tidak menerima notifikasi penolakan dari negara tujuan.

Adapun untuk CV. Prima Indo Tuna terdapat notifikasi otoritas kompeten Rusia (Rosselkhozadzor) nomor FS-ARV-7/6520-1 didasarkan dari hasil pemeriksaan pengawasan resmi pasar (*official control on the market*) dimana ditemukan produk gurita beku (*frozen octopus*) yang diekspor pada tahun 2024 dengan nomor *Health Certificate* 02.0-03094-2024 mengandung kandungan logam berat (arsenik) melebihi ambang batas yang diperbolehkan yaitu 9,05 mg/kg (ambang batas Rusia < 5 mg/kg).

Berdasarkan hasil investigasi terhadap ketiga UPI tersebut maka diperoleh akar masalah dan rekomendasi sebagai berikut :

No	Nama UPI	Akar Masalah	Rekomendasi
1.	CV. Prima Indo Tuna	Pengendalian terhadap potensi kontaminasi logam berat (arsen) belum optimal dijalankan	1. Pemutakhiran data pengujian logam berat sesuai dengan lokasi asal bahan baku 2. Perlu adanya monitoring logam berat.
2.	PT. Wahyu Pradana Binamulia	1. Pelaksanaan prosedur sanitasi belum konsisten dijalankan 2. Pengendalian proses perlu ditingkatkan	1. Program swab peralatan untuk dibuat lebih detail sehingga seluruh peralatan dapat terwakili 2. Intensitas pelatihan personil terkait sanitasi dan higiene perlu ditingkatkan 3. Pengendalian terhadap fasilitas yang mensupport proses produksi pada UPI perlu ditingkatkan dan dilakukan perbaikan jika terjadi masalah 4. Penyempurnaan sop pada pengendalian proses
3.	PT. Phillips Seafoods Indonesia		1. Pemutakhiran pada GMP tahapan penerimaan 2. UPI menyampaikan data terupdate antara lain : - Program pengendalian air dan es - SOP <i>environmental monitoring procedure</i> - Program pengujian swab peralatan

Berdasarkan data hasil uji laboratorium terdapat beberapa produk perikanan yang menyimpang di tahun 2025 sehingga dilakukan investigasi secara virtual. Adapun UPI yang di investigasi adalah sebagai berikut:

No	Nama UPI	Waktu Kegiatan Investigasi	Produk	Penyebab	Inspektur Mutu
1.	CV. Mitra Alam	29 Juli 2025	Air dan Es	Zat Padat Terlaru (TDS)	Andi Rahmaniar DJ Ardiana
2.	PT. Blue Ocean Resource	29 Juli 2025	Air	Total Zat padat terlarut dan pH pada air	Habrin Yake Muzakir
3.	PT. Nuansa Cipta Magello	04 September 2025	Pasteurized Crabmeat	Angka Lempeng Total (ALT)	Habrin Yake Muzakir
4.	PT. Wahyu Pradana Bina Mulia	20 Oktober 2025	Air dan Es	Penyimpangan Hasil Uji Laboratorium kimia (Fe)	Andi Rahmaniar DJ Ardiana
5.	PT. Lintas Antar Nusa	23 Oktober 2025	Air Asin	Penyimpangan Hasil Uji Lab Total Zat padat terlarut	Habrin Yake Muzakir
6.	CV. Maros Timur Jaya	03 November 2025	Air dan Es	Penyimpangan hasil uji parameter Besi (Fe) Terlarut pada Air dan Es serta Total Zat Padat	Habrin Yake Muzakir

				Terlarut (TDS) pada Es	
7.	PT. Global Maju Pratama	27 November 2025	Air	Penyimpangan hasil uji laboratorium parameter Zat Padat Terlarut (TDS)	Habrin Yake Muzakir
8.	PT. Sinar Graha	04 Desember 2025	Frozen Pelagic Fish (Steak Tenggiri)	Penyimpangan hasil uji parameter kimia Timbal (Pb)	Habrin Yake Muzakir

Kegiatan yang mendukung IKU ini beserta pagu anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Lock Pagu	Realisasi Anggaran TW IV 2025	Persentase Realisasi
1.	7010.ABR.001 Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra dan Negara Tujuan Ekspor	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0
2.	3989.QIC.002 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	0	0
3.	3989.BIA.001 Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0

Alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini pada tahun 2025 sebesar Rp. 45.000.000 tidak terealisasi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 57.000.000 dengan realisasi Rp. 56.841.000 dimana terjadi penurunan pagu anggaran sebesar 25%.

Pada tahun 2024 dan tahun 2025 kegiatan pendukung yaitu monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi negara mitra tercapai 100 %, namun dari segi anggaran tidak berjalan maksimal di tahun 2025 tidak tercapai disebabkan karena buka blokir anggaran telah dilaksanakan tetapi belum mengakomodir kegiatan perjalanan dinas sehingga tidak memungkinkan untuk dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran di tahun 2024.

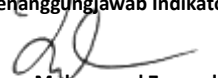
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Belum tersedia prosedur internal terhadap penyimpangan hasil uji setelah dilakukan investigasi

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Pertemuan/sharing session inspektur mutu terkait prosedur internal terhadap penyimpangan hasil uji setelah dilakukan investigasi	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan

Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Telah dilaksanakan kegiatan monev nomor registrasi negara mitra dibulan November sebanyak 4 (empat) UPI.	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan

Makassar, 06 Januari 2026
 Penanggungjawab Indikator Kinerja

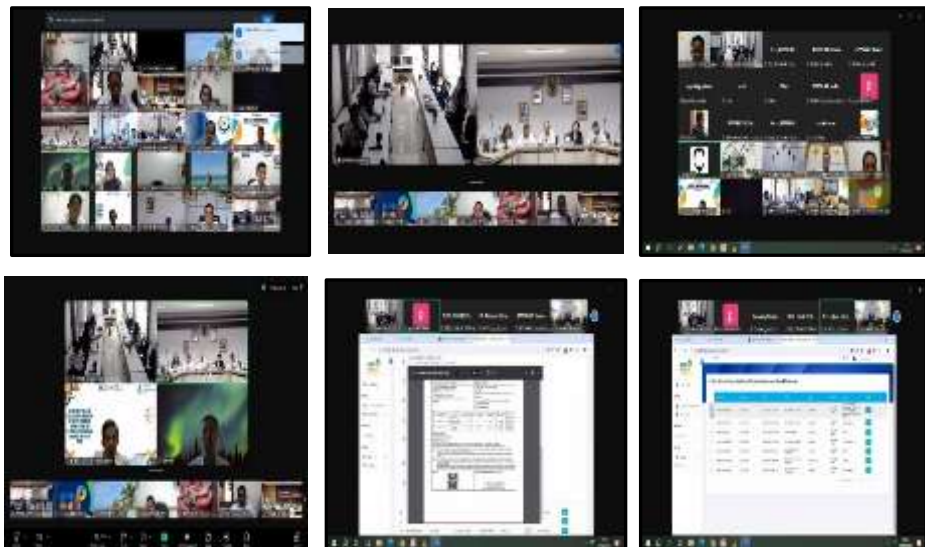

 Mohammad Zamrud

DOKUMENTASI KEGIATAN

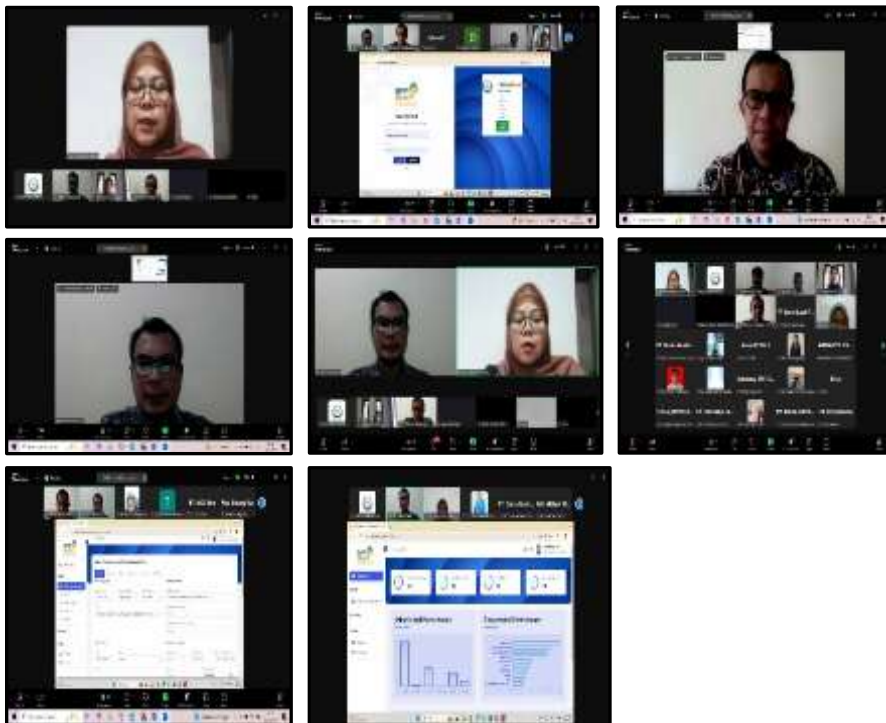
1. *Sharing Session* Pedoman Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Tanggal 5 Maret 2025



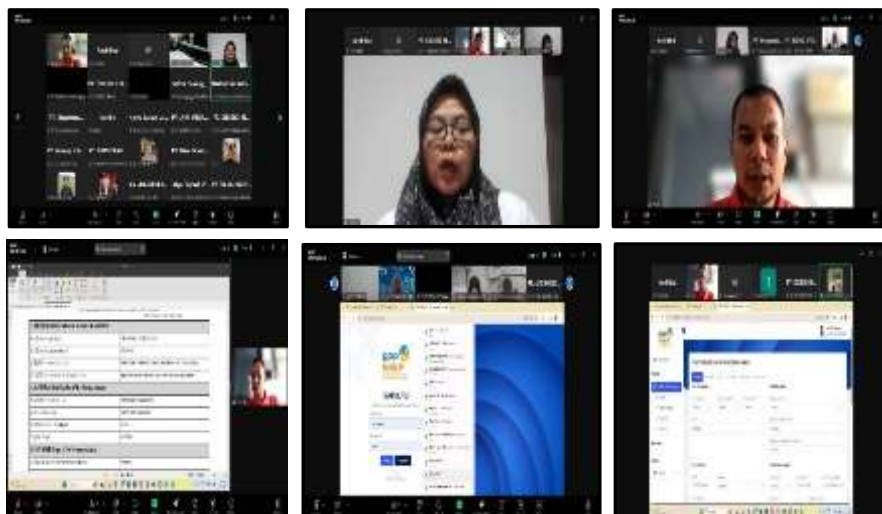
2. Launching dan Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU Pada Tanggal 27 Februari 2025



3. Sosialisasi Aplikasi SIAP MUTU dan PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Pada Tanggal 28 Februari 2025



4. Rapat Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi SIAP MUTU Bersama Pelaku Usaha/Eksportir Tujuan China Pada Tanggal 25 Maret 2025



5. Briefing Siang Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu Pada Tanggal 10 April 2025



6. Sosialisasi Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Penerapan Aplikasi SIAP MUTU Pada Tanggal 15 April 2025



7. Rapat Persiapan Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Tanggal 16 April 2025



8. Briefing Siang Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu Pada Tanggal 16 Juli 2025



9. Sharing session petunjuk teknis pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka penerbitan SMKHP tanggal 24 Juli 2025



10. Peningkatan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan tanggal 08 Oktober 2025



11. Briefing Siang Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu Pada Tanggal 14 Oktober 2025



12. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Penerbitan SMKHP pada Unit Pengolahan Ikan



13. Investigasi Penolakan Ekspor di Negara Tujuan



14. Monitoring dan Evaluasi Nomor Registrasi Negara Mitra



15. Ekspor Produk Perikanan dari Kabupaten Maros Pada Kegiatan Hari Ikan Nasional tanggal 21 Nopember 2025.



16. Ekspor Perdana Frozen Cephalopod PT. Nirvana Niaga Sejahtera tanggal 15 Desember 2025.



17. Pemberian Penghargaan Kepada BPPMHKP Makassar dari Pemerintah Kabupaten Maros pada tanggal 17 Desember 2025



18. Pelepasan Ekspor Serentak Sinergi Nusantara Dari Delapan Penjuru Wilayah Indonesia pada tanggal 17 Desember 2025



19. Rapat Koordinasi Penguatan SMKHP dan Pengembangan Laboratorium Rujukan Wilayah Timur pada tanggal 29 – 31 Desember 2025



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)
Nama Tim/ja	:	Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Tahunan 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)

T/R	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	70	75
Realisasi	-	83,10	91,23
%Capaian	-	118,7	121,64

Catatan :

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
- Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki. - ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. - Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi: - Ruang Lingkup; - Acuan Normatif; - Persyaratan Umum; - Persyaratan Struktural; - Persyaratan Sumber Daya; - Persyaratan Proses; - Persyaratan Sistem Manajemen - Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian diperoleh dengan menggunakan rumus : $\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ dimana : $\bar{X}$ = Rata rata $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke - 1, 2 , 3, ..., n - n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan - Hasil verifikasi Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian di Balai Besar KIPM Makassar dihitung oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP berdasarkan rumus di atas. Berdasarkan surat dari Kepala Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP Nomor B.35/BPPMHKP.2/TU.210/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Penyampaian Capaian Kinerja Sistem Manajemen Mutu sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, maka

Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai sebesar 90,96 dari target sebesar 75. Sehingga output kegiatan penerapan sistem manajemen mutu telah terealisasi sebesar 121,64 %. - Sebagai perbandingan, capaian nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu dengan beberapa UPT BPPMHKP dapat disandingkan sebagai berikut : - Balai KIPM Semarang dengan nilai 92,02. Maka untuk perbandingan ini, masih lebih rendah dengan selisih 1,06 poin. - Balai KIPM Denpasar dengan nilai 86,57. Maka untuk perbandingan ini, Balai Besar KIPM Makassar lebih tinggi dengan selisih 4,39 poin. Dari bechmarking tersebut diatas maka Balai Besar KIPM Makassar masih memerlukan perbaikan berkelanjutan terhadap indikator-indikator penilaian terutama pada indikator yang menjadi temuan ketidaksesuaian. - Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian adalah kegiatan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar. Selama Tahun 2025, terdapat 11.167 kali pengujian laboratorium yang terdiri dari : - Pengujian Organoleptik sebanyak 2.405 kali - Pengujian Mikrobiologi sebanyak 5.613 kali - Pengujian Kimia sebanyak 2.433 kali - Pengujian Air dan Es sebanyak 716 kali Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 dilakukan pengujian laboratorium sebanyak 14.307 kali yang lebih dipengaruhi oleh banyaknya pengujian parameter organoleptik di tahun 2024. - Selama tahun 2025, terdapat subkontrak pengujian sebanyak 2.423 kali pengujian ke laboratorium Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk parameter mikrobiologi dan kimia, Laboratorium PT. Angler Bio Chemlab untuk pengujian Phosphate dan Clostridium botulinum, dan Laboratorium Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim untuk pengujian air dan es. Pengujian subkontrak ini dilaksanakan karena masih ada parameter uji yang belum masuk dalam ruang lingkup pengujian dan juga dikarenakan adanya peralatan yang rusak. Kedepannya, dengan rencana pembangunan laboratorium rujukan Wilayah Timur Indonesia, maka parameter uji yang belum masuk dalam ruang lingkup pengujian akan dimasukkan dalam ruang lingkup uji laboratorium Balai Besar KIPM Makassar. - Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh 18 orang mulai dari Manager Puncak hingga analis dan staf laboratorium yang kompeten dalam melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium. - Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini mendukung Asta Cita ke-2 dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. - IKU ini mendukung budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di Lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu Berorientasi Pelayanan dengan memberikan pelayanan laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan. - Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPA Balai Besar KIPM Makassar pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 112.446.000,- mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 60,6% dari sebelumnya sebesar Rp. 70.000.000,- di tahun 2024. Realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 103.003.210,- atau sebesar 91,60%. Sisa anggaran sebesar Rp. 9.442.790,- sudah tidak dapat direalisasikan karena adanya anggaran penanganan limbah laboratorium yang berlebih. - Pada tahun 2025 ini telah dilakukan Surveilans ke-2 penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 pada tanggal 20 Mei 2025 dengan menyesuaikan ruang lingkup pengujian dengan menghapus ruang lingkup pengujian karantina dan ruang lingkup mutu yang peralatannya telah diserahkan kepada Badan Karantina Indonesia. Total ruang lingkup yang dipertahankan adalah sebanyak 12 ruang lingkup pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan. - Selama tahun 2025 telah dilakukan kegiatan peningkatan kompetensi analis laboratorium sebanyak 11 kali untuk meningkatkan kompetensi analis dalam melaksanakan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan. - Pada tanggal 25 November 2025 Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP melaksanakan Verifikasi Official Control untuk melihat konsistensi pengujian laboratorium dalam rangka official control di Balai Besar KIPM dengan evaluator Martono dan Danar Kristiasari. Hasilnya terdapat 5 temuan yang telah dilakukan tindakan perbaikan pada tanggal 24 Desember 2025. Hasil verifikasi official control Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai 88,33 (sangat baik).
--

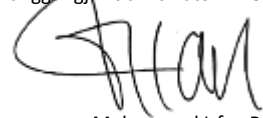
- Pada tanggal 7 – 8 November 2025 terdapat kunjungan Kepala Pusat Manajemen Mutu ke Balai Besar KIPM Makassar dalam rangka memantau progress persiapan pembangunan laboratorium rujukan yang di biyai dari anggaran SBSN tahun 2026. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Pusat Manajemen Mutu memberikan arahan rencana strategis pembangunan laboratorium rujukan. Rencananya Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar akan mendapatkan peralatan tambahan untuk penambahan ruang lingkup uji laboratorium Balai Besar KIPM Makassar.
- Selama tahun 2025, terdapat 58 mahasiswa program Sarjana dan siswa sekolah kejuruan yang melaksanakan magang di Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar, serta terdapat 4 orang lulusan perguruan tinggi yang melaksanakan magang berdasarkan program pemagangan nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Program magang ini memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada peserta magang dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan khususnya di bidang pengujian laboratorium.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar akan dijadikan laboratorium rujukan Wilayah Timur Indonesia dengan beberapa ruang lingkup baru. Potensi masalah yang ada adalah perlunya dilakukan peningkatan kompetensi laboratorium untuk mengakomodir ruang lingkup baru berupa ketersediaan peralatan, bahan, metode uji, personil, dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengujian untuk ruang lingkup yang akan di tambahkan.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Peningkatan kompetensi laboratorium melalui penyediaan gedung laboratorium rujukan Wilayah Timur Indonesia sesuai standar internasional SNI ISO/IEC 17025:2017	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana aksi tahun sebelumnya	Penanggung Jawab
Telah dilakukan surveilan ke-2 akreditasi dalam rangka mempertahankan status akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 di Tahun 2025.	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji

Makassar, 8 Januari 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja


Muhammad Irfan Rais

Revisi Verifikasi Penempatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Terpadu (R)				
No	Status LPT (SP/PM/SL)	Uraian	Revisi	Tenggat Pelaksanaan
1	Revisi	30.01	Verifikasi ulang	10-18 Juli 2020
2	Revisi	30.01	Revisi verifikasi	17 Juli 2020
3	Revisi	30.01	Revisi verifikasi	1 Agustus 2020
4	Revisi	30.01	Revisi verifikasi	15 Agustus 2020
5	Revisi	30.01	Revisi verifikasi	23 Oktober 2020
6	Revisi	30.01	Revisi verifikasi	27 September 2020
Revisi-Rata				
Revisi Verifikasi Penempatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Terpadu (R)				
No	Status LPT (SP/PM/SL)	Uraian	Revisi	Tenggat Pelaksanaan
1	Revisi	30.01	Revisi verifikasi	23 Oktober 2020
2	Revisi	30.01	Revisi verifikasi	15 November 2020
Revisi-Rata				

Waktu tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan verifikasi ulang sampai dengan Terpenuhi 70 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Pada: Satu Hari 70 x 70 x 0,1 dan 70 x 70 x 0,05 = 490,00 + 245,00 = 735,00 x 4 = 2.940,00

Revisi-Rata Manajemen Mutu

 Universitas
Serang Raya

Waktu Rata Rata (Rata)

**LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN VERIFIKASI PENERAPAN
SISTEM MANAJEMEN MUTU LABORATORIUM TANGGAL 20 MARET 2025**



**LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN SURVEILAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
SNI ISO/IEC 17025:2017 TANGGAL 20 MEI 2025**



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)
Nama Tim/ja	:	Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Tahunan 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)

T/R	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	70	75
Realisasi	-	83,10	90,96
%Capaian	-	118,7	121,28

Catatan :

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)	
- ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga Inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. - Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (ISO 17020). - Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi: - Persyaratan Umum - Persyaratan Struktural - Persyaratan Sumberdaya - Persyaratan Proses - Persyaratan Sistem Manajemen - Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah kegiatan surveilan penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Selama Triwulan IV Tahun 2025, terdapat 75 kali pelaksanaan surveilan penerapan HACCP. - Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi diperoleh dengan menggunakan rumus : $\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ dimana : $\bar{X} = \text{Rata rata}$ $\frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} = \text{Nilai tingkat pemenuhan ke - 1, 2 , 3, ... , n}$ $n = \text{Banyaknya nilai tingkat pemenuhan}$ - Hasil verifikasi Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi di Balai Besar KIPM Makassar dihitung oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP berdasarkan rumus di atas. Berdasarkan surat dari Kepala Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP nomor B.35/BPPMHKP.2/TU.210/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Penyampaian Capaian Kinerja Sistem Manajemen Mutu sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 maka Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai sebesar 90,96 dari target sebesar 75. Sehingga output kegiatan penerapan sistem manajemen mutu telah terealisasi sebesar 121,28 %. - Sebagai perbandingan, capaian nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu dengan beberapa UPT BPPMHKP dapat disandingkan sebagai berikut :	

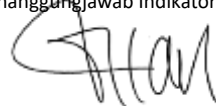
1. Balai Besar KIPM Surabaya II dengan nilai 91,30. Maka untuk perbandingan ini, masih lebih rendah dengan selisih 0,34 poin. 2. Balai KIPM Mataram dengan nilai 84,18. Maka untuk perbandingan ini, Balai Besar KIPM Makassar lebih tinggi dengan selisih 6,78 poin. Dari bachmarking tersebut diatas maka Balai Besar KIPM Makassar masih memerlukan perbaikan berkelanjutan terhadap indikator-indikator penilaian terutama pada indikator yang menjadi temuan ketidaksesuaian. • Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh 21 orang mulai dari Manager Puncak hingga inspektur mutu hasil perikanan yang telah memiliki nomor registrasi inspektur mutu dan/atau telah mengikuti pelatihan HACCP dasar. • Selama tahun 2025 dilakukan surveilan pelaksanaan HACCP sebanyak 318 kali sebagai pelaksanaan ruang lingkup lembaga inspeksi. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 terdapat surveilan HACCP sebanyak 320 kali. • Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi ini mendukung Asta Cita ke-2 dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. • IKU ini mendukung budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di Lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu Kompeten dimana ASN dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas sesuai dengan tantangan yang ada. Dengan adanya perubahan tugas dan fungsi dalam penjaminan mutu hulu hingga hilir, ASN inspektur mutu dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dan mengupdate regulasi-regulasi terbaru. • Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi bersumber dari DIPA Balai Besar KIPM Makassar tahun 2025 adalah sebesar Rp. 27.304.000,- mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 36,52% dari sebelumnya sebesar Rp. 20.000.000,-. Realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 27.254.000,- atau sebesar 99,82%. Sisa anggaran sebesar Rp. 50.000,- merupakan sisa anggaran dari kegiatan yang tidak terserap. • Pada tahun 2025 ini dilakukan 5 kali peningkatan kompetensi inspektur mutu berupa sharing session dan penyamaan persepsi inspektur mutu. Kegiatan peningkatan kompetensi inspektur mutu ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi inspektur mutu dalam melaksanakan tugas pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu hingga hilir. • Pada tanggal 25 November 2025 Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP melaksanakan Verifikasi Quality Manajemen System untuk melihat konsistensi pengujian laboratorium dalam rangka official control di Balai Besar KIPM dengan evaluator Martono dan Danar Kristiasari. Hasilnya terdapat 7 temuan yang telah dilakukan tindakan perbaikan pada tanggal 24 Desember 2025. Dari hasil verifikasi tersebut, lembaga inspeksi Balai Besar KIPM Makassar memperoleh penilaian 88,33 (sangat baik). • Pada tanggal 1 – 2 Desember 2025 telah dilakukan re-akreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012 oleh Badan Akreditasi Nasional dengan ruang lingkup Surveilans HACCP. Hasilnya terdapat 17 temuan penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012 dan 3 temuan penyaksian (witness). Tindakan perbaikan paling lambat harus diselesaikan pada tanggal 1 Februari 2026.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?) Sertifikat Akreditasi Lembaga Inspeksi Balai Besar KIPM Makassar SNI ISO/IEC 17020:2012 dengan nomor akreditasi LI-089-IDN telah dilakukan re-akreditasi. Terdapat 17 temuan penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012 dan 3 temuan witness lembaga inspeksi. Potensi masalah yang perlu diperhatikan adalah belum efektifnya tindak lanjut tindakan perbaikan temuan re-akreditasi yang memiliki tenggat waktu yang semakin dekat, yaitu tanggal 1 Februari 2026.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya Melakukan penyelesaian temuan re-akreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012 sesegera mungkin sebelum tenggat waktu yang ditentukan.	Penanggung Jawab Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji
--	--

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Berdasarkan rekomendasi tindak lanjut triwulan sebelumnya, telah dilakukan re-Akreditasi ulang terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17020:2012 pada tanggal 1-2 Desember 2025.	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji

Makassar, 8 Januari 2026
 Penanggungjawab Indikator Kinerja



Muhammad Irfan Rais

[illegible]

**LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN VERIFIKASI QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
PUSAT PENGENDALIAN MUTU BPPMHKP
TANGGAL 25 NOVEMBER 2025**



**LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN RE-AKREDITASI SNI ISO/IEC 17020:2012
TANGGAL 1 – 2 DESEMBER 2025**



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (8)
Nama Timja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Tahunan 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggarannya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahunan		
	2023	2024	2025
Target	93,75	93,78	92
Realisasi	96,38	97,16	94,58
%Capaian	102,81	103,60	102,80

Catatan :

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)	
DESKRIPSI Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini terintegrasi dengan Aplikasi OM-SPAN. Penilaian IKPA diatur pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. 🔍 Ruang lingkup : PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 mengatur mengenai pengukuran dan penilaian secara sistematis dan objektif atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA dan menggunakan aplikasi yang dikelola oleh DJPB. 🔍 Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja Pengukuran IKPA meliputi 3 aspek : 1. Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari: a. Revisi DIPA bobot 10 % b. Deviasi halaman 3 DIPA bobot 15% 2. Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:	

- a. Penyerapan anggaran bobot 20%
 - b. Belanja Kontraktual bobot 10%
 - c. Penyelesaian Tagihan bobot 10%
 - d. Pengelolaan UP dan TUP bobot 10%
 - e. Dispensasi Surat Perintah Membayar bobot 0%
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini adalah capaian output. Bobot capaian output adalah 25%.

Total Konversi Bobot pada Aspek pengukuran dan Indikator Kinerja Tahunan pada Tahun Anggaran 2025 adalah 100%

KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Berdasarkan hasil penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, kinerja pelaksanaan anggaran pada Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar memperoleh nilai akhir sebesar 94,58, dengan kategori Sangat Baik. Penilaian ini mencerminkan tingkat kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta hasil pelaksanaan anggaran yang secara umum telah berjalan efektif, tertib, dan akuntabel. Berikut penjelasan dari Indikator penunjang IKPA:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran

Kualitas perencanaan anggaran memperoleh nilai aspek sebesar 88,93. Capaian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun dengan cukup baik dan realistis. Indikator Revisi DIPA memperoleh nilai maksimal, yang mencerminkan bahwa perencanaan awal anggaran telah disusun secara matang sehingga tidak memerlukan banyak penyesuaian sepanjang tahun anggaran.

Namun demikian, pada indikator Deviasi Halaman III DIPA, nilai yang diperoleh belum optimal. Hal ini disebabkan masih adanya perbedaan antara rencana penarikan dana dengan realisasi pelaksanaan anggaran pada beberapa periode. Deviasi tersebut terjadi sebagai dampak dari penyesuaian jadwal kegiatan, adanya blokir anggaran, penghematan belanja, serta perubahan kondisi pelaksanaan kegiatan yang memerlukan penyesuaian waktu realisasi. Meskipun demikian, deviasi tersebut masih dalam batas wajar dan tidak mengganggu pencapaian target kinerja secara keseluruhan.

Berikut penjelasan nilai yang dicapai pada masing-masing indikator pendukung Kualitas perencanaan Anggaran:

a) Revisi DIPA

Revisi DIPA
Nilai: 100
Bobot: 10%
Nilai Akhir: 10,00

Hasil evaluasi:

- Perencanaan awal yang matang
- Revisi dilakukan tepat sasaran dan sesuai ketentuan

b) Deviasi Hal III DIPA

Deviasi Hal III DIPA
Nilai: 77,86
Bobot: 15%
Nilai Akhir: 11,68

Hasil evaluasi:

- Terdapat perbedaan antara RPB (Hal III DIPA) dengan realisasi bulanan

Tampilan RPD dan Realisasi Tahun Anggaran 2025

Monitoring/Realisasi Perubahan Data:

No	Uraian	RPB (Rp)	Realisasi (Rp)	RPB (Miliar Rp)	Realisasi (Miliar Rp)	RPB (Miliar Rp)	Realisasi (Miliar Rp)
1	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
30	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
33	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
34	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
35	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
37	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
38	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
39	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
40	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
42	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
43	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
44	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
45	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
46	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
47	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
48	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
49	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
50	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
51	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
53	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
55	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
56	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
57	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
58	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
59	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
60	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
61	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
62	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
63	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
64	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
65	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
66	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
67	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
68	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
69	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
70	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
71	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
72	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
73	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
74	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
75	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
76	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
77	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
78	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
79	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
80	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
81	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
82	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
83	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
84	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
85	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
86	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
87	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
88	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
89	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
90	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
91	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
92	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
93	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
94	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
95	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
96	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
97	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
98	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
99	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
100	Saluran Irigasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Kualitas pelaksanaan anggaran memperoleh nilai aspek sebesar 94,87, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran telah berjalan sangat baik. Indikator Penyerapan Anggaran mencatat nilai hampir maksimal, yang menggambarkan bahwa sebagian besar pagu anggaran dapat direalisasikan sesuai peruntukannya dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada indikator Belanja Kontraktual, nilai yang diperoleh belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh adanya kontrak yang tidak dapat direalisasikan sepenuhnya, pembatalan kontrak, maupun penyesuaian kebutuhan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika pelaksanaan di lapangan serta upaya efisiensi anggaran, namun tetap dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, indikator Penyelesaian Tagihan dan Pengelolaan UP dan TUP memperoleh nilai maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh tagihan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa penumpukan pada akhir tahun anggaran, serta pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan dilakukan secara tertib, tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut penjelasan nilai yang dicapai pada masing-masing indikator pendukung Kualitas Pelaksanaan Anggaran:

a) Penyerapan Anggaran

Penyerapan Anggaran
Nilai: 99,48
Bobot: 20%
Nilai Akhir: 19,90

Hasil evaluasi:

- Serapan anggaran hampir optimal
- sisa anggaran sangat kecil dan masih dalam batas wajar

b) Belanja Kontraktual

Belanja Kontraktual
Nilai: 80
Bobot: 10%
Nilai Akhir: 8

Hasil evaluasi:

- Terdapat kontrak yang tertunda sehingga tidak terealisasi secara penuh

c) Penyelesaian Tagihan

Penyelesaian Tagihan
Nilai: 100
Bobot: 10
Nilai Akhir: 10

Hasil evaluasi:

- Tagihan diselesaikan tepat waktu
- Tidak ada penumpukan SPM di akhir tahun

d) Pengelolaan UP dan TUP

Pengelolaan UP dan TUP
Nilai: 100
Bobot: 10
Nilai Akhir: 10

Hasil evaluasi:

- Tidak ada keterlambatan LPJ
- Tidak ada saldo mengendap bermasalah
- Pengelolaan kas UP/TUP maksimal

3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Pada aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai maksimal sebesar 100,00. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh output kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan dan dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menggambarkan bahwa anggaran yang digunakan telah mampu menghasilkan keluaran yang optimal dan memberikan manfaat sesuai tujuan program dan kegiatan.

Capaian Output
Nilai: 100
Bobot: 25
Nilai Akhir: 25

Hasil evaluasi:

- Output kegiatan tercapai sesuai target

Cara menghitung nilai total Capaian kinerja IKPA = (Nilai Akhir Kualitas Perencanaan Anggaran + Nilai Akhir Kualitas Pelaksanaan Anggaran + Nilai Akhir Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran) / Konversi Bobot 100 %

Perhitungan perolehan dari Nilai Akhir Kualitas Perencanaan Anggaran, Nilai Akhir Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Akhir Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan Indikator pendukung pada masing-masing adalah hasil perhitungan otomatis dari Aplikasi Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi Monev PA

Berikut tampilan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran Tahun 2025 pada Balai Besar KIPM Makassar.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan: 30-04-2025

No	Kode UPTD	Kode BA	Kode Suber	Uraian Suber	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	138	002	42758	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Nilai	100,00	77,86	99,40	90,00	100,00	100,00	100,00	94,58	100%	0,00	94,58
					Bobot	10	10	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	11,88	19,88	9,00	10,00	10,00	25,00				
					Nilai Target	100,00			90,00			100,00				

Dibawah ini merupakan tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran:

- Tabel perbandingan capaian kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator kinerja	Periode Tahun 2024 (Tahunan=93,78)		Periode Tahun 2025 (Tahunan=92)	
	Bobot	Nilai Akhir	Bobot	Nilai Akhir
Kualitas Perencanaan Anggaran				
Revisi DIPA	10	10	10	10
Deviasi Hal III DIPA	15	13,82	15	11,68
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Penyerapan Anggaran	20	19,15	20	19,9
Belanja Kontraktual	10	9,2	10	8
Penyelesaian Tagihan	10	10	10	10
Pengelolaan UP dan TUP	10	9,93	10	10
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Capaian Output	25	25	25	25
Dispensasi SPM (Pengurang)	0	0	0	0
Nilai Total	100	97,16	100	94,58
Nilai IKPA setelah konversi		97,16		94,58
Capaian (Realisasi/Target Q2)		103,60		102,80

Pada tabel diatas terlihat adanya penurunan nilai IKPA pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 sebesar 0,8 persen namun capaian realisasi masih melampaui target IKU 8 yang telah ditetapkan di awal tahun. Penurunan Tahun 2025 dipengaruhi oleh indikator Deviasi Hal III DIPA dan Belanja Kontraktual.

Hal-hal yang telah dilaksanakan dan dicapai selama tahun 2025 untuk mendukung nilai IKPA 2025 yaitu:

- Balai Besar KIPM Makassar mendapatkan IKPA 100 persen. Hal ini berdasarkan surat dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor:S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Penyesuaian data dan perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025.
- Indikator pada aspek pengukuran Kualitas Pelaksanaan Anggaran terkait pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sepanjang Tahun Anggaran 2025 memperoleh nilai sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh proses pengelolaan UP dan TUP telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Indikator pada aspek pengukuran Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran terkait capaian output sepanjang Tahun Anggaran 2025 memperoleh nilai sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh output kegiatan yang direncanakan telah terealisasi secara optimal, tepat sasaran, dan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Hal ini juga didukung dengan mengikutkan operator mengikuti kegiatan sosialisasi pelaporan proyeksi target dan realisasi Capaian Output 2025 secara online.
- Tim Keuangan telah melaksanakan rapat strategi pada tanggal 11 Juli 2025 dalam rangka meningkatkan capaian indikator deviasi Halaman III DIPA pada IKPA Triwulan III Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pengelola keuangan, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran, perlu melakukan perencanaan realisasi anggaran dengan mengacu pada Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disusun. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat kondisi yang mengharuskan optimalisasi penyerapan anggaran, sehingga realisasi anggaran tidak sepenuhnya sejalan dengan RPD yang telah direncanakan.
- Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan RPD 2026 yang dirangkaikan dengan rapat evaluasi kegiatan operasional tgl 19 Desember 2025

Sebagai perbandingan nilai IKPA dengan beberapa UPT lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat disajikan sebagai berikut :

1. IKPA Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Tahun Anggaran: 2025/2025

No	Kode UPT	Kode SK	Kode BSK	Kode Sub-BK	Uraian Sub-BK	Kategori	Terdapat Pelaksanaan Anggaran				Terdapat Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai TSP	Persentase Realisasi	Capaian UPT (Pencapaian)	Nilai AKIP (Pencapaian)
							Deviasi DIPA	Deviasi KPI	Persentase Anggaran	Deviasi Monev	Persentase Target	Persentase UPT (Pencapaian)	Output	Output					
1	100	001	01001		Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar	Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74	
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	85.74	100.00	85.74	100%	85.74	85.74		
					Manajemen	100.00	85.74	85.74											

SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja pelaksanaan anggaran, Balai Besar KIPM Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 10 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.329/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor: B.009/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar KIPM Makassar. Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:
 - 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
 - 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
 - 3 Orang Staf KPA dan;
 - 2 Orang Staf PPK
- Surat Perintah Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor: B.005/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tgl 2 Januari 2025 dengan beranggotakan 1 Pegawai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

ANGGARAN dan ASPEK PEMANFAATANNYA

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan layanan manajemen keuangan dan layanan perkantoran gaji dan tunjangan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

- Layanan manajemen keuangan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp23.450.000. Pagu pada kegiatan ini terblokir sepenuhnya.
- Layanan perkantoran gaji dan tunjangan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp6.734.232.000 setelah revisi. Pada TW IV 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar 6.632.028.852 atau 98,48 persen. Output dari layanan perkantoran gaji dan tunjangan adalah pembayaran gaji dan tunjangan seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar.

Total pagu anggaran untuk mendukung capaian kinerja pelaksanaan anggaran adalah sebesar Rp6.757.682.000 dengan realisasi anggaran 6.632.028.852 atau 98,14 persen. sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2024, kegiatan pada indikator kinerja ini hanya didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp9.468.000 Setelah revisi dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.440.000 atau 99,70 persen. terdapat penurunan realisasi anggaran pada Tahun 2025. Hal ini disebabkan pada Tahun 2025 pagu anggaran kegiatan layanan manajemen keuangan masih terblokir seluruhnya dan pagu anggaran sebagai pendukung pada indikator yang sama pada Tahun 2024 sangat kecil.

PROGRAM NASIONAL

Pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita.

LAMPIRAN KEGIATAN TAHUN 2025 IKU 8

- Tangkap Layar IKPA Tahun 2025 pada Aplikasi Monev PA

REKAMEN TERAPAH KEMENTERIAN KEPUKTIK INDONESIA
SALAH SATU DARI BANYAK RUMAH PENGUNJUNGAN MUKTI DAN KEMAMPUAN LAIN, PERHIMPATAN MARI LAIN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Salah satu indikator: 0000000000

No	Kode BPN	Kode RI	Kode Sektor	Kategori Sektor	Kategori	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Rencana Awal	Terserap dan Pengerjaan	Nilai yang telah Terserap/terpengerja
						Nilai Awal	Nilai Akhir	Nilai Awal	Nilai Akhir	Nilai Awal	Nilai Akhir	Nilai Awal	Nilai Akhir				
1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

- Kegiatan penyusunan RPD yang dirangkaikan dengan Rapat Evaluasi dan Kegiatan Operasional tgl 19 Desember 2025



Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

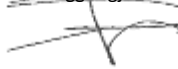
- Kurang optimalnya monitoring pelaksanaan belanja kontraktual
- Potensi masalah perencanaan RPD SBSN kurang optimal

Rekomendasi rencana aksi Triwulan I 2026	Penanggung Jawab
- Melaksanakan monitoring belanja kontraktual melalui briefing pagi/sharing session antar pengelola anggaran di awal tahun untuk meminimalisir tidak terserapnya kegiatan belanja kontraktual di akhir tahun - Tim Teknis berkoordinasi ke biro PBJ dan Sekretariat BPPMHKP terkait RPD SBSN	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi Triwulan III 2025	Penanggung Jawab
- Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan RPD 2026 yang dirangkaikan dengan rapat evaluasi kegiatan operasional tgl 19 Desember 2025	

- Pengelola anggaran telah memaksimalkan realisasi sesuai dengan RPD.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial
---	-------------------------------------

Makassar, 6 Januari 2026
 Penanggungjawab Indikator Kinerja



Karwit, S.Pi

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Timja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Tahunan 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	TAHUN		
	2023	2024	2025
Target	82	71	71,5
Realisasi	86,20	98,37	100
%Capaian	105,12	138,54	139,86

Catatan :

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Menteri keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran sebagai salah satu instrument penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara professional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga, unit eselon I / dan / satuan kerja bersangkutan. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas dimaksud bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA- K/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk:

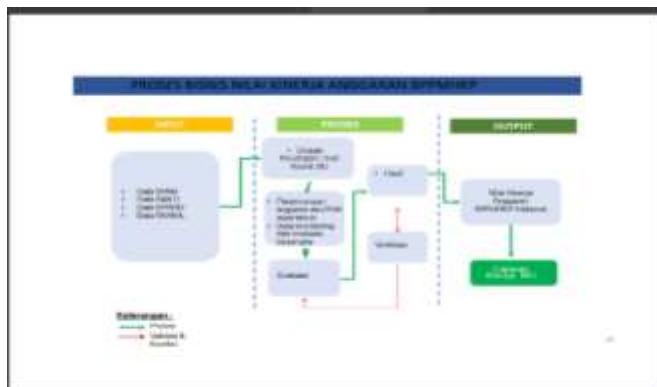
- Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan;
- Penyusunan revidi angka dasar;
- Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenan; dan
- Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga; dan/atau pihak-pihak lain, yang antara lain meliputi akademisi, pakar dan praktisi.

Untuk memantau Nilai Kinerja Anggaran, Kementerian Keuangan telah membuat suatu aplikasi yaitu Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Hal ini dimaksudkan agar setiap organisasi dapat selalu memantau dashboard kinerja anggaran dan melakukan peningkatan pada aspek-aspek penunjang Nilai Kinerja Anggaran tersebut. Pada tahun 2025 pengukuran Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan pada 2 kategori yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Aplikasi Monev Kementerian Keuangan pengukuran Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan pada 2 kategori yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan untuk tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya Nilai Kinerja Anggaran didasarkan dari 4 aspek yaitu Aspek Penyerapan,

Konsistensi, Capaian realisasi Output, dan Nilai Efisiensi. Berikut adalah proses bisnis terbentuknya data pada dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu



Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu

Tabel Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut :

NO	Uraian Kegiatan	Nilai Kinerja (%)				Ket.
		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	65,62	11,02	9,2	47,29	
2.	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	34,38	48,65	48,65	50	

Tabel Total Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 sebagaimana pada tabel :

No	Uraian Kegiatan	(&)				Ket.
		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1.	Total Nilai Kinerja Anggaran	100	93,44	88,53	100	
2.	Nilai	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	

Nilai Kinerja Anggaran pada dashboard Tahun 2025 adalah “Baik” artinya Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar KIPM Makassar Baik, dan perlu ditingkatkan Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

- Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran : Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektifitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian pemetaan SBK untuk menilai efisiensi. Dibawah ini adalah Dashboard aplikasi yang menampilkan Nilai kinerja Perencanaan Anggaran.
- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran : Pengukuran Nilai kinerja Pelaksanaan Anggaran di dukung oleh 8 indikator yaitu: Revisi DIPA, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Deviasi Halaman 3 DIPA, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP dan TUP, Capaian output dan Dispensasi SPM.

Berikut adalah Indikator Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan Nilai dan nilai akhir Tahun 2025 masing-masing indikator:

1. TRIWULAN 1 : Revisi DIPA (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 10), Deviasi Hal 3 DIPA (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 15), Penyerapan Anggaran (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 20), Belanja Kontraktual (nilai = 0 dan Nilai Akhir = 0), Penyelesaian Tagihan (nilai = 0 dan Nilai Akhir = 0), Pengelolaan UP dan TUP (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 10), Capaian Output (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 25), Dispensasi SPM (nilai = 0 dan Nilai Akhir = 0);

2. TRIWULAN 2 : Revisi DIPA (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 10), Deviasi Hal 3 DIPA (nilai = 86,88 dan Nilai Akhir = 13,03), Penyerapan Anggaran (nilai = 98,97 dan Nilai Akhir = 19,79), Belanja Kontraktual (nilai = 0 dan Nilai Akhir = 0), Penyelesaian Tagihan (nilai = 0 dan Nilai Akhir = 0), Pengelolaan UP dan TUP (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 10), Capaian Output (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 25), Dispensasi SPM (nilai = 0 dan Nilai Akhir = 0);
3. TRIWULAN 3 : Revisi DIPA (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 10), Deviasi Hal 3 DIPA (nilai = 77,05 dan Nilai Akhir = 11,56), Penyerapan Anggaran (nilai = 99,31 dan Nilai Akhir = 19,86), Belanja Kontraktual (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 10), Penyelesaian Tagihan (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 10), Pengelolaan UP dan TUP (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 10), Capaian Output (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 25), Dispensasi SPM (nilai = 0 dan Nilai Akhir = 0);
4. TRIWULAN 4 : Revisi DIPA (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 10), Deviasi Hal 3 DIPA (nilai = 77,86 dan Nilai Akhir = 11,68), Penyerapan Anggaran (nilai = 99,48 dan Nilai Akhir = 19,90), Belanja Kontraktual (nilai = 80 dan Nilai Akhir = 8), Penyelesaian Tagihan (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 10), Pengelolaan UP dan TUP (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 10), Capaian Output (nilai = 100 dan Nilai Akhir = 25), Dispensasi SPM (nilai = 0 dan Nilai Akhir = 0).

Aplikasi Monev Kemenkeu tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena adanya perbedaan indikator pengukuran untuk mendapatkan nilai Nilai Kinerja Anggaran. Namun dari segi Nilai Capaian Kinerja Tahun 2025 dan 2024 adalah 100% dan 98,37 %. terjadi peningkatan pada tahun 2025 sebesar 1,63%.

Capaian nilai perencanaan anggaran Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 100 persen dari target 71,5, dimana nilai perencanaan juga berintegrasi dengan nilai IKPA. Nilai tersebut tidak menggambarkan nilai sebenarnya, hal ini disebabkan karena adanya Nota Dinas dari Sekretaris Jenderal KKP Nomor: 138/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan IV TA 2025.



Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2025, pada Triwulan I sebesar Rp. 154.404.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.052.000 atau 0,69%, Triwulan II sebesar Rp. 263.504.000 dengan realisasi sebesar 31.775.600 atau 12,06%, Triwulan III sebesar Rp. 273.404.000 dengan realisasi sebesar 158.839.027 atau 58,10% dan Triwulan IV adanya revisi penambahan pagu sehingga menjadi 313.110.000 dengan realisasi sebesar 312.839.527 atau 99,87%, terjadi efisiensi sebesar Rp. 270.473 yang digunakan untuk :

- Triwulan I :
 - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat.
- Triwulan II :
 - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat;
 - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Laboratorium Bertingkat;
 - Halaman Gedung/Bangunan Kantor.
- Triwulan III :
 - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat;
 - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat;
 - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Laboratorium Bertingkat;
 - Halaman Gedung/Bangunan Kantor.
- Triwulan IV :
 - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat;
 - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat;

- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Laboratorium Bertingkat;
- Halaman Gedung/Bangunan Kantor.

Pada Triwulan IV Tahun 2025 terdapat buka blokir anggaran sebesar Rp. 1.620.576.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan dukungan manajerial (3987) sebesar Rp. 1.420.698.000, kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu (3989) sebesar Rp. 159.628.000 dan kegiatan manajemen mutu (7010) sebesar Rp. 40.250.000. Buka blokir anggaran berdampak positif terhadap kinerja anggaran Triwulan IV disebabkan anggaran yang tersedia dapat segera dibelanjakan sesuai kegiatan, program yang sempat tertunda akibat blokir anggaran dapat dilanjutkan dan diselesaikan tepat waktu serta target fisik dan manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Selain itu buka blokir anggaran menyebabkan ketidaksesuaian rencana penarikan dana yang telah disusun pada awal Triwulan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024 pagu anggaran sebesar Rp. 80.159.000 dan terealisasi sebesar Rp. 79.998.804 dan tahun 2023 anggaran sebesar Rp. 99.022.000 dan terealisasi sebesar Rp. 98.502.467.

Untuk mendukung tercapainya IKU ini, Balai Besar KIPM Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 9 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.329/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor: B.009/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar KIPM Makassar. Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:
 - 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
 - 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
 - 3 Orang Staf KPA dan;
 - 2 Orang Staf PPK

Komitmen untuk terus meningkatkan kinerja berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara menjadi prioritas Balai Besar KIPM Makassar.

Pada Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta cita.

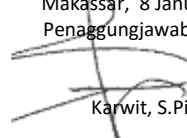
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Buka blokir anggaran akhir tahun belum terserap secara maksimal terutama di belanja 52;
- Buka blokir anggaran diakhir tahun berpotensi terjadinya pembelanjaan yang kurang efektif, tidak tepat sasaran dan ketidaksesuaian prioritas.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Rapat/briefing terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran; - Identifikasi resiko buka blokir anggaran.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
• Briefing personil dukungan manajerial terkait percepatan penyerapan anggaran tanggal 22 Oktober 2025	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 8 Januari 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja


Karwit, S.Pi

TRIWULAN I :

**Dokumentasi Rapat Pembahasan Penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025
Tanggal 2 Januari 2025 di BPPMHKP Makassar**



**Dokumentasi Rapat Relokasi Blokir Anggaran Pada Tanggal 24 Januari 2025
di selenggarakan oleh Sekretariat BPPMHKP**



TRIWULAN II :

**Dokumentasi Rapat Pembahasan Percepatan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025
di BPPMHKP Makassar**



TRIWULAN III :

**Dokumentasi Rapat Evaluasi Realisasi Output dan Realisasi Anggaran Triwulan III
Tahun 2025 di BPPMHKP Makassar**



TRIWULAN IV :

**Dokumentasi Brefing Personil Dukungan Manajerial Terkait Percepatan Anggaran
Tanggal 22 Oktober 2025**



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator (10)	:	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
Nama Timja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintah yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	100	100	100
Realisasi	100	100	100
%Capaian	100%	100%	100%

Catatan :

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Deskripsi : Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dan anggaran oleh Satuan Kerja, maka secara periodik dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal (Inspektorat Jenderal) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemerisa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (<i>reasonable assurance</i>) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh obyek pemeriksaan (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir; Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Satker BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern; Indikator kinerja “Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)” dihitung berdasarkan dokumen formal yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan dokumen bukti tindak lanjut penyelesaiannya. Formulasi perhitungannya menggunakan pendekatan sebagai berikut : $\% P = (A/B) \times 100\%$ Keterangan : %P = Persentase penyelesaian temuan; A = Jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 yang diselesaikan pada LHP atas kepatuhan; B = Nilai temuan BPK tahun 2025; Pada tahun 2025 tidak terdapat pemeriksaan BPK, sehingga realisasi dari IKU ini dinilai mencapai 100%, jika dibandingkan TW IV, TW III, TW II dan TW I 2025 yaitu 100% jadi Tahun 2025 ini capaian realisasinya 100%. Dengan demikian penyelesaian temuan BPK pada lingkup Balai Besar KIPM Makassar dinilai konsisten.

Kegiatan yang Dilaksanakan :

Pada tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan guna mendukung tercapainya indikator ini, yakni dengan melakukan pemeriksaan, verifikasi dan validasi terhadap seluruh bukti tagihan belanja untuk menentukan bahwa tagihan tersebut layak untuk dilakukan pembayaran. Dengan aktivitas tersebut diharapkan pengelolaan anggaran dapat dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku sehingga tidak ada temuan dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional baik internal maupun eksternal;

Persentase penyelesaian temuan BPK mendukung Misi Asta Cita ke-7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan Korupsi dan Narkoba”. Hal ini karena dengan adanya IKU ini dapat mendorong instansi pemerintah dalam hal ini Balai Besar KIPM Makassar untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta mematuhi penyelesaian temuan BPK tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IKU ini juga mendorong meningkatnya budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di lingkungan Balai Besar KIPM Makassar yaitu “Akuntabel” ASN bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh pengelola anggaran sebanyak 11 orang, yang terdiri dari :

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen;
- (3) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
- (4) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
- (6) Bendahara Penerimaan;
- (7) Bendahara Pengeluaran;
- (8) Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- (9) Verifikator Keuangan (3 orang);

Pada Triwulan IV tahun 2025 terdapat kegiatan audit BPK berdasarkan Surat Pemberitahuan BPK nomor 184/B/S/DJPN-IV/PPA.02/11/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan yang akan dilaksanakan selama 30 hari sejak tanggal 24 November s/d 31 Desember 2025. Adapun lokasi sampling audit di Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, NTT dan Kalimantan Barat. Provinsi Sulawesi Selatan tidak menjadi lokasi sampling audit tetapi mengumpulkan data Rekapitulasi Belanja Modal dan Belanja Barang Kontraktual TA 2025.

Indikator Kinerja ini didukung dengan pagu Tahun 2025 sebesar Rp. 196.283.000,- yang terdiri dari :

- Layanan Perkantoran, Perawatan Kendaraan Bermotor semula Rp. 135.310.000,- menjadi 141.683.000,-;
- Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu Rp. 54.600.000,-

Sampai dengan tahun 2025 telah direalisasikan anggaran Rp. 196.143.552,- atau 100% yang digunakan untuk Layanan perkantoran, Perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp. 141.564.319,- dan Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu sebesar Rp. 54.579.233,-

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

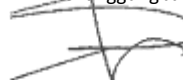
Belum optimalnya Sistem pengendalian internal keuangan terkait verifikasi berjenjang;

Rekomendasi Rencana Aksi Tahun 2026	Penanggung Jawab
Melaksanakan rapat SPIP membahas verifikasi keuangan secara berjenjang;	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Rencana Aksi Tahun 2025	Penanggung Jawab
Telah dilakukan verifikasi terhadap seluruh bukti tagihan belanja, dan dituangkan dalam lembar checklist;	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

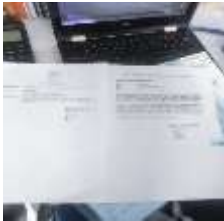
Makassar, 8 Januari 2026

Penanggung Jawab,



Karwit, S.Pi

Dokumentasi : Rapat Laporan Capaian Kinerja dan Kegiatan verifikasi keuangan pada Balai PPMHKP Makassar



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator (10)	:	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
Nama Timja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintah yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	100	100	100
Realisasi	100	100	100
%Capaian	100%	100%	100%

Catatan :

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Deskripsi : Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dan anggaran oleh Satuan Kerja, maka secara periodik dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal (Inspektorat Jenderal) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (<i>reasonable assurance</i>) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh obyek pemeriksaan (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir; Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Satker BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern; Indikator kinerja “Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)” dihitung berdasarkan dokumen formal yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan dokumen bukti tindak lanjut penyelesaiannya. Formulasi perhitungannya menggunakan pendekatan sebagai berikut : $\% P = (A/B) \times 100\%$ Keterangan : %P = Persentase penyelesaian temuan; A = Jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 yang diselesaikan pada LHP atas kepatuhan; B = Nilai temuan BPK tahun 2025; Pada tahun 2025 tidak terdapat pemeriksaan BPK, sehingga realisasi dari IKU ini dinilai mencapai 100%, jika dibandingkan TW IV, TW III, TW II dan TW I 2025 yaitu 100% jadi Tahun 2025 ini capaian realisasinya 100%. Dengan demikian penyelesaian temuan BPK pada lingkup Balai Besar KIPM Makassar dinilai konsisten.

Kegiatan yang Dilaksanakan :

Pada tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan guna mendukung tercapainya indikator ini, yakni dengan melakukan pemeriksaan, verifikasi dan validasi terhadap seluruh bukti tagihan belanja untuk menentukan bahwa tagihan tersebut layak untuk dilakukan pembayaran. Dengan aktivitas tersebut diharapkan pengelolaan anggaran dapat dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku sehingga tidak ada temuan dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional baik internal maupun eksternal;

Persentase penyelesaian temuan BPK mendukung Misi Asta Cita ke-7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan Korupsi dan Narkoba”. Hal ini karena dengan adanya IKU ini dapat mendorong instansi pemerintah dalam hal ini Balai Besar KIPM Makassar untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta mematuhi penyelesaian temuan BPK tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IKU ini juga mendorong meningkatnya budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di lingkungan Balai Besar KIPM Makassar yaitu “Akuntabel” ASN bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh pengelola anggaran sebanyak 11 orang, yang terdiri dari :

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen;
- (3) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
- (4) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
- (6) Bendahara Penerimaan;
- (7) Bendahara Pengeluaran;
- (8) Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- (9) Verifikator Keuangan (3 orang);

Pada Triwulan IV tahun 2025 terdapat kegiatan audit BPK berdasarkan Surat Pemberitahuan BPK nomor 184/B/S/DJPKN-IV/PPA.02/11/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan yang akan dilaksanakan selama 30 hari sejak tanggal 24 November s/d 31 Desember 2025. Adapun lokasi sampling audit di Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, NTT dan Kalimantan Barat. Provinsi Sulawesi Selatan tidak menjadi lokasi sampling audit tetapi mengumpulkan data Rekapitulasi Belanja Modal dan Belanja Barang Kontraktual TA 2025.

Indikator Kinerja ini didukung dengan pagu Tahun 2025 sebesar Rp. 196.283.000,- yang terdiri dari :

- Layanan Perkantoran, Perawatan Kendaraan Bermotor semula Rp. 135.310.000,- menjadi 141.683.000,-;
- Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu Rp. 54.600.000,-

Sampai dengan tahun 2025 telah direalisasikan anggaran Rp. 196.143.552,- atau 100% yang digunakan untuk Layanan perkantoran, Perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp. 141.564.319,- dan Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu sebesar Rp. 54.579.233,-

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Belum optimalnya Sistem pengendalian internal keuangan terkait verifikasi berjenjang;

Rekomendasi Rencana Aksi Tahun 2026	Penanggung Jawab
Melaksanakan rapat SPIP membahas verifikasi keuangan secara berjenjang;	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Rencana Aksi Tahun 2025	Penanggung Jawab
Telah dilakukan verifikasi terhadap seluruh bukti tagihan belanja, dan dituangkan dalam lembar checklist;	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 8 Januari 2026

Penanggung Jawab,


Karwit, S.Pi

Dokumentasi : Rapat Laporan Capaian Kinerja dan Kegiatan verifikasi keuangan pada Balai PPMHKP Makassar



**Lampiran 12. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR M MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Timja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan III tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	TAHUN		
	2023	2024	2025
Target	85	82	86
Realisasi	87,13	83,80	90
%Capaian	102.51	102.19	104.65

Catatan :

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) parameter yaitu : 1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 % Pada aspek ini menyampaikan dokumen perencanaan yang berupa : Renstra 2025-2029, Renja, RKAKL dan Rencana Aksi. Yang sudah dilaksanakan sampai triwulan IV tahun 2025 yaitu : penyusunan RKAKL dan Rencana Aksi Renja dan Renstra mencapai 30 %.

2. Pengukuran Kinerja dengan Bobot 30 %

Pengukuran Kinerja ini telah terselesai Pada Aspek ini menyampaikan dokumen pengukuran kinerja yang berupa :

Penyusunan Manual IKU tahun 2025 yang telah diselesaikan pada triwulan I terealisasi mencapai 30%

3. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15 %

Pada Aspek Pelaporan Kinerja tahun 2025, dokumen yang harus disiapkan adalah Laporan Kinerja Triwulan I , Triwulan II, Triwulan III, triwulan IV dan Tahunan.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025 telah disampaikan Laporan Kinerja Triwulan I , II, III, dan IV sehingga realisasi tercapai 15 %

4. Evaluasi Kinerja dengan Bobot 25 %

Evaluasi kinerja dilaksanakan secara internal oleh Balai Besar KIPM Makassar dan secara eksternal oleh Sekretariat BPPMHKP, Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat Jenderal secara berkala (triwulanan). Evaluasi secara internal dilakukan oleh Tim Balai Besar KIPM Makassar sebelum dilakukan penyusunan Laporan Kinerja, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan setelah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja . Hasil akhir dari evaluasi eksternal berupa pengesahan nilai NPSS dalam Aplikasi Kinerjaku yang dapat dijadikan dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan evaluasi kinerja secara internal dan eksternal realisasi tercapai 25 % .

Bobot realisasi capaian :

$$= \text{Parameter 1 (30 \%) + parameter 2 (30 \%) + parameter 3 (15 \%) + parameter 4 (25 \%)}$$
$$= 100 \%$$

Realisasi capaian = Bobot realisasi capaian x Target

$$= \frac{100}{86} \times 100$$
$$= 116,27 \%$$

Namun dilihat dari Aplikasi Kinerjaku dan Surat Kepala Badan BPPMHKP Nomor Surat 1/BPPMHKP.1/RC.610/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA. 2025 UPT lingkup BPPMHKP, terdapat perbedaan hasil penilaian yaitu 90 (A), dengan rincian sebagai berikut :

No	Parameter	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	27
2.	Pengukuran Kinerja	30	27
3	Pelaporan Kinerja	15	13,5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,5
Jumlah			90

Dengan demikian untuk kinerja AKIP diperlukan upaya peningkatan kinerja pada semua parameter kinerja.

Adapun pencapaian indikator ini tahun 2025 yaitu 90 (A) ini melebihi dari target 86 sehingga capaian kinerja ini 104,65 %. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu 102.19 % maka tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2.46 %.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2025 adalah :

1. Telah dilakukan rapat sesuai dengan memorandum Balai Besar KIPM Makassar Nomor B.14/BBKIPM.MKS/TU.330/III/2025 pada tanggal 5 Maret perihal penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 17 (tujuh belas) Indikator kinerja
2. Mengikuti Launching Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP sesuai Surat Sekjen Biro Perencanaan nomor B.1694/SK.1/RC.610/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 memberikan pemahaman dan kapasitas aparatur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029.
3. Tim SAKIP telah melakukan peningkatan kompetensi dengan mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh KKP melalui aplikasi E-Milia sesuai Surat Tugas Nomor B.1592/BBKIPM.MKS/KP.440/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025 jumlah pegawai 35 Orang
4. Telah dilaksanakan optimalisasi capaian kegiatan dan dilakukan penginputan pada aplikasi SAKTI dengan penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar 49.16 %
5. Telah melakukan penginputan data dukung rencana aksi triwulan III pada aplikasi kinerja berupa pagu anggaran yang mendukung setiap indikator, realisasi anggaran, masalah, rekomendasi dan tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, penginputan data dukung tersebut dilakukan setiap triwulan.
6. Tanggal 13 Oktober 2025 finalisasi Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2025-2029.
7. Tanggal 28 November 2025 telah melakukan perbaikan LKE pada Aplikasi Kinerja untuk Penilaian Mandiri SAKIP

Penilaian Mandiri SAKIP mendukung misi Asta Cita ke 7 yaitu “ Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini disebabkan karena dengan adanya penilaian mandiri sakip dapat

meningkatkan output dari program kegiatan yang terdapat dalam Tugas dan Fungsi Balai Besar KIPM Makassar.

IKU ini mendukung terciptanya budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu "Akuntabel" ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, hal ini disebabkan karena setiap pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi dipertanggungjawabkan secara tertulis dan disertai dengan dokumentasi kegiatan yang detail dan lengkap.

Untuk pemanfaatan melaksanakan Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 42.795.000 yang mengalami blokir sebanyak 100 %. jika dibandingkan pemanfaatan anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2024 dengan pagu Rp 38.668.000,- teralisasi anggaran sebesar sebesar Rp 38. 655.199 atau 99.96 %

Untuk mendukung tercapainya IKU ini didukung SDM sebanyak 7 orang terdiri dari Kasubbag Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Fungsional APK APBN Madya, APK APBN Muda, APK APBN Pertama, Staf Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran)

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

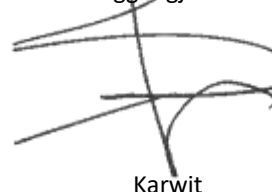
- Potensi masalah dapat terjadi jika monitoring terhadap capaian kegiatan tidak berjalan optimal

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Melakukan monitoring output kegiatan dan realisasi anggaran	Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Briefing personil dukungan manajerial terkait percepatan penyerapan anggaran tanggal 22 Oktober 2025;	Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 8 Januari 2026

Penanggungjawab Indikator Kinerja



Karwit

DOKUMENTASI KEGIATAN



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Tim/ja	:	Dukungan Manajemen
Periode Laporan	:	Tahunan 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tatakelola pemerintahan yang Efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	TAHUN		
	2023	2024	2025
Target	75	80	85
Realisasi	100	100	100
% Capaian	133,33	125	117,65

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?) Deskripsi Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik; Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut; Indikator Kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada Balai Besar KIPM Makassar berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s/d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Balai Besar KIPM Makassar yang menjadi obyek pengawasan, dengan formula perhitungan sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh unit kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan pada unit kerja}} \times 100 \%$ Kegiatan yang Dilakukan : Pada tahun 2025 terdapat audit dari Inspektorat Jenderal KKP yang memberikan rekomendasi yang telah ditindak lanjuti 100%, sehingga realisasi indikator kinerja tahunan ini mencapai 100, atau dengan % capaian sebesar 117,65% yang sama-sama telah melewati target seperti pada periode tahun 2024. Berikut Rekomendasi itjen hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 pada BPPMHKP Makassar.

Rekomendasi	Tindak Lanjut
Kepala BPPMHKP Makassar direkomendasikan untuk menyusun rencana aksi untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan Tahun 2025 kategori pelayanan prima, khususnya bagi aspek-aspek yang belum optimal, antara lain melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan atas SP;	TL 30 Juni s.d. 4 Juli 2025 Telah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor B.1859/BBKIPM.MKS/TU. 210/VI/2024 tanggal 30 Juni 2025 perihal Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025, yang berisi Matriks Rencana Aksi Tindakan Perbaikan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025. Adapun Forum Konsultasi Publik atas SP BPPMHKP Makassar pada bulan Agustus 2025 TL 10 Juli 2025 Telah ditindaklanjuti dengan Laporan Monev Pelaksanaan SP yang memuat masukan dari SKM, namun laporan tersebut belum menganalisa atas seluruh 14 komponen Standar Pelayanan. TL 3 September 2025 Telah ditindaklanjuti dengan Laporan Pelaksanaan Reviu Standar Pelayanan Publik Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2025
Kepala BPPMHKP Makassar direkomendasikan untuk menyusun rencana aksi untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan Tahun 2025 kategori pelayanan prima, khususnya bagi aspek-aspek yang belum optimal, antara lain mempublikasikan SP SIPPN	TL 30 Juni s.d. 4 Juli 2025 Telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Nomor B.1859/BBKIPM.MKS/TU. 210/VI/2024 tanggal 30 Juni 2025 perihal Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025, yang berisi Matriks Rencana Aksi Tindakan Perbaikan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025. 2. Penjelasan bahwa sampai dengan tanggal 3 Juli 2025, Website SIPPN KemenPAN RB belum dapat diakses, beserta bukti postingan KemenPAN RB pada akun instagram @pelayanan.publik.
Kepala BPPMHKP Makassar direkomendasikan untuk menyusun rencana aksi untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan Tahun 2025 kategori pelayanan prima, khususnya bagi aspek-aspek yang belum optimal, antara lain pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik yang belum dilakukan secara harian dan detail/sangat lengkap	<i>Kurang: Bukti pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik yaitu jumlah sertifikat yang terbit setiap harinya dan diposting secara harian dan detail/sangat lengkap</i> TL 30 Juni s.d. 4 Juli 2025 Telah ditindaklanjuti dengan: Surat Nomor B.1859/BBKIPM.MKS/TU. 210/VI/2024 tanggal 30 Juni 2025 perihal Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025, yang berisi Matriks Rencana Aksi Tindakan Perbaikan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025.

	TL 10 Juli 2025 Data dukung yang disampaikan belum seluruhnya sesuai, yaitu screenshot rekap penerbitan sertifikat dari aplikasi SIAPMUTU. Belum terdapat publikasi di media sosial atau website secara harian (minimal 7 hari) kepada pengguna jasa. TL 3 September 2025 Telah ditindaklanjuti dengan screenshot publikasi pelayanan di media sosial
Kepala BPPMHKP Makassar direkomendasikan untuk menyusun rencana aksi untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan Tahun 2025 kategori pelayanan prima, khususnya bagi aspek-aspek yang belum optimal, antara lain mengikutsertakan Inovasi "Si Jempol Jala Ekspor" dalam kompetisi	TL 30 Juni s.d. 4 Juli 2025 Telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Nomor B.1859/BBKIPM.MKS/TU. 210/VI/2024 tanggal 30 Juni 2025 perihal Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025, yang berisi Matriks Rencana Aksi Tindakan Perbaikan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025. 2. Surat Nomor B. 2346/BPPMHKP.1/HM.460/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 perihal Berita Acara Hasil Penilaian Proposal KIPP UPP Lingkup BPPMHKP Tahun 2025, yang didalamnya terdapat bukti keikutsertaan "Si Jempol Jala Ekspor" dalam kompetisi internal lingkup BPPMHKP
Anggaran : Capaian indikator kinerja ini didukung dengan anggaran dari DIPA Tahun 2025 pada mata anggaran 3987.EBA.994.002.0A, 3987.EBA.994.002.0G dan 3987.EBA.994.002.0I, dengan pagu anggaran Rp.2.064.505.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.2.060.401.068,- atau 99,80% yang digunakan untuk belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, belanja honor output kegiatan, belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Jika dibandingkan alokasi anggaran pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 822.011.000,- maka terjadi peningkatan alokasi pagu yang signifikan yaitu sebesar 60,18%. Demikian pula dengan besaran persentase penggunaan anggaran jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang hanya mencapai 86,30%.	
Sumberdaya Manusia : Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 14 orang yang terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Pejabat Pengadaan 1 orang, Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang 1 orang, Pengurus BMN 1, Bendahara 2 orang, Bendahara Penerimaan Pembantu 1 orang, Staf KPA 2 orang, Staf PPK 3 orang.	
Program Nasional, Budaya Kerja dan Pemanfaatan : Indikator kinerja ini jika tercapai maka akan mendukung keberhasilan program prioritas KKP maupun Program Prioritas Nasional Asta Cita. Indikator kinerja ini secara spesifik mendukung Program Prioritas Nasional Asta Cita ke 7 yaitu "Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba". IKU ini juga mendorong meningkatnya budaya kerja Ber-AHLAK di lingkungan Balai Besar KIPM Makassar yaitu "Akuntabel" dimana ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.	

Tercapainya target kinerja ini memncerminkan bahwa organisasi telah melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan dan standar yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan dan anggaran telah dilaksanakan dengan akuntabel dan tepat waktu. Aspek pemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan IKU ini yaitu memberikan informasi mengenai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, sehingga dapat mengambil tindakan dan Keputusan secara cepat, tepat dan akurat.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi masalah kurang cermatnya pengelola kegiatan dan anggaran dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan itjen.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Operator SIDAK melakukan pemantauan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan Itjen secara berkala.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
- Telah dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan Itjen pada aplikasi SIDAK periode Triwulan IV Tahun 2025.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 08 Januari 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja


Karwit



Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Tim Kerja	:	Dukungan Manajemen
Periode Laporan	:	Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja (14)	:	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	-	76
Realisasi	-	-	100
% Capaian	-	-	131,57

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Anggaran untuk RUP paket pengadaan barang dan jasa hingga akhir tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 3.242.871. 000,- Untuk menghitung persentase capaian rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%) menggunakan rumus sebagai berikut : $\text{Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Rp. 3.228.871. 000}}{\text{Rp. 3. 242.871. 000}} \times 100\% = 99,57 \%$ Realisasi IKU pada akhir tahun 2025 adalah sebesar 100 % dari target 76 % atau capaiannya sebesar 131,57 % Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai berikut : 1. Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam aplikasi SIRUP pada tanggal 12 Mei 2025;

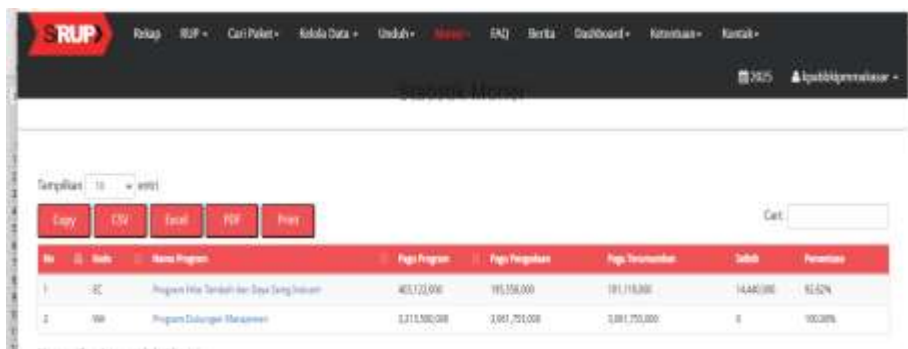
2. Mengikuti bimbingan/ diskusi terkait Sistem Informasi Rencanaa Umum Pengadaan (SIRUP)) yang dipandu oleh Kepala Sub bagian Umum/ Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada hari Senin, 19 Juni 2025;
3. Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam aplikasi SIRUP pada tanggal 4 Agustus 2025;;
4. Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam aplikasi SIRUP pada tanggal 24 s.d 25 November 2025;
5. Mengikuti Desiminasi Pencatatan RUP Atahun Anggaran 2026 Lingkup KKP tanggal 17 Desember 2025;

Untuk melaksanakan program kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/ Jasa yang mudah diakses masyarakat, akuntabel dan transparan pada instansi pemerintah khususnya lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka perlu disusun Rencana Umum Pengadaan berbasis aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berkaitan dengan hal tersebut Balai Besar KIPM Makassar sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah menyusun Rencana Umum Pengadaan yang diuplod di aplikasi SIRUP. Pada triwulan II dan triwulan IV telah dilakukan revisi kegiatan dan anggaran sehingga Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/ Jasa perlu menyesuaikan, diinput serta diumumkan ke dalam portal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Pada tahun anggaran 2025 nilai paket pengadaan barang dan jasa Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah mengalami perubahan (revisi) menjadi Rp. 3.241.329.000,-.. Keadaan dan posisi realisasi RUP sebagaimana pada tabel berikut:

No.	Kode	Nama Program	Pagu Program (Rp.)	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu terumumkan (Rp.)	Selish (Rp.)	Persentase
1	EC	Program dan Nilai Tambah Daya Saing Industri	403,122,000	195,558,000	181,118,000	14,440,000	92.62 %
2	WA	Program Dukungan Manajemen	3,213,500,000	3,061,753,000	3,061,753,000	0	100 %

Nilai Pagu Pengadaan Rp. 195.558.000,- yang selisih dengan Pagu terumumkan sebesar Rp. 14.440.000,- dalam posisi Blokir Angggaran (*Look Pagu*) dan tidak bisa diumumkan di RUP.



The screenshot shows the SIRUP application interface. At the top, there is a navigation bar with the SIRUP logo and various menu items like 'RUP', 'RUPP', 'Cari Paket', 'Solusi Data', 'Unduh', 'RUPP', 'RUPP', 'Dashboard', 'Kontak', and 'Kontak'. Below the navigation bar, there is a search bar and a table displaying RUP data. The table has columns for 'No', 'Kode', 'Nama Program', 'Pagu Program', 'Pagu Pengadaan', 'Pagu Terumumkan', 'Selisih', and 'Persentase'. The data in the table matches the table provided in the text.

No	Kode	Nama Program	Pagu Program	Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selish	Persentase
1	EC	Program Nilai Tambah Daya Saing Industri	403,122,000	195,558,000	181,118,000	14,440,000	92.62%
2	WA	Program Dukungan Manajemen	3,213,500,000	3,061,753,000	3,061,753,000	0	100.00%

Adapun periode pelaporan untuk IKU ini adalah tahunan sehingga capaian triwulan tidak bisa diukur hanya menggambarkan progres kegiatan PBJ yang diperoleh setiap triwulan. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Rencana Umum Pengadaan (RUP) Balai Besar KIPM Makassar yang telah diinput ke dalam aplikasi SIRUP LKPP.go.id yang dilaksanakan oleh tim Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP persentase capaian IKU ini adalah 100 % (sumber dari aplikasi SIRUP)

Adapun sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja ini selama tahun 2025 sebanyak 7 orang yang terdiri dari: KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Operator SIRUP dan Operator SAKTI (Modul Persediaan, Aset Tetap dan GLP).

Pada tahun 2025 alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebagai berikut :

- TW I sebesar Rp. 65.568.000,-
- TW II sebesar Rp. 120.504.000,-
- TW III sebesar Rp. 120.504.000,-
- TW IV sebesar Rp. 110.652.000,-

Realisasi anggaran hingga akhir tahun 2025 sebesar Rp. 110.650.000,- dengan persentase 99,99 %.

Indikator Kinerja Utama ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024 karena IKU ini merupakan IKU baru di Tahun Anggaran 2025.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis Web (*Web based*) mendukung misi Asta Cita ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini disebabkan karena dengan adanya aplikasi SIRUP maka transparansi pada pengelolaan sistem pemerintahan dapat terlaksana dengan baik, masyarakat dapat secara langsung mengakses pengadaan barang dan jasa.

Manfaatnya sebagai berikut :

1. SIRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (*Web based*) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP
2. SIRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya.
3. SIRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.
4. Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SIRUP pada website LKPP dengan alamat : inaproc.lkpp.go.id/sirup;
5. Untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi Balai Besar KIPM Makassar dalam pengadaan barang/ jasa

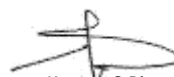
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi masalah Update perubahan kegiatan dan anggaran (revisi) belanja pengadaan barang dan jasa tidak tersampaikan ke bagian admin pengelola aplikasi SIRUP.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Setiap perubahan kegiatan dan anggaran pengadaan (revisi) disampaikan atau dikomunikasikan dengan pengelola aplikasi SIRUP	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Operator telah menginput data kegiatan dan anggaran dalam portal SIRUP.go.id dengan cermat dan lebih teliti sehingga nilai paket pengadaan yang diinput sesuai dengan nilai paket yang terumumkan	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

Makassar, 7 Januari 2026
Penanggung jawab Indikator Kinerja,


Karwin, S.Pi

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) TAHUN 2025

002-001 - 01.02

REKAP PENGADAAN BAHAN PENGADAN

TAKSIK ANGGARAN 2015

KUPOS	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Unit Kerja	Badan Penyelenggara Karpas-Perikanan Ruk. dan Karpas dan Perikanan Kelautan
PAJAK	Rekening Corant. T.A. 01 181-001000001

This report is generated by the system on 01/02/2015 at 10:00:00 AM. It is a summary of the data that has been entered in the system and is not intended to be used for any other purpose. It is not a legal document and should not be used as such. It is for information only.

This report is generated by the system on 01/02/2015 at 10:00:00 AM. It is a summary of the data that has been entered in the system and is not intended to be used for any other purpose. It is not a legal document and should not be used as such. It is for information only.

Generated by Sistem Karpas-Perikanan Ruk. dan Karpas Kelautan

[illegible]

							ISSN: 0275-1257
31	Journal of International Law and Economics	0275-1257	Volume 4(2)	2000	Winter 2000	Legal, Econ, 174 pp, 2 tables, 1 fig	112.00
32	Journal of International Law and Economics	0275-1257	Volume 4(2)	2000	Winter 2000	Legal, Econ, 174 pp, 2 tables, 1 fig	112.00
33	Journal of International Law and Economics	0275-1257	Volume 4(2)	2000	Winter 2000	Legal, Econ, 174 pp, 2 tables, 1 fig	112.00
34	Journal of International Law and Economics	0275-1257	Volume 4(2)	2000	Winter 2000	Legal, Econ, 174 pp, 2 tables, 1 fig	112.00
35	Journal of International Law and Economics	0275-1257	Volume 4(2)	2000	Winter 2000	Legal, Econ, 174 pp, 2 tables, 1 fig	112.00
36	Journal of International Law and Economics	0275-1257	Volume 4(2)	2000	Winter 2000	Legal, Econ, 174 pp, 2 tables, 1 fig	112.00
37	Journal of International Law and Economics	0275-1257	Volume 4(2)	2000	Winter 2000	Legal, Econ, 174 pp, 2 tables, 1 fig	112.00
38	Journal of International Law and Economics	0275-1257	Volume 4(2)	2000	Winter 2000	Legal, Econ, 174 pp, 2 tables, 1 fig	112.00
39	Journal of International Law and Economics	0275-1257	Volume 4(2)	2000	Winter 2000	Legal, Econ, 174 pp, 2 tables, 1 fig	112.00
40	Journal of International Law and Economics	0275-1257	Volume 4(2)	2000	Winter 2000	Legal, Econ, 174 pp, 2 tables, 1 fig	112.00
41	Journal of International Law and Economics	0275-1257	Volume 4(2)	2000	Winter 2000	Legal, Econ, 174 pp, 2 tables, 1 fig	112.00
42	Journal of International Law and Economics	0275-1257	Volume 4(2)	2000	Winter 2000	Legal, Econ, 174 pp, 2 tables, 1 fig	112.00
43	Journal of International Law and Economics	0275-1257	Volume 4(2)	2000	Winter 2000	Legal, Econ, 174 pp, 2 tables, 1 fig	112.00
44	Journal of International Law and Economics	0275-1257	Volume 4(2)	2000	Winter 2000	Legal, Econ, 174 pp, 2 tables, 1 fig	112.00
45	Journal of International Law and Economics	0275-1257	Volume 4(2)	2000	Winter 2000	Legal, Econ, 174 pp, 2 tables, 1 fig	112.00
46	Journal of International Law and Economics	0275-1257	Volume 4(2)	2000	Winter 2000	Legal, Econ, 174 pp, 2 tables, 1 fig	112.00
47	Journal of International Law and Economics	0275-1257	Volume 4(2)	2000	Winter 2000	Legal, Econ, 174 pp, 2 tables, 1 fig	112.00
48	Journal of International Law and Economics	0275-1257	Volume 4(2)	2000	Winter 2000	Legal, Econ, 174 pp, 2 tables, 1 fig	112.00
49	Journal of International Law and Economics	0275-1257	Volume 4(2)	2000	Winter 2000	Legal, Econ, 174 pp, 2 tables, 1 fig	112.00
50	Journal of International Law and Economics	0275-1257	Volume 4(2)	2000	Winter 2000	Legal, Econ, 174 pp, 2 tables, 1 fig	112.00

Continued on back cover. Backlist includes all 17 published volumes from 1982 to 1999.

[illegible]



Dokumentasi Operator mengikuti bimbingan/ diskusi terkait Sistem Informasi Rencanaa Umum Pengadaan (SIRUP)) yang dipandu oleh Kepala Subbagian Umum/ Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);



FOTO DOKUMENTASI INPUT DATA RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)



DOKUMENTASI MENGIKUTI DESIMINASI PENCATATAN RUP
TAHUN ANGGARAN 2026 LINGKUP KKP



**Lampiran 12. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR M MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator (15)	:	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Timja	:	Timja Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun		
	2023	2024	2025
Target	-	-	75,00
Realisasi	-	-	75,51
% Capaian	-	-	100,68

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)	
Deskripsi : - Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima; - Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa untuk terwujudnya birokrasi yang berdaya saing, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima, perlu melakukan pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja di instansi pemerintah; - Balai Besar KIPM Makassar telah menyandang predikat WBK sejak tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2018. Untuk mempertahankan predikat tersebut, maka Balai Besar KIPM Makassar harus konsisten dalam penerapannya khususnya penanaman nilai-nilai integritas kepada seluruh jajaran pegawai Balai Besar KIPM Makassar beserta <i>stakeholder</i> yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; - Sesuai surat Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor B.360/BPPMHKP.1/OT.720/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 Hal Persiapan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan PPMHKP Tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar bersama 4 UPT lainnya ditetapkan sebagai unit kerja yang akan dilakukan penilaian implementasi WBK dan WBBM oleh TPI (Tim Penilai Internal) KKP Tahun 2025-2026; - Target indikator kinerja ini bersifat tahunan, namun sampai dengan triwulan III tahun 2025 telah diperoleh hasil penilaian dari BPPMHKP. Berdasarkan penilaian dari tim penilai internal BPPMHKP diperoleh nilai total 75,19 atau 100,25% dari target, yang terdiri dari komponen pengungkit 37,16 dan komponen hasil 38,03.	

Kegiatan yang Dilaksanakan :

- Pada tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan sebagai wujud implementasi zona integritas WBK pada Balai Besar KIPM Makassar, dengan uraian sebagai berikut :
 - 1) Pertemuan pembahasan pemenuhan dokumen penerapan WBK pada tanggal 20 Februari 2025;
 - 2) Penyiapan dokumen penerapan WBK oleh masing-masing penanggung jawab unsur;
 - 3) Penetapan tim kerja pembangunan WBK sesuai surat tugas Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar Nomor B.325/BBKIPM.MKS/OP.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025;
 - 4) Pemenuhan kepatuhan penyampaian LHKPN sebanyak 8 orang dan SPT Tahunan sebanyak 37 orang;
 - 5) Penandatanganan pakta integritas untuk seluruh pegawai (ASN, PPNP dan PJLP);
 - 6) Penerbitan surat tugas dengan mencantumkan himbauan tidak melakukan KKN saat bertugas dan penyampiannya melalui WAG pegawai dan pelaku usaha;
 - 7) Penerbitan surat dan memorandum himbauan tidak menerima gratifikasi pada momen hari raya keagamaan dan penyampiannya melalui WAG pegawai dan pelaku usaha;
 - 8) Penandatanganan berita acara tuntas pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada tanggal 25 Maret 2025;
 - 9) Melakukan bincang inspiratif bertema pengendalian gratifikasi yang diikuti oleh seluruh pegawai pada tanggal 13 Maret 2025 dengan nara sumber Mohammad Zamrud, S.Pi., MP;
 - 10) Pemenuhan fasilitas pelayanan publik berupa perbaikan neon box, perbaikan running text, dan pengaktifan announcement menjaga integritas;
 - 11) Verifikasi dokumen penerapan zona integritas WBK masing-masing unsur oleh tim sekretariat :
 - Unsur manajemen perubahan (1) dilakukan verifikasi pada tanggal 30 April 2025;
 - Unsur penataan tata laksana (2) telah diverifikasi pada tanggal 11 Juni 2025;
 - Unsur penataan sistem manajemen SDM aparatur (3) telah diverifikasi pada tanggal 17 April 2025;
 - Unsur penguatan akuntabilitas, (4) telah dilakukan verifikasi pada tanggal 24 April 2025;
 - Unsur penguatan pengawasan (5) diverifikasi pada tanggal 17 April 2025;
 - Unsur peningkatan kualitas pelayanan publik (6) dilakukan verifikasi pada tanggal 22 Mei 2025;
 - 12) Internalisasi/sosialisasi penerapan zona integritas WBK oleh masing-masing unsur pada kegiatan apel pagi :
 - Unsur manajemen perubahan (1) pada tanggal 21 April 2025;
 - Unsur penataan tata laksana (2) pada tanggal 28 April 2025;
 - Unsur penataan sistem manajemen SDM aparatur (3) tanggal 5 Mei 2025;
 - Unsur penguatan akuntabilitas, (4) pada tanggal 19 Mei 2025;
 - Unsur penguatan pengawasan (5) pada tanggal 26 Mei 2025;
 - Unsur peningkatan kualitas pelayanan publik (6) pada tanggal 16 Juni 2025;
 - Unsur penguatan hasil pada tanggal 23 Juni 2025;
 - 13) Internalisasi/sosialisasi agen perubahan tentang reformasi birokrasi oleh tim agen perubahan Balai Besar KIPM Makassar pada tanggal 30 Juni 2025;
 - 14) Instruksi dari pimpinan dan unsur manajerial terkait konsistensi penerapan zona integritas WBK untuk seluruh pegawai (ASN dan non ASN) lingkup Balai Besar KIPM Makassar dalam briefing petugas pelayanan pada tanggal 15 Mei 2025 dan 14 Juni 2025;
 - 15) Penerbitan surat tugas dengan mencantumkan himbauan tidak melakukan KKN saat bertugas dan penyampiannya melalui WAG pegawai dan pelaku usaha;
 - 16) Penegasan tidak memberikan komisi atau keuntungan dari penyedia kepada pengelola anggaran dalam pengadaan barang dan jasa, serta penandatanganan pakta integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa;
 - 17) Pemenuhan fasilitas pelayanan publik berupa perbaikan fasilitas difabel, pengadaan papan informasi digital, dan penataan ruang pelayanan publik;
 - 18) Verifikasi dokumen penerapan zona integritas WBK oleh tim sekretariat WBK;
 - 19) Melaksanakan apel pagi setiap hari Senin yang dipimpin oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar atau pejabat lain yang ditunjuk. Pada apel pagi tersebut disampaikan himbauan

- penerapan nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai, penerapan nilai-nilai kebangsaan dan internalisasi ASN Ber-AKHLAK;
- 20) Pada tanggal 7 Juli 2025, dilaksanakan internalisasi pola pikir dan budaya kerja seluruh pegawai oleh tim agen perubahan, yang dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada pegawai teladan periode semester I tahun 2025;
 - 21) Tanggal 14 Juli 2025 telah dilaksanakan kegiatan bincang inspiratif dengan tema pelayanan prima bekerjasama dengan PT. BNI (Persero) Cabang Makassar. Pada momen tersebut dipaparkan tata cara melakukan melayani pelanggan, teknik berkomunikasi yang baik, etika penampilan dilanjutkan dengan praktek/simulasi serta diskusi dan tanya jawab;
 - 22) Pada tanggal 14 Juli 2025 dilaksanakan internalisasi oleh tim agen perubahan dengan tema “Filosofi Shinkansen” yang merupakan sarana transportasi yang efisien, simbol kemajuan teknologi dan kebanggaan masyarakat Jepang, diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja seluruh pegawai;
 - 23) Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Balai Besar KIPM Makassar, pada tanggal 16 Juli 2025 telah dilaksanakan briefing kepada petugas pelayanan dengan nara sumber (1) Ketua Tim Kerja Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan (2) Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Materi briefing terkait penerapan nilai-nilai integritas, petugas pelayanan wajib memutakhirkan diri dengan regulasi yang sifatnya dinamis, memperbaiki kelemahan dalam pelayanan, penyajian data yang valid, etika dalam berkomunikasi, optimalkan penggunaan papan informasi digital, serta deklarasi konflik kepentingan,
 - 24) Pada tanggal 17 Juli 2025, dilaksanakan penyusunan dokumen deklarasi konflik kepentingan oleh seluruh pegawai (ASN dan non ASN). Deklarasi konflik kepentingan tersebut berupa pernyataan dan daftar kepentingan pribadi pegawai yang ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan;
 - 25) Tanggal 28 Juli 2025 dilaksanakan sosialisasi penerapan disiplin ASN oleh Kepala Subbagian Umum. Pada kesempatan tersebut dipaparkan regulasi yang berlaku dalam penegakan disiplin ASN dilanjutkan dengan tanya jawab;
 - 26) Tanggal 4 Agustus 2025, dilaksanakan sosialisasi penerapan zona integritas WBK secara umum oleh ketua tim pembangunan zona integritas WBK pada Balai Besar KIPM Makassar, yang dilanjutkan dengan kuis dan tanya jawab;
 - 27) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Balai Besar KIPM Makassar, pada tanggal 11 September 2025 dilakukan bincang inspiratif pelayanan prima yang diikuti oleh petugas pelayanan dan pegawai lainnya dengan nara sumber dari Bank Syariah Indonesia. Dalam even tersebut dipaparkan tata krama melayani pelanggan, teknik berkomunikasi yang baik, etika penampilan dilanjutkan dengan praktek/simulasi serta diskusi dan tanya jawab;
 - 28) Penerbitan surat tugas dengan mencantumkan himbauan tidak melakukan KKN saat bertugas dan penyampaian melalui WAG pegawai dan pelaku usaha;
 - 29) Penegasan tidak memberikan komisi atau keuntungan dari penyedia kepada pengelola anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta penandatanganan pakta integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa;
 - 30) Pemenuhan fasilitas pelayanan publik berupa perbaikan fasilitas difabel dan kelompok rentan, pengadaan papan informasi digital, dan penataan ruang pelayanan publik;
 - 31) Pemenuhan fasilitas pelayanan publik berupa penataan ruang pelayanan dan ruang tunggu, penataan papan informasi digital, dan pemasangan poster pengelolaan pengaduan;
 - 32) Melaksanakan apel pagi setiap hari Senin yang dipimpin oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar atau pejabat lain yang ditunjuk. Pada apel pagi tersebut disampaikan himbauan penerapan nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai, penerapan nilai-nilai kebangsaan dan internalisasi ASN Ber-AKHLAK;
 - 33) Guna meningkatkan kualitas pelayanan khususnya untuk pelanggan berkebutuhan khusus, pada tanggal 8 Oktober 2025 dilakukan sosialisasi “Etika Berinteraksi untuk Penyandang Disabilitas” dengan nara sumber dari Balla Inklusi Makassar yang diikuti oleh seluruh pegawai. Pada sosialisasi tersebut dipaparkan materi dan dipraktikkan teknik melayani pelanggan berkebutuhan khusus dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab untuk pendalaman terhadap materi yang disampaikan. Pada akhir sesi dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar KIPM Makassar dengan Balla Inklusi Makassar;

- 34) Pada bulan Oktober 2025 beberapa pegawai yang terpilih telah melakukan pengisian SPI (Survei Penilaian Integritas) yang dilaksanakan oleh KPK. Tujuan SPI tersebut adalah untuk memetakan risiko korupsi, mengukur tingkat integritas di instansi publik (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah), dan mendorong perbaikan sistem pencegahan korupsi agar pelayanan publik lebih bersih, transparan, dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi publik (pegawai, pengguna layanan, dan ahli);
 - 35) Pada tanggal 14 Oktober 2025 telah dilakukan briefing bagi petugas pelayanan oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar yang diikuti oleh seluruh pegawai yang bertugas dalam pelayanan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam briefing tersebut disampaikan langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan petugas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima serta menghindari adanya komplain dari pelanggan;
 - 36) Pada tanggal 22 Oktober 2025 dilaksanakan briefing pegawai lingkup Dukungan Manajemen oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar. Tujuan dilaksanakannya briefing adalah untuk menyelaraskan pemahaman, memberikan instruksi atau arahan, meningkatkan motivasi kerja pegawai serta memastikan bahwa koordinasi di tingkat tim dukungan manajemen terjalin dengan baik guna mendukung kinerja organisasi;
 - 37) Pada tanggal 3 November 2025 dilaksanakan internalisasi oleh tim agen perubahan dengan tema “Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja”. Pada internalisasi tersebut disampaikan pola pikir yang merupakan pergeseran cara pandang, sikap mental, dan keyakinan dasar seseorang atau organisasi untuk menjadi lebih konstruktif, adaptif, dan profesional, sementara perubahan budaya kerja diartikan sebagai transformasi nilai, kebiasaan, perilaku, dan praktik kerja kolektif dalam organisasi agar selaras dengan tujuan baru, yang keduanya sering kali dilakukan bersamaan untuk meningkatkan integritas, kinerja, dan pelayanan;
 - 38) Pada tanggal 26 November 2025 dilakukan sosialisasi Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat BPPMHKP dengan nara sumber Inspektorat IV Inspektorat Jenderal KKP yang diikuti peserta dari UPT lingkup BPPMHKP. Balai Besar KIPKM Makassar mengikuti kegiatan tersebut secara daring. Dengan sosialisasi tersebut diharapkan seluruh pegawai lingkup BPPMHKP dapat memahami dan menerapkan kebijakan pengelolaan konflik dan pengendalian gratifikasi sesuai regulasi yang berlaku;
 - 39) Pada bulan Desember 2025, Balai Besar KIPM Makassar telah melaksanakan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dengan sasaran 24 orang responden para pengguna layanan. Survey tersebut bertujuan untuk memetakan persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan publik dan penerapan WBK pada Balai Besar KIPM Makassar. Hasil yang dicapai adalah (1) Nilai : 95,55; (2) Mutu Pelayanan : A; dan (3) Kinerja Unit Layanan : Sangat Setuju;
 - 40) Pada tanggal 4 Desember 2025 Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan dengan tujuan untuk menyusun standar pelayanan serta momentum untuk memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan mutu dan keamanan hasil perikanan. Peserta dalam forum tersebut berasal dari instansi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja, unsur Pemerintah Daerah, akademisi, asosiasi usaha perikanan, LSM dan media massa;
 - 41) Pada tanggal 22 Desember 2025 bertepatan dengan Hari Ibu, dilakukan sosialisasi oleh tim agen perubahan dengan tema “Disiplin dan Pengembangan Diri”. Pada sosialisasi disampaikan betapa pentingnya disiplin dan pengembangan diri guna menunjang kinerja organisasi. Tujuan disiplin dan pengembangan diri adalah untuk membangun kehidupan yang teratur, produktif, dan memuaskan dengan menciptakan kebiasaan baik, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, memperbaiki hubungan, dan membangun ketahanan diri menghadapi tantangan. Keduanya saling melengkapi, di mana disiplin menjadi fondasi untuk terus berkembang secara pribadi dan profesional, sementara pengembangan diri memberikan alat untuk memperkuat disiplin tersebut menuju kesuksesan;
- Perhitungan nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebagai berikut :
- (1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
 - (2) Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;

- (3) Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,50 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,00;
- (4) Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15,00;
- (5) Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal KKP.

Sumberdaya Manusia :

- Sumberdaya manusia yang terlibat dalam penerapan kinerja ini adalah seluruh pegawai lingkup Balai Besar KIPM Makassar sebanyak 60 orang, yang terdiri dari ASN (PNS 37 orang, PPPK 12 orang, PPPK Paruh Waktu 6 orang) dan non ASN 5 orang;

Anggaran :

- Alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja ini pada tahun 2025 semula sebesar Rp. 12.489.000,-, namun setelah adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah, anggarannya dialihkan menjadi Rp. 0,-. Anggaran untuk operasional zona integritas WBK menyatu dengan anggaran keperluan perkantoran.

Program Nasional :

- Penerapan zona integritas WBK merupakan salah satu program prioritas nasional yang tergambar dalam misi Asta Cita ke 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini berarti Asta Cita ke 7 fokus pada peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang adil dan upaya berkelanjutan dalam memberantasan korupsi dan pemberantasan narkoba. Asta Cita ke 7 juga sejalan dengan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penyediaan makanan dan susu gratis di sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan peningkatan produktivitas lahan pertanian;
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir, Balai Besar KIPM Makassar secara konsisten telah menerapkan zona integritas WBK. Hal ini dapat mendukung terwujudnya program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan ke 3 “Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, serta ke 4 “Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil”.

Aspek Pemanfaatan :

- Penerapan nilai-nilai integritas menuju WBK pada suatu unit kerja memiliki berbagai manfaat, yakni :
 - (a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
 - (b) Mencegah terjadinya korupsi;
 - (c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik;
 - (d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - (e) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat;
 - (f) Meningkatkan reputasi instansi pemerintah;
 - (g) Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024;

Target indikator kinerja ini bersifat tahunan. Berdasarkan surat Plt. Sekretaris Badan PPMHKP Nomor B.179/BPPMHKP.1/OT.710/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 Hasil Penilaian ZI Menuju WBK/WBBM Tahun

2025 diperoleh nilai total 75,51 atau 100,68% dari target 75, yang terdiri dari komponen pengungkit 37,48 dan komponen hasil 38,03. Rekapitulasi hasil penilaian tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

No.	Unsur	Bobot Nilai	Perolehan Nilai	%
1	2	3	4	5
A.	Pengungkit :	60,00	37,48	
I.	Pemenuhan :	30,00	27,61	92,02
1	Manajemen Perubahan	4,00	3,55	88,63
2	Penataan Tatalaksana	3,50	2,92	83,33
3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	4,36	87,16
4	Penguatan Akuntabilitas	5,00	4,57	91,38
5	Penguatan Pengawasan	7,50	7,22	96,25
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	5,00	100,00
II.	Reform :	30,00	9,88	32,92
1	Manajemen Perubahan	4,00	3,17	79,17
2	Penataan Tatalaksana	3,50	2,33	66,62
3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	3,50	70,00
4	Penguatan Akuntabilitas	5,00	5,00	100,00
5	Penguatan Pengawasan	7,50	6,88	91,67
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	5,00	100,00
	Total Pengungkit		37,48	62,47
B.	Hasil	40,00	38,03	
1	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22,50	22,50	100,00
a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survey Eksternal; Indeks Persepsi Anti Korupsi/IPAK)	17,50	17,50	100,00
b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00	5,00	100,00
2	Pelayanan Publik yang Prima	17,50	15,53	88,75
a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50	15,53	88,75
	Total Hasil		38,03	95,08
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi		75,51	

Akar Masalah (Mengapa Hal Tersebut Terjadi ?)

- Keterlambatan verifikasi dokumen implementasi zona integritas WBK menuju WBBM dikarenakan penanggung jawab unsur lambat menyampaikan dokumen tersebut ke Sekretariat WBK;
- Potensi kelambatan verifikasi dan validasi dokumen penerapan zona integritas WBK dikarenakan penanggung jawab unsur lambat menyampaikan dokumen tersebut ke Sekretariat WBK;
- Potensi kelambatan pemenuhan dokumentasi bukti penerapan zona integritas WBK oleh masing-masing penanggung jawab unsur dikarenakan penanggung jawab unsur masih lambat mengumpulkan dan mengolah data penerapan WBK yang menjadi tanggungjawabnya;

Rekomendasi Rencana Aksi Tahun Berikutnya	Penanggung Jawab
- Ketua tim WBK mengingatkan penyampaian dokumen implementasi WBK secara berkala kepada penanggung jawab unsur; - Tim Sekretariat memastikan pemenuhan fasilitas pendukung penerapan WBK;	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab
- Masing-masing penanggung jawab unsur telah menyampaikan dokumen penerapan zona integritas WBK sesuai tanggung jawabnya melalui google sheet yang disediakan; - Tim sekretariat telah melakukan verifikasi dokumen implementasi WBK pada semua unsur; - Nota Dinas Ketua Tim WBK kepada penanggung jawab unsur WBK tentang penyampaian dokumen implementasi WBK; - Diakukan pemenuhan fasilitas pendukung penerapan WBK (spanduk, banner, dan penataan ruang pelayanan);	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 5 Januari 2026
Penanggung Jawab Indikator Kinerja,

Karwit

Dokumentasi Kegiatan :



No. 1	Tanggal 2	Uraian Kegiatan 3	Dokumentasi 4
1	17-04-2025	Verifikasi dokumen penerapan zona integritas WBK unsur penguatan pengawasan (5)	
2	17-04-2025	Verifikasi dokumen penerapan zona integritas WBK unsur penataan sistem manajemen SDM aparatur (4)	
3	21-04-2025	Internalisasi WBK Unsur Manajemen Perubahan (1)	
4	24-04-2025	Verifikasi dokumen penerapan WBK unsur penguatan akuntabilitas (4)	
5	28-04-2025	Internalisasi zona integritas WBK unsur penataan tata laksana (2)	
6	30-04-2025	Verifikasi dokumen penerapan zona integritas WBK unsur manajemen perubahan (1)	

7	05-05-2025	Internalisasi zona integritas WBK unsur penataan sistem manajemen SDM aparatur (3)	
8	15-05-2025	Briefing petugas pelayanan	
9	19-05-2025	Internalisasi zona integritas WBK unsur penguatan akuntabilitas (4)	
10	22-05-2025	Verifikasi dokumen penerapan zona integritas WBK unsur peningkatan kualitas pelayanan publik (6)	
11	26-05-2025	Internalisasi ZI WBK Unsur Penguatan Pengawasan (5)	
12	14-06-2025	Briefing petugas pelayanan	

13	16-06-2025	Internalisasi ZI WBK Unsur Pelayanan Publik (6)	
14	16-06-2025	Verifikasi ZI WBK Unsur Penataan Tata Laksana (2)	
15	23-06-2025	Internalisasi zona integritas WBK unsur penguatan hasil	
16	30-06-2025	Sosialisasi agen perubahan tentang reformasi birokrasi	

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
1	2	3	4
1	07-07-2025	Internalisasi pola pikir dan budaya kerja pegawai	
			

2	14-07-2025	Sosialisasi peningkatan kinerja pegawai dengan tema "Filosofi Shinkansen"	
			
3	Setiap ada dokumen/laporan yang disampaikan	Verifikasi dokumen penerapan WBK	
4	16-07-2025	Bincang Inspiratif Pelayanan Prima Bersama BNI	
			
5	17-07-2025	Briefing Petugas Pelayanan	

6	28-07-2025	Sosialisasi Penerapan Disiplin ASN	
			
7.	04-08-2025	Sosialisasi Penerapan Zona Integritas WBK	
			
8.	11-09-2025	Bincang Inspiratif Pelayanan Publik	
			

Dokumentasi Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
1	2	3	4
1	08-10-2025	Sosialisasi “Etika Berinteraksi untuk Penyandang Disabilitas” oleh nara sumber dari Balla Inklusi Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar KIPM Makassar dengan Balla Inklusi	
			
2	14-10-2025	Briefing bagi Petugas Pelayanan	
			
3	22-10-2025	Briefing Personil Dukungan Manajemen	
			

4	03-11-2025	Sosialisasi Agen Perubahan “Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja”	
			
5	26-11-2025	Sosialisasi Pengelolaan Konflik Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi	
			
6	04-12-2025	Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan	

			
7	22-12-2025	Sosialisasi Agen Perubahan “Disiplin dan Pengembangan Diri”	
			
8	24-12-2025	Penegasan Tidak Menerima Gratifikasi Pada Momen Perayaan Hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026	
			

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)
Nama Timja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Tahunan 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)

T/R	TAHUN		
	2023	2024	2025
Target	3,33	3,65	3,36
Realisasi	3,64	3,66	3,93
%Capaian	107,28	100,27	111,82

Catatan :

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14 . Dimulai dari triwulan II tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (SURvey kepuasAN masyarakat) melalui link https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa U1. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana. Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai Besar KIPM Makassar survey dilakukan terhadap 11 (Sebelas) jenis layanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu: - Laporan hasil uji mutu produk perikanan - Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB) - Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) - Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) - Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB) - Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) - Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) - Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) - Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) - Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) - Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) Survey juga dilakukan terhadap setiap pengguna jasa yang menerima layanan dengan jumlah sampel minimal mengacu pada formula Isaac & Michael sebagai berikut:

Formula Isaac & Michael

$S = X^2 NP / (1-P)^2 d^2 (N-1) + X^2 P / (1-P)$

X^2 = Nilai chi square tabel = 3,841
dimana df = 1 dan $\alpha = 5\% = 0.05$

P = Perkiraan proporsi populasi (Jika tidak diketahui maka P = 0.5)

N = Jumlah Populasi

d = tingkat toleransi kesalahan (0.05)

$$S = \frac{3.841 \times 48 \times 0.5 \times 0.5}{(0.05^2 \times 47) + (3.841 \times 0.5 \times 0.5)}$$

$$S = \frac{46.092}{1.111} = 42.766 = 43$$

PUJADATIN, KAP, 2022

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	200
15	14	230	144	1300	207
20	19	240	148	1400	213
25	24	250	152	1500	220
30	29	260	156	1600	227
35	33	270	160	1700	233
40	38	280	164	1800	240
45	43	290	168	1900	246
50	48	300	172	2000	253
55	53	310	176	2100	259
60	58	320	180	2200	266
65	63	330	184	2300	272
70	68	340	188	2400	279
75	73	350	192	2500	285
80	78	360	196	2600	292
85	83	370	200	2700	298
90	88	380	204	2800	305
95	93	390	208	2900	311
100	98	400	212	3000	318
105	103	410	216	3100	324
110	108	420	220	3200	331
115	113	430	224	3300	337
120	118	440	228	3400	344
125	123	450	232	3500	350
130	128	460	236	3600	357
135	133	470	240	3700	363
140	138	480	244	3800	370
145	143	490	248	3900	376
150	148	500	252	4000	383
155	153	510	256	4100	389
160	158	520	260	4200	396
165	163	530	264	4300	402
170	168	540	268	4400	409
175	173	550	272	4500	415
180	178	560	276	4600	422
185	183	570	280	4700	428
190	188	580	284	4800	435
195	193	590	288	4900	441
200	198	600	292	5000	448

Selama tahun 2025, Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap Triwulan dengan jumlah responden sebagai berikut:

Triwulan	Jumlah Layanan	Jumlah Minimal Responden	Jumlah Responden	Keterangan
I	2.798	338	197	Jumlah responden tidak mencukupi. Dilakukan briefing/ sharing session kepada petugas pelayanan dan inspektur mutu untuk meningkatkan jumlah responden kepada pengguna layanan.
II	7.932	367	674	Jumlah responden telah mencukupi
III	3.590	351	660	Jumlah responden telah mencukupi
IV	1.063	285	447	Jumlah responden telah mencukupi

Dari jumlah responden yang mengisi Survei Kepuasan Masyarakat dapat terlihat bahwa pada Triwulan I jumlah responden belum mencukupi jumlah minimal responden sesuai dengan Formula Isaac & Michael. Namun dengan perbaikan terus menerus maka jumlah responden telah dapat ditingkatkan pada Triwulan II, III dan IV dan telah memenuhi jumlah minimal responden.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitung Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111.$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

Sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan MENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara rutin Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 kali dalam setahun

untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Besar KIPM Makassar.

Jika dilihat berdasarkan nilai per unsur, maka nilai IKM Balai Besar KIPM Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Kesesuaian persyaratan	3.733	3.730	3,885	3,944
2	Kemudahan prosedur	3.731	3.724	3,874	3,942
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian	3.724	3.674	3,871	3,933
4	Kesesuaian biaya	3.711	3.757	3,865	3,933
5	Kesesuaian produk	3.741	3.737	3,877	3,937
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi	3.706	3.665	3,873	3,931
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur	3.716	3.693	3,871	3,933
8	Layanan konsultasi dan pengaduan	3.746	3.740	3,879	3,940
9	Kualitas isi/sarana	3.706	3.702	3,873	3,933
	Nilai IKM	3,72	3,71	3,87	3,93

Jika dibandingkan dengan periode yang sama untuk dua tahun terakhir, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat terlihat pada table berikut:

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan		
		2023	2024	2025
1.	Kesesuaian persyaratan	3,680	3,750	3,944
2.	Kemudahan prosedur	3,610	3,757	3,942
3.	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian	3,669	3,755	3,933
4.	Kesesuaian biaya	3,669	3,787	3,933
5.	Kesesuaian produk	3,664	3,755	3,937
6.	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi	3,630	3,738	3,931
7.	Kemudahan dalam penggunaan fitur	3,540	3,775	3,933
8.	Layanan konsultasi dan pengaduan	3,723	3,812	3,940
9.	Kualitas isi/konten	3,620	3,785	3,933
	Nilai IKM	3,64	3,77	3,93

Dari nilai IKM yang dilaksanakan selama tiga tahun terakhir, dapat terlihat bahwa nilai IKM secara konsisten terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan perbaikan yang dilakukan terus menerus mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Balai Besar KIPM Makassar.

Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ini sejalan dengan penghargaan yang diterima oleh Balai Besar KIPM Makassar di Tahun 2025 pada pelayanan publik yang diberikan. Pada tanggal 2 Desember 2025, Balai Besar KIPM Makassar menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat "INFORMATIF" yang

ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Bapak Sakti Wahyu Trenggono Nomor B.1272/MEN-KP/XII/2025.

Jika dilihat nilai perunsur, nilai unsur yang paling rendah adalah unsur **kecepatan respon aplikasi**, unsur **Kesesuaian jangka waktu penyelesaian**, serta unsur **Kemudahan dalam penggunaan fitur** dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan. Berdasarkan Peraturan MenPANRB nomor 14 tahun 2017, rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Untuk itu perlu dilakukan tindakan perbaikan unsur kecepatan respon, unsur Kesesuaian jangka waktu penyelesaian, serta unsur Kemudahan dalam penggunaan fitur walaupun nilai unsur tersebut sudah berada dalam kategori Sangat Baik.

Dalam pelayanan sertifikasi ekspor pada Triwulan I 2025, Balai Besar KIPM Makassar menggunakan aplikasi Aplikasi SIAP Mutu (Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu) dalam rangka penerbitan SMKHP digunakan pertanggal 1 Maret 2025 secara serentak semua UPT BPPMHKP yang dikembangkan oleh Sekretariat BPPMHKP. Namun dalam pelaksanaannya Aplikasi SIAP Mutu masih dalam tahap penyempurnaan dan masih ada fitur yang dibutuhkan bagi petugas pelayanan dan pengguna layanan.

Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2023 ke Tahun 2025 sejalan dengan layanan konsultasi petugas pelayanan pasca transisi penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan. Petugas pelayanan memberikan informasi dan solusi terhadap kebingungan pelaku usaha tentang penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan, serta petugas lebih komunikatif meminta kritik, saran dan masukan terhadap peningkatan pelayanan publik dari Balai Besar KIPM Makassar. Sehingga nilai IKM dapat ditingkatkan dari unsur Layanan konsultasi dan Pengaduan pada Tahun 2025.

Balai Besar KIPM Makassar berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan melaksanakan:

- 27 Februari 2025, mengikuti Launching dan Sosialisasi Aplikasi Siap Mutu dalam rangka meningkatkan penerbitan SMKHP;
- 28 Februari 2025, Sosialisasi Aplikasi SIAPMutu dan PMK nomor 1 Tahun 2025 lingkup Badan Mutu KKP Makassar kepada pengguna layanan secara daring mengenai sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan pada Aplikasi SIAPMutu;
- 10-13 Maret 2025, Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik lingkup BPPMHKP Makassar;
- 10 April 2025 dilaksanakan Briefing siang Petugas Pelayanan, Verifikator Dokumen dan Penandatanganan SMKHP;
- 15 April 2025 dilaksanakan Sosialisasi Kepatuhan Pelaku Usaha Tahun 2025 secara daring. Disampaikan bahwa saat ini telah diluncurkan platform SIAP MUTU sebagai tools dalam pelayanan sertifikasi ekspor;
- 15 Mei 2025 dan tanggal 24 Juni 2025 dilaksanakan Briefing Petugas Pelayanan pada inspektur mutu dan petugas pelayanan untuk memutakhirkan diri dengan ketentuan regulasi;
- 14 Juli 2025 telah dilaksanakan kegiatan bincang inspiratif dengan tema pelayanan prima bekerjasama dengan PT. BNI (Persero) Cabang Makassar;
- 16 Juli 2025 dilaksanakan Briefing Petugas Pelayanan dilaksanakan untuk meningkatkan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat;
- 24 Juli 2025 dilaksanakan Sharing Session Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Penerbitan SMKHP;
- 11 September 2025 dilaksanakan Bincang Inspiratif Service Excelent yang bersinergi dengan PT. BSI;
- 25 September 2025 dilaksanakan Sharing session Pelayanan Publik ramah kelompok rentan;
- 30 September 2025 dilaksanakan Sosialisasi KepMen KP Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Pelayanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara daring;
- 8 Oktober 2025, Sosialisasi Pelayanan publik ramah kelompok rentan narasumber dari Balla' Inklusi Sulawesi Selatan;
- 07 Oktober 2025, Customer Service melakukan pendampingan terhadap PT. Celebes Ocean Fisheries terkait pengisian aplikasi SIAPMUTU;

- 14 Oktober 2025 telah dilakukan briefing bagi petugas pelayanan oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar disampaikan langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan petugas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima serta menghindari adanya komplain dari pelanggan;
- 18 November 2025 Customer Service melakukan pendampingan terhadap PT. Zhongyi Chain Services untuk konsultasi mengenai pendaftaran nomor registrasi negara mitra;
- 4 Desember 2025 Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan;
- 19 Desember 2025 Customer Service melakukan pendampingan terhadap CV. Prima Indo Tuna untuk konsultasi mengenai model sertifikat TRACES baru.

Bukti komitmen petugas pelayanan dan IMUT/AIMUT tersebut menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025 meningkat dari **3,77** di Tahun 2024 menjadi **3,93**. Namun demikian peningkatan berkelanjutan melalui kritik dan saran pengguna layanan tetap dilakukan, sehingga kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan dan dipertahankan.

Adapun kritik, saran dan masukan dari masyarakat melalui aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat terdapat tanggapan sebagai berikut;

- Kecepatan proses penerbitan sertifikat agar dipercepat;
- Beberapa fitur belum terdapat pada aplikasi yang dapat memudahkan pengguna layanan;

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
4.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	3
7.	PPPK	12
8.	PJLP	5
	TOTAL	37

Anggaran

Alokasi anggaran awal kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2025 yaitu 3987 EBA 994.002.B Semula Rp. 1.292.244.000, - dan terjadi revisi anggaran awal menjadi Rp. 356,509,000, -. Hingga Triwulan IV tahun 2025, anggaran yang sudah terealisasi sebanyak **Rp. 356,016,623,-** atau 99.86 % pada langganan daya dan jasa. Sehingga sisa anggaran sebesar Rp. **492,377,-**

Alokasi anggaran kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2024 yaitu Rp. 12.500.000,-. Pada RKAKL Triwulan IV tahun 2024 ini, terjadi revisi anggaran dimana anggaran untuk Survei Kepuasan Masyarakat dihilangkan dan dialihkan dari kegiatan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan (3990) ke kegiatan Dukungan Manajemen Internal (3987).

Anggaran dari Tahun 2024 dengan tahun 2025 berbeda sangat signifikan karena pada tahun 2025 anggaran untuk IKU Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) mengambil pada anggaran Langganan daya dan jasa sebagai penunjang tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik.

Program Nasional

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu prioritas nasional karena dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah memberikan perhatian atas percepatan digitalisasi

pelayanan publik sejalan dengan Asta Cita yang ke 5 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tools untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi atas kepuasan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Yang mana Survey ini dapat mengetahui kritik, saran dan masukan dari Masyarakat pengguna layanan pada Balai Besar KIPM Makassar untuk memperbaiki layanan menjadi pelayanan publik yang prima.

ASN BERAHLAK

IKU ini mendukung budaya ASN yang berakhlak dilingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu Berorientasi Pelayanan. ASN berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ini mencakup memahami kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan. Survey Kepuasan Masyarakat sebagai alat untuk mengetahui saran kritik masukan Masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik Balai Besar KIPM Makassar untuk memberikan pelayanan yang prima.

Aspek Pemanfaatan

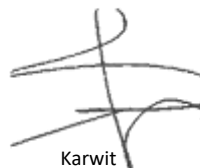
Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai Besar KIPM Makassar dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi atas kepuasan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Survey kepuasan Masyarakat ini sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Belum semua jenis layanan terutama bagian sertifikasi hulu dilakukan survey kepuasan Masyarakat oleh Inspektur/ Asisten Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Perlu dilakukan penyampaian secara berkala kepada petugas pelayanan dan Inspektur/ Asisten Inspektur Mutu terkait konsistensi penyampaian link survey kepada pengguna layanan untuk memperoleh umpan balik dari Masyarakat yang lebih banyak.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana aksi Tahun sebelumnya	Penanggung Jawab
Pada Tahun 2025 telah dilakukan Upaya pemanfaatan aplikasi SiapMutu oleh Pengguna Layanan melalui kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi SiapMutu serta pendampingan terkait pengisian Aplikasi yang dilakukan oleh Customer Service.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

Makassar, 9 Januari 2026
Penanggungjawab Indikator Kinerja



Karwit

DOKUMENTASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2025



Screenshot Dashboard Aplikasi SUSAN KKP

Susan KKP

Laporan SKM Detail

Tahun: 2025

10 Data terdapat. Tri: 402121 - 402121. Klik untuk mengunduh data dalam bentuk excel.

Download Data

Tahun	Tri	Berkas	Jenis SKM	Jenis Kelengkapan
2025	4	4.04	20.01	24
2025	5	4.04	40.01	34
2025	6	4.04	60.01	100
2025	7	4.04	80.01	8
2025	8	4.04	100.01	100
2025	9	4.04	120.01	100
2025	10	4.04	140.01	100
2025	11	4.04	160.01	100
2025	12	4.04	180.01	100
2025	13	4.04	200.01	100

Screenshot Aplikasi SUSAN KKP yang memperlihatkan nilai IKM Triwulan IV Tahun 2025

Survey Kepuasan Masyarakat

Uraian: Detail Besar KPM Makassar

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar?

2. Bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar?

3. Bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar?

4. Bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar?

5. Bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar?

6. Bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar?

7. Bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar?

8. Bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar?

9. Bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar?

10. Bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar?

Data Responden

Nama:

Email:

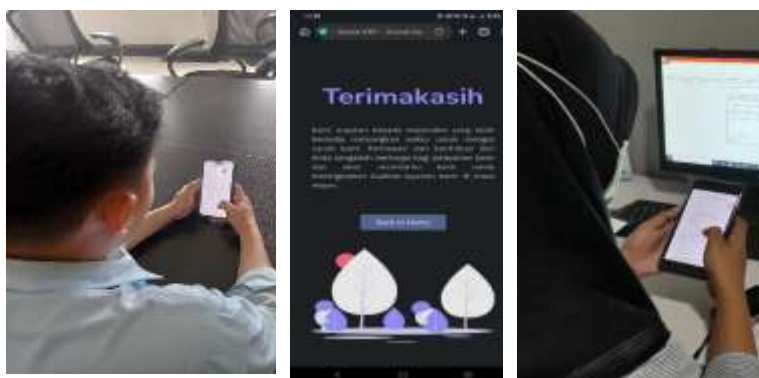
Telepon:

Alamat:

Screenshot tampilan isian survey kepuasan masyarakat pada aplikasi SUSAN KKP

DOKUMENTASI PENGISIAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2025





**DOKUMENTASI POSTINGAN
PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN PREDIKAT “INFORMATIF” TAHUN 2025**



Tanggal	Kegiatan	Foto
27-2-2025	Mengikuti Launching dan Sosialisasi Aplikasi Siap Mutu dalam rangka Penerbitan SMHKP	

28-2-2025	Sosialisasi Aplikasi SIAPMutu dan PMK nomor 1 Tahun 2025 lingkup Badan Mutu KKP Makassar	
1-3-2025	Sosialisasi Aplikasi SIAPMutu kepada pengguna layanan	
10-13 Maret 2025	Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik lingkup BPPMHKP Makassar	
10-04-2025	Briefing siang Petugas Pelayanan, Verifikator Dokumen dan Penandatangan SMKHP	

15-4-2025	Sosialisasi Kepatuhan Pelaku Usaha Tahun 2025	
15-5-2025	Briefing Petugas Pelayanan pada inspektur mutu dan petugas pelayanan	 Briefing Petugas Pelayanan Badan Mutu KKP Makassar 15 Mei 2025
24-6-2025	Briefing Petugas Pelayanan pada inspektur mutu dan petugas pelayanan	 Briefing dan Evaluasi Petugas Pelayanan Badan Mutu KKP Makassar 24 Juni 2025
14-7-2025	Bincang inspiratif dengan tema pelayanan prima bekerjasama dengan PT. BNI (Persero) Cabang Makassar	 Bersinergi dengan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Makassar, Badan Mutu KKP Makassar Mengadakan Bincang Inspiratif Pelayanan Publik 14 Juli 2025

16-7-2025	Briefing Petugas Pelayanan	 Briefing Petugas Pelayanan Badan Mutu KKP Makassar 16 Juli 2025
24-7-2025	Sharing Session Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Penerbitan SMKHP	 Sharing Session Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Penerbitan SMKHP 24 Juli 2025
11-9-2025	Bincang Inspiratif Service Excelent yang bersinergi dengan PT. BSI	 Bincang Inspiratif Mersemitasi Dengan PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar, Badan Mutu KKP Makassar Mengadakan Bincang Inspiratif Service Excelent 11 September 2025
25-9-2025	Sharing session Pelayanan Publik ramah kelompok rentan	
30-9-2025	Sosialisasi KepMen KP Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Pelayanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	 Sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 30 September 2025

7-10-2025	Customer Service melakukan pendampingan terhadap PT. Celebes Ocean Fisheries terkait pengisian aplikasi SIAPMUTU	
8-10-2025	Sosialisasi Pelayanan publik ramah kelompok rentan	
14-10-2025	Briefing bagi petugas pelayanan	
18-11-2025	Customer Service melakukan pendampingan terhadap PT. Zhongyi Chain Services untuk konsultasi mengenai pendaftaran nomor registrasi negara mitra.	
4-12-2025	Forum Konsultasi Publik	

19-12-2025	Customer Service melakukan pendampingan terhadap CV. Prima Indo Tuna untuk konsultasi mengenai model sertifikat TRACES baru.	
------------	--	--

INFOGRAFIS PENANGANAN PENGADUAN TAHUN 2025



